



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

**BUPATI MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH
2023**



BUPATI MADIUN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun 2022 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun sesuai waktu yang ditetapkan.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun 2022 kepada DPRD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menginformasikan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya serta hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Madiun.

Gambaran kinerja pembangunan tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Madiun, kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Madiun yang penuh ikhlas memberikan dukungan dan partisipasinya dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Madiun.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi seluruh upaya dan kinerja yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Ber-Akhlaq. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Madiun, 29 Maret 2023
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.2.1 Visi	2
1.2.2 Misi	3
1.2.2.1 Misi 1 dan Misi 5	4
1.2.2.1.1 Tujuan dan Sasaran MISI 1 dan MISI 5	5
1.2.2.2 Misi 2	6
1.2.2.2.1 Tujuan dan Sasaran MISI 2	7
1.2.2.3 Misi 3	8
1.2.2.3.1 Tujuan dan Sasaran MISI 3	10
1.2.2.4 Misi 4	10
1.2.2.4.1 Tujuan dan Sasaran MISI 4	11
1.3 Data Umum Daerah	11
1.3.1 Data Geografis Wilayah	11
1.3.1.1 Batas Wilayah Administratif	11
1.3.1.2 Luas Wilayah	12
1.3.1.3 Topografi	14
1.3.2 Jumlah Penduduk	14
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	19
1.3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	22
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	23
1.3.7 Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan	24



BAB II	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	25
2.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	25
2.1.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	29
2.1.2	Target Dan realisasi Pendapatan	30
2.1.2.1	Pendapatan Asli Daerah	31
2.1.2.2	Pendapatan Transfer	42
2.1.2.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48
2.1.3	Permasalahan Dan Solusi	49
2.2	Pengelolaan Belanja Daerah.....	50
2.2.1	Kebijakan Umum Keuangan Daerah	50
2.2.1.1	Target dan Realisasi Belanja Daerah	52
2.2.1.1.1	<i>Belanja Operasi</i>	52
2.2.1.1.2	<i>Belanja Modal</i>	66
2.2.1.1.3	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	71
2.2.1.1.4	<i>Belanja Transfer</i>	72
2.2.1.2	Belanja Berdasarkan urusan	72
2.2.1.3	Pembiayaan Daerah	73
2.2.2	Permasalahan dan Solusi	74
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	76
A.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	86
A.1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	86
A.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	87
A.3	Angka Pertumbuhan Ekonomi	88
A.4	Angka Kemiskinan	88
A.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	89
B.	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	90
B.1	Persentase Budaya Daerah yang Dilestarikan.....	90
B.2	Indeks Toleransi	91
B.3	Indeks Solidaritas	92
B.4	Indeks Stabilitas	93
B.5	Nilai SAKIP	94
B.6	Opini atas Audit BPK	94



B.7 Tingkat Maturitas SPIP	95
B.8 Indeks Profesionalitas ASN	96
B.9 Indeks SPBE	96
B.10 Nilai IKM	97
B.11 Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan).....	98
B.12 Pengeluaran Wisatawan (Spending of Money)....	99
B.13 Presentase Desa Mandiri	100
B.14 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)..	100
B.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101
B.16 Indeks Risiko Bencana	102
B.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	103
B.18 Pengeluaran Perkapita Makanan	104
B.19 Indeks Kesehatan	104
B.20 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	105
B.21 Indeks Pendidikan	105
C. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	106
3.1 Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan	111
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	111
1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	111
<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	111
2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	127
<i>a. Dinas Kesehatan</i>	127
<i>b. RSUD Caruban</i>	152
<i>c. RSUD Dolopo</i>	157
3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162
<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	162
4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	175
<i>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	175
5. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	180
<i>a. Satuan Polisi Pamong Praja</i>	180
<i>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i> .	187



6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial	192
<i>Dinas Sosial</i>	192
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	200
1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja	200
<i>Dinas Tenaga Kerja</i>	200
2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	206
<i>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	206
3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan	213
<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan</i>	213
4. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup .	221
<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>	221
5. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan	229
<i>Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan.</i>	229
6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	232
<i>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i> ...	232
7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	238
<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</i>	238
8. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	247
<i>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	247
9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	260
<i>Dinas Perhubungan</i>	260
10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	267
<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	267
11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	274
<i>Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha</i>	



<i>Mikro</i>	274
12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal .	281
<i>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i>	281
13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	294
<i>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga</i> ...	294
14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik	297
<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	297
15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian	299
<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	299
16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	301
<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	301
17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan	305
<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>	305
18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan	307
<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>	307
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	310
1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	310
<i>Dinas Pertanian dan Perikanan</i>	310
2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata	313
<i>Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga</i>	313
3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	317
a. <i>Dinas Pertanian dan Perikanan</i>	317
b. <i>Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan</i>	324
4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	328
<i>Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro</i>	328
5. Urusan Pemerintah Bidang Industri	334
<i>Dinas Tenaga Kerja</i>	334
6. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi	337
<i>Dinas Tenaga Kerja</i>	337
3.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	339
1. <i>Unsur Sekretariat Daerah</i>	339



2. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	353
<i>Sekretariat DPRD</i>	353
3.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	362
1. Unsur Perencanaan	362
<i>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ..</i>	362
2. Unsur Keuangan	372
<i>a. Badan Pendapatan Daerah</i>	372
<i>b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</i>	379
3. Unsur Kepegawaian	388
<i>Badan Kepegawaian Daerah</i>	388
4. Unsur Penelitian dan Pengembangan	392
<i>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ..</i>	392
3.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	395
<i>Inspektorat</i>	395
3.1.7 Unsur Kewilayahan	402
1. <i>Kecamatan Dolopo</i>	402
2. <i>Kecamatan Madiun</i>	407
3. <i>Kecamatan Wungu</i>	415
4. <i>Kecamatan Kebonsari</i>	419
5. <i>Kecamatan Wonoasri</i>	424
6. <i>Kecamatan Saradan</i>	429
7. <i>Kecamatan Jiwan</i>	433
8. <i>Kecamatan Geger</i>	440
9. <i>Kecamatan Pilangkenceng</i>	448
10. <i>Kecamatan Dagangan</i>	454
11. <i>Kecamatan Gemarang</i>	461
12. <i>Kecamatan Sawahan</i>	467
13. <i>Kecamatan Mejayan</i>	471
14. <i>Kecamatan Kare</i>	477
15. <i>Kecamatan Balerejo</i>	482
3.1.8 Unsur Pemerintahan Umum	487
<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</i>	487
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	499



3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021	501
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	539
4.1	Urusan Pemerintah Yang Ditugas Pembantuan	540
4.1.1	Tugas Pembantuan Yang diterima dari Pemerintah Pusat	542
4.1.2	Tugas Pembantuan Yang diterima dari Pemerintah Provinsi	552
4.2	Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	569
4.2.1	Permasalahan	569
4.2.2	Upaya penyelesaian permasalahan	422
BAB V	PENUTUP	570



DAFTAR TABEL

Tabel	I.1	Luas wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/ Kelurahan	12
Tabel	I.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	15
Tabel	I.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	15
Tabel	I.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel	I.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	16
Tabel	I.6	Laju Pertumbuhan Penduduk	19
Tabel	II.1	Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022	27
Tabel	II.2	Rencana dan Realisasi Pendapatan	30
Tabel	II.3	Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	31
Tabel	II.4	Rencana dan Realisasi Pajak Daerah	32
Tabel	II.5	Rencana dan Realisasi Retribusi Daerah	32
Tabel	II.6	Rencana dan Realisasi Retribusi Jasa Umum	33
Tabel	II.7	Rencana dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha	33
Tabel	II.8	Rencana dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu ...	34
Tabel	II.9	Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34
Tabel	II.10	Rincian Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34
Tabel	II.11	Rencana dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35
Tabel	II.12	Rencana dan Realisasi Rincian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	36
Tabel	II.13	Rencana dan Realisasi Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	37
Tabel	II.14	Rencana dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	37
Tabel	II.15	Rencana dan Realisasi Rincian Penerimaan Jasa Giro	37
Tabel	II.16	Rencana dan Realisasi Pendapatan Bunga	37
Tabel	II.17	Rencana dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	38
Tabel	II.18	Rencana dan Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	38
Tabel	II.19	Rencana dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	38
Tabel	II.20	Rencana dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah	38
Tabel	II.21	Rencana dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah	39



Tabel	II.22	Rencana dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian	39
Tabel	II.23	Rencana dan Realisasi Pendapatan BLUD	39
Tabel	II.24	Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer	42
Tabel	II.25	Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	42
Tabel	II.26	Rincian Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan	42
Tabel	II.27	Rencana dan Realisasi Dana Tranfer Umum- Dana Bagi Hasil	43
Tabel	II.28	Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK)	44
Tabel	II.29	Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik	44
Tabel	II.30	Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Non Fisik	46
Tabel	II.31	Rencana dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID)	46
		
Tabel	II.32	Rencana dan Realisasi Dana Desa	47
Tabel	II.33	Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah	47
Tabel	II.34	Rencana dan Realisasi Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah -Pendapatan Bagi Hasil	47
Tabel	II.35	Rencana dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	48
Tabel	II.36	Rencana dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48
Tabel	II.37	Rencana dan Realisasi Lain – lain Rincian Pendapatan Daerah Yang Sah -Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	49
Tabel	II.38	Rekapitulasi Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022	51
Tabel	II.39	Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Wajib Pelayanan Dasar	52
Tabel	II.40	Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	53
Tabel	II.41	Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Pilihan	55
Tabel	II.42	Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	56
Tabel	II.43	Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah Menurut	



		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	58
Tabel	II.44	Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	59
Tabel	II.45	Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Pilihan	62
Tabel	II.46	Belanja Barang Jasa pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	63
Tabel	II.47	Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Operasi	65
Tabel	II.48	Belanja Modal Satuan Kerja Menurut Urusan Wajib Pelayanan Dasar	66
Tabel	II.49	Belanja Modal Perangkat Daerah Menurut Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	67
Tabel	II.50	Belanja Modal Perangkat Daerah Menurut Urusan Pilihan	69
Tabel	II.51	Belanja Modal Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	69
Tabel	II.52	Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Terduga	71
Tabel	II.53	Rencana dan Realisasi Belanja Transfer	72
Tabel	II.54	Rencana dan Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan	72
Tabel	II.55	Pembiayaan Pada Sisi Penerimaan	73
Tabel	II.56	Pembiayaan Pada Sisi Pengeluaran	73
Tabel	III.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta indikator keberhasilan	79
Tabel	III.2	Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	87
Tabel	III.3	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	88
Tabel	III.4	Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022.....	88
Tabel	III.5	Angka Kemiskinan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	89
Tabel	III.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022	90
Tabel	III.7	Persentase budaya daerah yang dilestarikan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	91
Tabel	III.8	Indeks Toleransi Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022	92
Tabel	III.9	Indeks Solidaritas Kabupaten Madiun Tahun 2021-	



		2022	93
Tabel	III.10	Indeks Stabilitas Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022	94
Tabel	III.11	Nilai SAKIP Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	94
Tabel	III.12	Opini atas Audit BPK Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022	95
Tabel	III.13	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	96
Tabel	III.14	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	96
Tabel	III.15	Indeks SPBE Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022 ...	97
Tabel	III.16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	98
Tabel	III.17	PDRB Sektor unggulan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	99
Tabel	III.18	Pengeluaran Wisatawan Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022	99
Tabel	III.19	Presentase Desa Mandiri Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	100
Tabel	III.20	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022	101
Tabel	III.21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	102
Tabel	III.22	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022	103
Tabel	III.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	104
Tabel	III.24	Pengeluaran Perkapita Makanan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	104
Tabel	III.25	Indeks Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	105
Tabel	III.26	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	105
Tabel	III.27	Indeks Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022	106
Tabel	IV.1	Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan di Pemerintah Kabupaten Madiun.....	570



DAFTAR GAMBAR

Gambar	I.1	Langkah Pencapaian Misi Ke-1 dan Ke-5	5
Gambar	I.2	Langkah Pencapaian Misi Ke-2	7
Gambar	I.3	Langkah Pencapaian Misi Ke-3	9
Gambar	I.4	Langkah Pencapaian Misi Ke-4	11
Gambar	I.5	Peta Administrasi Kabupaten Madiun	12
Gambar	I.6	Peta Sub Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Madiun	13



BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun 2022 ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 Visi

Visi merupakan manifestasi dari cita-cita Bupati dalam membangun sebuah daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Madiun untuk periode RPJMD 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN
AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**



1.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Madiun yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Bupati Madiun Tahun 2018-2023:

1. Misi 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Misi 2 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
4. Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
5. Misi 5 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Nilai dari Visi Bupati Madiun yaitu **aman**, **mandiri**, **sejahtera** dan **berakhlak**.

- **Aman** direpresentasikan pada misi 1 dan misi 2 yaitu mewujudkan rasa aman di masyarakat dan ASN;
- **Mandiri** diwujudkan pada misi 3 yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- **Sejahtera** diwujudkan pada misi 4 yaitu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan; dan
- **Berakhlak** diwujudkan pada misi 5 yaitu Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, Misi ke 1 dan Misi ke 5 mengalami rekonstruksi pada tujuan, misi 1 dan misi 5 beririsan pada tujuan yang sama yaitu tentang peningkatan harmoni sosial di masyarakat yang meliputi tentang ketenteraman dan ketertiban, keberagaman agama dan budaya, serta solidaritas antar masyarakat. Misi 1 dan misi 5 dituangkan menjadi satu tujuan, yang esensinya saling terkait antara misi satu dan misi 5 tentang menciptakan kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan orientasi religius individu dimana tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga merupakan orientasi religius individu dalam berinteraksi dengan sesama. Kesalehan sosial dapat dimanifestasikan solidaritas sosial, toleransi dan ketenteraman ketertiban. Rekonstruksi tidak menghilangkan esensi dari kedua misi tersebut, hanya bertujuan untuk mendefinisikan tematik dan integratif.

1.2.2.1 MISI 1 dan Misi 5

Misi 1 yaitu "Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun " dan Misi 5 : "Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal."

Misi pertama dan misi kelima dari Bupati Madiun pada cascading ini dikelompokkan menjadi satu cascading, landasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah terdapat irisan substansi antara misi pertama dan misi kelima yaitu mengenai harmonisasi sosial. Substansi utama pada misi pertama adalah mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Rasa aman yang menjadi kata kunci menandakan terjadinya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah. Sedangkan pada misi kelima substansi utamanya adalah peningkatan kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya kesamaan

Substansi antara misi pertama dan misi kelima yaitu mengenai harmonisasi sosial, maka untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi

pencapaian visi dan misi Bupati pada cascading kedua misi tersebut disatukan dalam satu tujuan yang sama. Mengapa misi pertama dan misi kelima tidak berdiri masing-masing dengan dua tujuan yang berbeda? Hal ini disebabkan jika misi pertama dan misi kelima berdiri masing-masing dengan tujuan yang berbeda sedangkan substansi dari misi pertama dan kelima adalah sama, maka akan terjadi dua pencapaian tujuan dengan inti yang sama. Sehingga akan berdampak pada indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang akan dicapai.

Beberapa langkah pencapaian misi pertama dan kelima dilakukan oleh beberapa aspek, pertama adalah dengan meningkatkan kualitas kebudayaan, kedua meningkatkan solidaritas sosial, dan yang ketiga meningkatkan stabilitas sosial. Langkah pencapaian harmonisasi sosial pada misi pertama dan kelima dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.1
Langkah Pencapaian Misi ke-1 dan ke-5



1.2.2.1.1 Tujuan dan Sasaran MISI 1 dan MISI 5

Dalam rangka pencapaian Misi 1 dan Misi 5 tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: **Membangun Harmonisasi Sosial yang berpondasi dari nilai religius dan Kearifan Lokal**, dengan sasaran pembangunan:

1. menguatkan karakteristik kebudayaan;



2. terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
3. terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

1.2.2.2 MISI 2

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) Serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Misi kedua dari Bupati Madiun memiliki dua substansi utama, pertama adalah tata pemerintahan yang baik dan bersih dan kedua adalah pelayanan publik yang berkualitas. Jika kita jabarkan lebih dalam kedua substansi utama dalam misi kedua ini akan didapatkan beberapa poin penting yang menjadi misi Bupati Madiun pada aspek tata pemerintahan dan pelayanan publik ini.

Pertama, tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik mencerminkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Madiun yang profesional, baik secara sistem maupun Aparatur Sipil Negeranya. Sistem yang profesional menandakan pelaksanaan tata pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, selain itu tata pemerintahan yang baik berarti pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pencapaian visi dan misi Bupati Madiun. Selain itu pada aspek tata pemerintahan pada misi kedua ini, tata pemerintahan yang bersih juga menjadi misi dari Bupati Madiun. Tata pemerintahan yang bersih menandakan tidak adanya pelanggaran terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun diharapkan tidak ditemukan pelanggaran.

Kedua, pelayanan publik yang berkualitas dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi. Pelayanan publik yang berkualitas sering kali dimaknai sebagai pelayanan publik yang mempunyai inovasi sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan

merasakan kemudahan dan merasakan kepuasan. Inovasi yang dilakukan dapat berupa penyederhanaan birokrasi pelayanan publik (khususnya pelayanan perijinan) dan penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk inovasi layanan. Penggunaan teknologi informasi menawarkan berbagai macam kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dari pelayanan publik yang diberikan. Masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan pemberi layanan melalui teknologi informasi ini. Sehingga dengan pelayanan publik yang mengedepankan pengadopsian teknologi informasi, kepuasan masyarakat dapat meningkat. Berdasarkan uraian di atas, aspek utama dari misi kedua ini adalah Good and Clean Government. Upaya untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan, sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas/ unggul/ profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas. Skema mengenai hubungan dari ke empat aspek tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.2
Langkah Pencapaian Misi ke-2



1.2.2.2.1 Tujuan dan Sasaran MISI 2

Dalam rangka pencapaian Misi 2 tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: **Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik**



(good governance) untuk pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan:

1. Mewujudkan pemerintahan yang Akuntabel;
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital.

1.2.2.3 MISI 3

“Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan”

Tema dari misi ketiga ini adalah ekonomi, dengan peningkatan pembangunan ekonomi melalui agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan sebagai ujung tombaknya. Berdasarkan misi ketiga tersebut terdapat dua substansi utama yang melandasi misi tersebut.

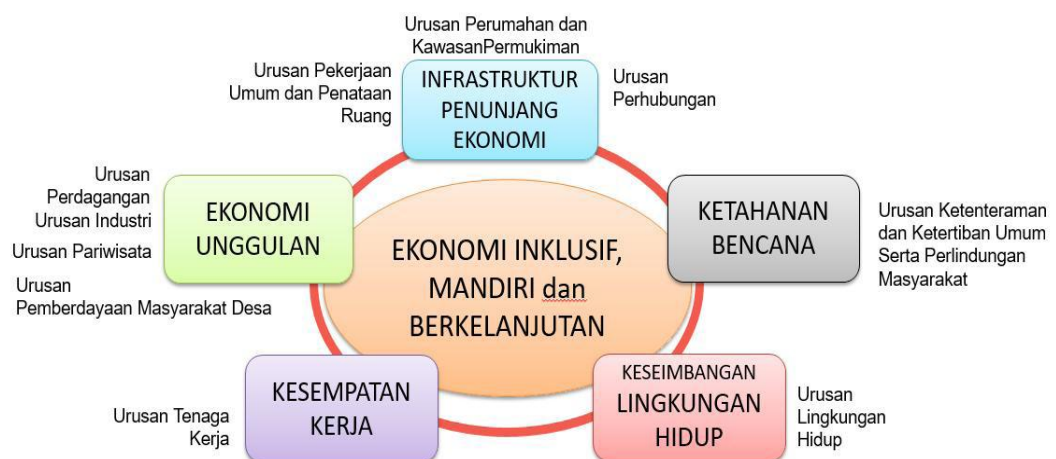
Pertama, pembangunan ekonomi yang mandiri. Pembangunan ekonomi yang mandiri dapat dimaknai sebagai pembangunan ekonomi dari dan untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Pembangunan ekonomi dari masyarakat berarti membangun/memberdayakan ekonomi masyarakat Kabupaten Madiun, sehingga masyarakat Kabupaten Madiun menjadi pelaku utama ekonomi di Kabupaten Madiun. Pembangunan/pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut difokuskan pada tiga aspek, yaitu agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Madiun mempunyai sektor yang mempunyai kekuatan dalam menggerakkan roda ekonomi daerah yaitu sektor pertanian dan perkebunan. Namun pembangunan ekonomi Kabupaten Madiun tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan saja, namun juga pembangunan kedua sektor tersebut diarahkan menuju ke arah industrialisasi sehingga akan menambah nilai ekonomi. Selain itu pariwisata juga menjadi salah satu sektor tumpuandalam pembangunan ekonomi dimana dewasa ini telah berkembang upaya pemanfaatan potensi lokal

melalui pariwisata dan trennya menunjukkan tren yang positif. Oleh karena itu potensi pariwisata dalam skala lokal dan daerah akan terus didorong untuk berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat dimaknai sebagai pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga dengan kata lain, aspek kelestarian lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam misi ketiga ini. Pembangunan ekonomi yang dilakukan harus tetap memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan di Kabupaten Madiun, sehingga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Madiun dapat terus meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, pada misi ke-3 ini substansi yang menjadi fokus utama adalah membentuk ekonomi inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam mewujudkan ekonomi inklusif, mandiri, dan berkelanjutan adalah memperluas kesempatan kerja, membangun infrastruktur penunjang perekonomian, pembangunan ekonomi sektor unggulan, membentuk keseimbangan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan membangun desa mandiri. Untuk lebih jelasnya upaya pencapaian misi ke-3 tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.3
Langkah Pencapaian Misi ke-3





1.2.2.3.1 Tujuan dan Sasaran MISI 3

Dalam rangka pencapaian Misi 3, tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: **Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan**, dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian;
3. Terjaganya keseimbangan kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatnya ketahanan bencana;
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal.

1.2.2.4 MISI 4

“Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan”

Kesejahteraan dapat dilihat dan dicapai melalui berbagai macam sudut pandang, kesejahteraan dapat dicapai melalui pendekatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan pencapaian kesejahteraan melalui ekonomi berarti masyarakat dikatakan sejahtera jika masyarakat tersebut terbebas dari kemiskinan, sedangkan jika pendekatannya adalah melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial maka kesejahteraan masyarakat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada misi keempat ini, pendekatan yang digunakan dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui tiga pendekatan utama, yaitu mempermudah dan meningkatkan akses pendidikan, mempermudah dan meningkatkan akses kesehatan, dan meningkatkan distribusi pendapatan. Melalui tiga pendekatan tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Madiun. Untuk lebih jelasnya mengenai penjabaran pencapaian misi ke-4 tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.4
Langkah Pencapaian Misi ke-4



1.2.2.4.1 Tujuan dan Sasaran MISI 4

Dalam rangka pencapaian Misi 4, tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: **Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan**, dengan sasaran pembangunan:

- Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat;
- Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

1.3.1.1 Batas Wilayah Administratif

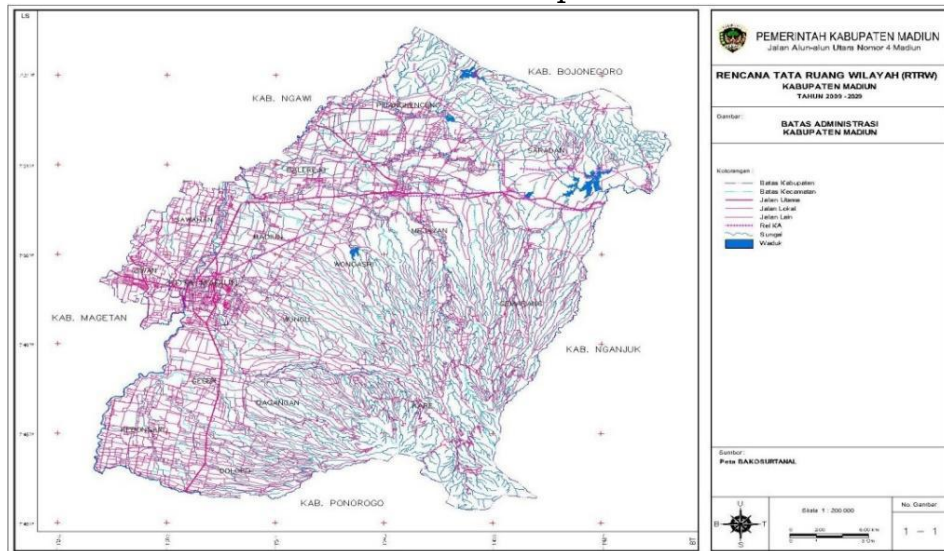
Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 38 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur, yang terletak antara 111° 25' 45" – 111° 51" Bujur Timur dan 7° 12' - 7° 48' 30" Lintang Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Madiun memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Timur	: Kabupaten Nganjuk
Sebelah Selatan	: Kabupaten Ponorogo
Sebelah Barat	: Kabupaten Magetan dan Ngawi

Gambar I.5

Peta Administrasi Kabupaten Madiun



1.3.1.2 Luas Wilayah

Kabupaten Madiun memiliki wilayah seluas 101.086 Ha atau 1.010,86 Km², terdiri atas 206 desa/kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan sebagai berikut :

Tabel I.1
Luas wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

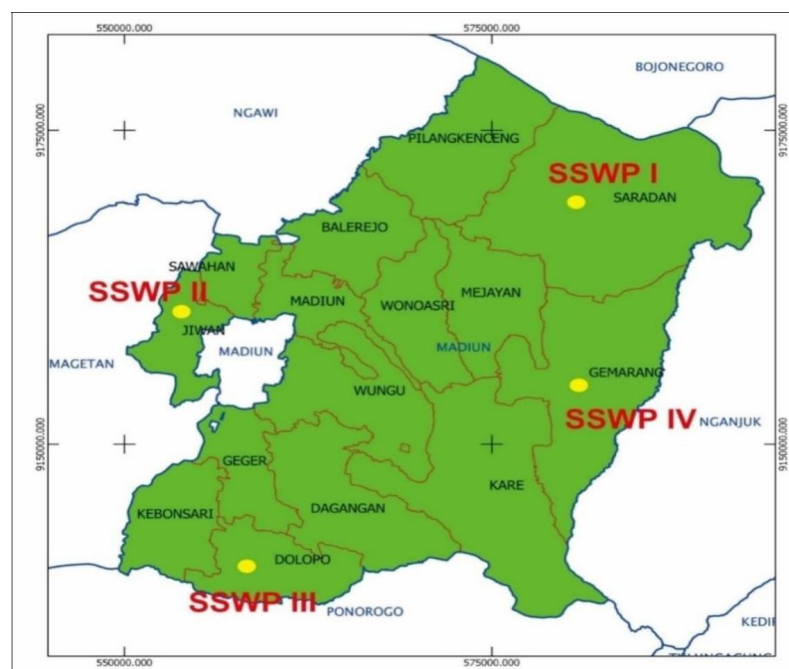
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Kebonsari	14	-	47,45
2.	Geger	19	-	36,61
3.	Dolopo	10	2	48,85
4.	Dagangan	17	-	72,36
5.	Wungu	12	2	45,54
6.	Kare	8	-	190,85
7.	Gemarang	7	-	101,97
8.	Saradan	15	-	152,92
9.	Pilangkenceng	15	-	81,34
10.	Mejayan	11	3	55,22
11.	Wonoasri	10	-	33,93
12.	Balerejo	18	-	51,98
13.	Madiun	12	1	35,93
14.	Sawahan	13	-	22,15
15.	Jiwan	14	-	33,76
Jumlah		198	8	1.010,86

Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kare dengan luas 190,85 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sawahan dengan luas 22,15 km².

Kabupaten Madiun terbagi dalam 4 (empat) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang terdiri dari:

1. SSWP - I adalah kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari Ibukota Kabupaten dengan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat Pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan;
2. SSWP - II adalah kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota Madiun dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman;
3. SSWP - III adalah kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata, dan agroforestry, di Kabupaten Madiun;
4. SSWP - IV adalah kawasan-kawasan yang direncanakan untuk pengembangan ekowisata dan fungsi lindung di Kabupaten Madiun (*Ecological City*).

Gambar I.6
Peta Sub Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Madiun





1.3.1.3 Topografi

Permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar relatif datar (67.57%) dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%.

a. Kemiringan Lereng

- 0 - 2% seluas 44.278,37 Ha (43,80%)
- 2 - 15% seluas 23.298,92 Ha (23,05%)
- 15 - 40% seluas 15.858,00 Ha (15,59%)
- > 40% seluas 17.140,00 Ha (16,85%)

b. Ketinggian tempat

- 0 – 2 mdpl seluas 0 Ha
- 21 – 100 mdpl seluas 41.267 Ha (42,13%)
- 101 – 500 mdpl seluas 45.004 Ha (45,95%)
- 501 – 1000 mdpl seluas 11.675 Ha (11,92%)
- 1001 – 1500 mdpl seluas 3.140 Ha (0,003%)

c. Penggunaan Lahan

- Pemukiman/Pekarangan 15.322 Ha (15,16%)
- Sawah 30.951 Ha (30,62%)
- Tegall 7.091 Ha (7,02%)
- Perkebunan 2.472 Ha (2,45%)
- Hutan Negara 40.511 Ha (40,08%)
- Lain-lain(jalan, sungai, makam) 3.902 Ha (3,83%)

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2022 berjumlah **755.733** jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak **374.752** jiwa dan perempuan sebanyak **380.981** jiwa. Data jumlah penduduk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel I.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	KEBONSARI	29.688	30.949	60.637
2.	DOLOPO	30.558	31.317	61.875
3.	GEGER	32.853	33.669	66.522
4.	DAGANGAN	27.057	27.088	54.145
5.	KARE	17.328	17.404	34.732
6.	GEMARANG	18.158	17.846	36.004
7.	WUNGU	29.401	30.103	59.504
8.	MADIUN	19.136	20.044	39.180
9.	JIWAN	28.942	29.703	58.645
10.	BALEREJO	22.359	22.983	45.342
11.	MEJAYAN	23.815	23.898	47.713
12.	SARADAN	36.643	36.492	73.135
13.	PILANGKENCENG	27.942	28.223	56.165
14.	SAWAHAN	12.756	13.123	25.879
15.	WONOASRI	18.116	18.139	36.255
Jumlah		374.752	380.981	755.733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, 2022

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	20.513	19.454	39.967
2.	5-9	23.883	22.531	46.414
3.	10-14	26.759	24.624	51.383
4.	15-19	26.019	24.086	50.105
5.	20-24	26.025	24.953	50.978
6.	25-29	25.670	23.902	49.572
7.	30-34	24.088	23.206	47.294
8.	35-39	26.298	27.055	53.353
9.	40-44	29.009	30.825	59.834
10.	45-49	27.978	29.020	56.998
11.	50-54	28.787	30.885	59.672
12.	55-59	24.709	27.146	51.855
13.	60-64	22.156	23.823	45.979
14.	65-69	17.746	17.596	35.342
15.	70-74	11.789	12.550	24.339
16.	> 75	13.323	19.325	32.648
Jumlah		754.456	755.733	755.733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, 2022



Tabel I.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak /belum sekolah	56.285	60.137	116.422
2.	Belum tamat SD/ sederajat	73.272	85.339	158.611
3.	Tamat SD/ sederajat	57.258	59.984	117.242
4.	SLTP/ sederajat	66.858	65.902	132.760
5.	SLTA/ sederajat	103.359	86.253	189.612
6.	D-I/II	984	1.592	2.576
7.	Akademi /D-III / sarjana muda	3.128	4.935	8.063
8.	D-IV/Strata-I	12.687	16.149	28.836
9.	Strata-II	881	663	1.544
10.	Strata-III	40	27	67
Jumlah		374.752	380.981	755.733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, 2022

Tabel I.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	AKUNTAN	4	6	10
2.	ANGGOTA BPK	2	0	2
3.	ANGGOTA DPD	0	0	0
4.	ANGGOTA DPR-RI	1	1	2
5.	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	24	7	31
6.	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	0	1
7.	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	2	0	2
8.	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	2.177	1.727	3.904
9.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
10.	APOTEKER	13	70	83
11.	ARSITEK	15	1	16
12.	ARTIS	0	0	0
13.	ASISTEN AHLI	0	0	0
14.	ATLIT	0	0	0
15.	BELUM/TIDAK BEKERJA	71.880	67.128	139.008
16.	BIARAWATI	0	1	1
17.	BIDAN	0	322	322
18.	BUPATI	1	0	1
19.	BURUH HARIAN LEPAS	17.220	4.611	21.831



No.	Pekerjaan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
20.	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	46	10	56
21.	BURUH PETERNAKAN	100	23	123
22.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	11.970	6.311	18.281
23.	CHEFF	0	0	0
24.	DOKTER	60	78	138
25.	DOSEN	143	159	302
26.	DUTA BESAR	0	0	0
27.	GUBERNUR	0	0	0
28.	GURU	1.782	3.804	5.586
29.	IMAM MESJID	91	0	91
30.	INDUSTRI	173	82	255
31.	JURU MASAK	22	83	105
32.	KARYAWAN BUMD	277	104	381
33.	KARYAWAN BUMN	1.124	249	1.373
34.	KARYAWAN HONORER	919	1.072	1.991
35.	KARYAWAN SWASTA	65.366	29.897	95.263
36.	KEPALA DESA	137	13	150
37.	KEPOLISIAN RI	1.269	70	1.339
38.	KONSTRUKSI	341	46	387
39.	KONSULTAN	13	8	21
40.	MANAJER	0	0	0
41.	MEKANIK	521	0	521
42.	MENGURUS RUMAH TANGGA	255	128.102	128.357
43.	NELAYAN/PERIKANAN	77	14	91
44.	NOTARIS	5	7	12
45.	OPERATOR	0	0	0
46.	PARAJI	17	51	68
47.	PARANORMAL	19	2	21
48.	PASTOR	0	0	0
49.	PEDAGANG	4.346	7.852	12.198
50.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	4.289	3.457	7.746
51.	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
52.	PEKERJAAN LAINNYA	317	116	433
53.	PELAJAR/MAHASISWA	58.534	54.217	11.2751
54.	PELAUT	137	0	137
55.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	55	3.158	3.213
56.	PENATA BUSANA	4	9	13
57.	PENATA RAMBUT	6	65	71
58.	PENATA RIAS	16	152	168
59.	PENDETA	35	10	45
60.	PENELITI	16	6	22
61.	PENGACARA	12	2	14



No.	Pekerjaan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
62.	PENSIUNAN	4.557	2.132	6.689
63.	PENTERJEMAH	0	0	0
64.	PENYIAR RADIO	4	4	8
65.	PENYIAR TELEVISI	1	1	2
66.	PERANCANG BUSANA	0	2	2
67.	PERANGKAT DESA	1.091	374	1.465
68.	PERAWAT	200	489	689
69.	PERDAGANGAN	976	1.256	2.232
70.	PETANI/PEKEBUN	58.295	33.637	91.932
71.	PETERNAK	185	35	220
72.	PIALANG	14	4	18
73.	PILOT	0	0	0
74.	PRESIDEN	0	0	0
75.	PROMOTOR ACARA	5	0	5
76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	1	1
77.	SENIMAN	88	30	118
78.	SOPIR	1.449	3	1.452
79.	TABIB	27	16	43
80.	TEKNISI	1	0	1
81.	TENAGA TATA USAHA	2	4	6
82.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	2.559	28	2.587
83.	TRANSPORTASI	188	12	200
84.	TUKANG BATU	2.233	10	2.243
85.	TUKANG CUKUR	132	5	137
86.	TUKANG GIGI	15	4	19
87.	TUKANG JAHIT	227	639	866
88.	TUKANG KAYU	785	0	785
89.	TUKANG LAS/PANDAI BESI	307	3	310
90.	TUKANG LISTRIK	97	3	100
91.	TUKANG SOL SEPATU	24	0	24
92.	USTADZ/MUBALIGH	63	7	70
93.	WAKIL BUPATI	1	0	1
94.	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
95.	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
96.	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
97.	WALIKOTA	0	0	0
98.	WARTAWAN	27	2	29
99.	WIRASWASTA	57.365	29.177	86.542
Jumlah		374.752	380.981	755.733

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, 2022



1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk sendiri di pengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah penambahan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total, di mana pertumbuhan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertumbuhan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Pertumbuhan Penduduk Total merupakan hasil perhitungan dari pertumbuhan penduduk alami ditambah dengan pertumbuhan penduduk migrasi.

Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2022 tercatat sebanyak **755.733** jiwa, atau mengalami penambahan sebanyak **1.277** Jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk masing-masing kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.6
Laju Pertumbuhan Penduduk

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2021	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1.	KEBONSARI	60.495	60.637	0,2347
2.	DOLOPO	61.837	61.875	0,0615
3.	GEGER	66.231	66.522	0,4394
4.	DAGANGAN	54.202	54.145	-0,1052
5.	KARE	34.438	34.732	0,8537
6.	GEMARANG	35.932	36.004	0,2004
7.	WUNGU	59.388	59.504	0,1953
8.	MADIUN	39.224	39.180	-0,1122
9.	JIWAN	58.699	58.645	-0,0920
10.	BALEREJO	45.486	45.342	-0,3166
11.	MEJAYAN	47.455	47.713	0,5437
12.	SARADAN	72.941	73.135	0,2660
13.	PILANGKENCENG	56.091	56.165	0,1319
14.	SAWAHAN	25.885	25.879	-0,0232
15.	WONOASRI	36.152	36.255	0,2849
Jumlah		754.456	755.733	0,1693

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, 2022



1.3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun tahun 2022 sebanyak 6.945 orang yang terinci sebagai berikut :

- a. Data pegawai berdasarkan status kepegawaian.

No.	Satus Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	CPNS	19	64	83
2.	PNS	2.475	3.490	5.965
3.	PPPK	281	616	897
Jumlah		2.775	4.170	6.945

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, (data 31 Desember 2022)

- b. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon.

No.	Jabatan/Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bupati Madiun	1	-	1
2.	Wakil Bupati	1	-	1
3.	Eselon II.a	1	-	1
4.	Ka. OPD/eselon II.b	25	1	26
5.	Eselon III.a	39	6	45
	<i>Direktur RSUD</i>	2	0	2
	<i>Camat</i>	12	0	12
	<i>Kabag di Sekretariat Daerah</i>	6	1	7
	<i>Kabag di Sekretariat DPRD</i>	3	0	3
	<i>Sekretaris</i>	14	2	16
	<i>Inspektur Pembantu</i>	1	3	4
	<i>Kepala Pelaksana BPBD</i>	1	0	1
6.	Eselon III.b	64	27	91
	<i>Sekretaris di Kecamatan</i>	12	0	12
	<i>Kabid/kabag pd RSUD</i>	2	5	7
	<i>Kabid di dinas/badan</i>	50	22	72
7.	Eselon IV	106	109	215
	<i>Eselon IV.a</i>	84	71	155
	<i>Eselon IV.b</i>	22	38	60
Eselon II. III dan IV		235	143	378
Fungsional Tertentu		1.631	3.553	5.184
Fungsional Umum (staf)		909	474	1.383
Jumlah		2.775	4.170	6.945

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, (data 31 Desember 2022)

- c. Data Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.

No.	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	695	1.015	1.710
	<i>IV/e</i>	2	0	2
	<i>IV/d</i>	5	0	5
	<i>IV/c</i>	58	91	149
	<i>IV/b</i>	451	706	1.157
	<i>IV/a</i>	179	218	397



No.	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2.	Golongan III	1.186	2.203	3.389
	III/d	337	570	907
	III/c	246	404	650
	III/b	256	563	819
	III/a	347	666	1.013
3.	Golongan II	542	333	875
	II/d	256	208	464
	II/c	112	118	230
	II/b	130	6	136
	II/a	44	1	45
4.	Golongan I	71	3	74
	I/d	69	3	72
	I/c	1	0	1
	I/b	1	0	1
	I/a	0	0	0
5.	PPPK	281	616	897
	X	2	2	4
	IX	243	554	797
	VII	22	57	79
	V	14	3	17
Jumlah		2.494	3.554	6.945

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, (data 31 Desember 2022)

d. Data Pegawai Berdasarkan Agama.

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	2.731	4.103	6.834
2.	Kristen	19	26	45
3.	Katholik	25	41	66
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	0	0	0
Jumlah		2.775	4.170	6.945

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, (data 31 Desember 2022)

e. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	23	2	25
2.	SMP	113	4	117
3.	SMA	642	222	864
4.	D1	2	7	9
5.	D2	28	21	49
6.	D3	190	644	834
7.	DIV.	15	134	149
8.	S1	1.586	3.003	4.589
9.	S2	176	133	309
Jumlah		2.775	4.170	6.945

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, (data 31 Desember 2022)



1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.925.038.562.315,00	2.007.057.652.785,1	104,26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.218.279.110,00	377.425.844.392,10	114,30
4.1.1	Pajak Daerah	79.120.000.000,00	93.537.254.751,52	118,22
4.1.2	Retribusi Daerah	9.104.057.550,00	8.892.585.049,06	97,68
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.988.234.655,00	7.988.235.164,21	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	234.005.986.905,00	267.007.769.427,31	114,10
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.583.724.800.636,00	1.615.008.705.848,00	101,98
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.460.272.689.627,00	1.458.363.334.903,00	99,87
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.276.890.498.627,00	1.275.033.321.703,00	99,85
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.612.627.000,00	15.612.627.000,00	100,00
4.2.1.5	Dana Desa	167.769.564.000,00	167.717.386.200,00	99,97
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.452.111.009,00	156.645.370.945,00	126,89
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	108.875.857.009,00	142.169.766.945,00	130,58
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	14.576.254.000,00	14.475.604.000,00	99,31
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.095.482.569,00	14.623.102.545,00	131,79
4.3.1	Pendapatan Hibah	11.095.482.569,00	14.623.102.545,00	131,79

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun, 2023



1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja menurut jenis belanja Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.196.806.712.721,00	2.059.524.737.418,60	93,75
5.1	BELANJA OPERASI	1.409.311.991.655,00	1.303.324.777.859,60	92,48
5.1.1	Belanja Pegawai	722.848.038.867,00	688.091.257.009,00	95,19
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	599.816.367.808,00	531.908.720.284,60	88,68
5.1.4	Belanja Subsidi	360.000.000,00	346.150.000,00	96,15
5.1.5	Belanja Hibah	72.977.673.755,00	70.030.130.346,00	95,96
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.309.911.225,00	12.948.520.220,00	97,28
5.2	BELANJA MODAL	342.535.944.866,00	318.862.276.800,00	93,09
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.207.630.019,00	94.074.151.329,00	93,88
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.235.066.618,00	99.215.300.789,00	88,40
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.587.387.325,00	119.490.997.436,00	96,69
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.505.860.904,00	6.081.827.246,00	93,48
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000,00	7.033.196.692,00	50,24
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00	7.033.196.692,00	50,24
5.4	BELANJA TRANSFER	430.958.776.200,00	430.304.486.067,00	99,85
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.448.832.200,00	10.448.832.200,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	420.509.944.000,00	419.855.653.867,00	99,84

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun, 2023



1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN NETTO	271.768.150.406,00	271.805.050.405,73	100,01
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	298.268.150.406,00	298.305.050.405,73	100,01
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	298.268.150.406,00	298.268.150.405,73	100,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	36.900.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun, 2023



BAB II

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Secara mendasar pengelolaan APBD Tahun 2022 berpijak pada serangkaian peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;

Sehubungan dengan Laporan Pelaksanaan APBD tahun 2022 disampaikan kepada DPRD setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, maka Laporan Pengelolaan Keuangan yang meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah disusun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK (unaudited). Laporan keuangan sudah memuat perubahan APBD pada tahun 2022, baik terkait anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 tetap berorientasi pada Anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini setiap dana yang



dianggarkan untuk melaksanakan program/kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- b. Pembahasan dan Penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- d. Pembahasan dan Penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- e. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD.
- f. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Perangkat Daerah.
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- i. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- j. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Secara umum dapat kami gambarkan sesuai tabel dibawah:

Tabel : II.1
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.925.038.562.315,00	2.007.057.652.785,1	104,26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.218.279.110,00	377.425.844.392,10	114,30
4.1.1	Pajak Daerah	79.120.000.000,00	93.537.254.751,52	118,22
4.1.2	Retribusi Daerah	9.104.057.550,00	8.892.585.049,06	97,68
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.988.234.655,00	7.988.235.164,21	100,00
4.1.4	Lain-lain	234.005.986.905,00	267.007.769.427,31	114,10



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.583.724.800.636,00	1.615.008.705.848,00	101,98
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.460.272.689.627,00	1.458.363.334.903,00	99,87
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.276.890.498.627,00	1.275.033.321.703,00	99,85
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.612.627.000,00	15.612.627.000,00	100,00
4.2.1.5	Dana Desa	167.769.564.000,00	167.717.386.200,00	99,97
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.452.111.009,00	156.645.370.945,00	126,89
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	108.875.857.009,00	142.169.766.945,00	130,58
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	14.576.254.000,00	14.475.604.000,00	99,31
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.095.482.569,00	14.623.102.545,00	131,79
4.3.1	Pendapatan Hibah	11.095.482.569,00	14.623.102.545,00	131,79
5	BELANJA DAERAH	2.196.806.712.721,00	2.059.524.737.418,60	93,75
5.1	BELANJA OPERASI	1.409.311.991.655,00	1.303.324.777.859,60	92,48
5.1.1	Belanja Pegawai	722.848.038.867,00	688.091.257.009,00	95,19
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	599.816.367.808,00	531.908.720.284,60	88,68
5.1.4	Belanja Subsidi	360.000.000,00	346.150.000,00	96,15
5.1.5	Belanja Hibah	72.977.673.755,00	70.030.130.346,00	95,96
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.309.911.225,00	12.948.520.220,00	97,28
5.2	BELANJA MODAL	342.535.944.866,00	318.862.276.800,00	93,09
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.207.630.019,00	94.074.151.329,00	93,88
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.235.066.618,00	99.215.300.789,00	88,40
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.587.387.325,00	119.490.997.436,00	96,69
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.505.860.904,00	6.081.827.246,00	93,48
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000,00	7.033.196.692,00	50,24
5.3.1	Belanja Tidak	14.000.000.000,00	7.033.196.692,00	50,24



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Terduga			
5.4	BELANJA TRANSFER	430.958.776.200,00	430.304.486.067,00	99,85
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.448.832.200,00	10.448.832.200,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	420.509.944.000,00	419.855.653.867,00	99,84
	SURPLUS / (DEFISIT)	(271.768.150.406,00)	(52.467.084.633,50)	19,31
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	298.268.150.406,00	298.305.050.405,73	100,01
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	298.268.150.406,00	298.268.150.405,73	100,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	36.900.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	271.768.150.406,00	271.805.050.405,73	100,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	219.337.965.772,23	0,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, antara lain :

- Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang;
- Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antar dinas terkait;



- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
- d. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah;
- f. Melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran,
- g. Melaksanakan asistensi terhadap OPD penghasil dalam rangka perhitungan penetapan target pendapatan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 2022 dan penetapan target pendapatan Tahun 2023,
- h. Melaksanakan monitoring dan penagihan Pajak Daerah oleh satgas penagihan dalam rangka meminimalisasi tunggakan.

2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Kebijakan dalam pengelolaan pendapatan tercermin dalam rencana dan realisasi pendapatan.

Tabel : II.2
Rencana dan Realisasi Pendapatan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	330.218.279.110,00	377.425.844.392,10	114,30
4.2	Pendapatan transfer	1.583.724.800.636,00	1.615.008.705.848,00	101,98
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	11.095.482.569,00	14.623.102.545,00	131,79
	Jumlah	1.925.038.562.315,00	2.007.057.652.785,10	104,26

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023



Secara umum pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 telah mencapai target, dan yang paling tinggi pencapaian targetnya adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 131,79%.

Adapun rincian pendapatan sebagai berikut :

1. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah 131,79%
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 114,30%
3. Pendapatan Transfer 101,98%

2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel : II.3
Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Pajak Daerah	79.120.000.000,00	93.537.254.751,52	118,22
2.	Retribusi Daerah	9.104.057.550,00	8.892.585.049,06	97,68
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.988.234.655,00	7.988.235.164,21	100,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	234.005.986.905,00	267.007.769.427,31	114,10
Jumlah		330.218.279.110,00	377.425.844.392,10	114,30

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023

Realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.377.425.844.392,10 atau 114,30% dari rencana sebesar Rp.330.218.279.110,00.

1) Pajak Daerah

Tabel II.4
Rencana dan Realisasi Pajak Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Pajak Hotel	85.000.000,00	106.150.170,00	124,88



No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.	Pajak Restoran	2.750.000.000,00	3.575.247.591,59	130,01
3.	Pajak Hiburan	5.000.000,00	8.125.000,00	162,50
4.	Pajak Reklame	700.000.000,00	935.155.506,65	133,59
5.	Pajak Penerangan Jalan	25.600.000.000,00	27.098.677.326,00	105,85
6.	Pajak Parkir	10.000.000,00	12.440.100,00	124,40
7.	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	367.026.038,00	104,86
8.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	20.000.000,00	40.086.000,00	200,43
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.000.000.000,00	25.705.364.612,28	102,82
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.600.000.000,00	35.688.982.407,00	145,08
JUMLAH		79.120.000.000,00	93.537.254.751,52	118,22

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023

2) Retribusi Daerah

Tabel : II.5
Rencana dan Realisasi Retribusi Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Jasa Umum	7.657.535.000,00	7.842.932.600,00	102,42
2.	Retribusi Jasa Usaha	430.930.550,00	433.681.500,00	100,64
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.015.592.000,00	615.970.949,06	60,65
Jumlah		9.104.057.550,00	8.892.585.049,06	97,68

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023

Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp.8.892.585.049,06 atau 97,68% dari rencana sebesar Rp. 9.104.057.550,00. Retribusi Jasa Umum pencapaian targetnya yang paling tinggi sebesar 102,42%.

Adapun Rincian dari Retribusi Daerah sebagai Berikut :



Tabel : II.6
Rencana dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	270.000.000,00	278.305.000,00	103,08
2.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	20.000.000,00	17.609.100,00	88,046
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.998.200.000,00	5.090.615.000,00	101,85
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.900.000.000,00	2.039.837.800,00	107,36
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	358.335.000,00	294.115.000,00	82,078
6.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	111.000.000,00	122.450.700,00	110,32
Jumlah		7.657.535.000,00	7.842.932.600,00	102,42

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Umum yang paling menonjol adalah Retribusi Pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang yang mencapai 110,32 % dari rencana.

Tabel : II.7
Rencana dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	287.117.650,00	330.982.000,00	115,28
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	143.812.900,00	102.699.500,00	71,412
Jumlah		430.930.550,00	433.681.500,00	100,64

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang paling tinggi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mencapai 115,28% dari rencana.

Tabel : II.8



Rencana dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.545.000,00	520.000,00	33,66
2.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan	1.014.047.000,00	615.450.949,06	60,69
Jumlah		1.015.592.000,00	615.970.949,06	60,65

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023

Adapun Realisasi dari total Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 60,65%, secara komulatif mengalami penurunan terutama dari Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tabel : II.9

Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.988.234.655,00	7.988.235.164,21	100,00
Jumlah		7.988.234.655,00	7.988.235.164,21	100,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel : II.10

Rincian Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.354.392.786,00	5.354.393.295,06	100,00



No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.633.841.869,00	2.633.841.869,15	100,00
Jumlah		7.988.234.655,00	7.988.235.164,21	100,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan didalamnya terdapat Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang realisasinya mencapai 100,00% atau sebesar Rp. 7.988.235.164,21 dari rencana sebesar Rp. 7.988.234.655,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Realisasi Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank dari Deviden Bank Jatim sebesar Rp.1.701.937.508,58.
- b. Realisasi berasal dari Bagian Laba Perumda BPR sebesar Rp.3.652.455.786,48.
- c. Realisasi berasal dari Bagian Laba PDAM sebesar Rp.2.633.841.869,15.

4) Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tabel II.11
Rencana dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Hasil Penjualan BMD yang dipisahkan	141.560.500,00	657.758.000,00	464,65
2.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahklan	5.000.000,00	1.800.000,00	36,00
3.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.454.781.500,00	1.678.461.900,00	115,38
4.	Jasa Giro	1.650.000.000,00	1.496.843.680,52	90,72
5.	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.853.208.223,26	97,06
6.	Penerimaan atas	277.000.000,00	230.590.500,00	83,25



No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah			
7.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	40.000.000,00	222.928.543,51	557,32
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	60.571.628,00	1.211,43
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	236.800.000,00	592.498.796,00	250,21
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	35.665.000,00	165.555.000,00	464,19
11.	Pendapatan dari Pengembalian	145.000.000,00	232.843.400,00	160,58
12.	Pendapatan BLUD	225.015.179.905,00	256.814.709.756,02	114,13
	Jumlah	141.560.500,00	657.758.000,00	464,65

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.12
Rencana dan Realisasi Rincian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	543.712.500,00	1.359,28
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	52.395.500,00	261,98
3.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	39.210.500,00	39.300.000,00	100,23
4.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	42.350.000,00	22.350.000,00	52,77
	Jumlah	141.560.500,00	657.758.000,00	464,65

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.13
Rencana dan Realisasi Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
----	--------	----------------------------	-----------	---



1	2	3	4	5
1.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	5.000.000,00	1.800.000,00	36,00
Jumlah		5.000.000,00	1.800.000,00	36,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ,2023

Tabel II.14
Rencana dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Hasil Sewa BMD	1.454.781.500,00	1.678.461.900,00	115,38
Jumlah		1.454.781.500,00	1.678.461.900,00	115,38

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.15
Rencana dan Realisasi Rincian Penerimaan Jasa Giro

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.427.316.892,77	95,15
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000,00	69.526.787,75	46,35
Jumlah		1.650.000.000,00	1.496.843.680,52	90,72

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.16
Rencana dan Realisasi Pendapatan Bunga

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.853.208.223,26	97,06
Jumlah		5.000.000.000,00	4.853.208.223,26	97,06

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.17
Rencana dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
----	--------	----------------------------	-----------	---



1	2	3	4	5
1.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	277.000.000,00	230.590.500,00	83,25
Jumlah		277.000.000,00	230.590.500,00	83,25

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.18
Rencana dan Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	40.000.000,00	222.928.543,51	557,32
Jumlah		40.000.000,00	222.928.543,51	557,32

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.19
Rencana dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	60.571.628,00	1.211,43
Jumlah		5.000.000,00	60.571.628,00	1.211,43

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.20
Rencana dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	236.800.000,00	592.498.796,00	250,21
Jumlah		236.800.000,00	592.498.796,00	250,21

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.21
Rencana dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5



1.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	35.665.000,00	165.555.000,00	464,19
Jumlah		35.665.000,00	165.555.000,00	464,19

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.22
Rencana dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	145.000.000,00	232.843.400,00	160,58
Jumlah		145.000.000,00	232.843.400,00	160,58

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.23
Rencana dan Realisasi Pendapatan BLUD

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan BLUD RSUD Caruban	80.000.000.000,00	107.337.041.735,73	134,17
2	Pendapatan BLUD RSUD Dolopo	110.000.000.000,00	115.157.350.640,29	104,69
3	Pendapatan BLUD Puskesmas Kebonsari	870.819.707,00	785.411.428,00	90,19
4	Pendapatan BLUD Puskesmas Gantrung	1.813.207.950,00	1.939.442.316,00	106,96
5	Pendapatan BLUD Puskesmas Geger	1.204.000.000,00	1.154.281.002,00	95,87
6	Pendapatan BLUD Puskesmas Kaibon	1.027.523.132,00	950.010.977,00	92,46
7	Pendapatan BLUD Puskesmas Mlilir	527.000.000,00	536.181.442,00	101,74
8	Pendapatan BLUD Puskesmas Bangunsari	1.105.197.194,00	1.210.267.900,00	109,51
9	Pendapatan BLUD Puskesmas Dagangan	2.588.771.642,00	2.682.277.933,00	103,61
10	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	891.032.033,00	802.911.183,00	90,11
11	Pendapatan BLUD Puskesmas Wungu	1.056.000.000,00	959.045.971,00	90,82
12	Pendapatan BLUD Puskesmas Mojopurno	1.169.849.169,00	1.123.949.995,00	96,08



No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
13	Pendapatan BLUD Puskesmas Kare	2.172.796.777,00	1.785.038.904,00	82,15
14	Pendapatan BLUD Puskesmas Gemarang	2.133.152.071,00	2.198.711.837,00	103,07
15	Pendapatan BLUD Puskesmas Saradan	1.839.928.597,00	1.816.084.616,00	98,70
16	Pendapatan BLUD Puskesmas Sumbersari	2.046.135.000,00	2.074.691.577,00	101,40
17	Pendapatan BLUD Puskesmas Pilangkenceng	1.702.259.409,00	1.580.258.196,00	92,83
18	Pendapatan BLUD Puskesmas Kretet	1.562.259.000,00	1.691.376.001,00	108,26
19	Pendapatan BLUD Puskesmas Mejayan	1.273.000.000,00	1.223.919.235,00	96,14
20	Pendapatan BLUD Puskesmas Klecorejo	1.174.794.436,00	1.174.454.810,00	99,97
21	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonoasri	1.426.303.746,00	1.416.091.803,00	99,28
22	Pendapatan BLUD Puskesmas Balerejo	2.653.225.815,00	2.568.460.094,00	96,81
23	Pendapatan BLUD Puskesmas Simo	723.257.000,00	655.918.158,00	90,69
24	Pendapatan BLUD Puskesmas Madiun	672.961.810,00	616.625.475,00	91,63
25	Pendapatan BLUD Puskesmas Dimong	535.768.027,00	534.527.582,00	99,77
26	Pendapatan BLUD Puskesmas Sawahan	948.254.600,00	830.897.825,00	87,62
27	Pendapatan BLUD Puskesmas Klagenserut	840.212.790,00	846.458.894,00	100,74
28	Pendapatan BLUD Puskesmas Jiwan	1.057.470.000,00	1.163.022.226,00	109,98
Jumlah		225.015.179.905,00	256.814.709.756,02	114,13

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah sebesar Rp.267.007.769.427,31 atau 114,10% dari rencana Rp.234.005.986.905,00 Realisasi tersebut didukung oleh jenis pendapatan antara lain :

- a. Realisasi Hasil Penjualan BMD Yang tidak dipisahkan sebesar Rp.657.758.000,00 atau 464,65%, berasal dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin, Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan, Hasil



- Penjualan Aset Tetap Lainnya dan Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- b. Realisasi Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 1.800.000,00 atau 36,00% dari plafond.
 - c. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.678.461.900,00 atau 115,38% dari plafond.
 - d. Realisasi Jasa Giro sebesar Rp.1.496.843.680,52 atau 90,72% dari plafond yang terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah dan Jasa Giro di Bendahara.
 - e. Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp. 4.853.208.223,26 atau 97,06% dari plafond.
 - f. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp. 230.590.500,00 atau 83,25% dari plafond.
 - g. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp. 222.928.543,51 atau 557,32% dari plafond.
 - h. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.60.571.628,00 atau 1.211,43% dari plafond.
 - i. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp.592.498.796,00 atau 250,21% dari plafond.
 - j. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp. 165.555.000,00 atau 464,19% dari plafond.
 - k. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.232.843.400,00 atau 160,58% dari plafond.
 - l. Hasil Penerimaan dari BLUD (RSUD Caruban, RSUD Dolopo dan 26 Puskesmas) sebesar Rp. 256.814.709.756,02 atau 114,13% dari plafond.

2.1.2.2 Pendapatan Transfer

Tabel II.24
Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
----	--------	----------------------------	-----------	---



1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.460.272.689.627,00	1.458.363.334.903,00	99,87
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.452.111.009,00	156.645.370.945,00	126,89
Jumlah		1.583.724.800.636,00	1.615.008.705.848,00	101,98

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2022 tercapai sebesar Rp. 1.615.008.705.848,00 atau 101,98% dari rencana sebesar Rp1.583.724.800.636,00.

Tabel II.25
Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Dana Perimbangan	1.276.890.498.627,00	1.275.033.321.703,00	99,85
2.	DID	15.612.627.000,00	15.612.627.000,00	100,00
3.	Dana Desa	167.769.564.000,00	167.717.386.200,00	99,97
Jumlah		1.460.272.689.627,00	1.458.363.334.903,00	99,87

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.26
Rincian Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	102.433.111.939,00	119.275.044.400,00	116,44
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	804.694.534.088,00	804.694.534.088,00	100,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	145.734.576.950,00	141.464.802.169,00	97,07
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	224.028.275.650,00	209.598.941.046,00	93,56



No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	(DAK) Non Fisik			
	Jumlah	1.276.890.498.627,00	1.275.033.321.703,00	99,85

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.27
Rencana dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.687.808.000,00	18.430.873.638,00	190,25
2.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPND	14.471.360.000,00	17.487.516.170,00	120,84
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	24.300.090.939,00	21.908.402.350,00	90,158
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	48.101.051.000,00	55.575.450.242,00	115,54
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.993.000,00	81.993.000,00	100,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.321.200.000,00	2.321.200.000,00	100,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.511.298.000,00	1.511.298.000,00	100,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00
	Jumlah	102.433.111.939,00	119.275.044.400,00	116,44

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

- a) Realisasi Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil yang menonjol pendapatannya adalah Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan komponen lainnya, sesuai dengan Surat Keputusan Bagi Hasil.



- b) Realisasi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 100% dari rencana sebesar Rp.804.694.534.088,00.
- c) Realisasi Dana Transfer Khusus - DAK Fisik mencapai 97,07% dari rencana sebesar Rp. 145.734.576.950,00 dan Realisasi Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik mencapai 93,56% dari rencana sebesar Rp. 224.028.275.650,00, hal ini sesuai dengan Petunjuk Tehnis pelaksanaan DAK di Kabupaten Madiun, adapun perincian DAK sebagai berikut :

Tabel II.28
Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Fisik	145.734.576.950,00	141.464.802.169,00	97,07
2.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Non Fisik	224.028.275.650,00	209.598.941.046,00	93,56
Jumlah		369.762.852.600,00	351.063.743.215,00	94,94

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.29
Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD	5.135.237.000,00	5.135.195.500,00	100,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	37.470.694.000,00	35.122.277.650,00	93,73
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	20.216.802.000,00	20.047.494.885,00	99,16
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.275.000.000,00	4.209.335.000,00	98,46
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.609.556.950,00	1.539.206.230,00	95,63
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan	2.810.942.000,00	2.762.262.078,00	98,27



No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Kefarmasian			
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	7.904.019.000,00	7.065.058.406,00	89,39
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	67.667.000,00	44.150.000,00	65,25
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.275.228.000,00	1.053.370.380,00	82,60
10.	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.583.498.000,00	6.527.229.450,00	99,15
11.	DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	26.654.365.000,00	26.630.000.000,00	99,91
	DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	8.754.318.000,00	8.750.000.000,00	99,95
12.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.854.827.000,00	7.640.765.500,00	97,27
13.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler	5.083.429.000,00	5.083.429.000,00	100,00
14.	DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan	9.721.339.000,00	9.537.378.090,00	98,11
15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	317.655.000,00	317.650.000,00	100,00
Jumlah		145.734.576.950,00	141.464.802.169,00	97,07

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.30
Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK)
untuk Non Fisik

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
----	--------	----------------------------	-----------	---



1	2	3	4	5
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.936.880.000,00	58.314.197.796,00	95,70
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.020.000.000,00	2.100.000.000,00	103,96
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	123.455.233.192,00	112.682.108.792,00	91,27
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.440.675.000,00	2.448.000.000,00	100,30
5.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12.963.280.000,00	11.974.857.000,00	92,38
6.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.170.130.000,00	1.037.700.000,00	88,68
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.104.880.649,00	13.910.436.649,00	106,15
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	-
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	398.680.000,00	0,00	-
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.496.101.668,00	5.496.101.668,00	100
11.	DAK Non Fisik-PK2UKM	440.182.454,00	440.182.454,00	100
12.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	330.199.278,00	330.199.278,00	100
13.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100
14.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	413.357.409,00	413.357.409,00	100
Jumlah		224.028.275.650,00	209.598.941.046,00	93,56

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.31
Rencana dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID)

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	DID	15.612.627.000,00	15.612.627.000,00	100,00
Jumlah		15.612.627.000,00	15.612.627.000,00	100,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.32
Rencana dan Realisasi Dana Desa

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5



No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Dana Desa	167.769.564.000,00	167.717.386.200,00	99,97
Jumlah		167.769.564.000,00	167.717.386.200,00	99,97

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2022 tercapai sebesar Rp. 156.645.370.945,00 atau 126,89% dari rencana sebesar Rp.123.452.111.009,00.

Tabel II.33
Rencana dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil	108.875.857.009,00	142.169.766.945,00	130,58
2	Bantuan Keuangan	14.576.254.000,00	14.475.604.000,00	99,31
Jumlah		123.452.111.009,00	156.645.370.945,00	126,89

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Tabel II.34
Rencana dan Realisasi Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah -
Pendapatan Bagi Hasil

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	33.964.903.592,00	42.391.512.580,00	124,81
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.191.572.779,00	18.325.526.460,00	106,60
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.021.799.314,00	31.787.330.020,00	122,16
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	273.130.482,00	427.030.940,00	156,35
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	31.424.450.842,00	49.238.366.945,00	156,69
Jumlah		108.875.857.009,00	142.169.766.945,00	130,58

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi atau sebesar Rp.14.475.604.000,00 atau 99,31% dari rencana sebesar



Rp.14.576.254.000,00, hal ini sesuai dengan pelaksanaannya di Kabupaten Madiun.

Tabel II.35
Rencana dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi

No	URAIAN	REALISASI
1	2	3
1.	Banprov Dinas Kesehatan	948.674.000,00
2.	Banprov BPPDGS	2.629.980.000,00
3.	Banprov Infrastruktur	10.000.000.000,00
4.	Banprov Jatim Puspa, Desa Berdaya dan BUMDes	100.000.000,00
5.	Banprov Bidang Pendidikan HR Kepala/Guru TK/Paud Non PNS	120.000.000,00
6.	Banprov Bid Pendidikan Thp 1 Th 2022	46.000.000,00
7.	Banprov Bid Pendidikan Thp 2 Tahun 2022	100.000.000,00
8.	Banprov Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	530.950.000,00
Jumlah		14.475.604.000,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

2.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tabel II.36
Rencana dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.095.482.569,00	14.623.102.545,00	131,79
Jumlah		11.095.482.569,00	14.623.102.545,00	131,79

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 131,79% atau sebesar Rp.14.623.102.545,00 dari rencana sebesar Rp.11.095.482.569,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pendapatan Hibah sebesar Rp.14.623.102.545,00 atau tercapai 131,79% dari plafon merupakan hibah untuk PDAM sebesar Rp.6.000.000.000,00 dan IPDMIP sebesar Rp.8.623.102.545,00.

Tabel II.37
Rencana dan Realisasi Lain – lain Rincian Pendapatan Daerah Yang Sah -
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat



No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.095.482.569,00	14.623.102.545,00	131,79
	a. Pendapatan Hibah PDAM		6.000.000.000,00	
	b. Pendapatan Hibah IPDMIP		8.623.102.545,00	

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023

2.1.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Terbatasnya petugas penilai pajak.
- 3) Sistem pendataan yang belum akurat dan perlu membenahan.
- 4) Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah memerlukan penatan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, penyesuaian struktur dan tarif pajak daerah dan penyesuaian obyek retribusi daerah.
- 5) Perbaiki Sistem, sarana prasarana pendukung untuk mekanisme pembayaran pajak guna meningkatkan PAD.

b. Solusi

- 1) Peningkatan pelayanan pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan pajak yang dapat melayani semua jenis pajak, tidak hanya PBB P-2, untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pajak yang saat ini sudah disediakan nomor Whatsapp pelayanan terkait pajak daerah, serta sosialisasi pembayaran maupun kewajiban perpajakan melalui media banner.



- 2) Dilaksanakan diklat penilai pajak, pemeriksa pajak serta juru sita pajak sebagai dasar para petugas verifikasi lapangan dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Memperkuat database PBB P-2 dengan terus melakukan kegiatan mutasi, pemecahan dan pencarian objek pajak baru agar dapat memperluas tax-base dari yang sudah ada
- 4) Bekerjasama dengan pihak akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- 5) Pemanfaatan teknologi Informasi dan Pengembangan kanal-kanal pembayaran pajak daerah serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun, melalui pajak daerah lainnya ataupun retribusi daerah yang ada.

2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Secara mendasar pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022 berpijak pada serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehubungan peraturan yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik struktur maupun mekanismenya, maka Pemerintah Kabupaten Madiun mengambil kebijakan sebagai pedoman bagi perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana Kerja yang terukur dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD yang telah tersusun dipakai sebagai dasar untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara



(PPAS) yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD kemudian disepakati menjadi PPA. KUA dan PPA yang disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

2.2.1.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Kebijakan dalam pengelolaan belanja tercermin dalam rencana dan realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan.

Adapun Rekapitulasi Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel II.38
Rekapitulasi Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.196.806.712.721,00	2.059.524.737.418,60	93,75
5.1	BELANJA OPERASI	1.409.311.991.655,00	1.303.324.777.859,60	92,48
5.1.1	Belanja Pegawai	722.848.038.867,00	688.091.257.009,00	95,19
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	599.816.367.808,00	531.908.720.284,60	88,68
5.1.4	Belanja Subsidi	360.000.000,00	346.150.000,00	96,15
5.1.5	Belanja Hibah	72.977.673.755,00	70.030.130.346,00	95,96
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.309.911.225,00	12.948.520.220,00	97,28
5.2	BELANJA MODAL	342.535.944.866,00	318.862.276.800,00	93,09
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.207.630.019,00	94.074.151.329,00	93,88
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.235.066.618,00	99.215.300.789,00	88,40
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.587.387.325,00	119.490.997.436,00	96,69
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.505.860.904,00	6.081.827.246,00	93,48
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000,00	7.033.196.692,00	50,24
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00	7.033.196.692,00	50,24



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.4	BELANJA TRANSFER	430.958.776.200,00	430.304.486.067,00	99,85
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.448.832.200,00	10.448.832.200,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	420.509.944.000,00	419.855.653.867,00	99,84

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Adapun Belanja Daerah terbagi menjadi 4 Urusan dengan penjelasan sebagai berikut :

2.2.1.1.1 Belanja Operasi.

a. Belanja Pegawai pada Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tabel II.39
Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Wajib Pelayanan Dasar

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	529.531.435.359,00	506.127.614.587,00	95,58
5.1.01	Pendidikan	418.540.802.330,00	398.726.566.469,00	95,27
5.1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	418.540.802.330,00	398.726.566.469,00	95,27
5.1.02	Kesehatan	86.913.895.444,00	85.236.228.444,00	98,07
5.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	86.913.895.444,00	85.236.228.444,00	98,07
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.124.387.429,00	9.165.202.221,00	90,53
5.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.124.387.429,00	9.165.202.221,00	90,53
5.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.380.891.293,00	3.028.198.419,00	89,57
5.1.04.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.380.891.293,00	3.028.198.419,00	89,57

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5 .1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	7.249.848.486,00	6.779.950.832,00	93,52
5 .1.05.1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	5.562.489.286,00	5.271.093.400,00	94,76
5 .1.05.1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.687.359.200,00	1.508.857.432,00	89,42
5 .1.06	Sosial	3.321.610.377,00	3.191.468.202,00	96,08
5 .1.06.1.06.01	Dinas Sosial	3.321.610.377,00	3.191.468.202,00	96,08

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 95,58% atau Rp. 506.127.614.680,08 dari rencana sebesar Rp.529.531.435.359,00 yang teralokasikan pada Perangkat Daerah.

2. Belanja Pegawai Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tabel II.40
Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	51.292.651.550,00	48.269.310.087,00	94,11
5.2.01	Tenaga Kerja	3.878.053.836,00	3.579.439.308,00	92,30
5.2.01 . 2.01.2-07.3-31.3-32.01	Dinas Tenaga Kerja	3.878.053.836,00	3.579.439.308,00	92,30
5.2.03	Pangan	3.575.944.080,00	3.226.137.961,00	90,22
5.2.03 . 2.03.2-09.3-27.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	3.575.944.080,00	3.226.137.961,00	90,22
5.2.05	Lingkungan Hidup	9.518.265.687,00	8.850.692.322,00	92,99
5.2.05 . 2.05.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	9.518.265.687,00	8.850.692.322,00	92,99



KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.554.144.177,00	3.141.726.196,00	88,40
5.2.06 . 2.06.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.554.144.177,00	3.141.726.196,00	88,40
5.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.402.246.715,00	3.343.923.188,00	98,29
5.2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.402.246.715,00	3.343.923.188,00	98,29
5.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.473.191.338,00	3.382.990.169,00	97,40
5.2.08 . 2.08.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.473.191.338,00	3.382.990.169,00	97,40
5.2.09	Perhubungan	5.583.868.932,00	5.528.525.962,00	99,01
5.2.09 . 2.09.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	5.583.868.932,00	5.528.525.962,00	99,01
5.2.10	Komunikasi dan Informatika	4.120.921.858,00	3.966.511.645,00	96,25
5.2.10 . 2.10.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.120.921.858,00	3.966.511.645,00	96,25
5.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.152.403.562,00	5.849.712.715,00	95,08
5.2.11 . 2.11.2-17.3-30.0-00.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6.152.403.562,00	5.849.712.715,00	95,08
5.2.12	Penanaman Modal	2.775.363.933,00	2.723.668.448,00	98,14
5.2.12 . 2.12.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.775.363.933,00	2.723.668.448,00	98,14
5.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	2.602.687.348,00	2.339.963.013,00	89,91
5.2.13 . 2.13.2-19.3-26.0-00.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2.602.687.348,00	2.339.963.013,00	89,91
5.2.14	Statistik	400.000,00	400.000,00	100,00
5 . 2.14 .	Dinas Komunikasi	400.000,00	400.000,00	100,00



KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
2.10.2-16.2-20.2-21.01	dan Informatika			
5.2.17	Perpustakaan	2.655.160.084,00	2.335.619.160,00	87,97
5.2.17 . 2.17.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.655.160.084,00	2.335.619.160,00	87,97

Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar 94,11% atau Rp.48.269.310.087,00 dari rencana sebesar Rp. 51.292.651.550,00 yang teralokasikan pada Perangkat Daerah.

3. Belanja Pegawai Urusan Pilihan

Tabel II.41
Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Pilihan

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5 . 3	Urusan Pilihan	13.338.017.175,00	12.864.764.914,00	96,45
5 . 3.01	Kelautan dan Perikanan	1.000.000,00	800.000,00	80,00
5 . 3.01 . 3.03.3-27.3-25.0-00.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.000.000,00	800.000,00	80,00
5 . 3.02	Pariwisata	3.510.000,00	2.650.000,00	75,50
5 . 3.02 . 2.13.2-19.3-26.0-00.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	3.510.000,00	2.650.000,00	75,50
5 . 3.03	Pertanian	13.324.257.175,00	12.852.264.914,00	96,46
5 . 3.03 . 3.03.3-27.3-25.0-00.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	13.324.257.175,00	12.852.264.914,00	96,46
5 . 3.06	Perdagangan	9.250.000,00	9.050.000,00	97,84
5 . 3.06 . 2.11.2-17.3-30.0-00.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	9.250.000,00	9.050.000,00	97,84

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023



Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Urusan Pilihan sebesar 96,45% atau Rp.12.864.764.914,00 dari rencana sebesar Rp.13.338.017.175,00 yang teralokasikan pada Perangkat Daerah.

4. Belanja Pegawai Urusan Pemerintahan Penunjang Fungsi

Tabel II.42
Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Perangkat Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	128.685.934.783,00	120.829.567.421,00	93,89
5.4.01	Administrasi Pemerintahan	14.782.811.695,00	14.251.640.192,00	96,41
5.4.01.4.01.4-01.5-06.0-00.03	Sekretariat Daerah	14.782.811.695,00	14.251.640.192,00	96,41
5.4.02	Pengawasan	4.311.215.334,00	4.160.495.857,00	96,50
5.4.02.4.02.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	4.311.215.334,00	4.160.495.857,00	96,50
5.4.03	Perencanaan	4.674.002.335,00	4.166.416.001,00	89,14
5.4.03.4.03.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.674.002.335,00	4.166.416.001,00	89,14
5.4.04	Kuangan	34.747.688.033,00	33.326.760.488,00	95,91
5.4.04.4.04.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.651.498.112,00	25.993.880.781,00	97,53
5.4.04.4.04.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pendapatan Daerah	8.096.189.921,00	7.332.879.707,00	90,57
5.4.05	Kepegawaian	3.416.093.489,00	3.034.187.800,00	88,82
5.4.05.4.05.5-03.0-00.0-00.01	Badan Kepegawaian Daerah	3.416.093.489,00	3.034.187.800,00	88,82
5.4.08	Sekretariat DPRD	28.816.996.716,00	28.432.287.499,00	98,66
5.4.08.4.08.4-02.0-	Sekretariat Dewan	28.816.996.716,00	28.432.287.499,00	98,66



KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
00.0-00.04	Perwakilan Rakyat Daerah			
5.4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	35.524.619.691,00	31.375.654.405,00	88,32
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.05	Kecamatan Balerejo	1.812.504.457,00	1.578.398.167,00	87,08
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.06	Kecamatan Dagangan	2.316.994.271,00	2.040.982.901,00	88,09
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.07	Kecamatan Dolopo	3.500.202.421,00	3.248.231.869,00	92,80
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.08	Kecamatan Geger	2.249.905.399,00	1.985.851.819,00	88,26
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.09	Kecamatan Gemarang	1.469.521.984,00	1.351.672.853,00	91,98
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.10	Kecamatan Jiwan	2.132.490.114,00	1.887.425.528,00	88,51
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.11	Kecamatan Kebonsari	1.721.100.574,00	1.683.310.615,00	97,80
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.12	Kecamatan Kare	1.870.334.747,00	1.759.443.271,00	94,07
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.13	Kecamatan Madiun	3.160.735.136,00	2.739.953.516,00	86,69
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.14	Kecamatan Mejayan	3.920.212.811,00	3.521.123.325,00	89,82
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.15	Kecamatan Pilangkenceng	1.799.815.938,00	1.617.810.866,00	89,89
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.16	Kecamatan Sawahan	1.948.694.168,00	1.555.551.277,00	79,83
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.17	Kecamatan Saradan	2.348.294.087,00	2.079.624.957,00	88,56
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.18	Kecamatan Wungu	3.426.821.610,00	2.704.985.696,00	78,94

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA PEGAWAI		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.4.11. 4.11.7-01.0- 00.0-00.19	Kecamatan Wonoasri	1.846.991.974,00	1.621.287.745,00	87,78
5.4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.412.507.490,00	2.082.125.179,00	86,31
5.4.12. 4.12.8-01.0- 00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.412.507.490,00	2.082.125.179,00	86,31

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi Urusan Pemerintahan Penunjang Fungsi sebesar 93,89% atau Rp.120.829.567.421,00 dari rencana sebesar Rp.128.685.934.783,00 yang teralokasikan pada Perangkat Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi

1. Belanja Barang dan Jasa Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tabel II.43
Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah
Menurut Urusan Wajib Pelayanan Dasar

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	408.002.926.950,00	359.164.254.624,50	88,03
5.1.01	Pendidikan	74.144.452.765,00	69.914.942.059,00	94,30
5.1.01. 1.01.1-01.2- 22.0-00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.144.452.765,00	69.914.942.059,00	94,30
5.1.02	Kesehatan	282.068.341.231,00	240.558.763.281,50	85,28
5.1.02. 1.02.1-02.0- 00.0-00.01	Dinas Kesehatan	282.068.341.231,00	240.558.763.281,50	85,28
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.499.682.487,00	31.485.651.581,00	93,99
5.1.03.	Dinas Pekerjaan	33.499.682.487,00	31.485.651.581,00	93,99



KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1.03.1-03.0-00.0-00.01	Umum dan Penataan Ruang			
5.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.787.306.098,00	3.429.611.548,00	90,56
5.1.04. 1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.787.306.098,00	3.429.611.548,00	90,56
5.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9.613.816.457,00	9.092.639.208,00	94,58
5.1.05. 1.05.1-05.0-00.0-00.02	Satuan Polisi Pamong Praja	6.751.332.317,00	6.498.364.061,00	96,25
5.1.05. 1.05.1-05.0-00.0-00.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.862.484.140,00	2.594.275.147,00	90,63
5.1.06	Sosial	4.889.327.912,00	4.682.646.947,00	95,77
5.1.06. 1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial	4.889.327.912,00	4.682.646.947,00	95,77

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023

Realisasi Belanja Operasi pada Belanja Barang Jasa menurut urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 88,03% atau Rp.359.164.254.624,50 dari rencana sebesar Rp. 408.002.926.950,00.

2. Belanja Barang dan Jasa Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tabel II.44
Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Perangkat Daerah Menurut Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	71.891.440.592,00	66.849.677.053,00	92,99



KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.2.01	Tenaga Kerja	2.984.774.914,00	2.752.704.591,00	92,22
5.2.01. 2.01.2-07.3-31.3-32.01	Dinas Tenaga Kerja	2.984.774.914,00	2.752.704.591,00	92,22
5.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	909.893.476,00	667.659.693,00	73,38
5.2.02. 2.08.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	909.893.476,00	667.659.693,00	73,38
5.2.03	Pangan	2.070.617.650,00	1.881.984.589,00	90,89
5.2.03. 2.03.2-09.3-27.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	2.070.617.650,00	1.881.984.589,00	90,89
5.2.04	Pertanahan	347.792.894,00	261.213.050,00	75,11
5.2.04. 1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	347.792.894,00	261.213.050,00	75,11
5.2.05	Lingkungan Hidup	9.299.346.409,00	8.690.519.062,00	93,45
5.2.05. 2.05.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	9.299.346.409,00	8.690.519.062,00	93,45
5.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.125.942.110,00	3.061.986.332,00	97,95
5.2.06. 2.06.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.125.942.110,00	3.061.986.332,00	97,95
5.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.478.163.120,00	6.783.176.190,00	98,87
5.2.07. 2.07.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.478.163.120,00	6.783.176.190,00	98,87
5.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.035.866.508,00	10.489.288.068,00	87,15
5.2.08. 2.08.2-14.2-08.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.035.866.508,00	10.489.288.068,00	87,15
5.2.09	Perhubungan	18.347.700.431,00	17.693.846.247,00	96,44
5.2.09. 2.09.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	18.347.700.431,00	17.693.846.247,00	96,44



KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.2.10	Komunikasi dan Informatika	3.127.606.607,00	3.086.711.909,00	98,69
5.2.10. 2.10.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.127.606.607,00	3.086.711.909,00	98,69
5.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.819.249.475,00	2.756.763.308,00	97,78
5.2.11. 2.11.2-17.3-30.0-00.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	2.819.249.475,00	2.756.763.308,00	97,78
5.2.12	Penanaman Modal	1.911.081.818,00	1.841.812.549,00	96,38
5. 2.12. 2.12.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.911.081.818,00	1.841.812.549,00	96,38
5.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	3.827.566.891,00	3.525.626.882,00	92,11
5.2.13. 2.13.2-19.3-26.0-00.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	3.827.566.891,00	3.525.626.882,00	92,11
5. 2.14	Statistik	348.153.960,00	347.080.216,00	99,69
5. 2.14 . 2.10.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	348.153.960,00	347.080.216,00	99,69
5.2.15	Persandian	98.184.648,00	95.651.764,00	97,42
5.2.15. 2.10.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	98.184.648,00	95.651.764,00	97,42
5. 2.16	Kebudayaan	1.681.901.687,00	1.560.099.761,00	92,76
5.2.16. 1.01.1-01.2-22.0-00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.681.901.687,00	1.560.099.761,00	92,76
5.2.17	Perpustakaan	1.229.948.459,00	1.108.643.142,00	90,14
5.2.17. 2.17.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.229.948.459,00	1.108.643.142,00	90,14
5.2.18	Kearsipan	247.649.535,00	244.909.700,00	98,89
5.2.18. 2.17.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	247.649.535,00	244.909.700,00	98,89

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2023

Realisasi Belanja Operasi pada Belanja Barang dan Jasa menurut urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar 92,99% atau Rp.66.849.677.053,00 dari rencana sebesar Rp. 71.891.440.592,00.



3. Belanja Barang dan jasa Urusan Pilihan

Tabel II.45
Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Perangkat Daerah
Menurut Urusan Pilihan

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.3	Urusan Pilihan	14.364.178.939,00	13.556.481.036,00	94,38
5.3.01	Kelautan dan Perikanan	129.214.050,00	112.162.040,00	86,80
5.3.01. 3.03.3-27.3-25.0-00.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	129.214.050,00	112.162.040,00	86,80
5.3.02	Pariwisata	2.531.717.958,00	2.347.849.099,00	92,74
5.3.02. 2.13.2-19.3-26.0-00.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2.531.717.958,00	2.347.849.099,00	92,74
5.3.03	Pertanian	7.949.476.710,00	7.490.900.420,00	94,23
5.3.03. 2.03.2-09.3-27.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	522.481.707,00	481.163.396,00	92,09
5.3.03. 3.03.3-27.3-25.0-00.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	7.426.995.003,00	7.009.737.024,00	94,38
5.3.06	Perdagangan	3.231.358.666,00	3.192.972.357,00	98,81
5.3.06. 2.11.2-17.3-30.0-00.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	3.231.358.666,00	3.192.972.357,00	98,81
5.3.07	Perindustrian	466.137.555,00	366.543.920,00	78,63
5.3.07. 2.01.2-07.3-31.3-32.01	Dinas Tenaga Kerja	466.137.555,00	366.543.920,00	78,63
5.3.08	Transmigrasi	56.274.000,00	46.053.200,00	81,84
5. 3.08 . 2.01.2-07.3-31.3-32.01	Dinas Tenaga Kerja	56.274.000,00	46.053.200,00	81,84

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Belanja Operasi pada Belanja Barang dan Jasa menurut urusan Pilihan sebesar 94,38% atau Rp.13.556.481.036,00 dari rencana sebesar Rp.14.364.178.939,00.



4. Belanja Barang dan jasa Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tabel II.46
Belanja Barang Jasa pada Belanja Operasi Perangkat Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	105.557.821.327,00	92.338.307.571,10	87,48
5.4.01	Administrasi Pemerintahan	25.976.411.125,00	24.476.949.695,00	94,23
5.4.01.4.01.4-01.5-06.0-00.03	Sekretariat Daerah	25.976.411.125,00	24.476.949.695,00	94,23
5.4.02	Pengawasan	3.060.419.553,00	2.878.771.221,00	94,06
5.4.02.4.02.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat	3.060.419.553,00	2.878.771.221,00	94,06
5.4.03	Perencanaan	8.045.941.520,00	6.968.947.228,00	86,61
5.4.03.4.03.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.045.941.520,00	6.968.947.228,00	86,61
5.4.04	Keuangan	18.084.059.887,00	12.806.428.975,10	70,82
5.4.04.4.04.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.107.781.521,00	9.266.520.770,10	65,68
5.4.04.4.04.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pendapatan Daerah	3.976.278.366,00	3.539.908.205,00	89,03
5.4.05	Kepegawaian	4.938.287.168,00	3.982.552.320,00	80,65
5.4.05.4.05.5-03.0-00.0-00.01	Badan Kepegawaian Daerah	4.938.287.168,00	3.982.552.320,00	80,65
5.4.07	Penelitian dan Pengembangan	1.344.547.934,00	1.281.823.526,00	95,33
5.4.07.4.03.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.344.547.934,00	1.281.823.526,00	95,33
5.4.08	Sekretariat DPRD	28.121.557.456,00	25.193.251.028,00	89,59
5.4.08.4.08.4-02.0-00.0-00.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.121.557.456,00	25.193.251.028,00	89,59



KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.4.11.	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	19.648.787.626,00	17.681.281.259,00	89,99
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.05	Kecamatan Balerejo	479.913.515,00	474.310.510,00	98,83
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.06	Kecamatan Dagangan	636.268.103,00	616.379.945,00	96,87
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.07	Kecamatan Dolopo	1.610.097.197,00	1.533.020.359,00	95,21
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.08	Kecamatan Geger	631.252.506,00	597.876.672,00	94,71
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.09	Kecamatan Gemarang	384.053.333,00	378.778.211,00	98,63
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.10	Kecamatan Jiwan	565.494.196,00	562.397.458,00	99,45
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.11	Kecamatan Kebonsari	601.944.670,00	573.834.169,00	95,33
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.12	Kecamatan Kare	444.942.841,00	417.649.099,00	93,87
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.13	Kecamatan Madiun	944.610.665,00	877.522.449,00	92,90
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.14	Kecamatan Mejayan	2.128.264.720,00	2.045.894.882,00	96,13
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.15	Kecamatan Pilangkenceng	592.536.963,00	570.078.295,00	96,21
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.16	Kecamatan Sawahan	571.018.794,00	545.294.354,00	95,49

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA BARANG DAN JASA		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.17	Kecamatan Saradan	566.951.022,00	557.796.529,00	98,39
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.18	Kecamatan Wungu	1.597.282.001,00	1.506.676.061,00	94,33
5.4.11. 4.11.7- 01.0-00.0- 00.19	Kecamatan Wonoasri	569.775.216,00	560.376.904,00	98,35
5.4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	3.662.190.942,00	2.931.697.681,00	80,05
5.4.12. 4.12.8- 01.0-00.0- 00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.662.190.942,00	2.931.697.681,00	80,05

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Belanja Operasi pada Belanja Barang dan Jasa menurut urusan Pemerintahan Penunjang Fungsi sebesar 87,48% atau Rp.92.338.307.571,10 dari rencana sebesar Rp.105.557.821.327,00.

c. Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Operasi

Tabel II.47
Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Operasi

KODE REK	URAIAN	BELANJA OPERASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BATUAN SOSIAL		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.1.4	Belanja Subsidi	360.000.000,00	346.150.000,00	96,15
5.1.5	Belanja Hibah	72.977.673.755,00	70.030.130.346,00	95,96
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	13.309.911.225,00	12.948.520.220,00	97,28
Jumlah		86.647.584.980,00	83.324.800.566,00	96,17

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023



Realisasi Belanja Operasi Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Operasi sebesar Rp.83.324.800.566,00 atau 96,17% dari rencana sebesar Rp.86.647.584.980,00.

2.2.1.1.2 Belanja Modal

a. Belanja Modal Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tabel II.48

Belanja Modal Satuan Kerja Menurut Urusan Wajib Pelayanan Dasar

KODE REK	URAIAN	BELANJA MODAL		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	312.894.817.363,00	292.110.745.740,00	93,36
5.1.01	Pendidikan	72.973.246.337,00	70.414.174.790,00	96,49
5.1.01. 1.01.1-01.2-22.0-00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.973.246.337,00	70.414.174.790,00	96,49
5.1.02	Kesehatan	104.019.990.374,00	90.043.064.912,00	86,56
5.1.02. 1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	104.019.990.374,00	90.043.064.912,00	86,56
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.434.870.358,00	108.190.161.391,00	97,09
5.1.03. 1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.434.870.358,00	108.190.161.391,00	97,09
5.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	493.688.350,00	491.510.550,00	99,56
5.1.04. 1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	493.688.350,00	491.510.550,00	99,56
5.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.638.699.441,00	22.686.142.047,00	95,97
5.1.05. 1.05.1-05.0-00.0-00.02	Satuan Polisi Pamong Praja	1.492.882.497,00	1.490.170.792,00	99,82
5.1.05. 1.05.1-05.0-00.0-00.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.145.816.944,00	21.195.971.255,00	95,71
5.1.06	Sosial	334.322.503,00	285.692.050,00	85,45
5.1.06. 1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial	334.322.503,00	285.692.050,00	85,45



Realisasi pada Belanja Modal menurut urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 93,36% atau Rp.292.110.745.740,00 dari rencana sebesar Rp.312.894.817.363,00.

b. Belanja Modal Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tabel II.49
Belanja Modal Perangkat Daerah Menurut Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

KODE REK	URAIAN	BELANJA MODAL		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	20.085.372.947,00	17.742.785.132,00	88,34
5 . 2.01	Tenaga Kerja	275.177.445,00	252.694.050,00	91,83
5 . 2.01 . 2.01.2-07.3-31.3-32.01	Dinas Tenaga Kerja	275.177.445,00	252.694.050,00	91,83
5 . 2.03	Pangan	373.539.350,00	369.261.000,00	98,85
5 . 2.03 . 2.03.2-09.3-27.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	373.539.350,00	369.261.000,00	98,85
5 . 2.05	Lingkungan Hidup	7.897.082.128,00	6.613.226.590,00	83,74
5 . 2.05 . 2.05.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	7.897.082.128,00	6.613.226.590,00	83,74
5 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	354.589.949,00	343.464.893,00	96,86
5 . 2.06 . 2.06.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	354.589.949,00	343.464.893,00	96,86
5 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	431.699.626,00	425.946.750,00	98,67
5 . 2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	431.699.626,00	425.946.750,00	98,67
5 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.754.847.194,00	1.189.147.200,00	67,76



KODE REK	URAIAN	BELANJA MODAL		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5 . 2.08 . 2.08.2- 14.2-08.0- 00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.754.847.194,00	1.189.147.200,00	67,76
5 . 2.09	Perhubungan	1.926.441.041,00	1.580.785.526,00	82,06
5 . 2.09 . 2.09.2- 15.0-00.0- 00.01	Dinas Perhubungan	1.926.441.041,00	1.580.785.526,00	82,06
5 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	1.538.072.435,00	1.534.903.505,00	99,79
5 . 2.10 . 2.10.2- 16.2-20.2- 21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.538.072.435,00	1.534.903.505,00	99,79
5 . 2.12	Penanaman Modal	384.001.798,00	383.223.875,00	99,80
5 . 2.12 . 2.12.2- 18.0-00.0- 00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	384.001.798,00	383.223.875,00	99,80
5 . 2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	182.488.816,00	180.067.100,00	98,67
5 . 2.13 . 2.13.2- 19.3-26.0- 00.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	182.488.816,00	180.067.100,00	98,67
5 . 2.15	Persandian	14.953.246,00	14.918.400,00	99,77
5 . 2.15 . 2.10.2- 16.2-20.2- 21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.953.246,00	14.918.400,00	99,77
5 . 2.16	Kebudayaan	127.500.000,00	69.800.000,00	54,75
5 . 2.16 . 1.01.1- 01.2-22.0- 00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	127.500.000,00	69.800.000,00	54,75
5 . 2.17	Perpustakaan	4.790.403.454,00	4.750.936.243,00	99,18
5 . 2.17 . 2.17.2- 23.2-24.0- 00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.790.403.454,00	4.750.936.243,00	99,18
5 . 2.18	Kearsipan	34.576.465,00	34.410.000,00	99,52
5 . 2.18 . 2.17.2- 23.2-24.0- 00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.576.465,00	34.410.000,00	99,52



Realisasi pada Belanja Modal menurut urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar 88,34% atau Rp.17.742.785.132,00 dari rencana sebesar Rp.20.085.372.947,00.

c. Belanja Modal Urusan Pilihan

Tabel II.50
Belanja Modal Perangkat Daerah Menurut Urusan Pilihan

KODE REK	URAIAN	BELANJA MODAL		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5.3	Urusan Pilihan	3.156.063.663,00	3.044.246.857,00	96,46
5.3.02	Pariwisata	562.042.492,00	558.463.590,00	99,36
5.3.02. 2.13.2-19.3-26.0-00.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	562.042.492,00	558.463.590,00	99,36
5.3.03	Pertanian	2.517.191.441,00	2.420.122.267,00	96,14
5.3.03. 2.03.2-09.3-27.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	185.917.891,00	184.400.000,00	99,18
5.3.03. 3.03.3-27.3-25.0-00.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.331.273.550,00	2.235.722.267,00	95,90
5.3.06	Perdagangan	76.829.730,00	65.661.000,00	85,46
5.3.06. 2.11.2-17.3-30.0-00.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	76.829.730,00	65.661.000,00	85,46

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023

Realisasi Belanja Modal menurut urusan Pilihan sebesar 96,46% atau Rp.3.044.246.857,00 dari rencana sebesar Rp.3.156.063.663,00.

d. Belanja Modal Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tabel II.51
Belanja Modal Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

KODE REK	URAIAN	BELANJA MODAL		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	6.399.690.893,00	5.964.499.071,00	93,20



KODE REK	URAIAN	BELANJA MODAL		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	1.529.800.877,00	1.493.515.231,00	97,63
5 . 4.01 . 4.01.4-01.5- 06.0-00.	Sekretariat Daerah	1.529.800.877,00	1.493.515.231,00	97,63
5 . 4.02	Pengawasan	23.514.684,00	23.509.800,00	99,98
5 . 4.02 . 4.02.6-01.0- 00.0-00.01	Inspektorat	23.514.684,00	23.509.800,00	99,98
5 . 4.03	Perencanaan	337.295.681,00	273.343.400,00	81,04
5 . 4.03 . 4.03.5-01.5- 05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	337.295.681,00	273.343.400,00	81,04
5 . 4.04	Keuangan	1.219.713.563,00	1.059.395.448,00	86,86
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0- 00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	704.926.316,00	667.871.976,00	94,74
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0- 00.0-00.02	Badan Pendapatan Daerah	514.787.247,00	391.523.472,00	76,06
5 . 4.05	Kepegawaian	114.204.452,00	113.422.020,00	99,31
5 . 4.05 . 4.05.5-03.0- 00.0-00.01	Badan Kepegawaian Daerah	114.204.452,00	113.422.020,00	99,31
5 . 4.07	Penelitian dan Pengembangan	10.009.061,00	10.000.000,00	99,91
5 . 4.07 . 4.03.5-01.5- 05.0-00.01 . 2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.009.061,00	10.000.000,00	99,91
5 . 4.08	Sekretariat DPRD	1.142.138.143,00	1.117.237.176,00	97,82
5 . 4.08 . 4.08.4-02.0- 00.0-00.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.142.138.143,00	1.117.237.176,00	97,82
5 . 4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	1.821.735.182,00	1.674.221.051,00	91,90
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.05	Kecamatan Balerejo	75.496.446,00	75.394.500,00	99,86
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.07	Kecamatan Dolopo	195.076.653,00	194.074.637,00	99,49
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.08	Kecamatan Geger	44.376.255,00	44.275.000,00	99,77
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.09	Kecamatan Gemarang	177.173.705,00	37.240.500,00	21,02

KODE REK	URAIAN	BELANJA MODAL		%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.10	Kecamatan Jiwan	31.319.550,00	31.313.100,00	99,98
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.12	Kecamatan Kare	42.067.742,00	41.605.020,00	98,90
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.13	Kecamatan Madiun	281.417.706,00	280.456.170,00	99,66
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.14	Kecamatan Mejayan	492.802.756,00	491.818.374,00	99,80
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.15	Kecamatan Pilangkenceng	28.357.614,00	28.149.600,00	99,27
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.16	Kecamatan Sawahan	28.464.727,00	28.354.950,00	99,61
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.18	Kecamatan Wungu	381.148.924,00	378.516.200,00	99,31
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0- 00.0-00.19	Kecamatan Wonoasri	44.033.104,00	43.023.000,00	97,71
5 . 4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	201.279.250,00	199.854.945,00	99,29
5 . 4.12 . 4.12.8-01.0- 00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	201.279.250,00	199.854.945,00	99,29

Realisasi Belanja Modal menurut urusan Pemerintahan Penunjang Fungsi sebesar 93,20% atau Rp.5.964.499.071,00 dari rencana sebesar Rp.6.399.690.893,00.

2.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Tabel II.52
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000,00	7.033.196.692,00	50,24
Jumlah		14.000.000.000,00	7.033.196.692,00	50,24

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023



Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.7.033.196.692,00 atau sebesar 50,24% dari rencana.

2.2.1.1.4 Belanja Transfer

Tabel II.53
Rencana dan Realisasi Belanja Transfer

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.448.832.200,00	10.448.832.200,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	420.509.944.000,00	419.855.653.867,00	99,84
Jumlah		430.958.776.200,00	430.304.486.067,00	99,85

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp.430.304.486.067,00 atau sebesar 99,85% dari rencana.

2.2.1.2 Belanja Berdasarkan Urusan

Tabel II.54
Rencana dan Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA	2.196.806.712.721,00	2.059.524.737.418,60	93,75
5 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.307.454.745.249,00	1.212.968.548.139,50	92,77
5 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	147.852.294.089,00	137.042.790.405,00	92,69
5 . 3	Urusan Pilihan	40.384.801.428,00	38.499.121.352,00	95,33
5 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	701.114.871.955,00	671.014.277.522,10	95,71

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi pada Tahun Anggaran 2022 dibagi menurut 4 (empat) Urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang realisasinya



93,75% atau sebesar Rp.2.059.524.737.418,60 dari rencana sebesar Rp. 2.196.806.712.721,00. sesuai tabel diatas.

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan dalam pengelolaan pembiayaan tercermin dalam rencana dan realisasi pembiayaan, hal ini sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Tabel II.55
Pembiayaan Pada Sisi Penerimaan Kabupaten Madiun

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	298.268.150.406,00	298.268.150.405,73	100,00
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	36.900.000,00	0,00
Jumlah		298.268.150.406,00	298.305.050.405,73	100,01

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023

Realisasi Penerimaan Pembiayaan mencapai 100,01% atau sebesar Rp.298.305.050.405,73 dari rencana sebesar Rp.298.268.150.406,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel II.56
Pembiayaan Pada Sisi Pengeluaran

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
2.	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00
JUMLAH		26.500.000.000,00	26.500.000.000,00	100,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023



Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.26.500.000.000,00 atau 100,00 % dari rencana sebesar Rp.26.500.000.000,00.

Dengan demikian secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan sebesar Rp.2.007.057.652.785,10 dikurangi Realisasi Belanja sebesar Rp.2.059.524.737.418,60 terdapat Defisit sebesar Rp.52.467.084.633,50 apabila ditambah dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp.271.805.050.405,73 maka diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp.219.337.965.772,23 lebih kecil dibandingkan Tahun 2021. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebesar Rp.298.268.150.405,73.

2.2.2 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Regulasi pengelolaan keuangan daerah atau perubahannya serta pagu definitif dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi disampaikan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan.
- 2) Proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan pada perangkat daerah belum maksimal sehingga banyak dilakukan perubahan/pergeseran anggaran di tahun berjalan.
- 3) Kurangnya pemahaman Pengelola Keuangan Perangkat Daerah terhadap regulasi baru dalam hal perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga menghambat proses administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Perubahan regulasi dan aplikasi pengelolaan keuangan Daerah kurang didukung dengan peningkatan SDM.

b. Solusi

- 1) Menyampaikan surat langsung maupun usulan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi pada saat rakor pengelolaan keuangan daerah terkait regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pagu definitif dana transfer bisa disampaikan lebih awal atau sebelum Perda APBD



ditetapkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan di daerah.

- 2) Persiapan dan peningkatan koordinasi yang lebih intens dan terjadwal di internal Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program kegiatan Perangkat Daerah.
- 3) Dilakukan sosialisasi dan rapat koordinasi terhadap Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah terkait perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
- 4) Pemberian sosialisasi, bimtek atau pelatihan untuk melaksanakan regulasi dan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan didampingi konsultan yang berkompeten.



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni perencanaan strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya dimaksud dapat berupa sumber daya manusia dan anggaran. Untuk mendapatkan aparatur Negara yang mendapatkan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja / kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada tujuan organisasi.



Dalam praktiknya memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah. Sampai dengan saat ini masih ditemukan :

1. sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi,
2. desain program/kegiatan tidak memiliki daya ungkit/dampak bagi pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan desain strategi/program/kegiatan maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis (*logic model*) maupun kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tepat. Pedoman ini akan mengarahkan instansi pemerintah untuk membangun model berpikir logis yang benar dalam rangka mendapatkan kinerja organisasi yang dijabarkan secara baik kepada individu, serta desain strategi/program/kegiatan yang tepat sasaran.

Untuk mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi, Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara elektronik, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam



perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan.

Selanjutnya hubungan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dengan tolok ukur indikator keberhasilan dapat digambarkan pada tabel di berikut :



Tabel III.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Keberhasilan

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK							
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
MISI 1 Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparaturn pemerintah Kabupaten Madiun	<i>Membangun Harmonisasi sosial yang berpondasi pada nilai religius dan kearifan lokal</i>		<i>Indeks Kesalehan Sosial</i>	67,55 (Baik)	68,16 (Baik)	100,90	
		Menguatkan karakteristik kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100 %	100 %	100	Urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal		Terwujudnya nilai – nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi	78,03	80,88	103,65	Unsur Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Indeks Solidaritas	87,01	88,99	102,27	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
		Terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Stabilitas	78,18	81,22	103,88	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik	<i>Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk pelayanan publik</i>		<i>Indeks Reformasi Birokrasi (RB)</i>	73,50 (BB)	83,41 (A)	113,48	
		Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	A (80,01)	BB (76,03)	95,02	Unsur Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan Inspektorat Unsur Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	100	Unsur Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Unsur Pengawasan Inspektorat
			Tingkat Maturitas SPIP	3,4 (Level 3)	3,265 (Level 3)	96,02	Unsur Pengawasan Inspektorat



Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	81,0	64,79	79,98	Unsur Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital	Indeks SPBE	2,70	3,21	118,45	Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai IKM	83,95	83,34	99,27	Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Unsur Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan		<i>Angka Pertumbuhan Ekonomi</i>	4,53	4,58	101,10	
			<i>Angka Kemiskinan</i>	11,81	10,79	109,45	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)	4 %	5,01 %	125,2	Urusan Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Urusan Perindustrian Dinas Tenaga Kerja



Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
berkelanjutan		dan mandiri					Urusan Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Mikro
			Pengeluaran Wisatawan	Rp. 344 Milyar	Rp. 458,5 Milyar	133,28	Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Oleh Raga
			Persentase Desa Mandiri	32,3 %	47,47%	146,98	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	77 (Baik)	77,09 (baik)	100,11	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
							<i>Urusan Perhubungan</i> Dinas Perhubungan
		Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,02	70,45	108,35	<i>Urusan Lingkungan Hidup</i> Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	160	113,40	141,09	<i>Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i> Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,32	5,84	73,97	<i>Urusan Tenaga Kerja</i> Dinas Tenaga Kerja
MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	<i>Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</i>		<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	72,00 (Tinggi)	72,39 (Tinggi)	101,79	



Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
		Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita makanan	Rp. 550.000	Rp. 488.619	88,83	Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Urusan Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Urusan Sosial Dinas Sosial
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,80	0,80	100	Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD caruban RSUD Dolopo
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,80	92,14	100,37	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKB, PPPA



Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022			KETERANGAN URUSAN / OPD
				Target	Realisasi	%	
			Indeks Pendidikan	0,635	0,631	99,37	<i>Urusan Pendidikan</i> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A.1 Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

Kesalehan sosial merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama pada pemeluk agama. Aspek kesalehan sosial meliputi solidaritas sosial (kesediaan untuk memberi dan peduli kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan) , toleransi (mampu menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, tidak memaksakan nilai pada orang lain serta tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda), kerjasama (melakukan pekerjaan atau aktifitas secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan atau mencapai tujuan bersama), adil (perilaku yang mampu bertindak sesuai proporsi, tersedianya kesempatan untuk mencapai tujuan bersama pula), dan stabilitas (tindakan yang berhubungan dengan orang lain tanpa mengganggu, merugikan dan melanggar kesejahteraan orang lain). Definisi Operasional, kesalehan sosial adalah skor yang diperoleh dari responden sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, yang diukur dengan; (1) Kepedulian Sosial (*caring, giving*), (2) Relasi Antar manusia (kebhinnekaan), (3) etika dan budi pekerti, (4) Pelestarian Lingkungan, (5) Kepatuhan kepada Negara dan Pemerintah. Realitas dalam kehidupan beragama khususnya di Kabupaten Madiun, masih ada kesenjangan dalam keberagaman masyarakat yaitu : Pertama, belum sepenuhnya nilai-nilai ajaran keagamaan menjiwai perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari, Kedua Agama sebagai daya tangkal terhadap kecenderungan manusia berperilaku menyimpang dan bersikap anti sosial belum cukup optimal, Ketiga, kegiatan sosial keagamaan belum maksimal atau belum mencerminkan interaksi sosial dalam kehidupan beragama sehingga relasi sosial dalam kehidupan beragama belum maksimal dalam berkontribusi dalam pembangunan. Nilai Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Madiun tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.2
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Kesalehan Sosial	61,67 (baik)	61,90 (baik)	65,86 (baik)	67,55 (baik)	68,16 (baik)	100,90

A.2 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, transformasi digital, deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalitas SDM, dan efektivitas pengawasan internal. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

Sesuai dengan Permen PAN-RB nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilakukan reuiu atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Tujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang semakin membaik. Selain itu, juga meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun



Tabel III.3
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	70,45	77,74	83,27 (A)	73,50 (BB)	83,41 (A)	113,48

A.3 Angka Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto. Angka kontinyu pertumbuhan ekonomi rata-rata tahun 2022 sebesar 4,58%.

Tabel III.4
Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,42	-0,12	3,32	4,53	4,58	101,10

A.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu bagian dari masalah klasik pembangunan yang belum terpecahkan sampai sekarang karena bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan lintas sektoral. Miskin



merupakan suatu kondisi belum terpenuhinya hak – hak dasar kebutuhan primer individu secara manusiawi dan belum mampu mengembangkan kehidupannya secara lebih bermartabat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, dan budaya.

Tabel III.5
Angka Kemiskinan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Angka Kemiskinan	9,6	10,38	11,91	11,81	10,79	109,45

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan atau yang dikenal dengan istilah P1 yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami kenaikan dan indeks Keparahan (P2) yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin berada dilevel diatasnya dari tahun sebelumnya.

A.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM merupakan indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik.



Tabel III.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	71,73	71,88	72,00 (tinggi)	72,39 (tinggi)	101,79

Dari tabel di atas terlihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di Kabupaten Madiun telah fokus terhadap pembangunan manusianya, sehingga dapat meningkatkan mutu penduduk Kabupaten Madiun sebagai subyek pembangunan.

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKD)

B.1 Persentase budaya daerah yang dilestarikan

Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam untuk melestarikan budaya daerah yaitu dengan melakukan update data pokok kebudayaan yang meliputi 10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan. Tahun 2019 ada pembaharuan data melalui data pokok kebudayaan yang dipersiapkan dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (PPKD) Kabupaten Madiun, berdasarkan klasifikasi obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan persentase seni dan budaya yang dikembangkan, baru dilakukan pengembangan pada tahun 2019. Prioritas pada penataan data pokok kebudayaan yang disesuaikan dengan obyek pemajuan kebudayaan, sebagai tahap awal dalam melakukan pengembangan.



Tabel III.7
Persentase budaya daerah yang dilestarikan Kabupaten Madiun
Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Persentase budaya daerah yang dilestarikan	57,57	99,54	100	100	100	100

B.2 Indeks Toleransi

Toleransi adalah kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda. Toleransi termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Atau toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat berbeda dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Toleransi merujuk pada sikap saling menghargai antar sesama. Sikap menghargai ini penting untuk lingkungan yang damai dan beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan, serta mencegah konflik dari masyarakat. Toleransi, khususnya Toleransi umat beragama merupakan pilar toleransi nasional, yang diawali lingkungan terkecil yakni desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, yang harus terus dipelihara. Toleransi hidup antar umat beragama berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, toleransi antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman serta perasaan orang lain. Multikultural masyarakat Indonesia, seperti juga di Kabupaten Madiun tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Sehingga sudah pasti ada perbedaan-perbedaan, dengan perbedaan tersebut apabila tidak dipelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama, antar masyarakat yang bertentangan dengan



nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong. Eksistensi masyarakat Kabupaten Madiun dapat dipastikan dengan adanya perbedaan dalam berbagai segi kehidupan, seperti halnya masyarakat pada umumnya. Hal itu merupakan suatu realitas sosial yang tidak dapat disangkal dan dielakkan, yakni kondisi rukun atau konflik. Termasuk dalam hubungan kehidupan beragama, hubungan pemeluk/penganut agama terlihat dalam pola hubungan/interaksi sosial berupa aktivitas sosial keagamaan dan bentukbentuk kerjasama maupun kompromi dan toleransi. Pola-pola hubungan sosial berjalan harmonis, seiring dengan faktor-faktor yang melandasi terjadinya pola interaksi seperti ketidakmampuan dalam membangun rumah diwujudkan dengan pola kerjasaan yakni gotong royong, perasaan senasib sepenanggungan karena tetangga yang akit dan terkena musibah bencana dengan memberikan bantuan, merupakan wujud dari pola solidaritas sosial, menyelesaikan persoalan dan usaha menghindari perselisihan/konflik guna mencapai tujuan bersama. Diantaranya dalam berbagai bentuk kompromi dan saling menjaga hubungan agar tercipta kondisi harmonis, tetap saling menghargai dan menghormati dalam aktivitas kehidupan dan peribadatan sebagai implementasi dan perwujudan toleransi yang telah dimiliki masyarakat Kabupaten Madiun.

Tabel III.8
Indeks Toleransi Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Toleransi	77,40 (toleran)	78,03 (toleran)	80,88 (toleran)	103,65

B.3 Indeks Solidaritas

Indeks solidaritas adalah salah satu bentuk pengukuran bagaimana solidaritas dan semua parameter yang didalamnya dapat diukur dan disajikan sebagai bentuk rekomendasi dan strategi dalam peningkatan solidaritas di masyarakat Kabupaten Madiun sehingga dapat menjadi bahan



untuk menyusun kebijakan untuk memperkuat solidaritas pada masyarakat sehingga mampu meminimalisasi terjadinya konflik pada masyarakat. Indeks solidaritas masyarakat Kabupaten Madiun yang dipersepsikan oleh masyarakat berada pada kategori tinggi. Hal ini terlihat dari Indeks Solidaritas yang diperoleh yaitu berkisar di antara 71,00 – 100,00.

Tabel III.9
Indeks Solidaritas Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Solidaritas	95,70	87,01	88,99	102,27

Upaya-upaya untuk mempertahankan solidaritas sosial yang sudah ada perlu dilakukan secara konsisten terutama mempertahankan indikator-indikator dalam solidaritas sosial itu sendiri, rasa saling percaya di masyarakat dipertahankan dengan melakukan kegiatan yang bernuansa pertemanan/persahabatan antar tetangga dan perlu upaya untuk mempertahankan keinginan individu untuk bermanfaat/berkontribusi pada orang lain di masyarakat, dengan melakukan upaya-upaya kegiatan yang bernuansa sosial antar tetangga.

B.4 Indeks Stabilitas

Stabilitas merupakan salah satu kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat. Agar dapat tercipta suatu kondisi Stabilitas yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan Stabilitas. Kondisi Stabilitas yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Harapan yang diinginkan yakni tercipta kondisi Stabil. Pengertian Stabil adalah sikap tenang dan teratur,



atau kondisi yang tenang atau yang lebih mudah untuk diartikan adalah suatu kondisi yang tidak semrawut dan mendukung untuk terjadinya suatu aktivitas atau tujuan tertentu.

Tabel III.10
Indeks Stabilitas Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Stabilitas	78,37 (stabil)	78,18	81,22	103,88

B.5 Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun. Hasil penilaian atas akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2019-2022 pada tabel berikut :

Tabel III.11
Nilai SAKIP Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Nilai SAKIP	71,00 (BB)	72,28 (BB)	73,06 (BB)	80,01 (A)	76,03 (BB)	95,02

B.6 Opini atas Audit BPK

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan



keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian buktibukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun mulai Tahun 2014 sampai tahun 2022 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Madiun telah meraih predikat WTP sebanyak 10 kali berturut-turut. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah.

Tabel III.12
Opini atas Audit BPK Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100

B.7 Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas SPIP pada tahun 2022 dapat terealisasi sebesar 3,265 poin, dimana semua parameter pengukuran maturitas yaitu Lingkungan pengendalian (*control environment*), Penilaian risiko (*risk assessment*), Kegiatan pengendalian (*control activities*), Informasi dan komunikasi (*information and communication*) dan Kegiatan pemantauan (*monitoring activities*) telah dilakukan secara mandiri serta divalidasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dimana Nilai Baseline Maturitas SPIP pada tingkat terdefinisi (Level 3) dimana Perangkat Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.



Tabel III.13
Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Tingkat Maturitas SPIP (Level 3) (Level 3)	3,303 (Level 3)	3,4 (Level 3)	3,265 (Level 3)	96,02

B.8 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2020 indeks profesionalitas ASN 80,48 sedangkan tahun 2021 turun drastis menjadi 48,77. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi BKN yang dulu penghitungan di lakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, sejak Oktober 2021 penilaian dilakukan oleh BKN pusat.

Tabel III.14
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Profesionalitas ASN	79,05	80,48	48,77	80,5	64,79	79,98

B.9 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga



diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau EGovernment, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Tabel III.15
Indeks SPBE Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,21	2,70	3,21	118,45

B.10 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.



Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Tidak sedikit kendala dan faktor-faktor lain yang mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Masih banyak ditemui keluhan-keluhan dari stakeholder dan media massa yang menilai bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah belumlah maksimal. Rendahnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap implementasi Standar Pelayanan Publik adalah kendala utama kualitas pelayanan di seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Madiun (setidaknya hal ini ditemukan di OPD yang menjadi obyek survei kepuasan masyarakat).

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Madiun, secara umum sudah masuk kategori baik. Namun tetap harus lebih ditingkatkan sehingga kualitas pelayanan benar-benar lebih meningkat, produktivitas kerja menjadi maksimal, kinerja aparatur lebih memadai.

Tabel III.16
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,89	81,01	81,09	83,95	83,34	99,27

B.11 Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Peningkatan produktifitas, skala usaha, dan nilai tambah barang dan jasa melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna dan ekonomi kreatif di semua sektor merupakan strategi yang sangat efektif untuk mendorong peningkatan PDRB di semua sektor.



Tabel III.17
PDRB Sektor unggulan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
<i>Kumulatif 3 sektor</i>	5,87 %	- 2,01 %	4,69 %	4 %	5,01 %	125,2 %
Sektor pertanian	2,22	1,13	1,63		- 4,05	
Sektor industri	7,18	- 1,41	6,79		13,31	
Sektor perdagangan	8,20	- 5,75	5,65		5,76	

B.12 Pengeluaran Wisatawan (Spending of Money)

Sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, Spending of Money (Pengeluaran Pariwisata) menjadi salah satu indikator sasaran dari kepala daerah mulai tahun 2021 sampai tahun 2023. Spending of Money adalah jumlah uang atau jumlah pengeluaran yang dibelanjakan oleh Wisatawan dimulai dari pengeluaran saat meninggalkan atau keluar dari rumah sampai tiba dan meninggalkan destinasi wisata. Bertujuan untuk mengukur potensi tingkat pengeluaran wisatawan dari sisi profil geografis asal wisatawan serta preferensi konsumsi yang mereka lakukan dalam rangka memenuhi unsur kebutuhan, keinginan dan harapan dari wisatawan selama tinggal pada destinasi pada durasi lama tinggal serta faktor demografis wisatawan berdasarkan lima kategori pengeluaran, yaitu akomodasi, transportasi, makan dan minum, belanja lainnya (fasilitas wahana, tiket, dll), dan pengeluaran lainnya (belanja souvenir, belanja hiburan, dll).

Tabel III.18
Pengeluaran Wisatawan Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Pengeluaran Wisatawan (spending of money)	Rp. 442,7 Milyar	Rp. 344 Milyar	Rp. 458,5 Milyar	133,28



B.13 Presentase Desa Mandiri

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah membuat beberapa langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan sustainable melalui program pembangunan desa. Untuk pelaksanaan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk menetapkan status kemajuan suatu desa. Status desa yang disebut dengan klasifikasi desa berdasarkan IDM ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 2 Tahun 2016, yang menggolongkan desa kedalam 5 status, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Jumlah dan status desa di Kabupaten Madiun berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Tabel III.19
Presentase Desa Mandiri Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Presentase Desa Mandiri	2,02 %	9,59 %	22,2 %	32,3 %	47,47 %	146,98

B.14 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga Perubahan RPJMD 2018-2023, yaitu meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome).



Tabel III.20
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Madiun
Tahun 2021-2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Layanan infrastruktur (IKLI)	76,22	77	77,09	100,11

B.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah berdasarkan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Oleh karena itu, IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijakan untuk menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik ke depannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024 terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH dengan adanya penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) sebagai komponen penyusun IKLH. Pada perhitungan IKLH yang terbaru untuk IKTL dan IKEG dintegrasikan menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL) namun karena Kabupaten Madiun bukan merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut, maka perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL.

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas



Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Madiun. IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan tutupan hutan sebagai indikator.

Tabel III.21
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun
Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,94	76,55	66,69	65,02	70,45	108,35

B.16 Indeks Risiko Bencana

Resiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Penilaian tingkat resiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan resiko bencana di suatu daerah. Resiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks resiko bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya - Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. - Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. - Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.



Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks	Predikat
> 144	Tinggi
13 - 144	Sedang
< 13	Rendah

Tabel III.22
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Risiko Bencana	162	160	113,40	141,09

B.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah adalah terserapnya penduduk pada lapangan kerja yang tersedia yang ditunjukkan oleh rasio penduduk bekerja. Ketika penduduk banyak bekerja artinya semakin sedikit penduduk yang tidak bekerja atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja.



Tabel III.23
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,52	4,80	4,99	4,32	5,84	73,97

B.18 Pengeluaran Perkapita Makanan

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, konsumsi mempunyai peran penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Tabel III.24
Pengeluaran Perkapita Makanan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Pengeluaran Perkapita Makanan	Rp. 442.625	Rp. 448.200	Rp. 448.641	Rp. 550.000	Rp. 488.619	88,83

B.19 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga Kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal, dan angka harapan hidup. Nilai indeks Kesehatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi pelayanan publik kesehatan di Kabupaten Madiun, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar tidak terjadi kesenjangan Kesehatan dan pemerataan kualitas Kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.



Tabel III.25
Indeks Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Kesehatan	0,788	0,790	0,792	0,80	0,80	100

B.20 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel III.26
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,81	91,79	91,77	91,80	92,14	100,37

B.21 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks Pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata Tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa



tercermin dari data angka melek huruf (literacy rate) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa memvaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama Sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengigiat peduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Tabel III.27
Indeks Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Indeks Pendidikan	0,625	0,626	0,627	0,635	0,631	99,37

C. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2022. Perubahan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2022 secara substantif merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Madiun periode tahun 2018-2023, sehingga sasaran dan prioritas pembangunan daerah secara periodik dan normatif merupakan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023. Perubahan RKPD tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan RKP Tahun 2022, dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022, utamanya terkait dengan keselarasan Prioritas Pembangunan Pusat dan Daerah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi menjadi negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Misi Presiden terpilih, yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi,



Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

- PN 1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5. Memperkuat Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Memperhatikan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian maka Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**".

Tema dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pasca pandemi Covid-19, maka tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dalam menghadapi pemulihan dari bencana pandemi Covid-19 adalah "**Pemulihan ekonomi dan Reformasi struktural dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era industri perdagangan berbasis agro.**"

Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata, melalui sasaran pembangunan :



- a. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan;
 - b. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
 - c. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian;
 - d. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - e. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
 - f. Meningkatnya Nilai Tambah KUKM;
 - g. Meningkatnya nilai tambah pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur, melalui sasaran pembangunan :
- a. Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
- a. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan
 - b. Meningkatnya Kemandirian PMKS
 - c. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
 - d. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
 - e. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - f. Menurunnya Pengangguran
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
- a. Meningkatnya Kepedulian Sosial
 - b. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
 - c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
 - d. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
 - e. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energia
- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air
 - b. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - c. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup



- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - b. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.
- a. Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Berdasarkan hasil penyelarasan dengan RKP dan RPKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka Perubahan RPKD Kabupaten Madiun tahun 2022 mengambil tema yaitu **“Penguatan Perekonomian, Sosial dan Pelayanan Dasar”**. Dengan Isu dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, sebagai berikut :

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN		SASARAN PEMBANGUNAN	
Masih terdapat anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	I.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan	1.	Meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik SD/MI, SMP/MTS dan Pendidikan Kejar Paket A/B/C
			2.	Mengakselerasi Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Proses Kegiatan Belajar Mengajar Melalui Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran
Tingginya angka kematian pada bayi dan ibu melahirkan	II.	Optimalisasi pelayanan kesehatan	1.	Meningkatkan perlindungan pelayanan kesehatan
			2.	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Kurangnya pengembangan usaha dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi	III.	Peningkatan pengembangan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah	1.	Menstimulasi pertumbuhan dan pemulihan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah pasca pandemic covid-19
			2.	Meningkatkan sarana prasarana pengembangan Usaha Pedagang Formal, Usaha Mikro, Industri Kecil

ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN		SASARAN PEMBANGUNAN	
				dan Menengah
			3.	Pengembangan sentra industri kreatif
	IV.	Mengakselerasi Peningkatan dan Pemulihan Industri Pariwisata Lokal Pasca Pandemi Covid-19	1.	Meningkatkan pengembangan industri pariwisata
			2.	Stimulasi Pemulihan Industri Pariwisata
Masih terdapat kekurangan sarana prasarana pengairan pertanian	V.	Meningkatkan SaranaPrasarana Penunjang Produksi Pertanian Daerah	1.	Meningkatkan kapasitas daya tampung air
			2.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air irigasi (reservoir)
System pemerataan distribusi pendapatan masyarakat kurang optimal	VI.	Menekan angka ketimpangan melalui bantuan sosial, pemberdayaan, Pelatihan Keterampilan dan kemudahan akses terhadap permodalan	1.	Membantu membuka jalur akses permodalan masyarakat kurang mampu
			2.	Meningkatkan aktivitas pemberdayaan dan pelatihanpelatihan keterampilan
			3.	Mengoptimalkan Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Kelompok Rentan Terdampak Pandemi Covid-19
Kondisi jalan belum semuanya dalam kondisi baik/mantap	VII.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian	1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SaranaPrasarana Akses Penunjang Optimalisasi Arus Barang dan Jasa dan serta Mobilisasi skala Lokal
Menurunnya kualitas air dan kualitas udara	VIII.	Terjaganya Keseimbangan Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Mengoptimalisasi Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dan Pencapaian Tujuan SDG's



3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,635	0,631	99,37
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	7,83	7,94	101,40
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,18	100,08

Capaian indikator tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan yaitu Indeks Pendidikan tercapai 99,37% apabila dibandingkan dengan target. Capaian yang dibawah target disebabkan oleh masih banyaknya penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu peningkatan informasi dan akses pendidikan untuk penduduk usia 25 tahun ke atas masih terkendala dengan kondisi pandemi. Berdasarkan data dari aplikasi marikab.madiunkab.go.id kondisi 31 Desember 2022 sejumlah 289.789 orang yang tamat SD/ SMP atau tidak tamat SD/ SMP dan atau belum/ tidak sekolah. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka indeks pendidikan mengalami kenaikan sebesar 0,004 poin persen. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan atau perkembangan pembangunan pendidikan cenderung stagnan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2022 tercapai 98,59%. Pencapaian indeks pendidikan tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Kondisi ini dikarenakan tidak terawatnya anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. Selain itu terdapat anak-anak yang drop out dan tidak segera dilakukan intervensi. Untuk meningkatkan indeks pendidikan upaya yang dilakukan dimulai ada tahun 2021 dengan memastikan system dan sasarnya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang drop out dan lulus tidak melanjutkan, serta



dewasa tidak sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk intervensi langsung baru akan dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya bersinergi dengan Pengadilan Agama, dimana anak-anak yang drop out karena menikah untuk kembali ke sekolah.

Perlu dilakukan perhatian lebih dan inovasi, terutama untuk peningkatan partisipasi pendidikan pada usia penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah serta menjaga agar anak usia 7-18 tahun tidak ada yang putus sekolah atau tidak sekolah.

Capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 tercapai 7,94 atau tercapai 101,40% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2022 tercapai 101,28%. Perlu peninjauan ulang target tahun 2023 karena pada tahun 2022 target sesuai dengan dokumen Renstra tahun terakhir sudah terlampaui. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Madiun tahun 2022 sebesar 7,94 ini, walaupun sudah melampaui target tetapi masih setara jenjang SMP kelas VIII. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang sebesar 8,03 tahun, sedangkan capaian nasional sebesar 8,69 tahun, maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun relatif tertinggal. Masih perlu kerja keras dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk mengejar ketertinggalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP yaitu 15 tahun. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai target antara lain:

1. Membentuk Tim Penanganan ATS Tingkat Kabupaten.
2. Menyusun SOP penanganan DO dan LTM.
3. Verifikasi dan validasi data anak Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan pada aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan, serta kecamatan.



4. Menyusun data anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan berdasarkan data dari aplikasi IMP Smart bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Melaksanakan koordinasi dengan Camat se Kabupaten Madiun untuk pemetaan anak tidak sekolah.
6. Melaksanakan inventarisasi hasil pemetaan ATS dari Kecamatan.
7. Melaksanakan koordinasi dengan PKBM untuk penjangkaran dan penerimaan anak tidak sekolah untuk melanjutkan pendidikan di jalur non formal.

Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 adalah 13,18 atau tercapai 100,08% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2022 tercapai 100%. HLS Kabupaten Madiun pada tahun 2022 sebesar 13,18 tahun artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,18 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka HLS diatas 13 tahun ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi tetap perlu ditingkatkan walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebesar 13,37 tahun, dan lebih tinggi dari HLS Indonesia tahun 2022 sebesar 13,10 tahun.

Capaian prestasi bidang pendidikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Provinsi : Peringkat 7 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Pencak Silat Jurus Tunggal Putra (1 siswa),
- b. Peringkat 6 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Festival Kreativitas Tari (5 siswa).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Rp.	414.915.588.008	394.942.928.349	95,19
	<i>Nilai SAKIP PD</i>	Nilai	83	87,04	100
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD</i>	%	88	99.74	113
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Rp.	480.481.605	477.798.310	99,44
	<i>Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan</i>	%	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	395.443.605	394.639.600	99,80
	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan peraturan</i>	Dokumen	12	12	100
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	85.038.000	83.158.710	97,79
	<i>Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (dokumen)</i>	Dokumen	22	22	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	410.717.830.080	390.932.824.858	95,18
	<i>Persentase pegawai yang terpenuhi penggajiannya</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	410.717.830.080	390.932.824.858	95,18
	<i>Jumlah Pegawai yang terbayarkan gajinya</i>	Orang	4.000	3.886	97,15
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	734.537.729	705.461.976	96,04
	<i>Persentase layanan administrasi umum yang tersedia</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	14.956.810	14.944.000	99,91
	<i>Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	13.733.775	13.150.000	95,75



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	46.521.825	44.367.250	95,37
	<i>Peralatan rumah tangga yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	304.635.323	300.630.900	98,69
	<i>Jumlah bahan logistic kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	75.986.600	74.412.100	97,93
	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia</i>	Jenis	3	3	100
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	13.860.000	13.860.000	100
	<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia</i>	Eksemplar	84	84	100
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	264.843.396	243.799.626	92,05
	<i>Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	363.405.710	344.605.100,00	94,83
	<i>Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	363.405.710	344.605.100	94,83
	<i>Jumlah peralatan dan Mesin yang tersedia</i>	Unit	29	29	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	1.682.107.813	1.550.997.853	92,21
	<i>Persentase jasa penunjang yang tercukupi</i>	%	100	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	338.352.000	293.564.712	86,76
	<i>Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	1.343.755.813	1.257.433.141,00	93,58
	<i>Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang tersedia</i>	Orang	36	36	100
1.6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	937.225.071	934.260.052	99,68
	<i>Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi</i>	%	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	197.710.905	196.960.052	99,62
	<i>Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara</i>	Unit	15	15	100
1.6.2	Pemeliharaan Mebel	Rp.	5.940.000	5.900.000	99,33
	<i>Kebutuhan pemeliharaan mebel yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.6.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	110.563.480	110.335.000	99,79
	<i>Peralatan dan mesin kantor yang terpelihara</i>	Bulan	12	12	100
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	623.010.686	621.065.000	99,69
	<i>Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara</i>	Bulan	12	12	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp.	179.599.963.639	172.383.427.969	95,98
	<i>Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan</i>	Nilai	5,36	5,93	110,63
	<i>Persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi</i>	%	100	66,67	66,67
	<i>APS SD</i>	Nilai	100	99,25	99,25
	<i>Persentase Lembaga SD terakreditasi A</i>	%	3,45	2,71	78,53
	<i>APS SMP</i>	Nilai	100	98,43	98,43
	<i>Persentase lembaga SMP terakreditasi A</i>	%	72,92	68,75	94,28
	<i>APS PAUD</i>	Nilai	100	98,43	98,43
	<i>Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi</i>	%	60	66,67	111,11

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.	95.877.767.246	90.395.845.383	94,28
	<i>APK SD</i>	Nilai	100	99,87	99,87
	<i>APM SD</i>	Nilai	96,20	97,23	101,07
	<i>Angka Melanjutkan SD ke SMP</i>	Angka	97,40	100,00	102,67
	<i>Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD</i>	%	42	92,55	220,36
	<i>Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD</i>	%	22	89,12	405,09
	<i>Persentase bangunan SD kondisi baik</i>	%	91	91,00	100,00
	<i>Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</i>	%	100	99,25	99,25
2.1.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp.	389.839.150	389.839.150	100
	<i>Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun</i>	Ruang	2	2	100
2.1.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp.	1.604.451.600	1.604.451.600	100
	<i>Jumlah ruang unit kesehatan yang dibangun</i>	Ruang	18	18	100
2.1.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp.	949.600.000	949.600.000	100
	<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun</i>	Ruang	5	5	100
2.1.4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.	4.906.251.061	4.704.251.061	95,88
	<i>Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun</i>	Unit	24	24	100
2.1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp.	3.468.008.224	3.468.008.224	100
	<i>Jumlah ruang kelas yang direhab</i>	Ruang	33	33	100
2.1.6	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	Rp.	485.700.625	485.700.625	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Jumlah ruang guru yang direhab</i>	Ruang	5	5	100
2.1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp.	627.774.525	627.774.525	100
	<i>Jumlah perpustakaan yang direhab</i>	Ruang	7	7	100
2.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.	449.488.000	449.488.000	100
	<i>Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhab</i>	Ruang	16	16	100
2.1.9	Pengadaa Mebel Sekolah	Rp.	1.760.620.400	1.760.620.400	100
	<i>Jumlah mebel sekolah baru yang tersedia</i>	Paket	79	79	100
2.1.10	Pengadaan Perlegkapan Siswa	Rp.	127.561.225	126.969.570	99,54
	<i>Jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan perlengkapan siswa</i>	Siswa	364	364	100
2.1.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp.	24.062.539.050	21.901.630.000	91,02
	<i>Jumlah alat praktik dan peraga siswa baru yang tersedia</i>	Paket	194	194	100
2.1.12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rp.	439.481.805	412.550.030	93,87
	<i>Angka Kelulusan SD</i>	%	100	100	100
2.1.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SIsua	Rp.	354.317.977	309.160.0	87,26
	<i>Jumlah prestasi peserta didik SD di tingkat kabupaten, nasional dan internasional</i>	Orang	18	76	422,22
2.1.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.	10.949.74.778	10.340.183.704	99,92
	<i>Jumlah PTK jenjang SD</i>	Orang	4.229	3.731	88,22
2.1.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.	499.500.000	479.096.150	95,92
	<i>Jumlah PTK jenjang SD yang dikembangkan karirnya</i>	Orang	725	725	100
2.1.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp.	47.265.950,00	40.237.500,00	85,13

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Jumlah lembaga sekolah yang dibina</i>	Lembaga	16,00	16,00	100,00
2.1.17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp.	43.651.582.876	40.922.583.669	93,75
	<i>Operasional SD yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
2.1.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp.	104.030.000	98.975.925	95,14
	<i>Jumlah lembaga SD yang ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS nya</i>	Lembaga	406	406	100
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp.	45.469.423.186	45.237.313.179	99,49
	<i>APK SMP/MTS</i>	Angka	100	93,56	93,56
	<i>APM SMP/MTS</i>	Angka	100	87,88	87,88
	<i>Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA</i>	Angka	96	92,77	96,64
	<i>Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP</i>	%	42	93,20	221,90
	<i>Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP</i>	%	22	95,24	432,91
	<i>Persentase bangunan SMP dengan kondisi baik</i>	%	89	76,89	86,39
	<i>Persentase jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</i>	%	100	98,43	98,43
2.2.1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp.	115.680.000	115.680.000	100
	<i>Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun</i>	Ruang	2	2	100
2.2.2	Pembangunan Laboratorium	Rp.	636.240.000	636.240.000	100
	<i>Jumlah laboratorium SMP yang dibangun</i>	Ruang	1	1	100
2.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.	954.360.000	954.360.000	100
	<i>Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah</i>	Ruang	5	5	100
2.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat	Rp.	8.444.705.200	8.331.916.700	98,66



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Ruang Kelas Sekolah				
	<i>Jumlah ruang kelas SMP yang direhab</i>	Ruang	50	50	100
2.2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rp.	991.956.000	991.956.00	100
	<i>Jumlah ruang guru SMP yang direhab</i>	Ruang	5	3	60
2.2.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp.	166.579.200	166.579.200	100
	<i>Jumlah ruang UKS SMP yang direhab</i>	Ruang	3	3	100
2.2.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp.	1.122.096.000	1.122.096.000	100
	<i>Jumlah perpustakaan SMP yang direhab</i>	Ruang	2	2	100
2.2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp.	2.855.850.000	2.855.850.000	100
	<i>Jumlah laboratorium SMP yang direhab</i>	Ruang	1	1	100
2.2.9	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp.	2.374.235.600	2.374.235.600	100
	<i>Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab</i>	Ruang	9	9	100
2.2.10	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.	1.990.000.000	1.990.000.000	100
	<i>Jumlah mebel SMP baru yang tersedia</i>	Unit	67	67	100
2.2.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Rp.	75.000.000	75.000.000	100
	<i>Jumlah siswa SMP yang mendapatkan bantuan biaya personil</i>	Siwa	100	100	100
2.2.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp.	618.400.000	547.974.485	88,61
	<i>Jumlah alat praktik dan peraga siswa baru yang tersedia</i>	Unit	21	32	152,38
2.2.13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Rp.	236.800.000	228.665.200	96,56
	<i>Angka Kelulusan</i>	%	100	100	100
2.2.14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp.	368.707.000	368.260.600	99,88
	<i>Jumlah Pretasi Peserta Didik</i>	Siswa	69	69	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>SMP di tingkat kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional</i>				
2.2.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp.	2.521.579.186	2.521.179.186	99,98
	<i>Jumlah PTK jenjang SMP</i>	Orang	1.737	1.737	100
2.2.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Rp.	208.315.000	198.695.000	95,38
	<i>Jumlah PTK Jenjang SMP yang meningkat karirnya</i>	Orang	38	38	100
2.2.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp.	25.000.000	24.774.000,00	99,10
	<i>Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan</i>	Lembaga	48	48	100
2.2.18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp.	21.748.920.000	21.718.980.368,00	99,86
	<i>Operasional SMP yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
2.2.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp.	15.000.000	14.470.340	96,47
	<i>Jumlah lembaga SMP yang ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana BOS nya</i>	Lembaga	48	48	100
2.3	Pengeolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	Rp.	28.720.983.207,00	27.659.721.207,00	96,30
	<i>APK PAUD</i>	Angka	100	100,00	100,00
	<i>Persentase bangunan PAUD kondisi baik</i>	%	55	14,45	26,27
	<i>Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini</i>	%	100	100,00	100,00
2.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp.	2.028.324.000	2.028.234.000	100
	<i>Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang dibangun</i>	Ruang	17	17	100
2.3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat	Rp.	2.524.147.500	2.524.036.000	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				
	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	Ruang	22	22	100
2.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp.	484.768.000	484.471.600	99,94
	Jumlah sarana, prasarana dan Utilitas PAUD yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7	7	100
2.3.4	Pengadaan Mebel PAUD	Rp.	177.337.00	177.337.500	100
	<i>Jumlah mebel PAUD baru yang tersedia</i>	Paket	15	15	100
2.3.5	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Rp.	75.000.000	74.000.000	98,67
	<i>Jumlah Siswa PAUD yang mendapatkan bantuan perlengkapan siswa</i>	Siswa	300	300	100
2.3.6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rp.	488.000.000	487.300.000	99,86
	<i>Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD baru yang tersedia</i>	Unit	50	50	100,00
2.3.7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp.	268.000.000	262.941.500	98,11
	<i>Jumlah Peserta Didik PAUD</i>	Orang	20.100	19.082	94,94
2.3.8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi PAUD	Rp.	9.458.419.607	9.400.519.607	99,39
	<i>Jumlah PTK PAUD yang tersedia</i>	Orang	1.972	1.731	87,78
2.3.9	Pengembangan Kariri Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp.	203.706.600	201.228.800	98,78
	<i>Jumlah PTK PAUD yang meningkat karirnya</i>	Orang	158	158	100
2.3.10	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp.	12.963.280.000	11.314.857.000	87,28
	<i>Operasional PAUD yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
2.3.11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Lembaga	50.000.000	49.976.200	99,95
	<i>Jumlah lembaga PAUD yang meningkat pengelolaan dana</i>	Lembaga	688	688	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>BOP PAUD</i>				
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.	9.531.790.000,00	9.090.548.200,00	95,37
	<i>Angka Kelulusan Paket A/B/C</i>	Angka	100	100,00	100,00
	<i>Persentase lembaga PKBM yang difasilitasi</i>	%	100	100,00	100,00
	<i>Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas</i>	Angka	15	8,96	59,73
	<i>Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</i>	%	4,5	6,34	140,89
2.4.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Rp.	320.000.000	312.915.900	97,79
	<i>Jumlah Peserta didik PNF yang terlayani</i>	Orang	1.500	1.829	121,93
2.4.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.	410.400.000	410.400.000	100
	<i>Jumlah PTK PNF yang tersedia</i>	Orang	114	114	100
2.4.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.	16.300.000	15.797.600	96,92
	<i>Jumlah PTK PNF yang meningkat karirnya</i>	Orang	49,00	49,00	100,00
2.4.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp.	7.609.960.000	7.309.744.800	96,92
	<i>Jumlah lembaga PNF yang dibina</i>	Lembaga	223	251	112,56
2.4.5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp.	1.170.130.000	1.037.700.000	88,68
	<i>Operasional BOP Kesetaraan yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100,00
2.4.6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp.	5.000.000	5.000.000	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Jumlah Lembaga PNF yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dan BOP Kesetaraan</i>	Lembaga	9	9	100
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp.	103.928.510,00	99.923.200,00	96,15
	<i>Persentase dokumen kurikulum SD yang dilaksanakan</i>	%	100,00	100,00	100,00
	<i>Persentase dokumen kurikulum PAUD yang dilaksanakan</i>	%	100,00	100,00	100,00
3.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp.	103.928.510	99.923.200	96,16
	<i>Jumlah Dokumen Kurikulum muatan local SD yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	100
3.1.1	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp.	76.362.840	76.272.000	99,88
	<i>Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal SD yang tersedia</i>	Buku	300	300	100,00
3.1.2	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp.	27.565.670	23.651.200	85,80
	<i>Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal SD yang tersusun</i>	Orang	151	151	100,00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp.	26.000.000	26.000.000	100
	<i>Persentase pendidik yang tersertifikasi</i>	%	55,82	51,78	92,76
	<i>Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV</i>	%	98,52	97,36	98,82
4.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.	26.000.000	25.100.500	96,54
	<i>Rasio guru murid SD</i>	Rasio	1:28	1:12	233,33
	<i>Rasio Guru murid SMP</i>	Rasio	1:32	1:15	213,33
	<i>Rasio Guru murid PAUD</i>	Rasio	1:10	1:15	66,66
	<i>Rasio tutor PNF dengan Peserta didik PNS</i>	Rasio	1:20	1:21	95,23

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>/Kesetaraan</i>				
4.1.1	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp.	9.000.000	8.797.800	97,75
	<i>Dokumen pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan</i>	Dokumen	1	1	100
4.1.2	Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	17.000.000	16.302.700	95,90
	<i>Dokumen Penataan dan pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan</i>	Dokumen	1	1	100

PERMASALAHAN

1. Masih adanya kesenjangan nilai kompetensi literasi dan numerasi peserta didik di satuan Pendidikan (masih terdapat satuan pendidikan yang kompetensi literasi numerasinya di bawah kompetensi minimum).
2. Data pendidikan kurang valid.
3. Terdapat sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 anak.
4. Aset sekolah terutama SD yang masih banyak belum tersertifikat.
5. Masih banyak sekolah yang kebutuhan gurunya belum terpenuhi.
6. Kompetensi guru yang perlu ditingkatkan.
7. Pendidikan karakter siswa yang perlu ditingkatkan.
8. Masih adanya iklim keamanan sekolah yang kurang aman (masih terdapat kasus bulliying, kekerasan fisik, kekerasan seksual).

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Langkah yang dilaksanakan dalam upaya penyelesaian permasalahan adalah:

1. Verifikasi dan validasi anak Drop Out dan Lulus Tidak Melanjutkan pada aplikasi Dapodik oleh sekolah dan kecamatan.



2. Gerakan Kembali ke sekolah untuk peserta didik yang DO dan LTM sebagai kegiatan prioritas daerah (terjaring 828 orang yang kembali ke pendidikan nonformal).
3. Membangun database pendidikan.
4. Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah tingkat Kabupaten.
5. Fasilitasi sertifikasi aset sekolah berkoordinasi dengan Desa, Kecamatan, BPAKD, BPN dan Kejaksaan.
6. Pemetaan kebutuhan guru dan pengajuan kebutuhan rekrutmen guru ke BKD.
7. Fasilitasi dan mendorong guru untuk mengikuti Program Guru Penggerak, Program Pendidikan Profesi Guru, serta pelaksanaan bimtek, sosialisasi dan workshop untuk peningkatan kompetensi guru.
8. Fasilitasi branding sekolah (Sekolah Sehat, Sekolah Aman, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Inklusi).
9. Pemberian bantuan biaya personil/perengkapan siswa PAUD, SD, SMP dan PKBM.
10. Pemberian Insentif dan perlindungan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan untuk GTT PTT PAUD, SD, SMP dan PKBM.
11. Pembangunan, rehabilitasi dan pemberian sarana prasarana bagi lembaga PAUD, SD, SMP dan PKBM yang membutuhkan.
12. Fasilitasi Program Sekolah Penggerak dan Program Organisasi Penggerak.
13. Standarisasi guru karakter.
14. Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
15. Penambahan alokasi anggaran untuk Pendidikan Nonformal.
16. Pembiasaan hafalan doa-doa harian dan surat pendek.
17. Mampu menguasai Bahasa asing, melestarikan Bahasa Jawa dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.



2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

a. Dinas Kesehatan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Nilai	0,80	0,80	100
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,2	0,2	100
		Angka Harapan Hidup	Nilai	71,54	71,90	100,5

Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berdasarkan misi 4 yakni Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan. Salah satu tujuan yang mengacu pada misi ke 4 adalah Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan dalam upaya penyamaan persepsi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tujuan pembangunan bidang kesehatan maka indikator yang dipergunakan adalah Indeks Kesehatan. Indeks kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup. Nilai indeks kesehatan ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana kondisi pelayanan publik kesehatan di Kabupaten Madiun sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar tidak terjadi kesenjangan kesehatan dan pemerataan kualitas kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan Misi ke 4 Pemerintah Kabupaten madiun maka Dinas Kesehatan memiliki 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator. Kebijakan Sasaran Dinas Kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat dan Angka Harapan Hidup.



Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Terdapat 12 indikator utama yang telah ditetapkan untuk menyatakan suatu keluarga sehat atau tidak, yaitu :

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih.
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan indikator tersebut dilakukan perhitungan Indeks Keluarga Sehat. Pengkategorian keluarga menurut IKS adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga Sehat : IKS diatas 0,800
- b. Keluarga Pra Sehat : IKS 0,500 - 0,800
- c. Keluarga Tidak Sehat : IKS kurang dari 0,500

Indikator Keluarga sehat ini merupakan output dari Program Indonesia Sehat. Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Untuk pencapaian indikator keluarga sehat di Kabupaten Madiun berdasarkan yang ditargetkan (0,2) sudah mencapai target (0,201) dengan masih ada beberapa permasalahan yang harus diintervensi untuk meningkatkan nilai indeks keluarga sehat di tahun berikutnya.



Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup di Kabupaten melebihi target yaitu 71,9 Tahun.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	57.637.710.821	55.088.595.854	95,58
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	98,00	78,41	98,00
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	%	88	80,96	94,31
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	55.856.265.602	53.537.354.889	95,85
	<i>Persentase ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas</i>	%	100	100	100
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	55.610.515.602	53.316.854.889	95,88
	<i>Persentase ASN dan Non ASN yang diangkat Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibayarkan gaji dan tunjangannya di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas</i>	%	100	100	100
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	245.750.000	220.500.000	89,73
	<i>Persentase tenaga kesehatan yang menerima insentif pelayanan covid</i>	%	100	100	100
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	614.569.097	536.564.683	87,31



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase ketersediaan dana untuk kebutuhan komponen instalasi listrik, Peralatan kebutuhan kantor, penyediaan barang cetakan dan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	25.387.316	20.127.328	79,28
	<i>Jumlah jenis alat listrik yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	Jenis	100	8	100
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	56.047.748	53.032.470	94,62
	<i>Jumlah per jenis alat tulis kantor yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	jenis	36	36	100
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	182.487.478	176.755.500	96,86
	<i>Jumlah per jenis alat rumah tangga yang disediakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	jenis	9	9	100
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	53.853.800	40.962.300	76,06
	<i>Jumlah barang cetakan yang disediakan dan kebutuhan penggandaan yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	jenis	10	10	100
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	296.792.755	245.687.085	82,78
	<i>Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	jenis	20	20	100
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	677.626.122	631.758.032	93,23
	<i>Persentase pemenuhan anggaran untuk jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	3.000.000	3.000.000	100
	<i>Jumlah materai yang disediakan untuk surat menyurat dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	Buah	100	165	100
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	322.011.226	311.330.168	96,68

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah kebutuhan waktu operasional jasa telepon, air, listrik dan internet yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	Jenis	4	4	100
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	352.614.896	317.427.864	90,02
	<i>Jumlah per jenis peralatan dan bahan yang disediakan, serta jumlah kebutuhan waktu layanan jasa keamanan yang tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	Jenis Alat dan orang	8 jenis alat & 68 orang	8 jenis alat & 68 orang	100
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	489.250.000	382.918.250	78,27
	<i>Persentase ketersediaan anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk dinas kesehatan</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	180.000.000	80.190.250	44,55
	<i>Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas untuk kebutuhan dinas kesehatan</i>	Paket	37	37	100
1.4.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	111.750.000	110.400.000	98,79
	<i>Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor Dinkes dan IFK yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan kantor</i>	Paket	5	5	100
1.4.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	197.500.000	192.328.000	97,38
	<i>Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (komputer, printer, AC split, mesin ketik, CCTV dan WIFI LAN)</i>	Paket	1	1	100
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	49.676.800.430	39.811.139.630	80,14
	<i>Angka Kematian Ibu</i>	per 100 ribu Kelahiran Hidup	0	6	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Angka Kematian Bayi</i>	Per 1000 lahir hidup	0	48	
	<i>Prevalensi Balita Stunting</i>	%	14	13,8	98,57
	<i>Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas</i>	%	73,00	74,88	100
	<i>Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit</i>	%	62	61	98,39
	<i>Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan</i>	%	61,00	77	100
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	13.924.870.815	12.629.799.356	90,70
	<i>Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah</i>	%	100	100	100
2.1.1	Pembangunan Puskesmas	Rp.	177.175.000	177.051.900	99,93
	<i>Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai dengan prototype</i>	bangunan	1	1	100
2.1.2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.	1.518.775.000	1.376.266.450	90,62
	<i>Persentase kebutuhan anggaran operasional untuk PMI yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
	Pengembangan Puskesmas	Rp.	3.095.500.000	2.563.041.395	82,80
	<i>Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai dengan prototype</i>	bangunan	1	1	100
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp.	750.000.000	750.000.000	100
	<i>Persentase kebutuhan anggaran operasional untuk PMI yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp.	725.586.100	644.479.157	88,82
	<i>Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun</i>	unit	1	1	100
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp	1.905.956.915	1.851.317.125	97,13
	<i>Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan</i>	unit	1	1	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1.3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.905.956.915	1.851.317.125	97,13
	Jumlah prasaranan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	2	7	100
2.1.4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	746.011.982	583.996.810	78,28
	<i>Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan</i>	Jenis	32	8	25,00
	Pengadaan Obat, Vaksin		2.640.872.292	2.576.310.239	97,56
	<i>Jumlah jenis obat yang diadakan</i>	Jenis	105	133	126,67
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		2.201.978.482	1.944.333.380	88,30
	<i>Jumlah jenis bahan habis medis pakai yang diadakan</i>	Jenis	30	36	120
2.1.5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	163.015.044	163.002.900	99,99
	<i>Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan Kedokteran Terpelihara pada Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	Jenis	24	24	100
	<i>jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar</i>	Puskesmas	26	26	100
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	35.375.263.625	26.895.446.324	76,03
	<i>Cakupan pelaksanaan pelayanan SPM Bidang Kesehatan</i>	%	100	61,25	61,25
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp.	55.862.568	53.144.550	95,13
	<i>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</i>	%	100	94,83	94,83
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp.	422.227.390	20.629.200	4,89
	<i>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</i>	%	100	90,32	90,32
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.	10.872.710	1.571.000	14,45



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i>	%	100	92,84	92,84
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp.	50.491.080	47.931.800	94,93
	<i>Cakupan posyandu purnama mandiri</i>	%	81,06	83	102,01
	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar</i>	%	100	89,40	79,50
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp.	86.726.916	79.695.700	91,89
	<i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	%	100	50,59	50,59
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp.	47.290.807	42.567.350	90,01
	<i>Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	%	100	86,89	86,89
	<i>Jumlah perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara</i>	orang	16.008	2176 orang	8,91
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp.	38.420.179	30.369.000	79,04
	<i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard</i>	%	20	48,24	100
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp.	55.000.000	53.983.450	98,15
	<i>Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	%	30	24,72	24,72
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp.	30.000.000	29.510.000	98,37
	<i>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	%	100	99,52	99,52
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp.	50.000.000	47.088.000	94,18
	<i>Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i>	%	100	77,61	77,61
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp.	350.000.000	341.790.000	97,65

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standart</i>	%	100	86,54	86,54
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp.	573.136.863	531.529.275	92,74
	<i>Presentase pemberiann insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan bidang sosial covid-19</i>	%	0	0	0
	<i>Persentase Penanganan Covid-19 yang bisa tertangani</i>	%	100	100	100
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.	2,614,288,107	1,979,142,470	75,70
	<i>Cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)</i>	%	69	58,24	84,41
	<i>Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)</i>	%	100	99,42	99,42
	<i>Cakupan Balita ditimbang di Posyandu (D/S) (%)</i>	%	80,20	69,50	86,66
	<i>Cakupan Balita Naik berat badan di Posyandu (N/D) (%)</i>	%	75,50	47,82	63,34
	<i>Cakupan Ibu nifas mendapat Vitamin A (%)</i>	%	90,10	99,92	110,90
	<i>Cakupan ibu hamil mendapat Fe 3 (%)</i>	%	90,10	93,59	103,87
	<i>Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)</i>	%	90,10	93,79	104,10
	<i>Cakupan remaja putri mendapat TTD</i>	%	26	57,94	222,85
	<i>Cakupan Kecamatan bebas rawan Gizi</i>	%	84	100	119,05
	<i>Cakupan Keluarga berperilaku Sadar Gizi (kadarzi) (%)</i>	%	90,30	97,46	107,93
	<i>Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)</i>	%	56	55,82	99,68
	<i>Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM</i>	Desa	206	206	100
	<i>Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan</i>	%	50	52,50	105
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.	50.000.000	49.104.000	98,2
	<i>Persentase Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani</i>	%	30	65	216,67



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya</i>	%	100	100	100
	<i>Jumlah Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK</i>	Puskesmas	26	25	96,15
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.	213.113.065	113.179.305	53,11
	<i>Jumlah desa yang melaksanakan program kab/kota sehat</i>	Desa	124	172	138,71
	<i>Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM</i>	Desa	206	206	100
	<i>Persentase Fasyankes yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Sesuai Peraturan</i>	%	85	100	117,65
	<i>Persentase Keluarga yang menggunakan Jamban Sehat</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan</i>	%	50	52,50	105
	<i>Persentase TPM yang Memenuhi Syarat</i>	%	37	37	100
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.	316.346.547	294.658.034	93,14
	<i>Cakupan kelurahan / desa siaga aktif</i>	%	100	100	100
	<i>cakupan posyandu purnama dan mandiri</i>	%	81,80	83,00	101,47
	<i>Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)</i>	%	56	55,82	99,68
	<i>Jumlah Desa yang melaksanakan Program STBM</i>	Desa	206	206	100
	<i>Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan</i>	%	50	52,50	105
	<i>Persentase TPM yang Memenuhi Syarat</i>	%	37	73	197,30
	<i>Persentase Anak Sekolah (SD Kelas 4-6 yang berusia 10-12 Tahun) yang dilakukan Pengukuran Kebugaran Jasmani</i>	%	30	65	216,67
	<i>Jumlah Puskesmas yang Terbentuk Pos UKK</i>	Puskesmas	26	24	92,31
	<i>Persentase Calon Jemaah Haji yang Diperiksa Kebugarannya</i>	%	100	100	100
2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp.	63.118.640	61.176.400	96,92
	<i>Persentase pembinaan ke penyehat tradisional</i>	%	60	62,50	104,17

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase penyehat tradisional yg memiliki STPT</i>	%	45	35	77,78
	<i>Persentase puskesmas yg melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar</i>	%	40	34	85,00
	<i>Persentase terbentuknya kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN)</i>	%	20	31	155
2.2.18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp.	572.126.750	557.901.100	97,51
	<i>Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</i>	%	100	90,78	90,78
	<i>Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap</i>	%	95	100,97	100,97
	<i>Cakupan Imunisasi Lanjutan BADUTA</i>	%	85,6	103,79	103,79
	<i>Jumlah Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) Non Polio</i>	Kasus	6 kasus	5 kasus	83,33
	<i>Persentase kelengkapan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)</i>	%	90	100	100
	<i>Persentase ketepatan pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)</i>	%	80	95	100
	<i>Persentase KLB di Desa/Kelurahan yang Ditanggulangi Kurang Dari 24 Jam</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji</i>	%	90	100	111,11
2.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp.	51.969.400	50.260.100	96,71
	<i>Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i>	orang	1303	980	75,21
2.2.20	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp.	79.567.270	74.068.000	93,09
	<i>Persentase kejadian bencana yang ditangani</i>	%	89	100	112,36
2.2.21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp.	1.000.240.594	907.356.090	90,71
	<i>Jumlah Fogging Fokus yang dilakukan</i>	Fokus	150 fokus	150	100
	<i>Persentase Penderita DBD yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan hepatitis</i>	%	70	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Penemuan kasus diare balita di sarana kesehatan dan kader di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu</i>	%	100	100	17,90
	<i>Presentase kasus kusta yang dilakukan PFS secara rutin</i>	%	85	100	117,65
	<i>Persentase penderita malaria mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	%	100	100	100
	<i>Kasus Pneumonia Balita yg ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu</i>	%	100	100	100
	<i>Jumlah perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara</i>	Orang	17075 orang	2,176	12,74
	<i>Rasio gigi tetap yang ditambah terhadap gigi tetap yang dicabut</i>	kasus	>1	2	200
	<i>Prosentase penduduk yang dideteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran</i>	%	40	76,86	192,15
	<i>Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap</i>	%	93,5	71,80	76,79
2.2.22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp.	27.148.971.739	20.299.699.700	74,77
	<i>Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (PBI- D)</i>	orang	45.000	47.194	#DIV/0!
	<i>Persentase pemenuhan biaya klaim pelayanan kesehatan yang belum dijamin oleh PBID</i>	%	100 orang	105 orang	100
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp	1.056.902.000	1.055.600.000	99,88
	<i>Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas</i>	paket	7	7	100
	<i>Persentase pelayanan vaksinasi Covid-19</i>	%	100	-	0
2.2.25	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp.	248.131.000	-	0
	<i>Jumlah Puskesmas terakreditasi</i>	Puskesmas	26	26	100
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp.	190.460.000	173.491.800	91,09

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase pemenuhan peralatan sistem SPGDT dalam rangka kegiatan PSC 119</i>	%	100	100	100
2.3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	376.665.990	285.893.950	75,90
	<i>Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal</i>	%	94	67,28	71,57
	<i>Persentase ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan,</i>	%	100	100	100
2.3.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp.	105.898.500	101.786.200	96,12
	<i>jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS,</i>	Puskesmas	26	26	100
	<i>Jumlah Puskesmas yang terakreditasi,</i>	Puskesmas	26	26	100
	<i>Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memberikan pelayanan UKM dan UKP</i>	Puskesmas	26	26	100
2.3.2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp.	270.767.490	184.107.750	67,99
	<i>Persentase Ketersediaan posko kegawatdaruratan</i>	%	100	100	100
	<i>Presentasi RS yang terakreditasi</i>	%	100	100	100
	<i>Jumlah anak yang mendapat khitan massal</i>	anak	150	239	159,33
	<i>Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal,</i>	%	94	67,2%	71,57
	<i>Presentase Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	%	20	6,84	34,20
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	1.322.060.000	1.282.436.550	97
	<i>Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan</i>	%	100	100	100
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.	28.000.000	27.921.000	99,72
	<i>Prosentase tenaga kesehatan yang mendapatkan izin praktek</i>	%	100	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Prosentase sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan</i>	%	20	15	75
3.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp.	28.000.000	27.921.000	99,72
	<i>Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin praktek</i>	Tenaga Kesehatan	120	155	129,17
	<i>Jumlah sarana kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan praktek tenaga kesehatan</i>	Sarana Kesehatan	91	128	140,66
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.	1.086.960.000	1.065.556.000	98,03
	<i>Prosentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid</i>	%	0	0	0
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	10.000.000	9.924.000	99,24
	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang direncanakan</i>	orang	50	387	774
3.2.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp.	1.051.500.000	1.030.590.000	98,01
	<i>Persentase tenaga kesehatan Non ASN yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid</i>	%	100	0	0
	<i>Jumlah perawat ponkesdes memberikan pelayanan kesehatan</i>	Orang	40	40	100
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	25.460.000	25.042.000	98,36
	<i>Jumlah Dokter Internsip yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia</i>	Orang	7	26	371,43
	<i>Jumlah Fasyankes yang melaporkan data ketenagaannya</i>	Fasyankes	170	173	101,76
	<i>Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang dinilai angka kreditnya</i>	Orang	150	117	78
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	207.100.000	188.959.550	91,24

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Prosentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi</i>	%	96.60	100	103,52
	<i>Prosentase tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang</i>	%	82,20	94,87	115,41
3.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	207.100.000	188.959.550	91,24
	<i>Jumlah tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi</i>	orang	29	90	310,34
	<i>Jumlah Petugas Pengelola Kefarmasian yang memperoleh bimtek Standart Kefarmasian</i>	orang	150	150	100
	<i>Jumlah Petugas Pengelola Keamanan Pangan yang memperoleh bimtek Keamanan Pangan</i>	orang	0	0	0
	<i>Jumlah tenaga kesehatan yang penilaian angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang</i>	orang	88	191	217,05
	<i>Jumlah SDM Kesehatan yang diusulkan melalui perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (Renbut)</i>	orang	501	387	77,25
	<i>Jumlah sarana kesehatan yang data SDMK terupdate di aplikasi SI-SDMK</i>	Unit	173	282	163,01
	<i>Jumlah dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia</i>	orang	9	26	288,89
	<i>Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Diklat Tenaga Kesehatan</i>	orang	6	5	83,33
	<i>Persentase pelayanan vaksinasi Covid-19</i>	%	0	0	0
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	472.540.396	463.099.514	98
	<i>Persentase sarana kefarmasian, toko alat kesehatan, industri kecil makanan dan minuman yang memenuhi standar</i>	%	80	89	111,25
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.	20.000.000	14.939.000	74.70
	<i>Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin</i>	%	100	89	89

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.	20.000.000	14.939.000	74,70
	<i>Jumlah Data Apotek yang berijin</i>	Apotek	70	73	104,29
	<i>Jumlah Data Toko Obat yang berijin</i>	Toko Obat	5	0	0
	<i>Jumlah Data Toko Alat Kesehatan yang berijin</i>	Toko Alat Kesehatan	4	0	0
	<i>Jumlah Data Optikal yang berijin</i>	Optikal	3	0	0
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.	287.757.106	285.380.700	99,17
	<i>Persentase Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</i>	%	100	100	100
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.	287.757.106	285.380.700	99,17
	<i>Persentase Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (%)</i>	%	100	138,46	138,46
	<i>Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan</i>	PIRT	260	360	138,46
	<i>Jumlah Pemohon Produsen Industri Rumah Tangga Pangan yang telah diperiksa sarana dan terbit sertifikat PIRT</i>	PIRT	260	360	138,46
	<i>Jumlah Kegiatan Pengkajian Sertifikasi Produksi</i>	Kegiatan	4	4	100
4.3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		18.254.590	17.320.400	94,88

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Cakupan TPM yang memperoleh SLHS/Label</i>	%	6	6	100
4.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp.	18.254.590	17.320.400	94,88
	<i>Persentase DAM yang Memenuhi Syarat</i>	%	56	104	185,71
	<i>Persentase TPM yang Memenuhi Syarat</i>	%	37	73	197,30
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp.	7.000.000	7.000.000	100
	<i>Cakupan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan telah melakukan pembinaan/penyuluhan yang memenuhi syarat</i>	%	20	21,92	109,60
	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp	139.528.700	138.459.414	99,23
	<i>Presentase Sampel makanan Industri Rumah Tangga Pangan yang diuji laboratorium yang memenuhi syarat</i>	%	70	128	182,86
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp	139.528.700	138.459.414	99,23
	<i>Jumlah pengawasan sarana Industri rumah tangga pangan</i>	sarana industri rumah tangga pangan	48	75	156,25
	<i>Jumlah pengawasan produk pangan industri rumah tangga</i>	industri rumah tangga	60	77	128,33
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		326.237.050	314.646.250	96,45
	<i>Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri</i>	%	19,8	19,42	98,08
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	326.237.050	314.646.250	96,45

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri</i>	%	19,8	19,42	98,08
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	326.237.050	314.646.250	96,45
	<i>Jumlah Poskestren Yang dilakukan pendampingan</i>	poskestren	10	5	50
	<i>Cakupan Taman Posyandu Optimal</i>	%	15	0	0
	<i>Jumlah sasaran yang mengikuti KIE Keamanan Pangan</i>	orang	300	369	123
	<i>Jumlah petugas kesehatan yang memberikan konseling</i>	Petugas kesehatan	38	38	100

PERMASALAHAN

1. Adanya 6 kasus kematian ibu, 48 kasus kematian bayi (umur 0-12 bulan) dan 7 kasus kematian balita (0 - 4) tahun dari target 0 di Kabupaten Madiun.
2. Masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) kurang memahami resiko hamil pada kondisi 4 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat, Banyak).
3. Pada pengadaan obat dan vaksin ada 3 kontrak obat tidak datang sampai batas waktu pelaksanaan sehingga dilakukan cut off kontrak pada barang yang tidak tersedia. Realisasi capaian target kinerja melebihi 100% dikarenakan terdapat pergeseran anggaran sehingga item obat yang diadakan bertambah dari 110 item menjadi 133 item.
4. Pada pengadaan Bahan Habis Pakai realisasi capaian target kinerja melebihi 100% dikarenakan terdapat perubahan anggaran sehingga item BHP yang diadakan bertambah dari 30 item menjadi 36 item.
5. Pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), jumlah data apotek yang berijin memiliki realisasi capaian target kinerja melebihi 100% dikarenakan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga dilakukan penambahan target sarana apotek yang dikunjungi.



6. Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, jumlah pemohon PIRT yang mengikuti BIMTEK PKP dan telah diperiksa sarana serta telah terbit sertifikat PIRT memiliki realisasi capaian target kinerja melebihi 100% dikarenakan terdapat inovasi kegiatan baru di DINKES yaitu Latare Bu Madi, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan jemput bola terhadap para pengusaha UMKM. Tingginya antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan produk pangan olahan mereka, sehingga target capaian kinerja melebihi 100% yaitu 138,46%.
7. Pada Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan. Jumlah sarana IRTP serta produk IRTP yang diperiksa memiliki realisasi capaian target kinerja melebihi 100% dikarenakan adanya pergeseran anggaran (DAK NF-BPOM).
8. Pada Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, jumlah sasaran yang mengikuti KIE realisasi capaian target kinerja melebihi 100% dikarenakan adanya menu baru pada kegiatan KIE yang bersumber dana DAK NF-BPOM sehingga target target capaian kinerja melebihi 100% yaitu 123%.
9. Pada kegiatan pemeliharaan alat kesehatan tercapai 100%, namun dalam pelaksanaan prosentase kelayakan dibandingkan jumlah total kesedihan peralatan masih dibawah 60%, hal ini dikarenakan pendanaan dalam pemeliharaan dan kalibrasi sangat minim. Mengacu pada data validasi aspek, jumlah peralatan di faskes pemerintahan harus diangkat minimal 60% kelayakan laik pakai.
10. Cakupan SPM bidang kesehatan secara rata rata dari 12 indikator tergolong rendah dikarenakan pada perhitungan SPM nilai penyebut pada penghitungan SPM menggunakan nilai sasaran proyeksi sehingga



- cakupan menjadi lebih kecil dikarenakan jumlah sasaran riil lebih kecil daripada sasaran proyeksi.
11. Semua program yang menggunakan sasaran data proyeksi maka cakupan pelaksanaan program cenderung kurang memenuhi target, dikarenakan sasaran riil lebih rendah.
 12. Kegiatan Posbindu masih belum berjalan optimal karena masa transisi setelah 2 tahun berhenti karena Pandemi Covid 19.
 13. Pada kegiatan skrining kanker rahim dan payudara masih terkendala rendahnya kesadaran rasa malu dan,takut sasaran Wanita Usia Subur terhadap pemeriksaan skrining IVA.
 14. Pada kegiatan pemeriksaan penderita Hipertesi yang mendapatkan pelayanan sesuai standat masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya ke Fasyankes.
 15. Pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pemberian PMT pangan lokal belum ada masih berupa biskuit.
 16. Indikator puskesmas terbentuk Pos UKK baru mencapai 96,15% atau dari 26 puskesmas sudah ada 25 puskesmas yang terbentuk pos UKK kurang 1 puskesmas yang belum terbentuk pos UKK yaitu Puskesmas Pilangkenceng, hal ini dikarenakan kurangnya advokasi dan koordinasi puskesmas kepada desa dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan kesehatan bagi pekerja informal.
 17. pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan secara umum capaian indikator serapan anggaran mencapai 53,11% dikarenakan adanya kesenjangan antara harga pada perencanaan dengan harga riil pelaksanaan dan volume perencanaan yang didasarkan pada tahun sebelumnya dengan volume riil pelaksanaan kegiatan. tetapi secara umum capaian indikator program sudah melebihi target dikarenakan sudah merupakan kegiatan rutin puskesmas.
 18. pada kegiatan pengelolaan surveillance kesehatan kegiatan imunisasi belum berjalan optimal sehingga cakupan desa UCI menjadi hanya 91%,



pada penemuan kasus AFP baru tercapai target 83,33% atau dari target 6 kasus baru tercapai 5 kasus.

19. Pada kegiatan akreditasi puskesmas penyerapan anggaran 0%. Berdasarkan data yang ada 26 puskesmas sudah terakreditasi (22 puskesmas masa berlaku sertifikat sudah habis, 4 puskesmas masih berlaku). Sesuai surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa sertifikat akreditasi masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
20. Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal (SKM) 9 Jenis Tenaga Kesehatan Wajib Ada sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, dari 26 Puskesmas baru 17 Puskesmas (73,08%) yang memenuhi SKM. Berdasarkan permasalahan tersebut sudah diupayakan pemenuhan kekurangan Tenaga Kesehatan melalui PPPK namun ada formasi Penyuluh Kesehatan Masyarakat yg tidak terisi dikarenakan adanya kebijakan baru dari Kemenkes terkait Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat sehingga banyak pelamar yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut karena belum memiliki STR.
21. Pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart masih belum mencapai target yaitu baru 77,61%.
22. Pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV sesuai standart masih belum mencapai target yaitu baru 86,54%.
23. Berdasarkan hasil pelaksanaan survey (E-sukma) Tahun 2022 tercatat 50 Responden dengan hasil survey sebagai berikut :
 - a) Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya (3,18).
 - b) kemudahan prosedur pelayanan (3,22).
 - c) kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (3,04).
 - d) kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (3,74).



- e) kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (3,18).
- f) kompetensi/kemampuan Petugas dalam pelayanan (3,18).
- g) perilaku Petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (3,18).
- h) kualitas sarana dan prasarana (3,02).
- i) penanganan pengaduan pengguna layanan (3,7).

Nilai IKM = 80,96

Hasil IKM tahun 2022 sebesar 80,96 masih belum memenuhi target 88%.

- 24. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan puskesmas sebesar 74,88% sudah sesuai target 73%, meskipun demikian masih ada 12 puskesmas yang pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di bawah rata2 puskesmas 74,88%.
- 25. Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan target melebihi target, karena mendapat tambahan anggaran (PAK).
- 26. Jumlah perawat ponkedes dan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai target 40 orang (38 orang perawat ponkesdes dan 2 orang dokter di puskesmas sesuai standar).
- 27. Jumlah petugas kesehatan yang memberikan konseling sesuai target yaitu 38 orang. dengan sasaran yang diberi konseling 1514 KK.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

- 1. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Madiun melalui peningkatan kapasitas tenaga bidan di Puskesmas Poned oleh dokter spesialis anak dan spesialis kandungan, pemenuhan sarana USG di setiap Puskesmas, Pelatihan tenaga dokter dan bidan tentang USG, pemeriksaan ANC dari 4 kali menjadi 6 kali, perbaikan sistem rujukan.
- 2. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian permasalahan Pengadaan obat agar tidak melanggar ketentuan adalah dengan cara Cut Off



- terhadap Penyedia yang tidak bisa menyediakan barang dikarenakan kekosongan stok barang.
3. Pengusulan ssh di tahun sebelumnya sebagai dasar usulan ssh baru untuk anggaran tahun berikutnya.
 4. Upaya agar lebih efektif dalam pemanfaatan alat termasuk pemeliharannya maka diupayakan alat kesehatan yang usia pakai lebih dari 10 tahun diusulkan untuk dilakukan penggantian.
 5. Pencapaian SPM sangat tergantung dari nilai sasaran. Dikarenakan ada perbedaan sasaran maka dinas kesehatan memiliki dua data sasaran. yang pertama adalah sasaran berdasarkan proyeksi BPS dan sasaran kedua adalah sasaran riil di masyarakat sesuai kondisi yang ditemukan, sehingga dinas kesehatan memiliki 2 nilai perhitungan SPM sesuai peruntukannya.
 6. untuk target awal tahun, SPM menggunakan target proyeksi sedangkan di akhir tahun baru bisa ditentukan target riil sasaran.
 7. Semua program yang menggunakan sasaran data proyeksi maka cakupan pelaksanaan program cenderung kurang memenuhi target. untuk menggambarkan dan melihat cakupan SPM maka setiap program harus memiliki 2 perhitungan nilai SPM.
 8. Upaya agar lebih efektif dalam pemanfaatan alat termasuk pemeliharannya maka diupayakan alat kesehatan dilakukan inventarisasi dengan mengutamakan efisiensi, target sasaran dan efektifitas dalam penggunaan, penyimpanan dan perawatan untuk penambahan usia pakai peralatan kesehatan perawatan di fasyankes pemerintahan, sebelum melakukan belanja pada unit alat kesehatan.
 9. Pengaktifan kembali kegiatan Posbindu di masyarakat dengan mensosialisasikan program pelayanan pemeriksaan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan dan mencukupi kebutuhan Alkes dan BMHP untuk menunjang pemeriksaan kesehatan.
 10. Pada sasaran wanita usia subur kita lakukan program screning massal dan meningkatkan sosialisasi bahaya kanker leher rahim dan payudara melalui media cetak dan elektronik.



11. Pemeriksaan dan pemantauan pasien Hipertensi dilakukan dengan bekerja sama lintas program dan lintas sektor terkait.melalui Prolanis, Posyandu Lansia, Posbindu,Pos UKK, dll untuk menjanging sasaran lebih banyak lagi dengan memanfaatkan sistim informasi data dari BPJS, E link, dan mengoptimalkan Jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas.
12. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat untuk Pemberian Makanan Tambahan tidak berupa biscuit lagi tetapi berupa pangan lokal sesuai daerah masing-masing.
13. Untuk mencapai target satu puskesmas minimal satu pos UKK maka Dinkeskab memerintahkan puskesmas yang belum terbentuk pos UKK untuk segera membentuk Pos UKK dengan target waktu 1 bulan dengan bukti SK kepala desa.
14. pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dalam perencanaan penganggaran akan mengacu pada standar harga terbaru dan volume yang mendekati keadaan sebenarnya.
15. Pada kegiatan pengelolaan surveillance kesehatan kegiatan imunisasi tidak berjalan optimal sehingga cakupan desa UCI menjadi hanya 90,78%, untuk itu perlu dilakukan penekanan pada puskesmas bahwa kegiatan imunisasi harus seiring dengan penanganan Covid-19, disamping itu petugas akan mendata bayi yang belum terimunisasi dan akan melakukan sweeping pada sasaran yang belum terimunisasi sehingga capain IDL 80% tercapai karena syarat desa UCI minimal 80% bayi terimunisasi lengkap karena syarat desa UCI adalah minimal 80% bayi sudah terimunisasi lengkap, mendorong pelayanan imunisasi dilaksanakan kembali di posyandu yang sempat terhenti karena Covid 19. Pada penemuan kasus AFP yang baru tercapai 83,33%, maka akan dilakukan MOU dengan RS Caruban, Dolopo, Dungus dan Soedono untuk melaporkan setiap ada penemuan kasus AFP ke Dinkes, mendorong PKM untuk lebih aktif melakukan kasus pelacakan sesuai dengan Definisi Operasional Kasus AFP, sehingga akan membantu pencapaian target penemuan kasus AFP.
16. Pelaksanaan survei akreditasi direncanakan pada tahun 2023.



17. Dalam upaya pemenuhan persyaratan STR bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu syarat rekrutmen PPPK dalam rangka pemenuhan Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas, Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Organisasi Profesi utamanya dengan Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) cabang Kabupaten Madiun untuk membantu anggotanya dalam pengurusan STR, sehingga saat rekrutmen PPPK tahun 2023 sudah bisa memenuhi persyaratan STR dan formasi Penyuluh Kesehatan Masyarakat bisa terpenuhi dan Puskesmas yang memenuhi SKM 9 Jenis Tenaga Kesehatan Wajib Ada bisa terpenuhi 100%.
18. Pada kegiatan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar belum tercapai target yang seharusnya 100% baru mencapai 77,61%, dikarenakan karena Cut off point nya dari Kemenkes adalah 5 Maret 2023, sehingga masih memungkinkan untuk tercapainya penambahan target. Disamping itu akan dilaksanakan MOU dengan Dokter Praktek Mandiri, Klinik Swasta untuk melaporkan semua pasien TBC yang berobat dan dimasukkan sistem Aplikasi SITB sehingga dapat mendongkrak capaian pelayanan TBC.
19. Pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV sesuai standart masih belum mencapai target yaitu baru 86,54%, salah satu penyebab belum tercapainya target tersebut salah satunya adalah belum optimalnya jejaring baik Dokter SPOG (Praktek Mandiri) maupun Bidan Praktik Mandiri yang melaporkan skrining HIV ke Puskesmas. Untuk itu akan didorong kedepannya Praktek Dokter SPOG maupun Praktek Bidan Mandiri untuk melaporkan hasil skrining HIV sehingga mampu mendongkrak capaian tersebut.
20. Hasil IKM tahun 2022 sebesar 80,96 masih belum memenuhi target 88%. Kriteria Mutu pelayanan B dengan kinerja Baik (Interval 76,61 - 88,30). Dinas Kesehatan hasil IKM masuk kriteria Baik, tetapi memang masih perlu perbaikan pelayanan terhadap masyarakat dengan menyediakan sarana, prasarana dan SDM khusus pelayanan publik.

21. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan puskesmas sebesar 74,88% sudah sesuai target 73%, meskipun demikian masih ada 12 puskesmas yang pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di bawah rata2 puskesmas 74,88%. Secara bertahap puskesmas yang belum memenuhi target akan direncanakan pengadaan peralatan kesehatan baik menggunakan anggaran APBD maupun dana BLU puskesmas.

b. RSUD CARUBAN

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	%	0,8	0,8	100
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	89	89,57	100,6

Sesuai dengan target tujuan dari RSUD Caruban yaitu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan indikator indeks kesehatan dengan target sebesar 0,8 pada tahun 2022 tercapai sebesar 0,8 dengan tingkat capaian sudah memenuhi target (100%). Hal ini dapat tercapai berkat kolaborasi yang baik diantara stakeholder pemberi pelayanan kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, Rumah sakit, dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Madiun.

Pada kinerja Sasaran RSUD Caruban kabupaten Madiun yang tercatat pada Renstra RSUD Caruban tahun 2018-2023 beserta perubahannya yaitu Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas dengan indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, pada Tahun 2022 dari target sebesar 89% terealisasi sebesar 89,57% dengan tingkat capaian sebesar 100,6%. Adapun indikator kinerja SPM tersebut mengacu pada Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit ini sebagai alat ukur mutu pelayanan Rumah Sakit yang merupakan gambaran kinerja pelayanan Rumah Sakit.



Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	111.507.474.133	100.102.303.373	89,8
	<i>Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase Capaian indikator SPM bagian tata usaha sesuai dengan standar</i>	%	76	87,50	115
	<i>Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar</i>	%	88	82,19	94
	<i>Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar</i>	%	91	93,33	103
	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83	81,20	97,9
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah</i>	%	88	93,36	106,09
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	19.573.626.046	18.772.038.913	95,9
	<i>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</i>	%	100	100	100
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	19.573.626.046	18.772.038.913	95,9
	<i>Jumlah ASN</i>	orang	324	297	91,67
	<i>Jumlah tenaga kesehatan ASN yang menangani Covid-19</i>	orang	120	28	30
1.2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp	91.903.848.087	81.332.575.999	88,5
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Verifikasi dan Akutansi yang memenuhi standar</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana yang memenuhi standar</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag Umum yang memenuhi standar</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag Kepegawaian yang memenuhi standar</i>	%	100	66,67	66,67
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Subbag perencanaan</i>	%	60	100	166,67



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>informasi yang memenuhi standar</i>				
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Medis yang memenuhi standar</i>	%	84,6	96,36	114
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Keperawatan yang memenuhi standar</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Medis yang memenuhi standar</i>	%	95,24	90	95
	<i>Persentase capaian indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Non Medis yang memenuhi standar</i>	%	90	88	98
1.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp	91.903.848.087	81.332.575.999	88,5
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Verifikasi dan Akutansi yang memenuhi standar</i>	indikator	2	2	100
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana yang memenuhi standar</i>	indikator	2	2	100
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Subbag Umum yang memenuhi standar</i>	indikator	4	4	100
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Subbag Kepegawaian yang memenuhi standar</i>	indikator	3	2	66,67
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Subbag perencanaan informasi yang memenuhi standar</i>	indikator	1	1	100
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Medis yang memenuhi standar</i>	indikator	65	57	96
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Pelayanan Keperawatan yang memenuhi standar</i>	indikator	3	3	100
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Medis yang memenuhi standar</i>	indikator	20	18	90
	<i>Jumlah indikator SPM RS pada Seksi Penunjang Non Medis yang memenuhi standar</i>	indikator	10	10	100
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.	16.194.011.800	14.903.756.639	92,0
	<i>Persentase capaian indikator</i>	%	100	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	SPM bidang keuangan sesuai dengan standar				
	Persentase Capaian indikator SPM bidang tata usaha sesuai dengan standar	%	76	87,50	115
	Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar	%	88	82,19	94
	Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar	%	91	93,33	103
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	16.194.511.800	14.903.756.639	92,0
	<i>Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Rumah Sakit yang sesuai standar</i>	%	61	65,17	107
2.1.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp.	4.522.153.953	3.825.092.578	84,6
	<i>Jumlah gedung rumah sakit yang direnovasi sesuai standar</i>	Unit / Paket	11	10	90,91
2.1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp	1.028.655.000	832.382.065	80,9
	<i>Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sesuai standar</i>	Unit	1	1	100
2.1.3	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.633.111.600	1.633.111.500	100
	<i>Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sesuai standar</i>	Unit	2	2	100
2.1.4	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	8.768.448.895	8.421.682.068	96,0
	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sesuai standar</i>	Unit	107	82	76,6
2.1.5	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp.	241.642.352	191.488.428	79,2
	<i>Jumlah Reagen/BAHP/Bahan Kimia yang tersedia sesuai standar</i>	Buah	6.339	6.339	100
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	Rp.	70.000.003	70.000.000	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi</i>	%	100	100	100
1.1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota	Rp	70.000.003	70.000.000	100
	<i>Persentase tenaga kesehatan yang memperoleh insentif penanganan Covid -19</i>	%	100	100	100
1.2	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp	70.000.003	70.000.000	100
	<i>Jumlah tenaga kesehatan non ASN yang menangani Covid-19</i>	Orang	80	12	20

PERMASALAHAN

1. Masih adanya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di RSUD Caruban.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Penambahan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar
2. Peningkatan kualitas/komptensi petugas pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan



c. RSUD DOLOPO

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	TUJUAN OPD : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,80	0,80	100
2	SASARAN OPD : Meningkatnya Standar Pelayanan minimal Rumah Sakit	Presentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	96,67	96,67	100

Tujuan RSUD Dolopo adalah Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator Indeks Kesehatan pada Tahun 2022 dengan capaian 100% dari target 0,80 dan realisasinya 0,80.

Sasaran RSUD Dolopo yaitu Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan indikator Presentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit pada Tahun 2022 target 96,67% dan realisasinya 96,67%. Presentase capaian SPM yang dicapai 100% tersebut dari 90 indikator SPM sesuai dengan Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dapat dicapai 87 indikator yang sesuai target SPM, indikator SPM yang belum sesuai standar adalah :

No	Indikator	Standar SPM	Realisasi
1	Kepuasan pelanggan pada Instalasi Rawat Jalan	$\geq 90\%$	83,01 %
2	Kematian pasien > 48 jam	$\leq 0,24\%$	0,89 %
3	Pertolongan persalinan melalui <i>section secaria</i>	$\leq 20\%$	52,73%

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	139.334.470.118	117.241.790.608	84,14
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	-	80,01	82,95	7,94
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah</i>	%	90	100	97,63
	<i>Persentase capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai standar</i>	%	100	100	61,76
	<i>Persentase capaian indikator</i>	%	87,5	100	91,03

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	SPM bagian tata usaha sesuai standar				
	Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan sesuai standar	%	97,87	93,62	74,03
	Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang sesuai standar	%	96,77	100	99,31
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	11.550.946.659	11.277.544.792	97,63
	<i>Presentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</i>	%	100	100	98,37
	<i>Presentase pemenuhan insentif nakes ASN yang menangani Covid-19</i>	%	100	100	82,68
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	11.550.946.659	11.277.544.792	97,63
	<i>Jumlah ASN</i>	Orang	155	169	98,37
	<i>Jumlah nakes ASN yang menangani Covid-19</i>	Orang	75	75	82,68
1.2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp.	127.783.523.459	105.964.245.816	82,92
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbagian Umum sesuai dengan standar</i>	%	100	100	90,94
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbagian Kepegawaian sesuai dengan standar</i>	%	66,67	100	91,78
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbagian Perencanaan sesuai dengan standar</i>	%	100	100	87,17
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbidang Pelayanan Medis sesuai dengan standar</i>	%	100	95,45	73,99
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar</i>	%	96	92	95,99
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbidang Penunjang Medis sesuai dengan standar</i>	%	95,83	100	99,24
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbidang Penunjang Non Medis sesuai dengan standar</i>	%	100	100	99,58
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbidang Penunjang Medis sesuai dengan standar</i>	%	66,67	100	0,00

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Presentase capaian indikator SPM Subbidang Penunjang Non Medis sesuai dengan standar</i>	%	100	100	61,76
1.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.	127.783.523.459	105.964.245.816	82,92
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbagian Umum sesuai dengan standar</i>	Indikator	4	4	90,94
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbagian Kepegawaian sesuai dengan standar</i>	Indikator	3	3	91,78
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbagian Perencanaan sesuai dengan standar</i>	Indikator	1	1	87,17
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbidang Pelayanan Medis sesuai dengan standar</i>	Indikator	22	21	73,99
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar</i>	Indikator	24	23	95,99
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbidang Penunjang Medis sesuai dengan standar</i>	Indikator	24	24	99,24
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbidang Penunjang Non Medis sesuai dengan standar</i>	Indikator	7	7	99,58
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbidang Anggaran dan Mobilisasi Dana sesuai dengan standar</i>	Indikator	3	3	0,00
	<i>Jumlah indikator indikator SPM Subbidang Verifikasi dan Akuntansi sesuai dengan standar</i>	Indikator	1	1	61,76
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RP.	41.522.456.313	37.812.630.500	91,07
	<i>Persentase capaian indikator SPM bidang pelayanan sesuai standar</i>	%	95,65	93,62	99,28
	<i>Persentase capaian indikator SPM bidang penunjang sesuai standar</i>	%	96,88	100	90,82
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	41.522.456.313	37.812.630.500	91,07

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit yang sesuai standar</i>	%	64	67,26	91,07
2.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.200.000.000	1.191.357.760	99,28
	<i>Jumlah sarana penunjang pelayanan rumah sakit yang diadakan</i>	Unit	23	23	99,28
2.1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	37.530.000.000	33.836.771.740	90,16
	<i>Jumlah gedung rumah sakit yang diadakan</i>	Unit	6	6	90,16
2.1.3	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp.	2.792.456.313	2.784.501.000	99,72
	<i>Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan</i>	Unit	13	13	99,72
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp.	413.928.574	313.928.574	75,84
	<i>Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi</i>	%	100	100	75,84
3.1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.	413.928.574	313.928.574	75,84
	<i>Persentase pemenuhan insentif nakes non ASN yang menangani Covid</i>	%	100	100	75,84
3.1.1	Sub Kegiatan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp.	413.928.574	313.928.574	75,84
	<i>Jumlah tenaga kesehatan non ASN yang menangani Covid-19</i>	Orang	75	75	75,84

PERMASALAHAN

Pelayanan pasien belum bisa maksimal dan memuaskan karena sebagian besar pelayanan masih menggunakan gedung lama belum bisa pindah ke gedung baru karena masih ada fasilitas yang belum lengkap di gedung baru



PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pada tahun 2023 melanjutkan pembangunan dan melengkapi fasilitas di gedung baru agar sesuai standar dan bisa segera digunakan untuk pelayanan pasien.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perekonomian	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	47,72	53,73	112,59
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bina Marga	Infrastruktur Bina Marga Kondisi Baik	%	43,91	47,22	107,54
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Irigasi	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	82,34	80,45	96,32
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pemukiman Perdesaan	Persentasi Kebutuhan Air Minum Sehari-hari yang terlayani oleh jaringan perpipaan pedesaan	%	2,47	3,19	129,14
		Persentasi Limbah Domestik yang dikelola	%	8,29	14,53	175,27
	Meningkatkan Kualitas Gedung Pemerintah Layak Publik	Persentase Gedung Kantor / Dinas / Badan kondisi baik	%	88,14	88,14	100
	Meningkatkan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Tata Ruang yang Berlaku	Persentase dokumen tata ruang yang dikelola	%	60,00	88,89	148,15

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun menentukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur sesuai Tugas, Pokok dan Fungsinya ;
2. Peningkatan kualitas kondisi jalan dan jembatan ;
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur irigasi ;
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pedesaan / kelurahan ;
5. Peningkatan kualitas sarana prasarana dan gedung pemerintah ;
6. Peningkatan pelayanan dan pengendalian pemanfaatan ruang.



Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun menentukan kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan / peningkatan / pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas
2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi untuk pelayanan dasar sesuai kebutuhan
3. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai kebutuhan
4. Melaksanakan pembangunan / rehabilitasi gedung-gedung pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5. Melaksanakan pembangunan / rehabilitasi sarana prasarana kelurahan berdasarkan skala prioritas
6. Melaksanakan penyediaan dan pengembangan jaringan air bersih pedesaan sebagai pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih
7. Melaksanakan peningkatan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang untuk efisiensi pengendalian dan pemanfaatan ruang. Selanjutnya langkah strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam program, kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. Program dalam hal ini merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sarasanya Tahun Anggaran 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun memiliki 10 (Sepuluh) program yang dijabarkan dalam 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) subkegiatan dengan rincian Program tersebut adalah sebagai berikut :



- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (7 kegiatan dan 20 subkegiatan);
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (2 kegiatan dan 10 subkegiatan);
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (1 kegiatan dan 3 subkegiatan);
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (1 kegiatan dan 2 subkegiatan);
- e. Program Pengembangan Permukiman (1 kegiatan dan 1 subkegiatan);
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (1 kegiatan dan 2 subkegiatan) ;
- g. Program Penataan Bangunan Gedung (1 kegiatan dan 2 subkegiatan);
- h. Program Penyelenggaraan Jalan (1 kegiatan dan 6 subkegiatan);
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi (3 kegiatan dan 3 subkegiatan);
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (2 kegiatan dan 3 subkegiatan);

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	15.325.415.569	13.609.283.082	88,80
	<i>Nilai Sakip Perangkat Daerah</i>	Nilai	83	77,35	93,19
	<i>Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Nilai	90	90	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	85.513.400	82.835.300	96,87
	<i>Persentase Jumlah Dokumen Pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	%	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	85.513.400	82.835.300	96,87
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Laporan Pemerintah yang disusun</i>	dok	6	6	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	9.980.362.429	9.046.317.440	90,64
	<i>Persentase Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN yang Terpenuhi</i>	%	100	100	100



NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	9.980.362.429	9.046.317.440	90,64
	<i>Jumlah Gaji dan Tunjangan yang ASN yang Terbayar</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	11.525.000	11.525.000	100
	<i>Persentase laporan dokumen aset yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	393.613.000	303.055.289	76,99
	<i>Jumlah dokumen aset yang tersusun</i>	dok	1	1	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	948.255.779	682.266.479	71,95
	<i>Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	9.183.235	9.143.000	99,56
	<i>Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	166.731.405	70.106.690	42,05
	<i>Jumlah kebutuhan peralatan gedung yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	33.411.850	23.510.600	70,37
	<i>Jumlah kebutuhan spanduk dan alat / bahan kebersihan kantor yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	236.772.089	199.276.500	84,16
	<i>Jumlah kebutuhan ATK dan mamin rapat yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	43.799.850	22.240.400	50,78
	<i>Jumlah kebutuhan fc, cetak dan jilid yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	64.744.350	54.934.000	84,85
	<i>Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan publikasi yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	393.613.000	303.055.289	76,99
	<i>Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.600.171.030	1.597.889.400	99,86
	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	%	100	100	100



NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.5.1	Pengadaan Alat Besar	Rp	1.545.700.000	1.543.455.000	99,85
	<i>Jumlah alat berat, alat ukur, dan bahan laboratorium yang diukur</i>	Paket	1	1	100
1.5.2	Pengadaan Mebel	Rp	54.471.030	54.434.400	99,93
	<i>Jumlah mebel kantor yang diadakan</i>	Paket	1	1	100
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	-	-	-
	<i>Jumlah peralatan dan mesin kebutuhan kantor yang terbayar</i>	Unit	-	-	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	915.068.269	861.800.352	94,18
	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	164.237.004	140.233.243	85,38
	<i>Jumlah Kebutuhan Air, Listrik, dan telepon kebutuhan kantor yang terbayar</i>	Bulan	12	12	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	750.831.265	721.567.109	96,10
	<i>Jumlah jasa administrasi, jasa kebersihan, dan jasa keamanan yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.784.519.662	1.326.649.111	74,34
	<i>Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	397.325.644	268.183.656	67,50
	<i>Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara</i>	unit	8	8	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	65.741.276	53.016.699	80,64
	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang terpelihara</i>	bulan	12	12	100
1.7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Rp	1.076.467.730	847.492.120	78,73
	<i>Jumlah sarana prasarana alat berat yang dipelihara (unit)</i>	Unit	15	15	100

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dicetak</i>	Berkas	600	600	600
	<i>Jumlah lokasi yang terlayani alat berat</i>	lok	50	50	100
1.7.4	Pemeliharaan Mebel	Rp	9.150.460	7.425.000	81,14
	<i>Jumlah mebel kantor yang dipelihara</i>	Bulan	12	12	100
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	235.834.552	150.531.636	63,83
	<i>Jumlah gedung dan sarpras gedung kantor yang dipelihara</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	24.669.017.702	23.864.632.489	96,73
	<i>Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi</i>	%	84,55	85,25	100,83
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.889.551.486	6.848.480.250	99,40
	<i>Persentase pengelolaan SDA dan sarana prasarana pengendali banjir yang terkelola</i>	%	100	100	100
2.1.1	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	116.100.000	115.130.950	99,17
	<i>Persentase luas baku sawah yang terlayani air irigasi</i>	%	3	3	100,00
2.1.2	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Rp	3.292.400.810	3.281.355.000	99,66
	<i>Jumlah sumur pompa dalam kondisi baik (unit)</i>	Unit	13	13	100,00
2.1.3	Rehabilitasi Kanal Banjir	Rp	2.594.561.534	2.583.908.300	99,59
	<i>Panjang saluran pembuang kondisi baik</i>	M ²	460	567	123,26
	<i>Jumlah sarana pengendali banjir yang terbangun / terpelihara</i>	lok	10	10	100
2.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Rp	669.400.000	659.392.800	98,49
	<i>Jumlah wilayah rawan banjir yang dipelihara</i>	Wilayah	2	2	100
2.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	216.999.142	208.693.200	96,17
	<i>Administrasi penunjang operasional kegiatan yang diadakan</i>	Paket	1	1	100
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Rp	17.779.466.216	17.016.152.239	95,71



NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	<i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik</i>	%	100	100	100
2.2.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	3.917.471.319	3.840.501.850	98,04
	<i>Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan</i>	M ²	3410	1966	57,65
2.2.2	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Rp	596.600.000	590.698.000	99,01
	<i>Jumlah saluran perpipaan sumur pompa dalam yang ditingkatkan</i>	Lok	5	5	100
2.2.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	11.074.169.644	10.727.336.144	96,87
	<i>Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi</i>	M ²	1963	2138	108,91
2.2.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	1.776.257.118	1.557.861.838	87,70
	<i>Jumlah wilayah irigasi yang dipelihara</i>	Wilayah	2	2	100
	<i>Panjang saluran irigasi yang dipelihara</i>	M ²	1717	4229	246,30
2.2.5	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rp	414.968.135	299.754.407	72,24
	<i>Administrasi penunjang operasional kegiatan DAK yang diadakan</i>	Paket	1	1	100
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	9.924.738.996	9.520.723.200	95,93
	<i>Persentase perluasan akses pelayanan air bersih (SR)</i>	%	2,47	3,19	129,14
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.924.738.996	9.520.723.200	95,93
	<i>Persentase pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum yang terpenuhi</i>	%	2,47	3,19	129,14
3.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp	837.019.014	783.035.900	93,55
	<i>Jumlah jaringan SPAM yang ditingkatkan</i>	Lokasi	19	21	110,52
3.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Rp	6.632.998.000	6.492.299.300	97,88
	<i>Jumlah SR yang dibangun</i>	SR	4613	5957	129,13
3.1.3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp	2.454.721.982	2.245.388.000	91,47
	<i>Panjang jaringan perpipaan yang ditingkatkan</i>	M ²	2000	35352,10	1.767



NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	5.001.581.567	4.904.997.561	98,07
	<i>Persentase sarana limbah yang terbangun</i>	%	0,40	0,6	150
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.001.581.567	4.904.997.561	98,07
	<i>Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang terpenuhi</i>	%	0,40	0,6	150
4.1.1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp	4.897.481.325	4.844.997.561	98,93
	<i>Jumlah SPALD-S yang dibangun (SR)</i>	SR	640	1122	175,31
4.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp	104.100.242	60.000.000	57,64
	<i>Administrasi penunjang operasional kegiatan IPLT</i>	paket	1	1	100
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	24.649.619.986	24.250.445.230	98,38
	<i>Persentase saluran drainase kondisi baik</i>	%	4,49	4,62	102,80
	<i>Persentase trotoar kondisi baik</i>	%	3,17	5,90	186,40
5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	24.649.619.986	24.250.445.230	98,38
	<i>Persentase panjang saluran drainase/gorong-gorong dan trotoar dalam kondisi baik</i>	%	7,66	10,52	137,37
5.1.1	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp	10.065.000.000	9.604.281.600	95,42
	<i>Persentase saluran drainase kondisi baik</i>	%	4,49	4,62	102,80
	<i>Persentase trotoar kondisi baik</i>	%	3,17	5,90	186,40
5.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp	14.584.619.986	14.566.571.080	99,88
	<i>Panjang saluran drainase yang ditingkatkan</i>	Km	6,200	4,550	73,39
	<i>Panjang saluran trotoar yang ditingkatkan</i>	Km	1,700	2,43	143,12
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp	4.606.714.014	4.367.421.700	94,81
	<i>Persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik</i>	%	49,50	62,55	126,38
6.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada	Rp	4.606.714.014	4.367.421.700	94,81



NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
	<i>Persentase jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah yang ditingkatkan</i>	%	49,50	62,55	126,38
6.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.606.714.014	4.367.421.700	94,81
	<i>Panjang jalan dan lingkungan yang ditingkatkan</i>	Km	2,100	0,934	44,48
	<i>Jumlah akses jalan wisata yang dipelihara / direhabilitasi</i>	lokasi	-		
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	9.806.593.762	9.632.912.827	94,81
	<i>Persentase penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang terpenuhi</i>	%	88,14	88,14	100
7.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp	9.806.593.762	9.632.912.827	94,81
	<i>Persentase jumlah sarpras dan gedung pemerintah kondisi baik sesuai rencana</i>	%	88,14	88,14	100
7.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp	171.950.209	78.710.000	45,77
	<i>Jumlah dokumen pendukung penyelenggaraan bangunan gedung</i>	dok	1	1	100
7.1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.634.643.553	9.554.202.827	99,17
	<i>Jumlah gedung kantor / dinas / badan yang direhabilitasi</i>	gedung	4	4	100
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	73.230.252.336	70.615.869.280	96,43
	<i>Persentase panjang jalan kabupaten kondisi mantap</i>	%	76,25	76,89	100,85
	<i>Persentase jumlah jembatan kondisi baik</i>	%	86,16	86,16	100,00
8.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	73.230.252.336	70.615.869.280	96,43

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase panjang jalan kabupaten kondisi baik</i>	%	28,15	29,99	106,57
8.1.1	Rekonstruksi Jalan	Rp	9.891.373.125	7.904.460.135	79,91
	<i>Panjang jalan yang direkonstruksi</i>	Km	3,23	3,906	120,93
8.1.2	Rehabilitasi Jalan	Rp	31.964.436.755	31.685.308.946	99,13
	<i>Panjang jalan yang rehabilitasi</i>	Km	10,1	18,902	187,15
8.1.3	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp	7.767.952.432	7.728.393.130	99,49
	<i>Panjang jalan yang direhabilitasi</i>	Km	5,8	7,457	128,57
8.1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp	16.796.680.463	16.625.085.478	98,98
	<i>Jumlah wilayah jalan yang dipelihara</i>	Wilayah	2	2	100
	<i>Panjang jalan kondisi sedang</i>	Km	313,440	348,42	111,16
8.1.5	Rehabilitasi Jembatan	Rp	5.227.161.344	5.206.539.780	99,61
	<i>Jumlah jembatan yang ditingkatkan</i>	buah	1	2	200
8.1.6	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp	1.582.648.217	1.466.081.811	92,63
	<i>Administrasi penunjang operasional kegiatan DAK jalan yang diadakan</i>	kegiatan	1	1	100
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	252.807.206	135.945.400	53,77
	<i>Persentase peningkatan jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat</i>	%	44,62	60,77	136,19
9.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp	167.343.652	69.776.000	41,70
	<i>Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi yang bersifat tenaga terampil</i>	%	100	100	100
9.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp	167.343.652	69.776.000	41,70
	<i>Jumlah tenaga terampil yang bersertifikat</i>	Orang	90	123	136,66
9.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	56.277.207	54.203.800	96,22
	<i>Persentase ketersediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
9.2.1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp	56.277.207	54.203.800	96,22
	<i>Jumlah dokumen jasa konstruksi yang disusun</i>	Dok	3	3	100
9.3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp	29.186.347	11.965.600	41,00
	<i>Persentase jumlah pelaksanaan seminar / sosialisasi / bimtek jasa</i>	%	100	100	100

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>konstruksi yang diadakan</i>				
9.3.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp	29.186.347	11.965.600	41,00
	<i>Jumlah pelaksanaan pengawasan penyedia jasa konstruksi</i>	Buah	45	30	66,66
10.	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Rp	2.007.016.688	1.992.101.650	99,25
	<i>Persentase dokumen rencana umum tata ruang yang rencana rinci tata ruang yang tersusun</i>	%	100	100	100
10.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp	1.827.745.388	1.820.754.150	99,62
	<i>Persentase jumlah dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
10.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp	169.910.992	169.266.800	99,52
	<i>Jumlah dokumen kelengkapan RTRW yang disusun</i>	Dok	3	3	100
	<i>Berkas kelengkapan dokumen RTRW yang berinci</i>	Berkas	15	10	66,66
10.1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp	1.657.834.396	1.651.487.350	99,62
	<i>Jumlah dokumen kelengkapan RRTR yang disusun</i>	Dok	6	6	100
	<i>Berkas kelengkapan dokumen RRTR yang terinci</i>	Berkas	15	30	200
10.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp	179.271.300	171.347.500	95,58
	<i>Persentase jumlah kajian teknis tata ruang yang dikeluarkan</i>	%	100	100	100
10.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp	179.271.300	171.347.500	95,58
	<i>Jumlah dokumen kajian dan informasi pemanfaatan ruang</i>	Dok	3	4	133,33
	<i>Berkas kelengkapan dokumen kajian dan informasi ruang</i>	paket	1	1	100



PERMASALAHAN

1. Jumlah anggaran yang ada belum sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
2. Kondisi cuaca tidak menentu (sering terjadi hujan) pada saat pelaksanaan pekerjaan.
3. Dalam kegiatan normalisasi sungai/saluran irigasi, tidak/belum ada patok batas yang jelas antara tanah milik masyarakat dengan sempadan sungai.
4. Belum ada pemetaan kewenangan yang jelas terkait pengelolaan air bersih kepada masyarakat antara Dinas PUPR dengan PDAM sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih pelayanan.
5. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum optimal.
6. Sebagian penyebab terjadinya kerusakan jalan karena diakibatkan belum adanya/belum berfungsinya saluran drainase.
7. Kegiatan pelebaran jalan belum diimbangi pelebaran jembatan yang ada di ruas tersebut.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Akibat keterbatasan jumlah anggaran, maka dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
2. Apabila terjadi hujan, pekerjaan terkait dihentikan dan kepada pelaksana pekerjaan diarahkan untuk tetap melaksanakan pekerjaan lain yang tidak terpengaruh cuaca sehingga target realisasi pekerjaan tetap dapat sesuai.
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah yang berbatasan dengan sungai sebelum dilakukan pekerjaan normalisasi sungai/saluran irigasi.
4. Sampai saat ini telah dan terus dilakukan koordinasi antara Dinas PUPR dengan PDAM terkait pemetaan wilayah kewenangan pelayanan.
5. Berkaitan dengan pengelolaan IPLT, Dinas PUPR terus melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan lembaga lain yang



terkait membahas penyerahan kewenangan pengelolaan IPLT, baik sarana prasarana, SDM maupun regulasi.

6. Pembangunan saluran drainase secara bertahap menyesuaikan anggaran yang tersedia pada lokasi-lokasi kerusakan jalan yang diakibatkan belum adanya/belum berfungsinya saluran drainase.
7. Kegiatan pelebaran jembatan diprioritaskan pada ruas-ruas jalan yang telah dilakukan pelebaran jalan.



4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	77	77,09	100,11
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya kualitas perumahan, kawasan permukiman dan terbangunnya tertib pertanahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani;	Unit	1.000	3.230	258,40
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Ha	29	57,78	199,24
		Persentase tanah asset pemerintah yang diserahkan	Bidang	5	4	80

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan indikator tersebut diatas sudah melebihi target dari yang ditetapkan, namun ada satu indikator yang pencapaiannya masih di bawah target yaitu Penyerahan asset pemerintah.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.279.156.982	4.112.572.242	96,11
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Angka	80,01	86,1	107,6
	<i>Hasil Survei Kepuasan ASN</i>	%	86	96	111,8
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	41.268.360	32.335.500	89,34
	<i>Jumlah dokumen pelaporan</i>	Dokumen	1	1	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	41.268.360	32.335.500	89,34
	<i>jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun</i>	Dokumen	3	3	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.378.741.293	3.057.198.496	90,48
	<i>Persentase pegawai yang terpenuhi penggajiannya</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.378.741.293	3.057.198.496	90,48



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Pegawai yang terbayarkan gajinya</i>	Orang	38	38	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	534.783.425	469.237.901	87,74
	<i>Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	150.268.980	149.604.450	99,56
	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia</i>	Paket	1	1	100
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	159.153.417	158.077.626	99,32
	<i>Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	34.527.028	24.250.400	70,24
	<i>Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia</i>	Jenis	3	3	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	8.870.000	7.480.000	84,33
	<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	181.964.000	129.825.425	71,35
	<i>Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	5.941.500	5.500.000	92,57
	<i>Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi</i>	Persen	100	100	100
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	5.941.500	5.500.000	92,57
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia</i>	set	1	1	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	685213079	595.537.582	86,91
	<i>Persentase jasa penunjang yang tercukupi</i>	%	100	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	76.644.329	63.851.280	83,31
	<i>Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi</i>	Jenis	4	4	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor	Rp.	608.568.750	531.686.302.	87,37
	<i>Jumlah Tenaga Pelayanan Umum yang tersedia</i>	Orang	24	24	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	262.692.211	246.547.751	93,85
	<i>Persentase sarana prasarana yang layak fungsi</i>	%	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	220.762.211	204.617.751	92,69



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara</i>	Unit	20	20	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	41.930.000	41.930.000	100
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara</i>	Unit	15	15	100
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.	744.959.554	701.544.105	94,17
	<i>Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani</i>	%	60	72,25	120,41
	<i>Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana</i>	%	0	0	0
	<i>Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah</i>	%	0	0	0
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000	99.500.400	99,50
	<i>Jumlah Rumah yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota</i>	Rumah	0	0	100
2.1.1	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000	99.500.400	99,50
	<i>Jumlah Dokumen</i>	Dokumen	1	1	100
2.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp.	50.000.000	27.080.683	54,16
	<i>Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	Dokumen	1	1	100
2.2.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp.	50.000.000	27.080.683	54,16
	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana yang tertangani</i>	Kegiatan	300	1	100
2.3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp.	594.959.554	574.963.022	96,63
	<i>Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	Dokumen	1	1	100
2.3.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp.	359.959.554	346.720.922	96,32
	<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun</i>	Kegiatan	1	1	100
2.3.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp.	235.000.000	228.242.100	97,12
	<i>Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terpelihara</i>	unit	1	1	100
3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.	2.841.469.160	2.755.826.261	96,98
	<i>Cakupan kawasan kumuh yang tertangani</i>	%	100	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp.	295.239.160	237.584.400	80,47
	<i>Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	Dokumen	1	1	100
3.1.1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Rp.	295.239.160	237.584.400	80,47
	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</i>	Dokumen	1	1	100
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp.	2.546.230.000	2.518.241.861	98,90
	<i>Luas Kawasan Kumuh Tertangani</i>	Lokasi	10	10	100
	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tertangani</i>	unit	3223	3223	100
3.2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp.	2.035.000.000	2.011.593.821	98,85
	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tertangani</i>	unit	3230	3230	100
3.2.2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp.	511.230.000	506.648.040	99,10
	<i>Luas Kawasan Kumuh Tertangani</i>	Lokasi	2	2	100
4.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp.	1.032.564.275	1.010.984.187	97,91
	<i>Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya</i>	%	0	0	-
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp.	1.032.564.275	1.010.984.187	97,91
	<i>Persentase Rumah Terlayani PSU</i>	%	100	100	100
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp.	150.000.000	139.506.855	93
	<i>Jumlah Serah terima PSU Perumahan</i>	buah	4	4	100
4.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp.	700.000.000	698.368.595	99,77
	<i>Jumlah Perbaikan atau Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	lokasi	3	3	100
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp.	182.564.275	173.108.737	94,82
	<i>Jumlah Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>	Bulan	12	12	100



PERMASALAHAN

1. Penanganan RTLH dari sumber dana selain APBD usulan banyak yang tidak melalui/ sepengetahuan Desa/kelurahan yang bersangkutan.
2. Sengketa Tanah Garapan : Jadwal audiensi untuk penyelesaian 2 kasus sengketa menyesuaikan Kementrian LHK
3. Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan dalam hal ini untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah , para Kades sasaran lokasi belum optimal dalam memberikan informasi.
4. Dalam pengesahan siteplan developer /pemohon belum dapat memahami secara utuh atas regulasi yang berlaku

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Mekanisme baru penanganan RTLH harus sesuai dengan database desa yang disusun atas dasar Musdes yang diperkadeskan.
2. Melakukan koordinasi baik secara langsung maupun bersurat resmi dengan Kementrian LHK.
3. Memberikan sosialisasi maksud dan tujuan terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
4. Dalam Pengesahan Site Plan menjawab atas permohonan secara tertulis dan menghadirkan pemohon untuk diberi penjelasan / diskusi atas regulasi yang ada dan berlaku.



5. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Stabilitas	Persen	78,18	81,22	103,88
	Meningkatkan Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat terhadap musibah kebakaran dan non kebakaran	Respons Time Rate terhadap penanganan kejadian kebakaran dan Non Kebakaran.	Menit	15	16	0,94
2.	SASARAN OPD : Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase laporan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindak lanjuti.	Persen	100	100	100
	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran dan non kebakaran	Persentase laporan kebakaran yang ditindaklanjuti dalam waktu 15 menit.	Persen	100	70,13	70,13

Indeks stabilitas ketentraman dan ketertiban umum mencerminkan dimana kondisi ketentraman dan ketertiban semakin kondusif, angka kriminilitas berkurang dan pelanggaran terhadap peraturan daerah semakin menurun. Setelah dilakukan survey oleh lembaga survey indeks ketentraman dan ketertiban diperoleh angka 81,22%. Target indeks stabilitas Satuan Polisi Pamong Praja pada Renja tahun 2022 adalah 52,92% dengan demikian capaian Indeks Stabilitas adalah 145%.

Dalam Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat terhadap musibah kebakaran dan non kebakaran dengan indikator, Meningkatkan Penanganan Pelayanan Tanggap Darurat terhadap musibah kebakaran dan non kebakaran target Renja 2022 adalah 15 menit akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah 16 menit, artinya waktu tanggap kebakaran TIDAK TERCAPAI.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7.563.412.935	7.234.425.264	95,65
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	80	66,82	0,8
	<i>Hasil Survei Kepuasan ASN</i>	Nilai	90		
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.719.789.286	5.421.612.900	
	<i>Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terenuhi</i>	%	100	100	100
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	5.562.089.286	5.270.693.400	
	<i>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN selama setahun</i>	%	100	100	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.	Rp.	157.700.000	150.919.500	95,70
	<i>Prosentase Teselenggaranya Pelaporan Keuangan OPD</i>	%	100	100	100
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	347.000.000	335.540.618	97
	<i>Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi</i>	6	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	7.000.000	6.995.000	99,93
	<i>Persentase kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	110.000.000	103.335.000	94
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor</i>	%	100	100	100
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	14.000.000	13.013.500	93
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga</i>	%	100	100	100
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	29.000.000	28.719.857	99,96
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan</i>	%	100	100	100
1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Rp.	7.000.000	3.510.000	50,14
	<i>Persentase tersedianya bacaan perundang undangan.</i>	%	100	100	100
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	180.000.000	179.967.260	99,98
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	%	100	100	100
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp.	1.099.309.993	1.080.249.352	98,27



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pemerintahan Daerah				
	<i>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	145.000.000	130.707.294	90,14
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	%	100	100	100
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Rp	32.500.000	30.157.986	92,79
	<i>Persentase Jasa Pelayanan kantor yang dilaksanakan</i>	%	100	100	100
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	921.809.993	919.384.072	99,74
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor</i>	%	100	100	100
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	397.313.656	397.022.394	99,93
	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	397.313.656	397.022.394	99,93
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</i>	%	100	100	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	4.084.986.165	3.871.861.587	94,78
	<i>Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	1.174.500.000	1.118.089.340	95,20
	<i>Jumlah Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti</i>	Kasus	25	6	100
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp.	347.000.000	343.658.000	99,04
	<i>Jumlah pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	Kasus	6	6	100
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan	Rp	79.304.062	54.843.000	69,16



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Massa				
	<i>Jumlah pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</i>	Laporan	18	18	100
2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Rp.	282.613.250	272.217.300	96,32
	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum</i>	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	11.400.000	11.293.500	99,07
	<i>Jumlah anggota LINMAS aktif</i>	orang	4.662	3.500	75,07
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Rp	74.879.508	72.074.190	96,25
	<i>Jumlah anggota Satpol PP dan Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	orang	4.250	2.060	48
2.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	160.000.000	149.986.600	93,74
	<i>Jumlah kerjasama dalam rangka penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</i>	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
2.1.7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	219.303.180	214.016.750	97,59
	<i>Jumlah sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban umum kondisi baik</i>	Unit	25	25	100
2.1.8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp.	0	0	0
	<i>Jumlah SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</i>	SOP	7	7	100
2.1.9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Rp.	0	0	0
	<i>Prosentase Jumlah pelanggaran perda dan perkara yang menurun</i>	%	25	18	72
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Rp.	2.848.086.165	2.699.601.197	94,79
	<i>Jumlah Penegakan perda dan perub sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
2.2.1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Rp.	131.508.000	130.982.000	99,60
	<i>Jumlah pengawasan kepatuhan perda dan</i>	Laporan	1	1	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>perbub</i>				
2.2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Rp.	696.609.494	684.382.230	98,24
	<i>jumlah penanganan atas pelanggaran perda dan perbub</i>	Kasus	6	6	100
2.2.3	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp.	2.019.968.671	1.884.236.967	99,78
	<i>Jumlah Penegakan perda dan perbub sesuai ketentuan</i>	Kasus	18	18	100
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp.	62.000.000	55.531.00	89,57
	<i>Jumlah PPNS yang aktif</i>		100	100	100
2.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp.	62.000.000	55.531.00	89,57
	<i>Jumlah PPNS yang mengikuti pengembangan karier PPNS</i>	Orang	4	4	100
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Rp.	2.158.305.000	2.153.341.402	99,77
	<i>Persentase kasus kebakaran yang tertangani</i>	%	50	27	54
	<i>Persentase kasus non kebakaran yang teratangani.</i>	%	150	390	380
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.104.805.805	2.100.198.000	99,78
	<i>Jumlah kasus pencegahan Kebakaran dan Non kebakaran sesuai dengan ketentuan</i>	Kasus	200	417	200
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	25.000.000	23.857.300	95,43
	<i>Jumlah pencegahan kebakaran dalam kabupaten kota</i>	Kasus	27	27	100
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	192.000.000	189.891.180	98,90
	<i>Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi kebakaran</i>	Kasus	27	27	100
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp.	186.250.000	185.557.490	99,63
	<i>Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran</i>	Kasus	250	250	100
3.1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp.	1.478.555.000	1.477.903.362	99,96
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran dan non</i>	Unit	1	1	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>kebakaran</i>				
3.1.5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp.	223.000.000	222.988.220	99,99
	<i>Jumlah pembinaan aparatur pemadam kebakaran</i>	Orang	32	32	100
3.2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Rp.	25.000.000	24.807.000	99,23
	<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>	Orang	32	32	100
3.3.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp.	25.000.000	24.807.000	99,23
	<i>Jumlah tenaga relawan Pemadam Kebakaran</i>	orang	32	32	100
3.3.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp.	28.500.000	28.335.000	99,42
	<i>Jumlah Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan sesuai standart operasional</i>	Laporan	1	1	100
3.3.2	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Rp.	28.500.000	28.335.000	99,42
	<i>Jumlah laporan pelaksanaan operasi</i>	Laporan	1	1	100

PERMASALAHAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun mengampu 3 (Tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota terdiri atas 4 (Empat) kegiatan dengan 12 (lima belas) sub kegiatan.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan dengan 13 (Tiga Belas) sub kegiatan.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan dan 7 (Tujuh) sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tingkat capaiannya telah sesuai dengan target dan



tidak menemukan kendala berarti. Demikian juga dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun mengingat potensi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, pelanggaran Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah semakin besar maka dipandang perlu untuk selalu meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan menambah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan Program Pencegahan, Pengendalian Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran untuk sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya belum bisa harapan masyarakat terkait dengan pelayanan pemadaman kebakaran.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Untuk meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja telah mengirimkan sebanyak 32 personil Pemadam Kebakaran untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan dengan kualifikasi Pemadam I di Balai Diklat Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Dari segi sarana prasarana di tahun 2022 dilaksanakan pengadaan 1 (Satu) unit mobil water supply yang fungsinya mensupply air ke unit mobil Damkar yang akan digunakan dalam menangani kebakaran.



b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Skor	160	113,40	141
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Skor	0,3	0,42	140

Indeks Risiko Bencana (IRB) menunjukkan tingkat risiko bencana suatu daerah didasarkan atas variable ancaman, kerentanan dan kapasitas. Semakin tinggi nilai IRB artinya semakin tinggi tingkat risiko bencana di daerah tersebut. Nilai IRB Kabupaten Madiun pada Tahun 2022 adalah 113,40 dan termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Madiun diperoleh nilai yaitu 0,42 dan masuk dalam kategori sedang. Berdasarkan nilai IRB dan IKD Kabupaten Madiun menggambarkan bahwa Kabupaten Madiun memiliki potensi bencana yang sedang dan ketahanan daerahnya yang sedang, untuk meningkatkan ketahanan daerah maka dibutuhkan upaya - upaya peningkatan kapasitas lebih tinggi lagi untuk menurunkan risiko bencana yang ada.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	2.470.244.469	2.288.307.158	92,63
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	83	80,20	96,62
	<i>Hasil Survei Kepuasan ASN</i>	Nilai	88	79,53	90,38
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.678.059.200	1.501.857.432	89,50
	<i>Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terenuhi</i>	%	100	100	100
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.678.059.200	1.501.857.432	89,50
	<i>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN selama setahun</i>	%	100	100	100
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	272.056.305	270.556.785	99,45



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	3.215.465	3.209.000	99,80
	<i>Persentase kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	35.827.627	34.878.000	97,35
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor</i>	%	100	100	100
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	6.102.635	5.821.035	95,39
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga</i>	%	100	100	100
1.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	67.956.288	67.834.100	99,82
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor</i>	%	100	100	100
1.2.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	17.200.290	17.192.600	99,96
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan</i>	%	100	100	100
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	141.754.000	141.622.050	99,91
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	%	100	100	100
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	114.950.000	114.438.000	99,55
	<i>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	600.000	88.000	14,67
	<i>Persentase kebutuhan pengiriman surat yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	92.600.000	92.600.000	100
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	%	100	100	100
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	21.750.000	21.750.000	100
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor</i>	%	100	100	100
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	405.178.964	401.454.941	99,08
	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp.	348.724.271	345.164.811	98,98

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Lapangan				
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</i>	%	100	100	100
1.4.2	Pemeliharaan Mebel	Rp.	2.090.000	1.988.000	95,12
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan mebel air</i>	%	100	100	100
1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	35.876.148	35.864.130	99,97
	<i>Persentase peralatan dan mesin yang terpelihara</i>	%	100	100	100
1.4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	18.488.545	18.438.000	99,73
	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor</i>	%	100	100	100
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp.	23.362.441.943	23.010.796.676	4,23
	<i>Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana</i>	%	68,20	43,18	63,31
	<i>Persentase korban terdampak bencana yang ditangani</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan</i>	%	100	100	100
2.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	250.000.000	0	0
	<i>Jumlah laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti</i>	kejadian	84	92	109,52
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	250.000.000	0	0
	<i>Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun</i>	Dokumen	1	0	0
2.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.	22.767.816.565	21.807.851.240	95,78
	<i>Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti</i>	%	100	100	100
2.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Rp.	45.844.613	42.449.900	92,60
	<i>Jumlah SDM/masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana</i>	orang	60	90	150
2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	44.766.900	44.600.400	99,63
	<i>Persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia</i>	%	100	100	100
2.2.3	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Rp.	22.581.783.052	21.631.118.440	95,79
	<i>Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana</i>	%	100	100	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
2.2.4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp.	95.422.000	89.682.500	93,99
	<i>Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana</i>	orang	700	1.650	235,7
2.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp.	641.464.050	640.011.386	99,77
	<i>Persentase kejadian bencana yang ditangani</i>	%	100	100	100
2.3.1	Respon Cepat Penanganan Bencana	Rp.	641.464.050	640.011.386	99,77
	<i>Jumlah kejadian bencana yang ditangani</i>	kejadian	84	92	109,52
2.4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp.	566.135.200	562.934.050	99,43
	<i>Jumlah desa tangguh bencana yang aktif</i>	desa	16	19	118,75
2.4.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	99.715.000	98.795.000	99,08
	<i>Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan</i>	dokumen	2	2	100
2.4.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	169.452.000	167.470.000	98,83
	<i>Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk</i>	desa	16	19	118,75
2.4.3	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Rp.	296.968.200	296.669.050	99,90
	<i>Jumlah laporan kejadian bencana yang diterima</i>	kejadian	84	92	109,52

PERMASALAHAN :

BPBD Kabupaten Madiun mengampu 2 (dua) program yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 4 (empat) kegiatan dengan 15 (lima belas) sub kegiatan, serta Program Penanggulangan Bencana yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan dengan 9 (sembilan) sub kegiatan. Secara garis besar pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tingkat capaiannya telah sesuai dengan target dan tidak menemukan kendala berarti. Sedangkan untuk Program Penanggulangan Bencana menemui beberapa kendala pencapaian target yaitu pada sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun memiliki capaian 0%. Dokumen KRB merupakan



dasar dari penyusunan dokumen perencanaan daerah terkait pelaksanaan penanggulangan bencana seperti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Dokumen Rencana Kontijensi, dimana semua dokumen tersebut merupakan pemenuhan SPM sub Urusan Bencana sehingga BPBD wajib menyusunnya secara bertahap dan terintegrasi. Mengingat urgensinya Penyusunan Dokumen KRB sehingga harus segera dilaksanakan, namun ternyata sesuai hasil reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Madiun oleh Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor Rev.01/1222/402.302/2022 terdapat kendala dimana waktu pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2022.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Belum tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota menjadi evaluasi untuk perencanaan selanjutnya sehingga akan kembali diusulkan pada Penganggaran tahun selanjutnya karena merupakan Dokumen yang wajib disusun sebagai salah satu dasar penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan untuk Pembentukan desa Tangguh bencana dihimbau kepada setiap desa terutama yang berada di Kawasan rawan bencana untuk secara mandiri membentuk desa Tangguh bencana dan BPBD siap mendampingi maupun memberikan arahan, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran untuk mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran di BPBD Kabupaten Madiun.
2. Keterbatasan sumberdaya dapat diatasi dengan berperan aktif dalam meningkatkan koordinasi pentahelix dengan melibatkan peran serta pemerintah pusat maupun provinsi melalui hibah dan penyediaan bantuan tanggap darurat bencana, juga melibatkan dunia usaha melalui program CSR. Sedangkan keterbatasan sumberdaya manusia ditindaklanjuti dengan adanya seleksi kompetensi bagi relawan penanggulangan bencana untuk melihat potensi kemampuan dalam penanganan bencana, serta meningkatkan kegiatan pelatihan pada tahun anggaran selanjutnya.



6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Dinas Sosial

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	TUJUAN OPD : Menciptakan Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Makanan	Rp	550.000	488.619	88,83
2	SASARAN OPD : Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	0,27	0,29	107,40

Tujuan Dinas Sosial untuk Menciptakan Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat dengan sasaran Penurunan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , di dalam penurunan tersebut mengampu 4 Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana adapun Program Prioritas Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana. Dalam Tahun 2022 sebanyak 229.234 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 229.902 jiwa berdasar DTKS , jadi untuk mencapai target adalah (Jumlah PPKS tahun (n-1) – jumlah PPKS tahun n dibagi jumlah PPKS tahun (n-1) dikalikan 100 terjadi penurunan sebanyak 0,29 %, atau sebanyak 668 jiwa dengan rincian 624 jiwa PKH Graduasi ,44 jiwa meninggal dan tidak layak untuk menerima.

Pencapaian penurunan PPKS Dinas Sosial melaksanakan antara lain pemberian bantuan berupa Sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi PPKS ,Rehabilitasi Sosial, Bantuan Sosial, Pembinaan, Pemberdayaan, bekerja sama dengan UPT Provinsi Jawa Timur, Kemensos dan Instansi Swasta dan OPD kewenangan Kab/Kota terkait penanganan PPKS.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.347.417.408	4.210.261.193	96,84
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	83	78,88	95,03
	<i>Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kesekretariatan perangkat daerah</i>	Nilai	80	80	100
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Rp.	2.000.000	1.999.000	99,95



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perangkat Daerah				
	<i>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan</i>	Laporan	25	25	100
1.1.1	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	2.000.000	1.999.000	99,95
	<i>Jumlah Laporan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Laporan	25	25	100
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.321.610.377	3.191.468.323	96,18
	<i>Presentase Pemenuhan Gaji ASN dan Tunjangan yang diterima</i>	%	100	100	100
1.2.1	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.321.610.377	3.191.468.323	96,18
	<i>Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan</i>	Orang/bulan	31	31	100
1.3	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	197.373.414	195.522.036	99,06
	<i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</i>	bulan	12	12	100
1.3.1	Sub.Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	4.914.180	4.872.050	99,14
	<i>Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	paket	2	2	100
1.3.2	Sub.Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	36.693.050	36.658.377	99,91
	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	paket	4	4	100
1.3.3	Sub.Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Rp.	4.349.540	4.322.500	99,38
	<i>Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan</i>	paket	4	4	100
1.3.4	Sub. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	15.702.602	14.566.500	99,38
	<i>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>	paket	6	6	100
1.3.5	Sub. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	3.600.000	3.600.000	100
	<i>Jumlah dokumen bahan bacaan dan</i>	dokumen	24	24	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>				
1.3.6	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	132.114.042	131.502.609	99,54
	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD</i>	Laporan	12	12	100
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	330.256.643	326.729.846	98,93
	<i>Prosentase jasa untuk penunjang kegiatan yang disediakan</i>	%	100	100	100
1.4.1	Sub. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	300.000	252.080	84,03
	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan</i>	laporan	2	2	100
1.4.2	Sub. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp.	51.768.768	50.015.213	96.61
	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	laporan	12	12	100
1.4.3	Sub. Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.	278.187.875	276.462.553	99,38
	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	laporan	12	12	100
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	204.844.949	204.173.113	99,67
	<i>Prosentase Pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara</i>	%	50	50	100
1.5.1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp.	169.824.259	169.290.988	99,69
	<i>Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	unit	10	10	100
1.5.2	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp.	500.000	478.850	95,77
	<i>Jumlah mebel yang dipelihara</i>	unit	4	4	100
1.5.3	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	9.020.000	9.020.000	100
	<i>Jumlah komputer, printer dan peralatan kantor lainnya yang dipelihara</i>	unit	12	12	100
1.5.4	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/rehab gedung kantor,kantor dan bangunan lainnya	Rp.	25.500.690	25.383.275	99,54

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara</i>	unit	2	2	100
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	291.332.025	290.368.875	99,67
	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	unit	6	6	100
1.6.1	Sub.Keg. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp.	38.272.025	38.049.000	99,42
	<i>Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan</i>	unit	5	5	100
1.6.2	Sub.Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	253.050.000	252.319.875	99,71
	<i>Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan</i>	unit	1	1	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp.	768.014.638	703.607.422	91,61
	<i>Presentase KPM yang diberdayakan</i>	%	19,42	100	514,93
	<i>Presentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</i>	%	87	100	87
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp.	135.852.934	135.326.895	99,61
	<i>Prosentase KAT yang diberdayakan</i>	KPM	19,42	100	
2.1.1	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Rp.	135.852.934	135.326.895	99,61
	<i>Jumlah KPM yang terfasilitas pemberdayaan sosial</i>	KPM	160	160	100
2.2	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Rp.	632.161.704	568.280.527	89,89
	<i>Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kesos</i>	PSKS	4	4	100
2.2.1	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Rp.	35.740.000	35.739.110	100
	<i>Jumlah Janda Perintis yang Menerima Bantuan</i>	orang	4	3	75
	<i>Jumlah siswa setingkat SLTA yg hadir di pembinaan nilai kepahlawanan</i>	orang	45	50	111,11
2.2.2	Sub.Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Rp.	596.421.704	532.541.417	89,29

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kab/Kota				
	<i>Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kesos</i>	PSKS	4	4	100
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp.	4.562.969.953	4.316.818.683	94,60
	<i>Presentase PSKS yang tertangani</i>	%	4,90	15,02	305,53
3.1	Keg.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Sosial	Rp.	848.504.370	783.895.900	92,38
	<i>Jumlah PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Sosial) yang ditangani</i>	orang	1.503	1.703	113,20
3.1.1	Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat	Rupiah	3.714.465.583	3.532.922.783	95,11
	<i>Jumlah Eks Psikotik yang tertangani</i>	orang	1477	1.477	100
	<i>Jumlah jenazah terlantar yang ditangani</i>	orang	12	7	58,33
	<i>Jumlah ODGJ yang direhabilitasi</i>	orang	14	14	100
	<i>Jumlah ODHA (orang dengan HIV/AIDS) yang mendapat bantuan</i>	orang	-	200	200
3.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	Rp.	3.714.465.583	3.532.922.783	95,11
	<i>Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial yang tertangani</i>	PPKS	7	7	100
3.2.1	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rupiah	201.532.980	201.345.656	99,91
	<i>Jumlah Panti yang dibantu</i>	Orang/panti	642/18	642/18	100
	<i>Jumlah Panti yang dibina</i>	panti	16	18	112,50
3.2.2	Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	1.273.923.850	1.222.420.448	95,95
	<i>Jumlah Disabilitas yg diberi bantuan</i>	orang	525	2.926	557,33
	<i>Jumlah Disabilitas dikirim untuk di rehabilitasi</i>	orang	20	25	125
	<i>Jumlah Disabilitas yang mendapat pembinaan</i>	orang	200	200	100
3.2.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada	Rp.	1.245.177.753	1.172.786.535	94,18

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	keluarga PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA				
	<i>Jumlah Anak Yatim piatu yang mendapat santunan/sembako</i>	anak	810	2.237	276,17
	<i>Jumlah Fakmis Penerima Bansos Uang</i>	orang	120	119	99,16
3.2.4	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Rp.	993.831.000	936.370.144	94,21
	<i>Jumlah Anak yang di Rehabilitasi</i>	anak	50	50	0
	<i>Jumlah LU yg diberi bantuan</i>	orang	100	1870	100
	<i>Jumlah Remaja bermasalah yang mengikuti pelatihan</i>	remaja	20	47	120
	<i>Jumlah anak yang mendapatkan hak pengasuhan</i>	anak	17	17	40
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.	5.318.713.044	4.812.837.910	90,49
	<i>Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin</i>	%	88	96,26	109,38
4.1	Keg. Pengelolaan data fakmis Cakupan Daerah Kab/Kota	Rp.	5.318.713.044	4.812.837.910	90,49
	<i>Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang dikelola secara elektronik</i>	jiwa	229.234	229.234	100
4.1.1	Sub. Kegiatan Pendataan Fakmis Cakupan Daerah Kab/Kota	Rp.	475.952.150	466.946.340	98,11
	<i>Jumlah Data DTKS yang diverifikasi dan validasi</i>	Jiwa	365.000	363.823	99,67
	<i>Jumlah data peserta PBIN yang dimutakhirkan</i>	jiwa	275.605	272.138	98,74
	<i>Jumlah data PBID yang dimutakhirkan</i>	jiwa	50.000	48.363	96,72
4.1.2	Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp.	4.642.760.894	4.345.891.570	93,61
	<i>Jumlah keluarga yang terfasilitasi bantuan sosial</i>	jiwa	352.605	308.541	87,50
	<i>Jumlah pendamping Bantuan Sosial Pangan (BSP) , SLRT dan PKH yang dibina</i>	orang	111	103	92,79
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp.	646.925.049	534.544.710	82,62
	<i>Persentase Korban Bencana Alam yang menerima bantuan dan bantuan khusus pasca Bencana</i>	%	100	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase Personil Tenaga yang dibina	%	100	100	100
	Persentase Korban Bencana Sosial yang difasilitasi	%	100	100	100
5.1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Rp.	116.120.658	22.045.500	18,98
	<i>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani</i>	jiwa	287	287	100
5.1.1	Sub. Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Rp.	116.120.658	22.045.500	18,98
	<i>Jumlah Korban Paska Bencana Alam dan kebakaran yang mendapat bantuan sembako dan permakanan</i>	KK	249	249	100
	<i>Jumlah Korban Paska Bencana Alam dan kebakaran yang mendapat bantuan Sandang</i>	KK	255	255	100
	<i>Jumlah Korban Bencana Sosial (Covid-19) yang dibantu</i>	KK	0	0	0
	<i>Jumlah Kelompok Rentan yang dibantu</i>	KK	38	38	100
5.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/ Kota	Rp.	530.804.391	512.499.210	96,55
	<i>Jumlah Kegiatan KSB dan Relawan Tagana yang dilaksanakan</i>	kegiatan	12	12	100
5.2.1	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp.	530.804.391	512.499.210	96,55
	<i>Jumlah Kegiatan Tagana dan KSB yang dilaksanakan (Sosialisasi Kebencanaan TMS, TTM, TMA)</i>	nasi bungkus	3589	3589	100
	<i>Jumlah relawan (KSB, Tagana, Pelopor) yang dibina</i>	orang	63	63	100

Permasalahan

Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan terserap rata – rata diatas 96 % sebagian tidak terserap dikarenakan untuk Pos Persediaan dan efisiensi Anggaran sedang Sub kegiatan jasa surat menyurat terserap 84,03 % dipergunakan untuk jasa pos sesuai kebutuhan dan kondisional.



Program Pemberdayaan Sosial capaian penyerapan sebesar 91,61 % sisa penyerapan 8,39 % yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang terdiri dari Sub Keg. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT dapat tercapai 99,95 % , Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota tercapai 100 % dan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kab/Kota dengan capaian penyerapan sebesar 89,29 % sisa penyerapan 10,71 % dikarenakan untuk jasa Karang Taruna tidak terserap dikarenakan SK belum selesai dan Pengadaan Modal untuk Lembaga Karang Taruna.

Program Rehabilitasi Sosial realisasi penyerapan sebesar 94,60 % terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar dan Gepeng di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, terdiri dari 5 Sub. Kegiatan antara lain Sub.Keg. Penyediaan Permakanan, Sub.Keg. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Sub.Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, Sub.Keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota adapun ke empat sub kegiatan diatas terealisasi rata rata 95 % sisa untuk efisiensi anggaran dan 1 (satu) penerima bantuan uang untuk keluarga fakir miskin meninggal, Bantuan uang kepada Individu (Kaum Duafa) dan bantuan sembako dalam BST untuk PPKS di Wilayah Kabupaten Madiun, Bantuan berupa Uang untuk Dampak Inflasi bagi 6.800 PPKS dan berupa sembako untuk ODHA sebanyak 200 orang. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat terserap 92,38 % dikarenakan ada pengembalian anggaran pos penanganan



jenazah terlantar dari target 12 orang realisasi 7 orang dan sisanya untuk efisiensi anggaran .

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin Cakupan Daerah Kab/Kota sudah terserap 90,49 %. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan Fakmis Cakupan Daerah Kab/Kota, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial dan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Sub. Kegiatan Pendataan Fakir Miskin dalam tahun 2022 sebesar 363.823 jiwa sedang jumlah data peserta PBIN dan PBID sejumlah 320.501 jiwa , adapun Permasalahan:

1. Seringnya ganti Operator di Desa.
2. Data dari Desa/Kel untuk yang sudah meninggal/Mampu tidak segera di nonaktifkan di Aplikasi SigNg dikarenakan kekurangtahuan dari operator terhadap penanganan data Aplikasi baru dari Kemensos.
3. Kesadaran desa untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi data masih kurang sehingga berpengaruh pada data jumlah DTKS.

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Jumlah keluarga yang terfasilitasi bantuan sosial (KPM PKH sejumlah 29.737, BPNT sejumlah 58.968 dan DBHCHT sejumlah 1.997 untuk Buruh Pabrik, Buruh Tani dan masyarakat lain adapun permasalahan sbb :

1. Data usulan OPD (dinas pertanian dan perikanan) setelah dilakukan verifikasi dan validasi bersama Tim Sekretariat DBHCHT Kab. Madiun masih ditemukan tidak sesuai kriteria.
2. NIK masih ditemukan belum padan dengan Dukcapil sehingga KPM tidak menerima bantuan.



3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Nilai	4,32	5,84	132
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Nilai	70	72-72	103

Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 4,99 sedangkan Agustus Tahun 2022 sebesar 5,84. Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT) Agustus 2022 terjadi kenaikan 0,18 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Hal ini disebabkan terjadinya beberapa hal diantaranya PHK, Bukan Angkatan Kerja yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan (Mengikuti Pelatihan +mencari Pekerjaan), serta Angkatan Kerja baru (mengikuti pelatihan + mencari pekerjaan).

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Madiun pada tahun 2022 sebanyak 407.037 orang mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2021 sebanyak 377.825 orang Kenaikan sebanyak 29.212 atau 5,95%. Sejalan dengan kenaikan Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)mengalami kenaikan 5,95%, tidak keseimbangannya persediaan lapangan kerja mengakibatkan TPT mengalami kenaikan.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp.	5.125.413.252	4.754.746.382	104,40
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	%	80.01	83.61	104,4
	<i>Prosentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah</i>	%	77	77	100
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.878.053.836	3.579.439.372	92,00
	<i>Presentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan</i>	Bulan	14	14	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1.1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.			
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bulan			
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	704.432.329	649.775.913	92,08
	<i>Presentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasional perkantor</i>	Bulan	12	12	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	19.800.000	19.711.000	99,55
	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.2.1	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	308.520.771	298.724.894	96,82
	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	214.606.316	207.095.203	94,16
	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM PELATIHAN KERA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp.	1.650.494.075	1.482.262.571	89,88
	<i>Persentase lulusan pelatihan yang bekerja</i>	%	77	77	100
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp.	1.593.185.500	1.425.450.558	89,54
	<i>Jumlah Peserta Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	Orang	128	277	216
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp.	1.593.185.500	1.425.450.558	89,54
	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	Orang	128	277	216
2.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp.	20.097.025	19,923.940	99,14
	<i>Persentase Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi</i>	%	32	32	100
2.2.1	Pembinaan lembaga Pelatihan Kerja swasta	Rp.	20.097.025	19,923.940	99,14
	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	Lembaga	10	10	100
2.3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	37.211.550	36.888.073	99,13
	<i>Persentase Pembinaan Perusahaan</i>	%	4	3,2	80
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas	Rp.	37.211.550	36.888.073	99,13



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tenaga Kerja				
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	Persh	35	28	80
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp.	127.705.610	122.493.300	95,92
	<i>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</i>	%	77	77	100
3.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	64.322.010	59.443.200	92,42
	<i>Jumlah Calon Tenaga Kerja yang dilayani Bimbingan Jabatan</i>	Orang	3000	3176	105,9
3.1.1	Pelayanan Antar Kerja	Rp.	64.322.010	59.443.200	92,42
	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKD dan AKL.</i>	Orang	2100	4504	214,5
3.2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	63.383.600	63.050.100	99,47
	<i>Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan</i>	Orang	200	200	100
3.2.1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp.	63.383.600	63.050.100	99,47
	<i>Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan</i>	Orang	200	200	100
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp.	234.393.258	226.093.360	96
	<i>Angka Sengketa Perusahaan per tahun</i>	%	80	80	100
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	181.453.608	173.972.860	96
	<i>Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</i>	%	5	5	100
4.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Rp.	38.523.000	36.610.360	95,04
	<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	Persen	10	10	100
4.1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp.	142.930.608	137.362.500	96,10
	<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	Laporan	608	608	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	52.939.650	52.120.500	96,10
	<i>Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan</i>	%	100	140	140
4.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	52.939.650	52.120.500	96,10
	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	Perkara	10	14	140

PERMASALAHAN :

1. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. hal ini terlihat dari realisasi fisik keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 92 %. Meskipun ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk memaksimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan.
2. Tingginya Angka Pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun pada tahun 2022 yang menembus angka 23.757 orang, terjadi tidak seimbangannya persediaan lapangan kerja mengakibatkan TPT mengalami kenaikan.
3. Terjadinya PHK terhadap karyawan PT. DWI PRIMA SENTOSA sebanyak 641 Orang.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Untuk Pemulihan Ekonomi dampak pandemi Covid-19 dengan cara meningkatkan pelatihan-2 terhadap pencaker sehingga akan mengurangi angka pengangguran.
2. Tingginya Angka Pengangguran di Kabupaten Madiun yang mencapai 23.757 orang, langkah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten madiun melalui Progran Kegiatan pelatihan yang berbasis kompeten yang sedianya



mempunyai target peserta pelatihan sejumlah 128 orang realisasi sejumlah 277 orang. Karena disaat PAK terjadi penambahan Anggaran dengan harapan dalam Pemulihan ekonomi saat ini angka pengangguran bisa tertangani.

3. Ditingkatkan lagi pembinaan untuk meminimalisir terjadinya kasus di perusahaan.



2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,80	92,14	100,37
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	38	38,15	100,39
		2. Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :

1. Indikator Indeks Pembangunan Gender dengan target 91,45 realisasi 91,77 dan capaian 100,35%. IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki dimana jika angka IPG semakin mendekati angka 100 maka kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. Angka capaian IPG Kabupaten Madiun 91,77 pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan angka IPG Jawa Timur yakni 91,67 dan nasional sebesar 91,27.
2. Indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan target 38%, realisasi 38,15% dan capaian 100,39% dikarenakan adanya komitmen Pokja Pengarusutamaan Gender/PUG dan komitmen Fokal Poin dari OPD
3. Indikator Persentase Kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditindaklanjuti dengan target 100%, dan realisasi 100%. Pada tahun 2022 terdapat laporan 36 tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dapat ditindaklanjuti sebanyak 36 kasus.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp.	126.787.216	125.985.340	99,37
	<i>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif</i>	Persen	81,93	81,93	100,00
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	54.137.500	54.002.190	99,75
	<i>Persentase fokal poin OPD yang aktif</i>	Persen	71,11	71,11	100
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp.	54.137.500	54.002.190	99,75
	<i>Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan ARG</i>	Persen	32	32	100
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Rp.	24.541.000	24.166.600	98,47
	<i>Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>	Persen	33,33	33,33	100
1.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, sosial dan Ekonomi (PAD)	Rp.	24.541.000	24.166.600	98,47
	<i>Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>	Orang	206	206	100
1.3	Penguatandan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	48.108.716	47.816.550	99,39
	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif</i>	Lembaga	68	68	100
1.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	48.108.716	47.816.550	99,39
	<i>Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berkompeten</i>	Orang	350	350	100
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	164.094.260	71.717.890	43,71
	<i>Rasio kekerasan terhadap perempuan</i>	Angka	15	3,004	499,33
2.1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Rp.	51.500.000	51.044.040	99,11
	<i>Persentase kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan</i>	Persen	100	100	100
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Rp.	51.500.000	51.044.040	99,11

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan				
	<i>Jumlah pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtPA)/TPPO</i>	Kegiatan	5	5	100
2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	97.515.000	5.597.500	5,74
	<i>Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standart</i>	Persen	100	100	100
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	97.515.000	5.597.500	5,74
	<i>Jumlah hasil visum korban kekerasan terhadap perempuan (KtPa)/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</i>	Orang	18	4	22,22
2.3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	15.079.260	15.076.350	99,98
	<i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif</i>	Persen	10	10	100
2.3.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	15.079.260	15.076.350	99,98
	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terfasilitasi</i>	Lembaga	30	30	100
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp.	244.033.000	243.657.600	99,85
	<i>Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif</i>	Persen	40	40	100
3.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp.	85.000.000	84.981.200	99,98
	<i>Persentase lembaga pemenuhan hak anak dari unsur pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang terfasilitasi</i>	Persen	25	25	100
3.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/kota	Rp.	85.000.000	84.981.200	99,98

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>	Lembaga	50`	50	100
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	159.033.000	158.676.400	99,78
	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif</i>	Lembaga	120	120	100
3.2.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	159.033.000	158.676.400	99,78
	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terfasilitasi</i>	Lembaga	200	200	100
	<i>Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Kab. Layak Anak</i>	Dokumen	1	1	100
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp.	374.979.000	226.298.863	60,35
	<i>Rasio kekerasan terhadap anak</i>	Angka	14	16,05	87,23
4.1	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Rp.	61.450.000	57.961.880	94,32
	<i>Persentase kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan</i>	Persen	100	100	100
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	61.450.000	57.961.880	94,32
	<i>Jumlah kegiatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtPa)/TPPO)</i>	Kegiatan	4	5	125
4.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	164.529.000	39.979.858	24,30
	<i>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani</i>	Persen	100	100	100
4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	164.529.000	39.979.858	24,30
	<i>Jumlah Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>	Kali	40	55	137,5

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>dalam satu tahun</i>				
4.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	149.000.000	128.357.125	86,15
	<i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terfasilitasi</i>	Persen	100	100	100
4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	76.806.000	56.167.225	73,13
	<i>Jumlah pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak</i>	Kegiatan	1	2	200
4.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	72.194.000	72.189.900	99,99
	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terfasilitasi</i>	Lembaga	20	20	100

PENJELASAN :

1. Program Perlindungan Khusus Anak dengan Indikator Rasio kekerasan terhadap anak, target 14%, realisasi 16,05% dan capaian 87,23%. Pada tahun 2022 terdapat 27 tindak kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa/Kelurahan yang berdampak meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah hasil visum korban kekerasan terhadap perempuan (KtPa)/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), target 18, realisasi 4 dan capaian 22,22%. Dari 9 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti terdapat 4 kasus yang perlu ditangani dengan visum.



3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah kegiatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtPa)/TPPO), target 4 kegiatan dengan realisasi 5 kegiatan dan capaian 125%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan Forum Anak Kabupaten Madiun Sumbang Sekolah pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang bertujuan untuk mencapai kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan dan untuk menekan tingginya kasus kekerasan.
4. Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam satu tahun, target 40, realisasi 55 dan capaian 137, 5%. Dalam satu kasus korban kekerasan terdapat beberapa kasus yang memerlukan lebih dari satu kali pendampingan terhadap korban kekerasan. Pendampingan korban kekerasan meliputi penjangkauan, pendampingan psikologi, tenaga ahli, penyidikan sampai dengan persidangan di pengadilan.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, target 1 kegiatan, realisasi 2 kegiatan dengan capaian 200%. Untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut perlu dilakukan 2 kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Petugas Puskesmas se-Kab. Madiun dan Tim P2TP2A dan Pelatihan Konselor Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Tim P2TP2A.



PERMASALAHAN

1. Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2026 belum bisa dilaksanakan dengan optimal.
2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan dan belum terminasi karena proses hukum masih berjalan.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Dilakukan sosialisasi secara masiv dalam setiap kegiatan terutama yang melibatkan lembaga peningkatan kualitas hidup anak agar RAD KLA dapat terlaksana dan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya terhadap pelaksanaan perbup tersebut melalui tim gugus tugas KLA.
 - a. Membentuk dan mengaktifkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat disetiap Desa / Kelurahan se Kabupaten Madiun.
 - b. Revitalisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) tingkat Kecamatan dan Desa serta Sosialisasi Sistem Tanggap Aduan Warga (Si Gapura) melalui Tim Penggerak PKK.



3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD: Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita makanan	Rp.	550.000	488.619	88,83
2.	SASARAN OPD: Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	61	61	100
	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	78	87,74	112,48
	Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan	Angka Produksi				
		Daging	Ton	9.575	10.293	107,49
		Telur	Ton	4.573	5.260	115,02
		Susu	Ton	234	269	114,95

Secara keseluruhan seluruh terget kinerja sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Masyarakat Kabupaten Madiun tercapai dengan baik.

Sasaran Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat pada Tahun 2022 dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dapat tercapai dengan nilai 60,98 atau 99,98% dari target yang ditetapkan.

Sasaran Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi juga dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,74 atau 112,48 %. Meskipun ada variabel pembentuk skor pola pangan harapan yaitu angka kecukupan energi (AKE) dan angka kecukupan protein (AKP) yang menjadi indikator di salah satu program yang belum mencapai angka yang dianjurkan karena kurangnya konsumsi di kelompok pangan umbi-umbian dan biji berminyak tapi dapat tertutup oleh konsumsi dari kelompok pangan lainnya terutama di kelompok padi-padian.

Begitu pula dengan sasaran meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan dengan indikator angka produksi daging, telur, dan susu.



Semua target produksi tercapai diatas 100%. Dengan persentase capaian : Daging = 107,49%, Telur = 115,02%, dan Susu = 114,95%.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.504.183.080	4.099.218.641	91,01
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	skor	76	70,32	92,52
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	skor	80	88	110
1.1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp.	3.574.744.080	3.226.138.087	90,25
	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.574.744.080	3.226.138.087	90,25
	<i>Tersedianya gaji dan tunjangan bagi pegawai</i>	Bulan	12	12	100
1.2	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp.	280.590.012	274.282.019	97,75
	<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	3.128.237	3.089.730	98,77
	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	121.108.885	120.892.000	99,82
	<i>Tersedianya perlengkapan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	6.158.480	5.712.700	92,76
	<i>Tersedianya peralatan rumah tangga</i>	Bulan	12	12	100
1.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	39.052.670	37.931.462	97,13
	<i>Tersedianya bahan logistik kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.5	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Rp.	8.341.520	8.179.500	98,06
	<i>Tersedianya bahan cetak kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	9.800.220	8.592.300	87,67
	<i>Tersedianya bahan bacaan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.7	Penyelenggaraan Rapat	Rp.	93.000.000	89.884.327	96,65



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	<i>Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	Bulan	12	12	100
1.3	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp.	130.672.909	118.331.550	90,56
	<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	30.000.000	29.648.100	98,83
	<i>Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	100.672.909	88.683.450	88,09
	<i>Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp.	283.998.614	250.020.875	88,04
	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	3.400.000	2.340.000	68,82
	<i>Tersedianya jasa surat menyurat</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	71.440.114	44.197.599	61,87
	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang dapat dimanfaatkan</i>	Bulan	12	12	100
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	209.158.500	203.483.276	97,29
	<i>Tersedianya jasa pelayanan umum kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp.	234.177.465	230.446.110	98,41
	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	132.477.465	129.491.110	97,75
	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan</i>	Bulan	12	12	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>perizinan kendaraan dinas operasional/lapang yang dapat dimanfaatkan</i>				
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	17.200.000	16.955.000	98,58
	<i>Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya</i>	Bulan	12	12	100
1.5.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	84.500.000	84.000.000	99,41
	<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp.	1.340.918.000	1.226.476.775	91,47
	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi	(kal/org/hr)	2150	1840	85,5
	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Protein	(gr/org/hr)	57	56,11	98,43
2.1	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	Rp.	290.000.000	288.498.350	99,48
	<i>Stabilnya pasokan dan harga pangan</i>	Bulan	12	12	100
2.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan	Rp.	32.476.800	32.392.000	99,74
	<i>Jumlah dokumen terkait harga pangan dan NBM yang dimanfaatkan</i>	Dokumen	1	1	100
2.1.2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rp.	117.523.200	117.250.000	99,77
	<i>Jumlah dokumen tentang harga dan neraca pangan strategis yang dapat dimanfaatkan</i>	Dokumen	2	2	100
2.1.3	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Rp.	140.000.000	138.856.350	99,18
	<i>Jumlah pangan pokok (beras) yang tersalurkan melalui lembaga distribusi pangan</i>	Ton	25	32,7	130,8
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp.	262.090.000	249.931.900	95,36

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Terkelolanya cadangan pangan kabupaten</i>	Bulan	12	12	100
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000	92.128.000	92,13
	<i>Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat yang menerima penyuluhan dan sosialisasi tentang lumbung pangan</i>	Kelompok	7	9	128,57
2.2.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	162.090.000	157.803.900	97,36
	<i>Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah</i>	Ton	10	14,55	145,5
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp.	788.828.000	688.046.525	87,22
	<i>Jumlah kegiatan dalam mendukung Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	kegiatan	3	3	100
2.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per tahun	Rp.	100.000.000	89.169.400	89,17
	<i>Jumlah dokumen terkait konsumsi pangan yang dapat dimanfaatkan</i>	Dokumen	1	1	100
2.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp.	688.828.000	598.877.125	86,94
	<i>Jumlah lokasi pekarangan pangan lestari</i>	Kelompok	8	8	100
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp.	100.000.000	84.925.660	84,93
	<i>Persentase daerah rawan pangan yang tertangani</i>	%	100	100	100
3.1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000	84.925.660	84,93
	<i>Jumlah kecamatan yang masyarakatnya dilatih dan dibina tentang kerawanan pangan</i>	Kecamatan	4	4	100
3.1.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000	84.925.660	84,93
	<i>Terlaksananya sosialisasi tentang</i>	Lokasi	4	4	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>kerawanan pandangan dan Tersalurkannya bantuan pangan sehat untuk pencegahan stunting</i>				
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp.	75.000.000	66.762.600	89,02
	<i>Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman</i>	%	100	100	100
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Rp.	75.000.000	66.762.600	89,02
	<i>Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang aman</i>	%	100	100	100
4.1.2	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	75.000.000	66.762.600	89,02
	<i>Jumlah nomor registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan</i>	Nomor Registrasi	10	15	150

PERMASALAHAN

Setelah bebas dari PMK selama 36 tahun, PMK kembali masuk di wilayah Indonesia pada awal April 2022, dan kemudian ditetapkan sebagai wabah penyakit menular pada hewan ternak di Indonesia oleh Kementerian Pertanian per tanggal 7 Mei 2022. Penyebaran wabah PMK telah terjadi sejak awal April dan hingga akhir bulan September 2022 telah meluas ke 24 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 296 kabupaten dan kota dengan total kasus PMK secara kumulatif di Indonesia sebanyak 517.213 ekor ternak. Awal kembalinya kasus PMK pada ternak di Indonesia pertama kali dilaporkan di 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu kabupaten Gresik, Mojokerto, Lamongan dan Sidoarjo dengan jumlah 1.296 ternak yang sakit dan 8 ternak dilaporkan mati.

Untuk di Kabupaten Madiun sendiri sampai tanggal 12 Agustus 2022 terkonfirmasi positif PMK 29 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang meliputi :

- Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing;
- Desa Tulung, Kecamatan Saradan 7 ekor sapi.
- Kecamatan Kebonsari :
 - Desa Krandegan 13 ekor sapi;
 - Desa Sukorejo 2 ekor sapi;



- Desa Kebonsari 2 ekor sapi;
- Desa Mojorejo 3 ekor sapi;

Dari hasil pemantauan tanggal 24 Februari 2023 Kabupaten Madiun semua ternak yang terkonfirmasi positif PMK sudah sembuh (nol kasus).

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Dalam upaya menanggulangi dan menangani ternak yang sakit akibat wabah PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan vaksinasi untuk mencegah penyebaran wabah PMK dan memperketat pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ternak pada pos lalu lintas ternak di wilayah Kabupaten Madiun untuk mencegah meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK)

- Vaksin tahap I dan tahap II sudah selesai dengan jumlah sebanyak 9.410 dosis.
- Pembagian vaksin ke-III terbagi menjadi :
 - Revaksinasi
 - Sapi : 7.842 dosis
 - Kambing/Domba : 1.422 dosis
 - Perluasan Tahap I
 - Sapi : 9.870 dosis
 - Kambing/Domba : 24.306 dosis
 - Kerbau : 8 dosis
- Pembagian vaksin ke-IV terbagi menjadi :
 - Revaksinasi
 - Sapi : 6.339 dosis
 - Kambing/Domba : 17.397 dosis
 - Kerbau : 8 dosis
 - Perluasan
 - Sapi : 2.078 dosis
 - Kambing : 13.280 dosis
- Pembagian vaksin ke-V terbagi menjadi :
 - Perluasan
 - Sapi : 2.287 dosis
 - Kambing : 5.956 dosis
 - Revaksinasi



- Sapi : 61 dosis
- Kambing/Domba : 1.692 dosis
- Booster
- Sapi : 1.036 dosis
- Kambing/Domba : 0 dosis

Total vaksinasi PMK sampai tanggal 24 Februari 2023 sebanyak 102.992 dosis.



4. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	TUJUAN OPD : Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,02	70,45	108
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	49,05	60,67	123
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	84,15	84,61	100
		Indeks Tutupan Lahan	Nilai	57,04	61,09	107
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	45 %	45%	100%

Tujuan meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercapai 108 % dengan predikat “Baik”. Peringkat Propinsi 6 dari 38 Kabupaten/Kota dan Nasional 145 dari 514 Kabupaten/Kota.

Sasaran Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Air/IKA Indeks Kualitas Udara/IKU dan Indeks Tutupan Lahan/ITH pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dan mencapai target Kabupaten Madiun dalam kategori baik.

Sasaran Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sampah dengan Indikator Persentase Jumlah Sampah yang tertangani sebesar 45% bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan karena pelayanan sampah yang meliputi Kelurahan dan Desa-desa di sekitar Perkotaan dan pasar-pasar sudah terlayani dengan baik.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp.	12.828.972.837	12.593.280.007	98
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	B	CC	95
	<i>Kepuasan ASN Terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daaerah</i>	%	100	100	100
1.1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daaerah	Rp.	174.850.000	0	0



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Jumlah Dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	Dokumen	14	14	100
1.1.1	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	174.850.000	170.488.000	97,51
	<i>Jumlah Dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	Dokumen	14	14	100
1.2	Administrasi keuangan perangkat Daerah	Rp.	9.508.785.687	8.844.302.000	93,01
	<i>Presentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyedia Gaji dan tunjangan ASN	Rp.	9.508.785.687	8.844.302.000	93,01
	<i>Presentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar</i>	%	100	100	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	3.037.670.417	3.005.371.277	99
	<i>Presentase sarana prasarana kantor yang layak fungsi</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Rp.	4.324.736	2.048.700	47
	<i>Jumlah alat listrik yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	197.633.550	195.411.250	99
	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tercukupi</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp.	77.832.029	74.274.312	95
	<i>Jumlah kebutuhan rumah tangga yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	79.770.935	79.008.224	99
	<i>Jumlah sarana prasarana ASN yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	40.475.116	29.268.424	72,31
	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	8.724.000	8.724.000	100
	<i>Jumlah bahan bacaan yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	306.504.670	236.963.474	77
	<i>Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	3.037.670.417	3.005.371.277	98,9



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	109.851.912	100.301.893	91
	<i>Presentase rekening listrik, air dan internet yang terbayar</i>	%	100	100	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	2.927.818.505	2.905.069.384	99
	<i>Presentase gaji kontrak yang terbayar</i>	%	100	100	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	419.784.411	353.014.247	98,9
	<i>Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang terpelihara</i>	%	100	100	100
1.5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.	333.886.043	288.837.503	86
	<i>Persentase kendaraan dinas yang terpelihara</i>	%	100	100	100
1.5.2	Pemeliharaan Mebel	Rp.	9.324.882	8.369.525	89
	<i>Persentase mebel yang terpelihara</i>	%	100	100	100
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp.	57.048.321	36.518.478	64
	<i>Persentase peralatan kantor yang terpelihara</i>	%	100	100	100
1.5.4	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	Rp.	19.525.165	19.288.741	98
	<i>Persentase gedung yang terpelihara</i>	%	100	100	100
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	612.346.600	591.719.450	96,6
	<i>Presentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup</i>	%	100	100	100
2.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Rp.	612.346.600	591.719.450	96,6
	<i>Jumlah dokumen yang tersusun</i>	Dokumen	2	2	100
2.1.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan	Rp.	612.346.600	591.719.450	96,6
	<i>Jumlah dokumen yang ter susun</i>	Dokumen	2	2	100
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	956.268.830	817.774.726	85,5
	<i>Presentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen</i>	%	100	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>lingkungan</i>				
3.1	Pencegahan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Rp.	579.629.500	489.763.006	84,4
	<i>Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang teratasi</i>	%	100	100	100
3.1.1	Koordinasi , sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air , Udara , dan Laut	Rp.	175.175.000	171.199.050	97,7
	<i>Presentase Limbah industri sesuai baku mutu</i>	%	78	78	100
	<i>Jumlah lokasi titik pantau</i>	Titik pantau	23	23	100
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp.	153.860.000	83.302.500	54
	<i>Jumlah Pembuatan biopori yang diadakan</i>	Buah	6	6	100
	<i>Jumlah sumur resapan yang diadakan</i>	Buah	5	5	100
3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Rp.	250.594.500	235.261.456	93
	<i>Presentase sarana dan prasarana yang tersedia</i>	%	40	40	100
3.2	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab / Kota	Rp.	246.399.200	222.103.220	90
	<i>Presentase pencemaran yang bisa ditanggulangi</i>	%	100	100	100
3.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp.	100,000,000	99,500,400	100
	<i>Jumlah papan informasi yang diadakan</i>	Buah	50	50	100
3.2.2	Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	146.399.200	122.602.820	83
	<i>Jumlah Pengawasan limbah yang dilaksanakan</i>	Usaha	10	10	100
3.3	Pemulihan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Rp.	130.240.130	105.908.500	81
	<i>Presentase pemulihan Lingkungan yang terlaksana</i>	%	50	5	10



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
3.3.1	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp.	130.240.130	105.908.500	81
	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	12	12	100
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN (KEHATI)	Rp.	2.801.467.298	2.971.972.379	70
	<i>Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air</i>	%	7	7	100
	<i>Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di kelola</i>	Ha	23	22	95
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Rp.	3.801.467.298	2.662.132.753	70
	<i>Presentase Pengelolaan Keanekaragaman hayati yang terlaksana</i>	%	50	50	100
4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.	3.483.427.298	2.352.293.127	67
	<i>Jumlah taman yang terpelihara</i>	Lokasi	18	18	100
	<i>Jumlah lampu Hias yang terpelihara</i>	Lokasi	18	18	100
4.1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati Lainnya	Rp.	113.040.000	108.579.276	96
	<i>Jumlah satwa yang dipelihara dan di kembangkan</i>	Ekor	7	7	100
4.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp.	205.000.000	201.260.350	98
	<i>Jumlah Desa / Kelurahan berseri yang di bina</i>	kali	3	3	100
	<i>Jumlah Desa /Kelurahan Proklamasi yang dibina</i>	kali	3	3	100
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp.	58.830.000	2.226.000	3,7
	<i>Presentase usaha / Kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan Limbahnya</i>	%	100	100	100
5.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp.	58.830.000	2.226.000	3,7
	<i>Jumlah dokumen yang terverifikasi</i>	Dokumen	15	15	100
5.1.1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp.	58.830.000	2.226.000	3,7
	<i>Jumlah verifikasi dokumen yang terlaksana</i>	Dokumen	15	15	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Rp.	55.489.800	48.636.000	87



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
	<i>Presentase izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di terbitkan</i>	%	100	100	100
6.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH di tebitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	55.489.800	48.636.000	87
	<i>Jumlah dokumen yang tersusun</i>	Usaha	1	1	100
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Rp.	55.489.800	48.636.000	87
	<i>Jumlah dokumen yang tersusun</i>	Dokumen	1	1	100
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp.	165.822.000	150.955.000	91
	<i>Cakupan Masyarakat yang mendapatkan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</i>	%	45	45	100
7.1	Penyelenggaraan pendidikan , Pelatihan , dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	165.822.000	150.955.000	91
	<i>Jumlah penyelenggaraan Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan</i>	%	15	15	100
7.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	36.160.569	34.183.000	91
	<i>Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan</i>	Kali	7	7	100
7.1.2	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Rp.	129.661.431	116.772.000	90
	<i>Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan</i>	Kali	5	5	100
8.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp.	165.243.000	158.474.900	95.9
	<i>Presentase penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</i>	%	40	40	100
8.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	165.243.000	158.474.900	95.9
	<i>Jumlah penerima penghargaan</i>	Buah	3	3	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>lingkungan Hidup</i>				
8.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp.	165.243.000	158.474.900	95.9
	<i>Jumlah Kantor yang dinilai</i>	OPD	68	68	100
	<i>Jumlah pembinaan sekolah adiwiyata yang dilaksanakan</i>	Sekolah	30	30	100
	<i>Jumlah peserta putra putri lingkungan hidup</i>	Peserta	100	100	100
9.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	130.800.000	128.398.750	98
	<i>Presentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani</i>	%	100	100	100
9.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	150,000,000	85,135,600	57
	<i>Jumlah pengaduan yang dindaklanjuti</i>	pengaduan	40	40	100
9.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Rp.	150,000,000	85,135,600	57
	<i>Jumlah dokumen yang di susun</i>	pengaduan	40	40	100
10.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp.	7.412.500.145	7.096.784.805	95,7
	<i>Presentase sampah yang tertangani</i>	%	40	40	100
10.1	Pengelolaan Sampah	Rp.	7.412.500.145	7.096.784.805	95,7
	<i>Jumlah sarana yang dikelola</i>	Unit	15	15	100
10.1.1	Pengurangan sampah dengan melakukan Pembatasan , Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp.	132.442.325	129.794.900	98
	<i>Jumlah Kegiatan Pengurangan Sampah</i>	Kali	4	4	100
10.1.2	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan , Pengumpulan , Pengangkutan , Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA /TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Rp.	1.471.658.023	1.356.365.493	92
	<i>Jumlah kendaraan operasional sampah yang terpelihara</i>	bulan	12	12	100
10.1.3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp.	526.729.000	526.279.000	99
	<i>Jumlah titik pantau yang terpelihara</i>	Titik pantau	20	20	100
10.1.4	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA	Rp.	5.231.685.612	5.231.685.612	96



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	/TPST/SPA Kabupaten / Koto				
	<i>Jumlah sarana prasarana TPA yang tersedia</i>	buah	25	25	100

PERMASALAHAN :

1. Pembuangan sampah oleh masyarakat masih sembarangan di pinggir2 jalan di wilayah kecamatan Wonoasri, Wungu, Kare, Dolopo, Geger, Mejayan, Saradan, Madiun dan Jiwan menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar dan bau yang menyengat di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.
2. Kapasitas TPA Kaliabu sdh mulai penuh dan tahun 2024 sdh berakhir masa berlakunya.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Mengadakan pembersihan di lokasi-lokasi sampah di buang sembarang dang membersihkan sampah yang menumpuk
2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar pentingnya kesadaran mengelola sampah
3. Membuat papan informasi di larang membuang sampah di sekitar lokasi.
4. Mencari alternatif lain Tempat Pembuangan Sampah yang baru.



5. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	77	77,09	100,11
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya kualitas perumahan, kawasan permukiman dan terbangunnya tertib pertanahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani;	Unit	1000	3230	258,40
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Ha	29	57,78	199,24
		Persentase tanah asset pemerintah yang diserahkan	Bidang	5	4	80

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan indikator tersebut diatas sudah melebihi target dari yang ditetapkan, namun ada satu indikator yang pencapaiannya masih di bawah target yaitu Penyerahan asset pemerintah.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp.	145.784.470	104.052.550	71,37
	<i>Jumlah permasalahan yang terselesaian/tertangani</i>	Kasus	2	2	100
1.1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	145.784.470	104.052.550	71,37
	<i>Jumlah permasalahan yang terselesaian/tertangani</i>	kasus	2	2	100
1.1.1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	145.784.470	104.052.550	71,37
	<i>Jumlah permasalahan yang terselesaian/tertangani</i>	kasus	2	2	100
2.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp.	125.000.000	94.488.000	75,59
	<i>Jumlah dokumen perencanaan</i>	Dokumen	1	1	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>pengadaan tanah</i>				
2.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp.	125.000.000	94.488.000	75,59
	<i>Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah</i>	Dokumen	1	1	100
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	125.000.000	94.488.000	75,59
	<i>Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah</i>	Dokumen	1	1	100
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp.	77.008.424	63.739.000	74
	<i>Jumlah Dokumen penataan kawasan</i>	Dokumen	0	0	-
3.1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	77.008.424	63.739.000	74
	<i>Jumlah Dokumen penataan kawasan</i>	Dokumen	0	0	-
3.1.1	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	77.008.424	63.739.000	74
	<i>Jumlah siteplan yang disahkan</i>	Unit	6	6	100

PERMASALAHAN

1. Penanganan RTLH dari sumber dana selain APBD usulan banyak yang tidak melalui/ sepengetahuan Desa/kelurahan yang bersangkutan.
2. Sengketa Tanah Garapan : Jadwal audiensi untuk penyelesaian 2 kasus sengketa menyesuaikan Kementrian LHK.
3. Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk Pembangunan dalam hal ini untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, para Kades sasaran lokasi belum optimal dalam memberikan informasi.
4. Dalam pengesahan siteplan developer /pemohon belum dapat memahami secara utuh atas regulasi yang berlaku

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Mekanisme baru penanganan RTLH harus sesuai dengan database desa yang disusun atas dasar Musdes yang diperkadeskan.
2. Melakukan koordinasi baik secara langsung maupun bersurat resmi dengan Kementrian LHK.



3. Memberikan sosialisasi maksud dan tujuan terhadap Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
4. Dalam Pengesahan Site Plan menjawab atas permohonan secara tertulis dan menghadirkan pemohon untuk diberi penjelasan / diskusi atas regulasi yang ada dan berlaku.

6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	IKM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	81,78	81
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan sesuai data kependudukan	1. Presentase kepemilikan dokumen kependudukan sesuai data kependudukan	%	99	94	94
	Meningkatkan kepemilikan akta pencatatan sipil sesuai data kependudukan	2. Presentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil sesuai data kependudukan	%	97	99,8	102

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 81.78 % dari target 100 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 hal ini disebabkan masih terjadinya massa pandemi COVID-19, masyarakat mengharap layanan Adminduk melalui WA segera mendapatkan respon terkait permohonan layanan yang diperlukan.

Presentase kepemilikan dokumen kependudukan realisasi capaiannya 94 % dari target 99 % hal ini terjadi karena kurang tercukupinya akan kebutuhan blanko E-KTP bagi masyarakat sedangkan masih adanya penduduk kabupaten Madiun yang bekerja di Luar Negeri yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Presentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil realisasi capaiannya 99,8 % dari target 97 % untuk lebih mendayagunakan Petugas Registrasi Desa dan Perangkat Desa dan memanfaatkan BPP untuk mencatatatkan berbagai perubahan peristiwa administrasi kependudukan.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp	4.505.461.838	4.069.837.782	90
	<i>Nilai Sakip Perangkat Daerah</i>	Nilai	80	66	82
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.554.144.177	3.141.726.328	88
	<i>Presentase administrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan</i>	%	100	100	100
1.1.1	Indikator Sub Kegiatan Persentase Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN selama setahun	Rp	100	88	88
	<i>Presentase administrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan</i>	Orang	34	34	34
1.1.2	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp	7.106.000	7.054.750	99
	<i>Presentase perencanaan, Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</i>	%	100	100	100
1.1.3	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd	Rp	7.106.000	7.054.750	99
	<i>Persentase Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja skpd</i>	%	100	100	100
1.1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	505.147.444	499.231.739	98
	<i>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan</i>	%	100	100	100
1.1.5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	4.622.000	4.556.500	98
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12
1.1.6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	4.622.000	4.556.500	98
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1.7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	9.436.570	9.425.300	99
	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12
1.1.8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Rp	9.436.570	9.425.300	99
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12
1.1.9	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	17.304.750	17.179.750	99
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12
1.1.10	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp	2.970.000	2.970.000	100
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12
1.1.11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp	153.858.401	149.191.061	96
	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12
1.1.12	Sub Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantor	Rp	60.000.000	59.843.700	99
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	bulan	12	12	12
1.1.13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	351.771.388	351.771.388	100
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	laporan	221	221	221
1.1.14	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	354.589.949	343.464.893	96
	<i>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</i>	%	100	100	100
1.1.15	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	354.589.949	343.464.893	96
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Unit	26	26	26



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	303.755.572	286.052.965	94
	<i>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</i>	%	100	100	100
1.1.17	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	825.000	384.211	46
	<i>Persentase terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	%	100	46	46
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, dan listrik yang disediakan</i>	Rp	120.055.240	115.313.192	96
1.1.18	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	96	96
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12
1.1.19	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	170.764.716	161.270.773	94
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	bulan	12	12	12
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp	1.265.521.107	1.254.211.800	99
	<i>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan</i>	%	100	99	99
2.2	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp	1.265.521.107	1.265.521.107	99
	<i>Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan</i>	%	100	99	99
2.2.2	Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp	414.267.974	409.728.000	98
	<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	%	100	98	98
2.2.3	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp	851.253.133	844.783.000	99
	<i>Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan</i>	%	100	99	99
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp	165.802.863	164.902.863	99
	<i>Presentase Pelayanan</i>	%	100	99	99

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan</i>				
3.3	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp	165.802.863	164.902.863	99
	<i>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan</i>	%	100	99	99
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp	489.604.360	463.195.524	94
	<i>Persentase Data Kependudukan</i>	%	100	94	94
4.4	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp	489.604.360	463.195.524	94
	<i>Persentase data kependudukan yang tervalidasi</i>	%	100	94	94
4.4.5	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp	489.604.360	463.195.524	94
	<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>	dokumen	1	1	100
4.4.6	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data	Rp	8.747.900	6.277.500	71
	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>	Jumlah OPD	15	10	66
4.4.7	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Rp	92.152.250	80.419.500	87
	<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah</i>	%	100	87	87
4.4.8	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	29.700.000	29.310.000	98
	<i>IKM bidang kependudukan dan pencatatan sipil</i>	%	100	98	98
4.4.9	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	Rp	29.700.000	29.310.000	98
	<i>Jumlah Dokumen Tata Cara</i>	laporan	1	1	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun</i>				
4.4.10	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	55.748.145	53.705000	96
	<i>Persentase terpenuhinya penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	%	100	96	96
4.4.12	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	55.748.145	53.705.000	96
	<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Bulan	12	12	12
4.4.13	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	367.752.110	341.930.910	92
	<i>Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan</i>	bulan	12	12	12
4.4.14	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp	367.752.110	341.930.910	92
	<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>	bulan	12	12	12



7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Mandiri	Persentase Desa Mandiri	%	32,3 (64 Desa)	47,47 (94 Desa)	146,98
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Jumlah Desa yang meningkat status pembangunannya	Persentase Desa Maju	%	54,55 (108 Desa)	52,53 (104 Desa)	96,28
		Persentase Desa Berkembang	%	13,13	0	0

Capaian indikator tujuan Presentase Desa Mandiri dihitung dari Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah seluruh Desa se Kabupaten Madiun dikalikan 100%. Indikator menggambarkan status Kemajuan dan kemandirian Desa. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki Kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kategori Desa Mandiri mendasar pada Permendesa PDPTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp.	5.417.380.510	5.349.534.642	98,1
	<i>Nilai Sakip Perangkat Daerah</i>	Nilai	83	82.38	99,3
	<i>Presentase pelayanan kesekretariatan</i>	%	88	88	100,1
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	136.894.872	135.332.864	98,9
	<i>Persentase dokumen pemerintahan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	%	100	100	100
1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	136.894.872	135.332.864	98,9
	<i>Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan pertanggungjawaban</i>	Dokumen	19	21	111

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>keuangan</i>				
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.402.246.715	3.343.923.449	98,3
	<i>Persentase administrasi keuangan daerah yang terlaksana</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.402.246.715	3.343.923.499	98,3
	<i>Jumlah dokumen penganfrakan gaji dan tunjangan ASN</i>	Dokumen	12	12	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1.015.234.820	1.001.962.242	98,7
	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>	Paket	10	10	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	7.132.103	6.602.000	92,6
	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	200.012.075	197.931.750	99,0
	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan</i>	Unit	23	23	100
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	39.260.224	39.138.800	99,7
	<i>Tersedianya peralatan rumah tangga</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	282.139.493	276.544.913	98,0
	<i>Tersedianya alat tulis kantor</i>	Bulan	12	12	100
	<i>Tersedianya Bahan Pembersih</i>	Bulan	12	12	100
	<i>Tersedianya makan dan minum</i>	Bulan	12	12	100
	<i>Tersedianya pendukung peralatan komputer</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	51.414.925	50.415.722	98,1
	<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	3.960.000	3.360.000	84,8
	<i>Tersedianya Barang cetakan dan pengadaan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	431.316.000	427.969.057	99,2
	<i>Terlaksananya rapat koordinasi, rapat dinas dan konsultasi dalam dan luar daerah</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	189.987.270	186.224.500	98,0
	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Paket	1	1	100
1.4.1	Pengadaan Mebel	Rp.	189.987.270	186.224.500	98,0
	<i>Jumlah mebel diadakan</i>	Paket	1	1	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	517.969.029	499.614.454	96,5
	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	110.009.736	96.266.400	87,5
	<i>Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar</i>	Bulan	12	12	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	407.959.293	403.348.054	98,9
	<i>Tersedianya Jasa Keamanan</i>	Orang	3	3	3
	<i>Tersedianya Jasa Kebersihan</i>	Orang	4	4	4
	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Kinerja</i>	Orang	4	4	4
	<i>Tersedianya Jasa Publikasi</i>	Paket	30	83	277
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	191.207.446	182.477.083	95,4
	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi</i>	%	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	123.887.446	121.695.360	98,2
	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional</i>	Bulan	12	12	100
1.6.2	Pemeliharaan Mebel	Rp.	3.020.000	2.300.000	76,2
	<i>Terpeliharanya mebeleur</i>	Bulan	12	12	100
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	13.749.000	8.087.401	58,8
	<i>Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	50.551.000	50.394.322	99,7
	<i>Terpeliharanya gedung kantor</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp.	10.000.000	8.349.960	83,5

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Presentase Fasilitas Penyelenggaraan penataan Desa	%	100	100	100
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp.	10.000.000	8.349.960	83,5
	<i>Jumlah desayang tertib administrasi kewenangan Desa sesuai regulasi</i>	Desa	198	198	100
2.1.1	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Rp.	10.000.000	8.349.960	83,5
	<i>Jumlah kecamatan yang terfasilitasi penataan kewenangan Desa</i>	Kecamatan	15	15	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp.	117.500.000	117.367.535	99,9
	Jumlah Kerjasama Desa yang terbentuk	kerjasama	16	17	106
3.1	Fasilitas Kerjasama antar Desa	Rp.	117.500.000	117.367.535	99,9
	<i>Jumlah BUMDesa Bersama yang Terbentuk</i>	BUMDesa Bersama	1	14	1400
	<i>Jumlah Kawasan perdesaan</i>	Kawasan Perdesaan	1	-	-
3.1.1	Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000	99.997.535	100
	<i>Jumlah Lembaga pasca PNPM Mpd yang terfasilitasi dalam Kerjasama pembentukan BUMDesa bersama</i>	Lembaga	7	14	200
	<i>Jumlah Lembaga Pasca PNPM-MPd wadah Kerjasama antar desa yang dibina</i>	Lembaga	14	14	100
3.1.2	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp.	17.500.000	17.370.000	99,3
	<i>Jumlah Desa terfasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan</i>	Desa	5	15	375
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp.	4.244.693.555	3.611.913.560	85,1
	Presentase desa dengan tata Kelola pemerintahan desa yang baik	%	73,2	74,2	100
	Presentase desa dengan dokumen perencanaan pembangunan yang baik	%	88,4	88,4	100
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	4.244.639.555	3.611.913.560	85,1
	<i>Presentase desa yang dibina dalam penyelenggaraan</i>	%	100	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>administrasi pemerintahan desa</i>				
	<i>Presentase desa dengan perencanaan pembangunan tepat waktu</i>	%	100	100	100
4.1.1	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp.	9.373.800	9.371.000	99,9
	<i>Jumlah Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa</i>	Desa	145	145	100
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp.	288.351.900	284.969.190	98,8
	<i>Jumlah Desa yang dibina dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.</i>	Desa	198	198	100
	<i>Jumlah desa yang dibina dalam updating data IDM dan SDG's Desa</i>	Desa	198	198	100
	<i>Jumlah KPM yang dibina</i>	KPM	100	206	142
4.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp.	864.288.864	763.437.550	88,3
	<i>Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa</i>	Desa	198	198	100
	<i>Jumlah regulasi teknis tentang pengelolaan keuangan desa</i>	Regulasi	4	4	100
4.1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp.	349.668.900	269.223.920	77,0
	<i>Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa</i>	Aparatur	213	224	105
4.1.5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp.	217.442.550	217.248.900	99,9
	<i>Jumlah Desa yang melaksanakan proses pemilihan kepala desa</i>	Desa	143	143	100
4.1.6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp.	39.792.030	39.201.500	98,5
	<i>Jumlah Desa/kelurahan yang telah dibina dalam updating profil desa/kelurahan</i>	Desa/Kelurahan	206	206	104
4.1.7	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Rp.	2.293.110.020	1.868.321.100	81,48
	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan iuran jaminan Kesehatan dari APBD kabupaten</i>	Desa	198	198	100
	<i>Jumlah desa yang telah melaksanakan updating data base Aparatur Desa</i>	Desa	198	198	100
	<i>Jumlah Produk Hukum Daerah</i>	Produk	4	4	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>tentang Pemerintahan Desa yang disusun</i>	Hokum			
4.1.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp.	50.509.000	30.475.000	60,3
	<i>Jumlah Desa yang dibina dalam updating data asset desa</i>	Desa	198	198	100
	<i>Jumlah desa yang difasilitasi pelepasan dan tukar menukar tanah kas desa</i>	Desa	2	5	250
4.1.9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp.	22.842.691	22.590.000	98,9
	<i>Jumlah BPD yang dibina</i>	Desa	198	198	100
4.1.10	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp.	109.313.800	107.075.400	98,0
	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas untuk pemutakhiran epdeskel</i>	Desa/Kel	51	51	100
	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang telah di evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan serta Lomba Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten</i>	Desa/Kel	15	15	100
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp.	1.486.375.754	1.467.300.742	98,7
	<i>Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif</i>	%	62,1	63,4	102,09
	<i>Presentase BUMDes yang aktif</i>	%	42,4	46,5	109,59
	<i>Presentase Lembaga Ekonomi uang aktif</i>	%	66,8	66,8	100
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.486.375.754	1.467.300.742	98,7
	<i>Presentase Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan</i>	%	58,4	81,3	139
5.1.1	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lambaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,Kara	Rp.	106.902.000	103.017.600	92,7

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	ngtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
	<i>Jumlah lembaga Posyandu yang aktif</i>	Lembaga	725	725	100
	<i>Jumlah LPKMD/K yang aktif</i>	Lembaga	133	206	155
	<i>Jumlah RT/RW yang Aktif</i>	RT/RW	3.460	3.460	100
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,Kara ngtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	87.264.309	80.872.700	92,7
	<i>Jumlah Peserta peningkatan kapasitas dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai social budaya masyarakat</i>	Peserta	150	150	100
	<i>Jumlah Desa yang telah melaksanakan pengukuran keswadayaan masyarakat</i>	Desa	98	98	100
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	377.337.300	375.699.615	99,6
	<i>Jumlah BUMDesa yang diberdayakan</i>	Lembaga	84	198	236
	<i>Jumlah Lembaga UED yang diberdayakan</i>	Lembaga	32	32	100
	<i>Jumlah Pasar Desa yang diberdayakan</i>	Lembaga	50	50	100
	<i>Jumlah UPK Gerdu Taskin UPKu PPKM yang diberdayakan</i>	Lembaga	26	26	100
	<i>Jumlah Desa yang terfasilitasi BKK Provinsi</i>	Desa	15	15	100
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Terhnologi Tepat Guna	Rp.	100.000.000	98.722.200	98,7
	<i>Jumlah Lembaga HIPPAM yang di bina</i>	Lembaga	45	45	100
	<i>Jumlah Lembaga Tepian Hutan yang dibina</i>	Lembaga	30	30	100
	<i>Jumlah Desa yang diberdayakan dalam pemanfaatan potensi SDA</i>	Desa	5	45	900
	<i>Jumlah Desa yang diberdayakan dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna</i>	Desa	5	45	900



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rupiah	164.872.145	160.976.220	97,6
	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam Penilaian Juara Gotong Royong Terbaik tingkat Kabupaten</i>	Desa/Kel	15	15	100
	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam Pembinaan Gotong Royong Masyarakat</i>	Desa/Kel	206	206	100
5.16	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp.	650.000.000	648.012.407	99,7
	<i>Jumlah Lembaga PKK aktif yang dibina</i>	Lembaga	185	206	111

PERMASALAHAN :

1. Terdapat satu indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak tercapai adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Target Indikator 83 terealisasi 82,38 dengan capaian 99,3%.

Penyebab :

- Evaluasi internal yang telah dilakukan belum memberikan dampak perbaikan dalam penerapan SAKIP unit kerja.
- Belum ada pemanfaatan Teknologi Informasi (aplikasi) yang digunakan Sebagai alat memonitor pencapaian kinerja seluruh unit kerja.

2. Terdapat satu indikator kegiatan yang tidak tercapai pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa. Indikator jumlah Kawasan perdesaan yang terbentuk dengan target 1 kawasan, tidak dapat terealisasi.

Penyebab :

- Belum Terwujudnya kesepakatan dan kesepahaman Bersama antar Pemerintah Desa untuk Pembentukan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Pembangunan Kawasan perdesaan adalah pembangunan dengan pendekatan multisector, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan partisipasi dari semua pihak baik Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dengan belum



terbentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) belum dapat memaksimalkan upaya mendorong terbentuknya kawasan perdesaan.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja.
2. Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sebagai alat control dan evaluasi kinerja.
3. Melaksanakan fasilitasi kepada Desa yang memiliki potensi penyelenggaraan pembangunan Kawasan perdesaan.
4. Menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).



8. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka	0,22	1,0027	21,94
2.	SASARAN OPD : Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	%	77	71,27	92,56
		Persentase keluarga sejahtera	%	83,85	84,88	101,23

1. Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan target 0,22, realisasi 1,0027. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan gambaran untuk melihat perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Apabila dilihat dari data LPP yang bersumber dari Survey Demografis dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. LPP Kabupaten Madiun termasuk pada kategori LPP yang rendah apabila dibandingkan dengan LPP nasional sebesar 1,17 pada tahun 2022.
2. Indikator Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif dengan target 77%, realisasi 71,27% dan capaian 92,56%. Tidak tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan :
 - Petugas Lini Lapangan dan Kader IMP kurang memanfaatkan data sasaran PUS Unmetneed.
 - Adanya aplikasi baru dalam pencatatan pelaporan pelayanan KB melalui NEW SIGA dari BKKBN yang mana servernya masih belum stabil.
3. Indikator Persentase Keluarga Sejahtera dengan target 83,85%, realisasi 84,88% dan capaian 101,23%. Tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan :
 - Terbentuknya Central Of Excellent (COE) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di tingkat Kecamatan yang mampu

memfasilitasi dalam memberikan pembinaan untuk produk- produk unggulan di tingkat Desa

- Peningkatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berupa lantainisasi dan jambanisasi yang merupakan perwujudan dari salah satu indikator Keluarga Sejahtera

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.	232.467.720	198.911.805	85,56
	<i>Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun</i>	Persen	100	100	100
1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp.	7.455.200	3.477.600	46,65
	<i>Persentase siswa yang memperoleh informasi program kependudukan</i>	Persen	5	5	100
1.1.1	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Rp.	7.455.200	3.477.600	46,65
	<i>Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang terbentuk</i>	Sekolah	2	2	100
1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	225.012.520	195.434.205	86,85
	<i>Jumlah dokumen data informasi kependudukan yang tersusun</i>	Dokumen	3	3	100
1.2.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Rp.	68.787.520	65.274.800	94,89
	<i>Jumlah dokumen data mikro keluarga tingkat Desa/Kelurahan</i>	Dokumen	206	206	100
1.2.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp.	41.068.700	36.681.550	89,32
	<i>Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	Laporan	1	1	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.3	Penyediaan data dan informasi keluarga	Rp.	24.225.000	24.225.000	100
	<i>Jumlah Data mikro Keluarga beresiko stunting</i>	Dokumen	206	206	100
1.2.4	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Rp.	90.931.300	69.252.855	76,16
	<i>Jumlah Data Program Bangga Kencana yang diolah dan dilaporkan</i>	Laporan	11	11	100
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Rp.	9.148.223.340	7.891.800.082	86,27
	<i>Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need</i>	Persen	9,47	19,74	47,97
	<i>Persentase masyarakat yang memahami program Banggakencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)</i>	Persen	58	72,01	124,16
2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp.	1.136.060.900	996.643.165	87,73
	<i>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program Bangga kencana melalui advokasi dan KIE</i>	Persen	58	72,01	124,16
	<i>Persentase ketersediaan dukungan manajemen dan KIE untuk kegiatan program Bangga kencana</i>	Persen	100	100	100
2.1.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Rp.	4.375.000	4.063.920	92,89
	<i>Jumlah kegiatan advokasi program Bangga Kencana pada stakeholder dan mitra kerja</i>	Kali	1	1	100
2.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp.	25.000.000	24.983.520	99,93
	<i>Jumlah KIE program Banggakencana sesuai kearifan budaya lokal</i>	Kali	1	1	100
2.1.3	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta	Rp.	70.640.000	39.279.425	55,61

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	media luar ruang				
	<i>Jumlah Promosi dan KIE program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang</i>	Kali	3	3	100
2.1.4	Penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Rp.	154.545.900	148.518.120	96,10
	<i>Jumlah publikasi program Banggakencana melalui media ctak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program Bangga Kencana</i>	Kali	4	4	100
2.1.5	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp.	234.000.000	192.887.220	82,43
	<i>Jumlah Rakorcam/Rakordes/ Minilok yang dilaksanakan</i>	Kali	180	180	100
2.1.6	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp.	607.500.000	547.955.760	90,20
	<i>Persentase Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB di Kecamatan berjalan lancar</i>	Persen	100	100	100
2.1.7	Pengendalian Program KKBPK	Rp.	40.000.000	38.955.200	97,39
	<i>Persentase kasus stunting yang diaudit</i>	Persen	100	100	100
2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp.	3.568.339.840	3.495.838.270	97,97
	<i>Persentase kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mandiri</i>	Persen	31,39	31,39	100
	<i>Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif</i>	Persen	100	100	100
2.2.1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di LiniLapangan oleh PKB/PLKB	Rp.	2.579.539.840	2.572.038.270	99,71
	<i>Jumlah kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	Orang	1.306	1.306	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>yang difasilitasi</i>				
2.2.2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp.	988.800.000	923.800.000	93,43
	<i>Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif melaksanakan pembinaan program Bangga kencana</i>	Orang	1.306	1.306	100
2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.845.170.000	2.876.139.287	74,80
	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar</i>	Persen	96,67	100	103,44
2.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp.	13.500.000	13.489.430	99,92
	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan, Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan distribusi Alat dan obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Persen	100	113,79	113,79
2.3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp.	998.174.000	630.894.412	63,20
	<i>Persentase Peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	Persen	35	27,46	78,46
2.3.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp.	609.881.800	26.873.000	4,41
	<i>Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Dokumen	4	4	100
2.3.4	Penyediaan Sarana Penunjang	Rp.	1.975.000.000	1.965.562.390	99,52

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pelayanan KB				
	<i>Persentase Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	Persen	100	100	100
2.3.5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp.	12.000.000	9.390.400	78,25
	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi</i>	Persen	100	123,33	123,33
2.3.6	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Rp.	40.000.000	39.713.700	99,28
	<i>Jumlah Faskes yang mampu memberikan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak – hak Reproduksi</i>	Faskes	29	29	100
2.3.7	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Rp.	36.000.000	35.742.920	99,29
	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai standar</i>	Persen	70	70	100
2.3.8	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp.	61.260.800	59.437.900	97,02
	<i>Persentase ketersediaan dukungan operasional Pelayanan KB Bergerak</i>	%	100	100	100
2.3.9	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Rp.	75.00.000	72.748.385	97
	<i>Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan</i>	%	35	52,72	150,63
2.3.10	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Rp.	24.353.400	22.286.750	91,51
	<i>Cakupan peserta baru KB pria</i>	%	37,50	41,62	110,99
2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Rp.	598.652.600	523.179.360	87,39

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	KesertaanBer-KB				
	<i>Persentase stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitrakerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangsa kencana</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase stakeholder/mitrakerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB</i>	%	39,40	58,77	149,16
2.4.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp.	30.000.000	29.631.300	98,77
	<i>Persentase Komitmen dan peran serta stakeholders /mitrakerja yang mendukung operasional Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	%	39,40	42,11	106,88
2.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Rp.	33.902.600	33.473.700	98,73
	<i>Jumlah Rumah Data kependudukan paripurna di kampung KB percontohan</i>	Rumah Data	4	4	100
2.4.3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp.	534.750.000	460.074.360	86,04
	<i>Persentase Kampung KB Aktif</i>	%	100	100	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.	3.767.989.460	2.887.475.491	76,63
	<i>Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun</i>	%	6,95	5,44	127,76
3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp.	3.679.860.000	2.799.486.251	76,08
	<i>Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif</i>	%	50	50	100
3.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Rp.	513.000.000	443.900.000	86,53

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
	<i>Persentase sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan sesuai rencana</i>	%	100	100	100
3.1.2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp.	62.600.000	62.216.251	99,39
	<i>Jumlah kelompok kegiatan kesejahteraan keluarga yang aktif</i>	Kelompok	196	196	100
3.1.3	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Rp.	3.104.260.000	2.293.370.000	73,88
	<i>Persentase biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga disediakan</i>	%	100	100	100
3.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp.	88.129.460	87.989.240	99,84
	<i>Persentase Kader Tribina yang aktif</i>	%	65	65	100
	<i>Persentase kelompok PIK-Remaja yang aktif</i>	%	50	50	100
3.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Rp.	88.129.460	87.989.240	99,84



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah kader Tribina yang aktif</i>	Orang	1805	1805	100
	<i>Jumlah kelompok PIK-Remaja yang aktif</i>	Kelompok	70	70	100

PENJELASAN :

1. Program Keluarga Berencana dengan indikator :

a. Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need target 9,47, realisasi 19,74 dan capaian 47,97. Tidak tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan :

- PUS unmeetneed yang telah berusia 40 tahun keatas sebagian besar tidak ber KB dikarenakan merasa sudah tidak subur
- Petugas Lini Lapangan dan Kader IMP kurang memanfaatkan data sasaran PUS Unmeetneed
- Adanya aplikasi baru dalam pencatatan pelaporan pelayanan KB melalui NEW SIGA dari BKKBN yang mana servernya masih belum stabil

b. Persentase masyarakat yang memahami program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), target 58%, realisasi 72,01% dan capaian 124,16%. Pendukung tercapainya indikator tersebut antara lain :

- Penyuluhan, sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh KB, dan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) terhadap masyarakat tentang program Bangga Kencana dengan sasaran remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), Kelompok Kegiatan dan masyarakat lainnya
- Promosi dan KIE melalui media elektronik (TV, Radio, media sosial) dan media non elektronik (media cetak/koran, leaflet, media luar ruang (banner, baliho/vinyl, umbul – umbul, spanduk)

c. Persentase Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi sesuai standar dengan target 96,67%, ralisasi 100% dan capaian 103,44%. Tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan telah dilaksanakannya



- pelatihan tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyedia sarana KIE terhadap semua Fasilitas Kesehatan serta adanya dukungan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari BKKBN
- d. Persentase Fasilitas Kesehatan, Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan distribusi Alat dan obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB, target 100%, realisasi 113,79% dan capaian 113,79%. Tercapainya indikator ini disebabkan data Faskes yang tercatat pada data basis sejumlah 29 sedangkan jumlah riil Faskes sebanyak 33 Faskes dan dari keseluruhan dari Faskes tersebut mendapatkan distribusi Alat dan obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.
- e. Peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan target 35%, realisasi 27,46% dan capaian 78,46%. Tidak tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan :
- belum semua pelayanan diinput dalam aplikasi New SIGA karena kendala server sedangkan data pelayanan KB bersumber dari Aplikasi NEW SIGA dari BKKBN
 - adanya pembatasan usia drop out dari Pasangan Usia Subur (> 49 tahun)
- f. Persentase fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, target 100%, realisasi 123,33% dengan capaian 123,33%. Tercapainya indikator karena adanya pembinaan terhadap Faskes yang bermasalah terutama pada sistem pencatatan dan pelaporan serta Faskes baru (Faskes Pemerintah, Mandiri, Swasta) yang perlu pembinaan dan pelatihan dalam menginput pada Aplikasi New SIGA
- g. Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan dengan target 35%, realisasi 52,72% dan capaian 150,63%. Tercapainya indikator ini karena sudah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan KB Pasca Persalinan dengan metode strategi konseling berimbang pada Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa/PPKBD



- h. Cakupan peserta baru KB pria, target 37,50%, realisasi 41,62%, capaian 110,99%.
Tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan :
- Tersedianya biaya pelayanan gratis untuk KB MOP (Metode Operasi Pria)
 - Adanya insentif bagi motivator KB pria yang mengirimkan akseptor KB MOP
 - Pelayanan KB MOP dapat dilaksanakan setiap minggu di Puskesmas Kare
- i. Persentase stakeholder/mitrakerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB, target 39,40%, realisasi 58,77% dan capaian 149,16%. Tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan :
- Adanya dukungan Faskes untuk melakukan pembinaan
 - Penyediaan alat obat kontrasepsi serta sarana prasarana penunjang
 - Adanya pembiayaan pelayanan KB
- j. Persentase Komitmen dan peran serta stakeholders /mitrakerja yang mendukung operasional Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, target 39,40%, realisasi 42,11% dan capaian 106,88%. Tercapainya kinerja dari indikator tersebut antara lain :
- Adanya pembinaan program/kegiatan dan penyediaan KIE bagi mitra kerja
 - Adanya operasional Penyuluhan KIE bagi Penyuluh KB
 - Penambahan jumlah fasilitas pemberi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
 - Adanya dukungan operasional pelayanan KB bergerak dan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- k. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 tahun, target 6,95%, realisasi 5,44% dan capaian 127,78%. Pendukung tercapainya indikator tersebut adalah :



- Melakukan konseling pranikah bagi calon pengantin dan masih tergolong usia anak yang akan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Hasil konseling ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim didalam pemberian dispensasi perkawinan dimaksud.
- Sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag tentang Pendewasaan Usia Perkawinan kepada calon pra nikah, sekolah dan masyarakat yang dilakukan oleh Penyuluh Garap Keluarga Sakinah di tiap Kecamatan.
- Pembinaan bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya tentang Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilakukan pada saat kegiatan Masa Orientasi Sekolah dan juga kegiatan lainnya di tiap sekolah tingkat SMP dan SMA.
- Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dan juga Pencegahan NAPZA
- Pembinaan Keluarga yang mempunyai remaja melalui Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
- Koordinasi dan sinergisitas dengan Perangkat Daerah dan mitra kerja lainnya terkait Pendewasaan Usia Perkawinan

PERMASALAHAN

1. Masih tingginya unmeet need
2. Masih rendahnya keikutsertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
3. Masih rendahnya pemahaman remaja tentang masalah kependudukan.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Peningkatan kapasitas penyuluh KB dalam memetakan permasalahan di wilayah kerjanya
2. Peningkatan kapasitas Kader IMP dan motivator KB dalam Komunikasi perubahan perilaku



3. Penyediaan media dan sarana penunjang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB di Balai Penyuluhan
4. Optimalisasi peran Kelompok KB dan kelompok kegiatan untuk menjaring sasaran kesertaan ber KB
5. Pembagian target sasaran unmetneed/ peserta KB bermasalah kepada Penyuluh KB dan IMP
6. Penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas/kompetensi Kader IMP dan penyuluh KB serta biaya operasional Kader IMP
7. Peningkatan kompetensi kinerja kesehatan dan pelayanan KB
8. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan
9. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di Fasilitas kesehatan
10. Perluasan akses pelayanan KB di Faskes swasta
11. Penyediaan fasilitasi pembiayaan pelayanan KB MKJP
12. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja penyuluh KB
13. Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan
14. Meningkatkan peran Karang Taruna di Desa dengan memberikanketrampilan dan wawasan tentang kependudukan.



9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Pelayanan Perhubungan yang Berkualitas	Indeks Jalan Berkeselamatan	Nilai	70	65	92
2	SASARAN OPD : Meningkatkan Infrastruktur dan Manajemen Perhubungan	Presentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan	Persen	75	60	80
		Persentase Manajemen Perhubungan yang baik	Persen	95	95	100

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan didukung dari perencanaan yang matang dan terukur. Dalam pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan realisasi pencapaian dengan kinerja yang baik dan solidnya semua pegawai Dinas Perhubungan. Dalam pengawasan kegiatan dievaluasi setiap bulannya untuk mengetahui permasalahan yang menghambat kegiatan dan dicari solusi pemecahan masalah disemua bidang.

1. Indikator jalan yang berkeselamatan target 70 % Realisasi 65 % belum optimal dikarenakan pencapaian di Pelayanan izin trayek tidak tercapai, ditahun 2022 untuk pengendalian dan pengawasan opererasi gabungan dengan Polri tidak terlaksana masih dalam pandemi dan pelayanan bus balik gratis tidak dapat dilaksanakan karena masih kondisi Covid 19 Omicron.
2. Indikator Sasaran Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan dari target 75 % Terealisasi 60 %, pada indikator sasaran tidak tercapai karena anggaran dan kinerja terfokus untuk KPBU APJ yang mana tahap Progres Lelang, untuk kegiatan Pemasangan rambu digunakan untuk pergantian traffic light di perempatan moneng dan warning light dipasang di depan pasar Gemblong untuk mengurangi laka lantasi di depan pasar.



3. Indikator sasaran Persentase manajemen perhubungan yang baik target 95 % realisasi 100 % didukung Pelayanan Parkir berlangganan 100 % , Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor 100%, pelayanan rekomendasi ANDALALIN target 10 dokumen terealisasi 28 Dokumen, pelayanan pengaduan gangguan sarana prasarana keselamatan 100 %

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp.	2.215.380.163	2.147.031.154	96,43
	<i>Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berprofesionalisme</i>	%	100	100	100
	<i>Nilai SAKIP Dinas Perhubungan</i>	Nilai	BB	BB	100
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	75.000.000	74.436.600	99,25
1.1.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	75.000.000	74.436.600	99,25
	<i>Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan</i>	Paket	1	1	100
1.1.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	0	0	0
	<i>Tersedianya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai</i>	Bulan	12	12	100
1.1.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	0	0	0
	<i>Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan (abdiyasa) yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	1	1	100
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	534.255.616	493.778.710	92,42
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	7.271.079	7.264.963	99,92
	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	134.834.183	133.206.290	98,79
	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	62.464.606	61.412.450	98,32
	<i>Tersedianya bahan logistik kantor</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	33.100.581	33.073.500	99,92
	<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	6.804.000	6.714.000	98,68
	<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan</i>	Bulan	12	12	100
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	289.781.167	252.107.507	87
	<i>Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	364.000.000	364.000.000	100
1.3.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	364.000.000	364.000.000	100
	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	Unit	1	1	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	647.220.322	623.599.550	96,35
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	4.493.650	4.369.400	97,23
	<i>Tersedianya jasa surat menyurat yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp.	119.912.068	116.402.124	97,07
	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	522.814.604	502.828.026	96,18
	<i>Tersedianya jasa pelayanan umum perkantoran</i>	Bulan	12	12	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	594.904.225	514.216.294	86,44
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	475.096.832	473.480.514	99,66
	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	26.164.000	24.588.400	93,98
	<i>Jumlah pemeliharaan peralatan dan</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>mesin lainnya</i>				
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	93.643.393	16.147.380	17,24
	<i>Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	Bulan	12	12	100
2.	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	18.058.761.309	16.982.525.943	94,04
	<i>Prosentase Sarana Prasarana dan perlengkapan yang berfungsi baik</i>	%	100	85	85
	<i>Persentase kendaraan laik Jalan</i>	%	100	90	90
	<i>Prosentase Angka tertib Lalulintas</i>	%	100	78	78
2.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp.	387.750.000	278.841.600	71,91
2.1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp.	96.000.000	0	0
	<i>Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Paket	1	1	100
2.1.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp.	121.750.000	110.388.000	90,67
	<i>Tersedianya kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Paket	1	1	100
2.1.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp.	170.000.000	168.453.600	99,09
	<i>Tersedianya pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Kegiatan	1	1	100
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	14.892.779.186	14.589.230.466	97,96
2.2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	1.704.966.305	1.613.621.233	94,64
	<i>Jumlah pembangunan prasarana jalan Kabupaten/Kota (KPBU)</i>	Kegiatan	1	1	100
2.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp.	312.564.400	224.254.202	71,75
	<i>Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan (pemeliharaan palang pintu kereta api diperlintasan sebidang)</i>	Paket	1	1	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah operasional palang pintu kereta api yang terbayar</i>	Orang	12	12	100
2.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp.	12.875.248.481	12.751.355.031	99,04
	<i>Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	1	1	100
2.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp.	100.370.000	95.735.422	95,38
2.3.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp.	100.370.000	95.735.422	95,38
	<i>Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)</i>	Kegiatan	1	1	100
2.4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp.	653.725.240	637.197.840	97,47
2.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	653.725.240	637.197.840	97,47
	<i>Tersedianya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan</i>	Orang	100	100	100
2.5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	746.124.244	388.263.615	52,04
2.5.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	390.856.925	296.393.615	75,83
	<i>Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor</i>	Paket	1	1	100
2.5.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	230.000.000	0	0
	<i>Tersedianya bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor</i>	Paket	1	1	100
2.5.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp.	100.000.000	91.870.000	91,87
	<i>Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala</i>	Paket	1	1	100
2.5.4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian	Rp.	25.267.319	0	0



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Berkala Kendaraan Bermotor				
	<i>Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Kegiatan	1	1	100
2.6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	1.214.512.135	942.594.000	77,61
2.6.1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp.	910.831.000	670.322.650	73,59
	<i>Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas</i>	Paket	2	2	100
2.6.2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	253.681.135	227.946.350	89,86
	<i>Tersedianya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota</i>	Kegiatan	1	1	100
2.6.3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	50.000.000	44.325.000	88,65
	<i>Tersedianya forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota</i>	Kali	4	4	100
2.7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp.	40.000.000	28.198.000	70,50
2.7.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Rp.	40.000.000	28.198.000	70,50
	<i>Jumlah penetapan kebijakan tata Kelola andalalin yang dilaksanakan</i>	Dokumen	10	10	100
2.8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	23.500.504	22.465.000	95,59
2.8.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	23.500.504	22.465.000	95,59
	<i>Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM</i>	Orang	441	398	90,25



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>kepada Pelaku Angkutan Umum, Ojek Online, Ojek Offline dan Becak)</i>				

PERMASALAHAN :

1. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana akibat adanya perubahan regulasi.
2. Adanya tumpang tindih kewenangan (videotron).
3. Adanya kekosongan pejabat Eselon.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Anggaran yang tidak terserap digeser di PAK
2. Menjalin komunikasi dengan pihak terkait
3. Pengajuan usulan pengisian pejabat Eselon ke BKD



10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD: Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	2,70	3,21	118,89
2.	SASARAN OPD: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Persen	15,38	16,66	108,32

Tujuan dari Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator tujuan Indeks SPBE dari target 2,70 pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mendapat nilai 3,21 atau dengan capaian persentase sebesar 118,89%.

Sasaran dari Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik dengan indikator Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi, dari target indikator yang telah ditetapkan sebesar 15,38% realisasi sebesar 16,66% capaian 108,32%. Aplikasi layanan publik yang terintegrasi pada tahun 2022 sebanyak 9 aplikasi, sedangkan jumlah keseluruhan aplikasi layanan publik pada Tahun 2022 sebanyak 54 aplikasi. Adapun aplikasi yang telah terintegrasi adalah sebagai berikut: JDIH, SIM RS RSUD Dolopo, SIM RS RSUD Caruban, Siranap, eLink, SIBANTER (Sistem Informasi Bantuan Terpadu), Siap PMKS, SIPD, SIRUP

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.274.020.847	5.106.471.563	76,89
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah</i>	Skor	88	80	90,9
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	83	82,4	99,27



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	12.450.000	12.357.500	99,26
	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun</i>	Dokumen	21	22	104,76
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	12.450.000	12.357.500	99,26
	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan bidang komunikasi, aplikasi informatika, persandian dan statistik yang tersusun</i>	Dokumen	21	22	104,76
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.118.321.858	3.966.612.172	96,32
	<i>Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4.118.321.858	3.966.612.172	96,32
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bulan	12	12	100,00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	579.093.457	576.443.783	99
	<i>Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi cukai yang sesuai dengan strategi komunikasi yang ditetapkan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	169.406.875	167.996.895	99,17
	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia</i>	Paket	3	3	100
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	167.826.373	167.261.731	99,66
	<i>Kebutuhan logistik kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	12.878.789	12.858.552	99,84
	<i>Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp.	6.334.020	5.945.500	93,87
	<i>Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	222.647.400	222.381.105	99,88
	<i>Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	8.487.384	6.650.500	78,36



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia</i>	Paket	3	3	100
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	8.487.384	6.650.500	78,36
	<i>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia</i>	Paket	3	3	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	180.613.738	172.165.426	60,14
	<i>Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	53.506.190	53.259.588	100
	<i>Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon</i>	Paket	12	12	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	127.107.548	118.905.838	93,55
	<i>Jumlah jasa pelayanan umum kantor (tenaga keamanan, kebersihan, resepsionis, administrasi dan pengemudi)</i>	Orang	8	8	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	375.054.410	372.242.182	99,25
	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	Bulan	12	12	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	194.014.275	191.597.847	98,75
	<i>Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia</i>	Orang	12	12	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	23.988.600	23.915.420	99,69
	<i>Jumlah peralatan kantor dan mesin yang terpelihara</i>	Unit	20	22	110
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	157.051.535	156.728.915	99,79
	<i>Jumlah gedung kantor yang terpelihara</i>	Unit	1	1	100
2.	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp.	776.297.664	757.961.933	97,64
	<i>Persentase desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan</i>	%	100	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	776.297.664	757.961.933	97,64
	<i>Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media Pemkab Madiun</i>	informasi	325	1.193	367
	<i>Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui mitra Pemerintah Daerah</i>	informasi	150	130	86,66
2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp.	477.544.676	459.863.093	96,30
	<i>Jumlah peserta yang mengikuti Desiminasi Pemerintah Daerah</i>	Orang	75	75	100
	<i>Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan melalui Pemberitaan Advetorial pada media massa</i>	150 Berita	150	130	86,66
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	17.662.408	17.222.400	97,51
	<i>Jumlah Bimtek/Monev PPID yang dilaksanakan</i>	kali	1	1	100
	<i>Jumlah kelembagaan KIM yang dibentuk</i>	KIM	15	15	100
2.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp.	281.090.580	280.876.440	99,92
	<i>Jumlah informasi melalui media luar ruang</i>	Buah	60	159	265
	<i>Jumlah Penggiat Medsos Mitra Pemerintah Daerah</i>	Orang	30	30	100
3.	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp.	2.736.282.389	2.725.781.930	99,62
	<i>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE</i>	%	100	100	100
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.215.970.000	1.215.944.000	100
	<i>Jumlah nama domain Perangkat Daerah</i>	PD	53	53	100
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp.	1.215.970.000	1.215.944.000	100
	<i>Jumlah PD yang terhubung melalui jaringan intra Pemerintah Kab. Madiun</i>	PD	53	53	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
3.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.520.312.389	1.509.837.930	99,31
	<i>Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus</i>	%	100	100	100
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	114.689.885	113.576.320	99,03
	<i>1. Jumlah PD yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah</i>	PD	53	53	100
	<i>2. Jumlah kebijakan dalam mendukung implementasi e Government</i>	Kebijakan	1	2	200
	<i>3. Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang TIK</i>	orang	5	11	220
3.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Rp.	862.635.460	862.281.210	99,96
	<i>Persentase Service Level Agreement</i>	%	100	100	100
3.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp.	542.987.044	533.980.400	98,34
	<i>Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan</i>	Aplikasi	3	4	133,33

PERMASALAHAN :

1. Kurangnya pelaksana pengelola konten, sehingga konten di media yang dikelola oleh pemerintah daerah kurang banyak dan beragam.
 - a. Tidak adanya operator khusus yang fokus mengelola atau menangani PPID dan KIM, sehingga menyulitkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pembinaan.
 - b. Sering terjadinya pergantian pengelola PPID Pembantu OPD dan KIM Desa sehingga operasional PPID dan KIM tidak optimal.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah Tahun 2021, bahwa Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun belum cukup untuk mengakomodir isi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Belum diterapkannya 8 (delapan) manajemen SPBE serta audit TIK sehingga hal tersebut berdampak terhadap capaian indeks SPBE Pemerintah Kab. Madiun.
4. Tim Koordinasi SPBE belum berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/190/KPTS/402.013/2021 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Madiun.
5. Pembangunan Aplikasi Presensi Online telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan Aplikasi Presensi Online bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun mulai diberlakukan per tanggal 1 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 863/3422/402.201/2022 Tanggal 27 September 2022 Perihal Pemberlakuan Presensi Online. Dalam pelaksanaannya, aplikasi tersebut masih diperlukan adanya pengembangan.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Membuat grup administrator media sosial dari masing-masing Perangkat Daerah, sehingga sumber informasi lebih beragam.
2. Melakukan monitoring dan pembinaan PPID dan KIM, sehingga pengurus PPID dan KIM dapat mengetahui kekurangan dan memperbaiki kekurangan tersebut.
3. Revisi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



4. Perlunya komitmen Bapak Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE serta Peran aktif Tim Koordinasi SPBE dalam menentukan arah kebijakan terkait implementasi pelaksanaan SPBE di Kabupaten Madiun.
5. Perlunya reviu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Madiun melalui revisi Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/190/KPTS/402.013/2021 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Pada Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika TA. 2023 terkait Pengembangan aplikasi Presensi Online sesuai dengan hasil evaluasi pemberlakuan aplikasi Presensi Online terhitung mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022.



11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan PDRB sektor Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	17,00	17,57	103
	Menciptakan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Persentase distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	%	95	147	155
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya hasil produksi usaha perdagangan	Persentase peningkatan hasil produksi usaha perdagangan	%	11	11,41	104
	Meningkatnya hasil produksi usaha mikro	Persentase peningkatan hasil produksi usaha mikro	%	1,031	1,820	177
	Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persentase peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	%	7	7,89	113

(Keterangan : Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan 5,76%)

Realisasi dari pencapaian indikator tujuan dan sasaran melebihi target. Terdapat 2 (dua) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran. Pada indikator tujuan : kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB target yang ditetapkan adalah 17% sedang realisasinya 17,57%. Capaian indikator tujuan ini adalah 103%. Indikator sasaran pada tujuan ini adalah:

- Persentase peningkatan hasil produksi perdagangan dengan target 11% dan realisasinya adalah 11,41%, capaian dari indikator sasaran ini adalah 104%.
- Persentase peningkatan hasil produksi usaha mikro dengan target 1,031% dan realisasinya adalah 1,82%, capaian dari indikator sasaran ini adalah 177%.

Pada indikator tujuan : Persentase distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan target 95% sedang realisasinya 155%. Capaian indikator tujuan ini adalah 155%. Indikator sasaran pada tujuan ini adalah : Persentase peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya targetnya adalah 7% sedangkan realisasi 7,89% sehingga capaiannya adalah 113%.



Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Rp.	7.619.364.137	7.279.513.310	95,54
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	A	BB	95
	<i>Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah</i>	%	80	90	112,50
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	18.000.000	7.917.340	43,99
	<i>Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang sesuai peraturan</i>	%	100	100	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	18.000.000	7.917.340	43,99
	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun</i>	buah	30	30	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	6.152.403.562	5.849.712.755	95,08
	<i>Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	6.152.403.562	5.849.712.755	95,08
	<i>Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan</i>	orang	72	72	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	338.267.767	332.121.491	98,18
	<i>Persentase administrasi umum yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	5.272.586	5.169.373	98,04
	<i>Jumlah komponen listrik yang tersedia</i>	bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	120.870.509	118.825.445	98,31
	<i>Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia</i>	bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	24.999.847	24.659.612	98,64
	<i>Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia</i>	bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	7.744.000	7.248.000	93,60
	<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia</i>	bulan	12	12	100
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	179.380.725	176.219.061	98,24
	<i>Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara</i>	bulan	12	12	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	845.727.048	832.381.965	98,42
	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	453.400.184	450.720.489	99,41
	<i>Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia</i>	bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	392.326.864	381.661.476	97,28
	<i>Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia</i>	bulan	12	12	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	264.965.760	257.379.759	97
	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i>	%	100	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	175.765.400	171.152.382	97,38
	<i>Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara</i>	unit	7 unit kendaraan roda 4	7 unit kendaraan roda 4	100
1.5.2	Pemeliharaan Mebel	Rp.	4.971.500	4.595.000	92,43
	<i>Jumlah mebel yang terpelihara</i>	bulan	12	12	100
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	62.284.665	61.126.455	98,14
	<i>Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara</i>	bulan	12	12	100
1.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	21.944.195	20.505.922	93,45
	<i>Jumlah gedung kantor yang terpelihara</i>	unit	2	2	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp.	104.105.000	99.808.424	95,87
	<i>Persentase koperasi yang berkualitas</i>	%	35	41,94	119,83
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Rp.	104.105.000	99.808.424	95,87
	<i>Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi</i>	persen	35	36,31	103,74
2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	58.550.000	56.005.172	95,65
	<i>Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas</i>	Koperasi	60	82	136,67
2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	45.555.000	43.803.252	96,15
	<i>Jumlah koperasi yang difasilitasi pemeriksaan kepatuhan</i>	Koperasi	30	60	200
3.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp.	147.000.000	146.540.400	99,69
	<i>Persentase koperasi yang sehat</i>	%	44,67	38,36	85,87
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	147.000.000	146.540.400	99,69
	<i>Persentase usaha simpan pinjam koperasi yang telah dinilai kesehatannya</i>	%	44,67	38,36	85,87
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	147.000.000	146.540.400	99,69
	<i>Jumlah KSP-USP/KSPPS-USPPS yang telah difasilitasi penilaian kesehatan</i>	Koperasi	130	150	115,38
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp.	492.400.000	478.295.052	97,14

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Persentase Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	82	86,49	105,48
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Rp.	153.083.735	147.037.414	96,05
	<i>Persentase pengelola koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	%	49	53.19	108,55
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp.	153.083.735	147.037.414	96,05
	<i>Jumlah SDM pengelola koperasi yang terfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM</i>	Koperasi	52	60	115,38
4.2	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Rp.	339.316.265	331.257.638	97,63
	<i>Persentase SDM pengelola usaha yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	%	33,3	33,3	100
4.2.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Rp.	339.316.265	331.257.638	97,63
	<i>Jumlah SDM pengelola usaha mikro yang terfasilitasi melalui pelatihan usaha</i>	UM	150	150	100
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp.	171.950.000	171.850.860	99,94
	<i>Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi</i>	%	64	63,94	99,91
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Rp.	171.950.000	171.850.860	99,94
	<i>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan</i>	%	64	11,76	18,38

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
5.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	171.950.000	171.850.860	99,94
	<i>Jumlah Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya</i>	Koperasi	135	150	111,11
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp.	1.543.877.100	1.471.507.877	95.31
	<i>Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</i>	persen	20,9	21,72	103,92
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp.	1.543.877.100	1.471.507.877	95.31
	<i>Persentase pemberdayaan UM yang dilaksanakan</i>	persen	20,9	22,8	109,09
6.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp.	30.000.000	29.672.700	98,91
	<i>Jumlah UM yang terdata</i>	UM	300	1.500	500
6.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp.	27.157.487	26.048.384	95,92
	<i>Jumlah UM yang bermitra</i>	UM	20	21	105
6.1.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp.	92.842.513	92.502.243	99,63
	<i>Jumlah UM yang terfasilitasi perijinan</i>	UM	570	688	120,70
6.1.4	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	Rp.	1.393.877.100	1.323.284.550	94,94
	<i>Jumah UM yang diberdayakan/dilatih</i>	UM	1.396	1.405	100,64
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp.	225.856.800	221.410.140	98,03
	<i>Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM</i>	%	0,25	0,69	276
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan	Rp.	225.856.800	221.410.140	98,03

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	<i>Persentase pengembangan UM yang dilaksanakan</i>	%	0,25	0,69	276
7.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp.	225.856.800	221.410.140	98,03
	<i>Jumlah UM yang difasilitasi pengembangan produk</i>	Orang	50	150	300

PERMASALAHAN :

1. Kendala kapasitas pemahaman masing-masing peserta terhadap penyampaian materi aktivitas kegiatan berdampak terhadap implementasinya.
2. Banyak data yang nantinya dibutuhkan OPD tetapi yang mengeluarkan data adalah BPS.
3. Banyaknya jumlah UMKM di Kab. Madiun.
4. Data UM yang sudah dan belum di fasilitasi belum terintegrasi.
5. Capaian program pemberdayaan mencapai 22,8% dikarenakan capaian target kegiatan, pendataan, NIB dan kelembagaan (bansos) melebihi target.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Memaksimalkan tenaga pendamping koperasi untuk memonitoring, evaluasi dan mendampingi koperasi peserta pelatihan dalam implementasi hasil pelatihan.
2. Kerja dengan BPS.
3. Permohonan wilayah tim pendamping lapangan.
4. Penyempurnaan aplikasi SIMIUM

12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	86	86,53	100,62
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	Persen	80	85,62	107,03
	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rp.	1.000.000.000.000	1.823.088.069.145	182,31

DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu *Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan* yang diukur melalui indikator *Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*. Tujuan ini selaras dengan sasaran pada Misi 2 P-RPJMD Kab Madiun Tahun 2018-2023 yaitu *Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital* dengan salah satu indikatornya adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Tujuan ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan yang inovatif, transparan, sederhana, mudah dan cepat baik dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2022, Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTSP tercapai dengan skor 86,53 dimana angka ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 86. Di tahun 2022, Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan tiap semester menggunakan jasa konsultan dan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur (SuKMa-e Jatim). Jumlah total responden yang mengikuti survey adalah sebanyak 1.427 responden. Berikut rincian hasil penilaian kinerja pelayanan per unsur di tiap semester :

NO	UNSUR	NILAI PER UNSUR		
		SMT 1	SMT 2	RATA-RATA TAHUN 2022
U1	Persyaratan	3,60	3,29	3,45
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,43	3,20	3,31
U3	Waktu Penyelesaian	3,44	3,19	3,32
U4	Tarif/Biaya	3,37	3,96	3,67
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,54	3,44	3,49
U6	Kompetensi Pelaksana	3,52	3,32	3,42
U7	Perilaku Pelaksana	3,61	3,41	3,51
U8	Sarana dan Prasarana	3,22	3,26	3,24
U9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,54	3,94	3,74
NRR Tertimbang		3,48	3,45	3,46
Nilai IKM		86,89	86,16	86,53
Kategori Kinerja Pelayanan		Baik	Baik	Baik

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kinerja pelayanan pada DPMPSTSP Kabupaten Madiun memiliki predikat BAIK. Hasil penilaian ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dengan fokus melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya lebih rendah dibandingkan unsur lainnya seperti U2, U3 dan U8 terkait Sistem, Mekanisme, Prosedur, Waktu Penyelesaian serta Sarana dan Prasarana.



❖ Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Merupakan tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur. Dua hal utama terkait unsur ini adalah kemudahan mendapatkan informasi tentang alur dan kemudahan prosedur yang dilalui untuk mendapatkan pelayanan. Kemungkinan penyebab rendahnya nilai pada unsur ini adalah pemohon merasa informasi terkait SOP pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun belum disampaikan dengan jelas, valid serta mudah untuk dipahami maupun diakses oleh pemohon. Sehingga, masyarakat masih perlu datang langsung ke loket DPMPTSP untuk memperoleh informasi terkait prosedur layanan perizinan. Masyarakat juga masih banyak yang beranggapan bahwa prosedur pemrosesan perizinan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Selain itu, banyak perizinan yang diproses di luar OSS yang belum bisa diakses secara online, sedangkan masyarakat menuntut adanya kemudahan pemrosesan perizinan berbasis teknologi informasi.

❖ Waktu Penyelesaian Pelayanan

Hal yang sering menjadi keluhan pemohon adalah ketidakpastian waktu dalam pemrosesan perizinan. Penyebab utamanya adalah belum terbangunnya komitmen yang kuat antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis pemroses perizinan untuk mematuhi SOP dan standard waktu yang telah ditetapkan. Kapasitas SDM pelayanan yang masih kurang maksimal juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan muda.

❖ Sarana dan prasarana

Meskipun setiap tahun selalu ada upaya peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan di Mal Pelayanan Publik, ternyata unsur ini masih memiliki skor terendah berdasarkan survey. Untuk itu perlu adanya evaluasi sebagai upaya perbaikan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan saran yang



disampaikan responden, beberapa hal yang dapat menjadi fokus untuk perbaikan kualitas sarana prasarana yaitu ketersediaan gadget/alat bantu elektronik untuk memudahkan pemohon mengakses layanan serta kenyamanan ruang tunggu dan toilet.

Untuk mencapai tujuan, DPMPTSP menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dalam pelaksanaan tupoksi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sasaran 1 yaitu *Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan* diukur dengan indikator *Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan*. Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada loket DPMPTSP dengan memberikan penilaian kategori Tidak Puas, Kurang Puas, Puas atau Sangat Puas. Hasil penilaian secara berkala/triwulan akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja layanan DPMPTSP. Di tahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat tercapai senilai 85,62% atau sebesar 107,03% dari target. Data ini diperoleh dari sejumlah 3.006 pemohon yang menyatakan puas dan sangat puas atas pelayanan DPMPTSP dibandingkan seluruh jumlah pemohon yang mengisi survey sebanyak 3.511 orang.

Sasaran 2 yaitu *Mewujudkan peningkatan realisasi investasi* diukur dengan indikator *Nilai Realisasi Investasi*. Semakin tinggi nilai realisasi investasi maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah. Artinya, dengan adanya kemudahan berusaha maka investasi di suatu daerah akan lebih prospektif. Realisasi investasi di Kabupaten Madiun terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2022, nilai realisasi investasi mencapai Rp 1.823.088.069.145 (1,8 Triliun) atau tercapai 182,31% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun. Nilai realisasi ini diperoleh dari pelaporan LKPM oleh pelaku usaha Non UMK (per triwulan) dan UMK (per semester). Berikut data rincian pelaporan LKPM di tahun 2022:



Data Realisasi Investasi Tahun 2022

No	Kategori Pelaku Usaha	Nilai Modal	Nilai Realisasi (Rp)
1	Usaha Mikro Kecil	< 1 Milyar (Mikro) 1-5 Milyar (Kecil)	1.071.981.923.311 (58,80%)
2	Usaha Non UMK	5-10 Milyar (Menengah) > 10 Milyar (Besar)	751.106.145.834 (41,20%)
Jumlah			1.823.088.069.145

Usaha Mikro Kecil mendominasi pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Madiun yaitu sebesar 58,80%. Sektor Usaha Mikro Kecil penyumbang realisasi investasi terbesar adalah sektor perdagangan, konstruksi dan industri kecil. Untuk itu, sejalan dengan pemerintah, pemerintah daerah juga harus turut mendukung dan mengembangkan sektor UMK, karena telah terbukti menjadi salah satu tonggak utama dalam pemulihan ekonomi setelah diterpa oleh pandemi COVID 19.

Sedangkan usaha Non UMK hanya berkontribusi sebesar 41,20% yang didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan perumahan. Meskipun kontribusi terhadap realisasi investasi lebih rendah, tetapi usaha Non UMK khususnya sektor industri mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini akan berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.	4.380.092.724	4.313.166.567	98,46
	<i>Indikator Kinerja Program: Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	83	80,36	96,82
	<i>Indikator Kinerja Program Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</i>	Nilai	88	85,29	96,92
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	59.451.284	59.383.819	99,89

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu</i>	%	100	100	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	59.451.284	59.383.819	99,89
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun</i>	Dokumen	15	15	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.775.363.933	2.723.668.488	98,14
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.775.363.933	2.723.668.488	98,14
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN</i>	Dokumen	26	26	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	279.270.159	275.481.738	98,64
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase tersedianya layanan administrasi umum</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	77.685.814	76.290.230	98,20
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Presentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	8.784.300	8.759.841	99,72
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Presentase kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	27.084.045	24.983.496	92,24
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Prosentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	165.716.000	165.448.171	99,84
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Prosentase penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	668.889.746	663.678.699	99,22

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan</i>	%	100	100	100
1.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	668.889.746	663.678.699	99,22
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan</i>	Paket	5	5	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	422.148.948	421.732.123	99,90
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	161.749.400	161.663.159	99,95
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Persentase kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	260.399.548	260.068.964	99,87
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Persentase kebutuhan jasa pelayanan umum yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	175.368.654	169.221.799	96,49
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	%	100	98	98
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	128.842.460	127.112.500	98,66
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Presentase kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik</i>	%	100	100	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	46.526.194	42.109.299	90,51
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Persentase peralatan dan mesin kantor lainnya yang terpelihara</i>	%	100	95	95
2	NAMA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp.	94.472.545	93.796.250	99,28
	<i>Indikator Kinerja Program</i>	%	100	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal				
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Rp	94.472.545	93.796.250	99,28
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan</i>	%	80	75	93,75
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp	94.472.545	93.796.250	99,28
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Rumusan kebijakan daerah mengenai fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun</i>	Dokumen	1	1	100
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp.	59.706.255	52.689.000	88,25
	Indikator Kinerja Program Minat Investasi	Rp.	1,5 Triliyun	4.002.949.087.544	266,86
3.1	NAMA KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	59.706.255	52.689.000	88,25
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun</i>	%	60	65	108,33
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp	59.706.255	52.689.000	88,25
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan</i>	Event	2	2	100
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp.	96.521.301	96.130.180	99,59
	Indikator Kinerja Program: Rata-rata waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan	Hari Kerja	12	14	100
4.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	96.521.301	96.130.180	99,59
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan</i>	%	75	85	113,33

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp	61.972.480	61.735.000	99,62
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan</i>	%	90	95	105,19
4.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Rp	34.548.821	34.395.180	99,56
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti</i>	%	100	100	100
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp.	393.394.000	347.249.775	88,27
	<i>Indikator Kinerja Program: Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal</i>	%	75	78,13	104,17
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	393.394.000	347.249.775	88,27
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi kebijakan penanaman modal dan bimbingan teknis terkait OSS dan LKPM Online</i>	%	60	115	191,67
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	345.218.250	300.539.775	87,06
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal</i>	unit	300	347	115,67
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	48.175.750	46.710.000	96,96
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya</i>	unit	100	115	115
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp.	45.860.724	45.673.140	99,59
	<i>Indikator Kinerja Program: Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan</i>	%	10	24,29	242,91

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	layanan perizinan dan non perizinan				
6.1	NAMA KEGIATAN Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	45.860.724	45.673.140	99,59
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan</i>	Layanan	7500	8458	112,77
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp	45.860.724	45.673.140	99,59
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun</i>	Publikasi	10	10	100

PERMASALAHAN :

1. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP dimana OSS RBA terus diperbaharui dan mengalami beberapa perubahan sehingga DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Selain itu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertipikat Laik Fungsi (SLF) lebih rumit dalam pengaplikasiannya serta berbiaya mahal karena menggunakan jasa pihak ketiga untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin. Beberapa kendala teknis lain yang dihadapi antara lain aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.



Permasalahan lain terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengganti izin lokasi dimana pelayanannya belum online secara langsung sehingga pelayanan tidak optimal. Selain itu, terbitnya Keputusan Menteri ATR/BPN berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi penghambat investasi, karena harus dialih fungsikan terlebih dahulu ke Kementerian ATR/BPN. Hal ini berdampak pada panjangnya prosedur pengajuan perizinan.

2. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, regulasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan penanaman modal berjalan dinamis dimana sering terjadi perubahan. Undang -undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta. Untuk itu, harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat Perpu. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun seluruhnya dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

3. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif



Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang prospektif untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

4. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Digitalisasi dan pengintegrasian pelayanan perizinan yang diikuti dengan sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA dan aplikasi K/L lainnya baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Pendampingan pelayanan dan fasilitasi/koordinasi dengan Kementerian Investasi dan K/L terkait guna penyelesaian permasalahan perizinan melalui zoom meeting.
3. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
4. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam



membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

5. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.



13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan peran serta pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan atlet Berprestasi	Persen	13	29,66	228,2
		Persentase peningkatan Pemuda berprestasi	Persen	23	78,79	342,60
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya peran pemuda dan olahraga	Persentase atlet yang berprestasi	Persen	5,08	26	511,38
		Persentase pemuda yang berprestasi	Persen	5,5	5,74	104,36

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah atlet prestasi yaitu dengan menyelenggarakan kejuaraan di cabang olahraga Volley, bulu tangkis dan pencak silat. Serta mengikuti kejuaraan cabang olahraga tingkat propinsi, seperti kickboxing, senam, yudo, mengikuti beberapa kejuaraan porprov jatim, mengikuti kejuaraan Popda Jatim serta mengikuti kejuaraan di Peparpeda (Pekan Paralimpik Pelajar Daerah) Jatim.

Upaya yang dilakukan guna mencapai indikator ini adalah dengan melakukan seleksi pemuda berprestasi melalui seleksi pasukan pengibar bendera yang dilaksanakan di seluruh SMA atau sederajat yang ada di Kabupaten Madiun, hingga terpilihlah 76 pasukan pengibar bendera. Selanjutnya pasukan pengibar bendera ini wajib mengikuti seleksi pasukan bendera tingkat propinsi dan terpilihlah 2 orang pasukan pengibar bendera yang mengikuti seleksi tingkat propinsi. Upaya yang juga dilakukan untuk mendapatkan pemuda prestasi adalah melakukan pembinaan pemuda melalui forum forum pemuda hingga terpilihlah 5 orang pemuda yang dikirim ke propinsi untuk mengikuti lomba pemuda pelopor tingkat propinsi. Ada 5 bidang kepeloporan yang dilombakan untuk pemilihan pemuda pelopor tingkat propinsi yaitu bidang : 1). Pendidikan, 2). Agama, Sosial dan Budaya, 3). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pariwisata 4). Pangan dan 5). Teknologi.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp.	952.772.290	913.161.900	90,76
	<i>Indikator Kinerja Program : Persentase pemuda yang dikirim ke propinsi</i>	%	0,5	0,63	126
1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp.	822.772.904	804.248.800	97,75
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pemuda prestasi yang dikirim ke propinsi</i>	orang	5	9	180
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi. & Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp.	130.000.000	108.913.100	83,78
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah pemuda pelopor yang dikirim ke propinsi</i>	orang	5	5	100
1.1.2	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Rp.	822.772.904	804.248.800	97,75
	<i>Indikator Jumlah paskibraka yang memenuhi syarat untuk dikirim ke propinsi</i>	orang	4	4	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp	3.122.684.890	2.928.860.411	93,79
	<i>Indikator Persentase atlit yang dikirim ke propinsi</i>	%	55	74,66	135
2.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp	3.122.684.890	2.928.860.411	93,79
	<i>Indikator Jumlah atlit yang dikirim ke propinsi</i>	orang	95	112	117
2.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Rp	3.122.684.890	2.928.860.411	93,79
	<i>Indikator : Jumlah atlit yang berprestasi</i>	orang	25	39	156
2.2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp.	340.714.424	298.211.280	87,53
	<i>Indikator Persentase olahraga masyarakat yang dilaksanakan</i>	%	100	100	100
2.2.1	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Rp.	340.714.424	298.211.280	87,53
	<i>Indikator Jumlah olahraga masyarakat yang dilaksnakan</i>	jenis	4	4	100



PERMASALAHAN

1. Masih kurangnya sarana prasarana olahraga (indoor)
2. Kurangnya SDM Pelatih olahraga prestasi
3. Kurangnya pelaksanaan even kejuaraan single even cabang olahraga
4. Masih kurangnya pembinaan kepemudaan yang berkelanjutan
5. Kurang adanya koordinasi antar organisasi kepemudaan

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Perlunya pembangunan gedung olahraga multi fungsi
2. Peningkatan sertifikasi pelatih olahraga
3. Adanya pelaksanaan kejuaraan olahraga secara rutin dan berkelanjutan
4. Pembinaan kepemudaan yang berkelanjutan
5. Meningkatkan koordinasi antar organisasi kepemudaan



14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD: Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	2,70	3,21	118,89
2.	SASARAN OPD: Meningkatnya kualitas layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Aplikasi Layanan Publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Persen	15,38	16,66	108,32

Tujuan dari Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator tujuan Indeks SPBE dari target 2,70 pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mendapat nilai 3,21 atau dengan capaian persentase sebesar 118,89%.

Sasaran dari Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik dengan indikator Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi, dari target indikator yang telah ditetapkan sebesar 15,38% realisasi sebesar 16,66% capaian 108,32%. Aplikasi layanan publik yang terintegrasi pada tahun 2022 sebanyak 9 aplikasi, sedangkan jumlah keseluruhan aplikasi layanan publik pada Tahun 2022 sebanyak 54 aplikasi. Adapun aplikasi yang telah terintegrasi adalah sebagai berikut: JDIH, SIM RS RSUD Dolopo, SIM RS RSUD Caruban, Siranap, eLink, SIBANTER (Sistem Informasi Bantuan Terpadu), Siap PMKS, SIPD, SIRUP.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp.	348.553.960	347.480.216	99,69
	<i>Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia dan valid</i>	%	85	85	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	348.553.960	347.480.216	99,69
	<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	%	100	100	100
	<i>Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi</i>	sektor	1	1	100
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp.	103.492.105	102.928.878	99,46
	<i>Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia</i>	dokumen	4	4	100
1.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp.	245.061.855	244.551.338	99,79
	<i>Jumlah data statistik sektoral yang tersedia</i>	sektor	36	36	100
	<i>Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersusun</i>	dokumen	1	3	300

PERMASALAHAN :

1. Kurangnya pemahaman Pengelola Data terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, sehingga beberapa proses statistik tidak dilaksanakan, misalnya setiap kegiatan statistik harus mengisi pada “Romantik Online” dan “INDAH”.
2. Update data pada Portal SDI tidak tepat waktu.
3. Belum ada petunjuk teknis kode referensi sehingga data pada Portal SDI kurang memenuhi standar SDI.
4. Data yang diinput oleh Pengelola Data pada aplikasi Dastik Kewilayahan kurang valid.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola data terkait penyelenggaraan statistik sektoral.
2. Internalisasi kepada pengelola data bahwa data yang selalu terupdate adalah penting.
3. Menunggu petunjuk teknis dari Pusat.
4. Perlu klarifikasi data dengan Dipemas, Kecamatan, dan Desa. Perlu peningkatan kapasitas SDM Pengelola Data melalui Bimtek.



15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD: Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	2,70	3,21	118,89
2.	SASARAN OPD: Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi	%	15,38	16,38	108,32

Tujuan dari Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator tujuan Indeks SPBE dari target 2,70 pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mendapat nilai 3,21 atau dengan capaian persentase sebesar 118,89%.

Sasaran dari Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik dengan indikator Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi, dari target indikator yang telah ditetapkan sebesar 15,38% realisasi sebesar 16,66% capaian 108,32%. Aplikasi layanan publik yang terintegrasi pada tahun 2022 sebanyak 9 aplikasi, sedangkan jumlah keseluruhan aplikasi layanan publik pada Tahun 2022 sebanyak 54 aplikasi. Adapun aplikasi yang telah terintegrasi adalah sebagai berikut: JDIH, SIM RS RSUD Dolopo, SIM RS RSUD Caruban, Siranap, eLink, SIBANTER (Sistem Informasi Bantuan Terpadu), Siap PMKS, SIPD, SIRUP.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PENYELANGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp.	113.137.894	110.570.164	97,73
	<i>Persentase Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	%	100	100	100
1.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	61.135.200	59.353.096	97,08
	<i>Persentase OPD yang telah melakukan keamanan informasi</i>	%	100	100	100
1.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	26.615.000	26.012.160	97,73
	<i>Jumlah sosialisasi kebijakan Persandian yang dilaksanakan</i>	kali	1	1	100
1.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	34.520.200		
	<i>Jumlah pengamanan informasi Perangkat Daerah</i>	PD	53	53	100
1.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	52.002.694	51.217.068	98,49
	<i>Jumlah sarana prasarana yang diamankan</i>	Unit	6	6	100
1.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp.	52.002.694	51.217.068	98,49
	<i>Jumlah sarana prasarana operasional pengamanan informasi sesuai ketentuan</i>	unit	3	3	100

PERMASALAHAN :

Surat ijin frekuensi dari Kementerian Kominfo tidak sama dengan frekuensi repeater (Radio Pancar Ulang-RPU) UHF yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Madiun.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

Melakukan perubahan anggaran untuk pengadaan peralatan repeater (Radio Pancar Ulang-RPU) yang disesuaikan ijin frekuensi dari Kementerian Kominfo di Jakarta.



16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Karakteristik Kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	Persen	100	100	100
2.	SASARAN OPD : Menguatnya Karakteristik Kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	Persen	98,97	99,00	100,03

Capaian indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Kebudayaan yaitu Persentase budaya daerah yang dilestarikan tercapai 100% apabila dibandingkan dengan target. Capaian ini dapat tercapai 100% karena berbagai upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain dengan pengembangan kebudayaan, pembinaan sejarah dan pelestarian serta pengelolaan cagar budaya.

Nilai Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2022 tercapai 99,00% meningkat 4,43 persen poin apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi tahun 2022 tercapai 99,71%. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan pembinaan kelompok seni budaya, update data objek pemajuan kebudayaan pada aplikasi Sitemon, pelatihan untuk pelaku seni budaya, dan pemberian bantuan alat kesenian untuk kelompok seni budaya.

Prestasi yang dicapai di bidang Kebudayaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Nasional : Juara Harapan II Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional.
- b. Tingkat Provinsi :
 1. Juara III Cipta Baca Puisi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Jenjang SD dari SDN Bulu 03 Pilangkenceng (Zifara Helsi Aurelia);
 2. Juara III Seni Musik Tradisi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Jenjang SD dari Gabungan Juara Lomba Tetembangan PSP dan Sanggar Seni Pasendrat Lukardo SDN Mejayan 01 Kecamatan Mejayan.



3. 5 (lima) penyaji terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp.	833.690.000	748.431.863	89,77
	<i>Persentase budaya lokal yang dilestarikan</i>	%	100	100	100
1.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	833.690.000	748.431.863	89,77
	<i>Jumlah budaya lokal yang dilestarikan</i>	Angka	10	10	100
1.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp.	783.690.000	698.631.863	89,15
	<i>Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilastarikan</i>	Angka	10	10	100
1.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp.	50.000.000	49.800.000	99,60
	<i>Jumlah karya cipta yang tersusun</i>	Angka	1	1	100
1.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	521.511.687	506.162.375	97,06
	<i>Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan</i>	Angka	28	28	100
1.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp.	471.511.687	459.867.265	97,53
	<i>Jumlah seni tradisi yang dilestarikan</i>	Angka	5	5	100
1.2.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Rp.	40.000.000	36.295.110	90,74
	<i>Jumlah SDM kesenian tradisional yang meningkat kompetensinya</i>	Angka	100	100	100
1.2.3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Rp.	10.000.000	10.000.000	100
	<i>Jumlah pelaku seni yang mendapatkan apresiasi</i>	Angka	2	2	100
1.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	377.500.000	226.447.100	59,99

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah lembaga adat yang dibina</i>	Angka	206	206	100
1.3.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Rupiah	85.000.000	84.800.000	99,76
	<i>Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang dibina</i>	Angka	1	1	100
1.3.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Rupiah	292.500.000	141.647.100	48,43
	<i>Jumlah sarana dan Prasarana baru yang tersedia</i>	Angka	7	5	71,43
2.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp.	132.500.000	69.197.523	52,22
	<i>Cakupan pembinaan sejarah</i>	%	100	77,27	77,27
2.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	132.500.000	69.197.523	52,22
	<i>Jumlah dokumen sejarah local yang tersusun</i>	Dokumen	3	3	100
2.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Rp.	236.700.000	221.308.000	93,50
	<i>Jumlah SDM yang terakses informasi sejarah dan budaya</i>	Angka	17	17	100
3.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp.	263.700.000	221.308.000	83,92
	<i>persentase cagar budaya yang ditetapkan</i>	Persen	8,7	6,68	76,78
3.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	Rp.	236.700.000	221.308.000	93,50
	<i>Jumlah cagar budaya yang ditetapkan</i>	Angka	17	17	100

PERMASALAHAN

1. Pengelolaan Kebudayaan belum maksimum
2. Pengelolaan Cagar Budaya belum maksimum
3. Kompetensi pelaku budaya masih perlu ditingkatkan

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Membangun data base kebudayaan dengan mengembangkan aplikasi Dapobud, digitalisasi sejarah, manuskrip, ritus, adat, seni budaya, Revitalisasi kesenian, Pendokumentasian karya seni budaya, Rintisan



Regulasi Perbup Pemajuan Kebudayaan dan berkoordinasi dengan Dinas PMD (Dokumen Pemanjuan Kebudayaan Desa).

2. Rintisan Perbup CB dan Pembentukan TACB dan sertifikasi TACB dan Penetapan CB secara berkala, Pemanfaatan CB berkordinasi dengan Dinas Parpora dan Lemaga sekolah.
3. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan.
4. Melaksanakan Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan tuntutan, Bimtek Menerial lembaga/Organisasi/pelaku seni, Pelatihan SDM Kesenian Tradisional dan Pemberdayaan SDM dan penulisan sejarah lokal/desa.



17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan	Indek Pendidikan	Nilai	0,63	0,618	98,10
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya masyarakat sepanjang hayat menuju Budaya Literasi	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	Nilai	19	18,71	98,47

Tahun 2022 ada penambahan koleksi buku dan jumlah lembaga yang terakreditasi melebihi target. Dua Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang masih kurang yaitu Tenaga Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp.	4.605.000.000	4.489.595.938	97,5
	<i>Persentase Perpustakaan terakreditasi</i>	%	2.7	2.16	80
1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah kab/Kota	Rp.	262.275.000	261.736.500	99,8
	<i>Persentase Peningkatan kunjungan</i>	Unit	7.5	36	480
1.1.1	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah kab/kota	Rp.	62.275.000	61.744.500	99,2
	<i>Penambahan jumlah rak Buku</i>	Unit	3	5	166
1.1.2	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Rp.	200.000.000	199.992.000	100
	<i>Penambahan jumlah koleksi buku</i>	Exemplar	500	313	62
1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah kab/Kota	Rp.	4.512.525.562	4.398.979.273	97,5
	<i>Nilai Budaya Kegemaran Membaca</i>	%	65	70.3	108
1.2.1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp.	24.323.562	24.131.750	99,2
	<i>Jumlah sasaran penerima manfaat</i>	Orang	20	35	175
1.2.2	Pemilihan Duta baca tingkat	Rp.	13.202.000	13.061.925	98



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	daerah kab/Kota				
	<i>Keterpilihan terhadap seluruh peserta</i>	%	30	10	33,3

PERMASALAHAN :

Tahun 2022 ada 2 indikator kinerja yang tidak memenuhi target, yaitu:

1. Presentase peningkatan kunjungan

Indikator kunjungan di tahun 2022 ditarget naik 7,5% setelah diprosentase baik kunjungan online maupun kunjungan offline mengalami kenaikan 36% semula kunjungan 43,000 pengunjung menjadi 58,507 pengunjung namun perlu digarisbawahi bahwasanya kunjungan offline mengalami penurunan dikarenakan adanya mobilitas proyek rehab gedung.

2. Keterpilihan duta baca terhadap seluruh peserta

Indikator ini ditargetkan sebesar 50%, namun pencapaiannya sebesar 5,5%. Kondisi ini justru baik, membuktikan adanya persaingan yang ketat diantara peserta. Ditargetkan persaingan antara pemenang dengan jumlah peserta yaitu 1 : 2 (sebesar 50%) tetapi ternyata persaingan menjadi 1 : 18 (5,5%), artinya untuk menjadi pemenang 1 peserta harus mengalahkan 18.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Seiring dengan semakin meredanya pandemi, dan juga untuk meningkatkan pengunjung offline maka layanan perpustakaan umum akan dimaksimalkan dengan membuka layanan setiap hari dengan menambah jam kunjungan hari senin - hari jum,at pukul 07.00-17.00 hari sabtu - hari minggu pukul 07.30-12.30

2. layanan melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) juga akan dioperasionalkan guna melayani sekolah dan pondok pesantren kata komunitas literasi.



18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Inovasi Layanan Publik Menuju Transformasi Digital	Indek SPBE	Nilai	2,70	3,21	121,13
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	Nilai audit Kearsipan Eksternal	Nilai	83,00	79,53 (BB - Sangat Baik)	95,82

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan upaya peningkatan Inovasi layanan berbasis elektronik dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sesuai amanat percepatan dalam Perpres No 95 Th 2018 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Aplikasi SRIKANDI telah diuji terapkan di internal Dinas Perpustakaan dan di akhir bulan Desember 2021 telah dilaksanakan sosialisasi pengenalan aplikasi SRIKANDI pada seluruh Perangkat Daerah, untuk kemudian akan kembali ditindaklanjuti progresnya di tahun anggaran 2022. Tahun 2022 lebih intens lagi silakukan sosialisasi dan pendampingan kepada OPD terkait implementasi Srikandi sehingga seluruh OPD akan menggunakan aplikasi Srikamdi di akhir tahun 2022.

Terkait upaya peningkatan Tata Kelola Kearsipan yang berindikator Nilai Pengawasan Kearsipan tidak mencapai target yang direncanakan karena adanya perubahan komponen dan sistem penilaian sesuai peraturan kepada ANRI No 6 th 2019 tentang komponen dan sistem penilaian sesuai peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. yaitu menerapkan penilaian 60 % nilai Audit eksternal dan 40% nilai Audit Internal. Namun hasil penilaian masih termasuk dalam kategori BB "sangat Baik" dengan Nilai 79,53.



Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp.	231.026.000	228.528.100	98,92
	<i>Indeks Ketersediaan Arsip</i>	Indeks	78	68,76	88,15
1.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Rp.	82.000.000	81.233.100	99,06
	<i>Persentase OPD yang memiliki daftar arsip Dinamis</i>	%	30	28	94,34
1.1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Rp.	28.944.720	27.569.500	95,25
	<i>Jumlah OPD yang melaksanakan penyusutan arsip</i>	OPD	25	20	80,00
1.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab /Kota	Rp.	122.026.000	120.530.000	98,77
	<i>Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik</i>	%	90	100	111,11
1.2.1	Akuisisi,Pengolahan,Preservasi dan Akses arsip statis	Rp.	58.958.075	58.626.300	99,44
	<i>Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi, dipreservasi diolah dan dibuatkan akses arsipnya</i>	berkas	600	4.940	823,33
1.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Rp.	27.000.000	26.765.000	99,13
	<i>Jumlah Arsip statis yang masuk SIKN</i>	Arsip	50	65	130
1.3.1	Pemberdayaan kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Rp.	20.000.000	19.820.000	99,10
	<i>Jumlah OPD yang mendapat pendampingan</i>	OPD	35	53	175
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELEMATAN ARSIP	Rp	51.200.000	50.791.600	99,20
	<i>Indek Keberadaan dan Keutuhan</i>	%	70	67	95,7
2.1	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Rp	25.000.000	24.932.500	99,73
	<i>Jumlah Kegiatan Pemusnahan Sesuai NSPK</i>		6	2	33
2.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Rp	25.000.000	24.932.500	99,73



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah kegiatan penilaian dan penetapan arsip usul musnah</i>		6	2	33,30
2.2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kab/Kota	Rp	26.200.000	25.859.100	98.70
	<i>Jumlah Kegiatan perlindungan dari penyelamatan Arsip</i>		4	5	125
2.2.1	Pemulihan dan penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Rp	26.200.000	25.859.100	98,70
	<i>Jumlah Arsip Akibat Bencana yang dipulihkan dan tersimpan</i>		4	5	125

Secara umum, indikator bidang Kearsipan menunjukkan peningkatan dan progres penyelesaian pekerjaan tetap berlangsung. Namun untuk indeks ketersediaan arsip belum mencapai target karena terdapat komponen jumlah arsip yang dimasukkan SIKN yang belum optimal dilaksanakan. Sedangkan untuk Indeks keberadaan arsip dan keutuhan arsip masih belum dilakukan autentifikasi terhadap arsip yang dialihmediakan.

PERMASALAHAN :

1. Jumlah SDM dengan basik pendidikan kearsipan sangat terbatas.
2. Sarana Prasarana Kearsipan yang terbatas.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

Memaksimalkan SDM yang ada untuk melakukan pendampingan Sri kandi dan memenuhi komponen-komponen yang mendukung pencapaian nilai Pengawasan Kearsipan.



3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian dan Perikanan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	SASARAN OPD : Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	%	0,82	0,91	110,98

(Keterangan : Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor pertanian - 4,05%)

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional yang saat ini juga merupakan salah satu tumpuan pembangunan ekonomi Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Dalam rangka mendukung tercapainya Misi 3 RPJMD "Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan" Dinas Pertanian dan Perikanan menuangkannya kedalam tujuan dinas yaitu "Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian". Peningkatan PDRB Sektor Pertanian selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran dinas sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun adalah "Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan" dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan. Selama tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perikanan menargetkan peningkatan produksi pertanian dan perikanan sebesar 0,82% dengan capaian 0,91% atau 109,76% dari target yang telah ditetapkan. Terlampauinya target tersebut tentu saja tidak lepas dari komitmen pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan dengan rincian anggaran beserta realisasinya seperti yang disajikan pada table berikut ini :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp.	50.000.000	48.762.125	97,52
	<i>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</i>	%	0,1	0,04	40,0
1.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Rp.	50.000.000	48.762.125	97,52



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
	<i>Jumlah produksi perikanan tangkap</i>	kg	508.916	509.400	100,09
1.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp.	50.000.000	48.762.125	97,52
	<i>Jumlah benih ikan yang diperbantukan</i>	ekor	50.000	145.050	290,10
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp.	220.000.000	204.530.000	92,97
	<i>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</i>	%	1	1,04	104
2.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp.	220.000.000	204.530.000	92,97
	<i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</i>	kg	3.614.774	3.649.100	100,95
2.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	220.000.000	204.530.000	92,97
	<i>Jumlah penyediaan pakan ikan di UPT</i>	paket	1	1	100
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp.	130.000.000	63.232.040	48,64
	<i>Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan</i>	%	2	30,6	1530
3.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	130.000.000	63.232.040	48,64
	<i>Jumlah UMKM pengolahan ikan</i>	Unit usaha	15	16	106,67
3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	130.000.000	63.232.040	48,64
	<i>Jumlah Produk Olahan Ikan</i>	Kg	10.400	13.334	128,21

PERMASALAHAN

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya, tingginya harga pakan dan terbatasnya ketersediaan benih unggul.
2. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dikarenakan pelaku usaha perikanan budidaya (pembesaran dan pembenihan) adalah skala kecil/tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, SDM, jaringan teknologi dan pasar.



3. Belum optimalnya sarana tangkap (perahu) maupun alat tangkap (jaring, pancing, pelampung dan *coolbox*)
4. Belum optimalnya sarana pengawasan (perahu patroli) maupun peralatan penunjang pengawasan (pelampung dan head lamp)
5. Berkurangnya populasi ikan di perairan darat akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
6. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan secara memadai serta belum terpenuhinya sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

PENYELESAIAN MASALAH

1. Optimalisasi perikanan budidaya melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan
2. Peningkatan produktifitas perikanan budidaya melalui pelatihan pembesaran ikan dan pelatihan pembenihan ikan
3. Optimalisasi sarana tangkap melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap di perairan darat.
4. Optimalisasi sarana pengawasan melalui bantuan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya ikan di perairan darat.
5. Peningkatan populasi ikan perairan darat melalui bantuan restocking perairan umum darat (pud).
6. Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan serta pemberian bantuan fasilitasi sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.



2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

No	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri	Spending of Money (Pengeluaran wisatawan)	Rp.	344.000.000.000	458.466.303.690	133,27
2.	SASARAN OPD Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase peningkatan pengembangan daya tarik pariwisata Yang dilaksanakan	Persen	4,8	78,6	1637
	Meningkatnya Promosi Pariwisata	Persentase peningkatan promosi pariwisata yang dilaksanakan	Persen	8,5	4,63	54,47

Upaya untuk meningkatkan nilai spending of money adalah dengan menarik sebanyak banyaknya pengunjung wisata baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara dengan cara meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan pengadaan sarana dan prasarana pariwisata baik berupa sarana fisik maupun pengembangan SDM Pariwisata, guna mendukung pengembangan wisata minat khusus di Kabupaten Madiun. Upaya lain yang dilakukan untuk mendatangkan wisatawan untuk meningkatkan spending of money adalah dengan melaksanakan promosi wisata melalui Penguatan Promosi wisata melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. Beberapa upaya untuk mencapai sasaran meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yaitu dengan melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata, mengembangkan jumlah kawasan, melakukan dan melaksanakan pembinaan kepada industri pariwisata. Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai sasaran Meningkatkan promosi pariwisata yaitu dengan melaksanakan event promosi pariwisata di Kabupaten Madiun maupun di luar Kabupaten Madiun, melaksanakan promosi melalui media cetak dan elektronik, memanfaatkan media sosial, melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kota



Madiun dan pihak lainnya guna melaksanakan promosi wisata Kabupaten Madiun.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp.	1.579.907.500	1.565.831.239	99,15
	<i>Persentase pengembangan daya tarik pariwisata yang dilaksanakan</i>	%	4,8	77,6	1.616,6
1.1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	516.450.500	511.922.250	99,12
	<i>Persentase Kawasan yang dikembangkan</i>	%	50	100	200
1.1.1	Pengelolaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp.	516.450.500	511.922.250	99,12
	<i>Jumlah kawasan yang dikembangkan</i>	kawasan	1	2	
1.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	803.457.000	795.699.989	99,03
	<i>Persentase pengelolaan destinasi pariwisata yg dilaksanakan</i>	%	100	100	100
1.2.1	Pengelolaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota	Rp	803.457.000	795.699.989	99,03
	<i>Jumlah sarpras yang dipelihara dan dibangun di destinasi wisata</i>	unit	5	97	1940
1.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rp	260.000.000	258.209.000	99,31
	<i>Persentase industri pariwisata yang dibina dan difasilitasi</i>	%	28,57	28,75	100
1.3.1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Rp	260.000.000	258.209.000	99,31
	<i>Jumlah industri pariwisata yang dibina dan difasilitasi</i>	industri	2	2	100
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp	1.337.363.450	1.184.410.450	91,56
	<i>Persentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti</i>	%	13	186,36	1.433,54
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	1.337.363.450	1.184.410.45	91,56
	<i>Jenis pemasaran pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti</i>	jenis	2	2	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, & Media Baik dalam & Luar Negeri	Rp.	1.162.363.450	1.017.081.350	87,50
	<i>Jumlah event pariwisata yang diikuti dan dilaksanakan</i>	even	22	41	1,86
2.1.2	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam & Luar Negeri	Rp.	175.000.000	167.329.100	95,62
	<i>Jumlah kerjasama yang dihasilkan</i>	Kerjasama	3	3	100
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	180.000.000	158.721.000	88,18
	<i>Jumlah pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif</i>	kali	1	1	100
3.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp	180.000.000	158.721.000	88,18
	<i>Persentase pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan kapasitasnya</i>	%	5	7,09	1,42
3.1.1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Rp	180.000.000	158.721.000	88,18
	<i>Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan kapasitasnya</i>	orang	30	30	100

PERMASALAHAN

1. Belum adanya standarisasi pelaksanaan even,
2. Masih kurangnya even organizer lokal kabupaten yang berstandarisasi
3. Terbatasnya pemahaman tata kelola dan kelembagaan Pariwisata
4. Peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan bukan asset Pemerintah Kabupaten Madiun
5. Minimnya database industri pariwisata
6. Minimnya database ekonomi kreatif

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Mencari regulasi yang mengatur tentang standarisasi even baik propinsi maupun kementerian,



2. Mendorong even organizer kabupaten untuk meningkatkan kompetensi di bidang even organizer.
3. Peningkatan pemahaman tata kelola dan kelembagaan melalui pendampingan dan kerjasama dengan OPD terkait.
4. Peningkatan Kerjasama dengan pemangku wilayah atau stake holder terkait
5. Dilaksanakan pendataan industri pariwisata
6. Dilaksanakan pendataan ekonomi kreatif



3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

a. Dinas Pertanian dan Perikanan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	SASARAN OPD : Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	%	0,82	0,91	110,98

(Keterangan : Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor pertanian - 4,05%)

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional yang saat ini juga merupakan salah satu tumpuan pembangunan ekonomi Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Dalam rangka mendukung tercapainya Misi 3 RPJMD "Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan" Dinas Pertanian dan Perikanan menuangkannya kedalam tujuan dinas yaitu "Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian". Peningkatan PDRB Sektor Pertanian selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran dinas sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun adalah "Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan" dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan. Selama tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perikanan menargetkan peningkatan produksi pertanian dan perikanan sebesar 0,82% dengan capaian 0,91% atau 109,76% dari target yang telah ditetapkan. Terlampauinya target tersebut tentu saja tidak lepas dari komitmen pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan dengan rincian anggaran beserta realisasinya seperti yang disajikan pada table berikut ini :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp	14.585.054.685	14.054.734.960	96,36
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	A	BB	95
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)</i>	Nilai	90	85	94,44



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	7.500.000	7.154.200	95,39
	<i>Persentase dokumen laporan kinerja yang tepat waktu</i>	%	100	100	100
1.1.2	<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Rp	7.500.000	7.154.200	95,39
	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	Dokumen	12	14	116,67
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	13.306.657.175	12.841.765.432	96,51
	<i>Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	13.306.657.175	12.841.765.432	96,51
	<i>Jumlah gaji yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	413.682.093	366.721.864	88,65
	<i>Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	7.000.000	6.957.500	99,39
	<i>Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	24.630.000	24.461.750	99,32
	<i>Jumlah sarana perkantoran yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	30.805.000	30.774.412	99,90
	<i>Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	129.600.000	129.424.140	99,86
	<i>Jumlah kebutuhan logistik Kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	10.000.000	9.789.340	97,89
	<i>Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	4.400.000	4.200.000	95,45

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	207.247.093	161.114.722	77,74
	<i>Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	406.442.177	391.397.964	96,30
	<i>Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.000.000	4.990.092	99,80
	<i>Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	117.270.417	109.671.237	93,52
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	284.171.760	276.736.635	97,38
	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	450.773.240	447.695.500	99,32
	<i>Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara</i>	%	100	100	100,00
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	123.000.000	121.984.620	99,17
	<i>Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100,00
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	20.000.000	19.954.400	99,77
	<i>Jumlah pemeliharaan peralatan perkantoran yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	300.773.240	298.771.480	99,33
	<i>Jumlah pemeliharaan prasarana perkantoran yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	7.000.000	6.985.000	99,79
	<i>Jumlah pemeliharaan prasarana</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>perkantoran lainnya yang dilaksanakan</i>				
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp.	1.596.033.250	1.520.217.122	95,25
	<i>Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian</i>	%	8,14	7,24	88,94
2.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp.	1.596.033.250	1.520.217.122	95,25
	<i>Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian</i>	kelompok	18	16	88,89
2.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp.	600.000.000	588.554.280	98,09
	<i>Jumlah bibit buah-buahan yang dikembangkan</i>	batang	700	-	-
	<i>Jumlah bibit buah-buahan yang diperbantukan</i>	batang	1.850	2.730	147,57
2.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp.	996.033.250	931.662.842	93,54
	<i>Jumlah sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tembakau yang diperbantukan</i>	unit	53	1.089	2.178
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp.	9.850.252.263	9.614.939.687	97,61
	<i>Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik</i>	%	4	4	100
3.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	2.198.462.734	2.088.574.220	95,00
	<i>jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan :</i>				
	<i>* pupuk</i>	kg	39.533	17.133	43,34
	<i>* bibit</i>	batang	1.621.158	767.610	47,35
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Rp	2.198.462.734	2.088.574.220	95,00
	<i>Jumlah subsidi harga pupuk</i>	kg	367.500	-	-
	<i>Jumlah sarana usaha pertanian tembakau yang diperbantukan :</i>				
	<i>* Alsintan</i>	unit	6	15	250
	<i>* jalan produksi</i>	unit	3	3	100
	<i>* jaringan irigasi</i>	unit	3	2	66,67
3.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp.	7.651.789.529	7.526.365.467	98,36

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik</i>	unit	1.978	1.978	100
3.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp.	6.283.884.800	6.226.544.550	99,09
	<i>Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara</i>	unit	10	20	200
3.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp.	1.367.904.729	1.299.820.917	95,02
	<i>Jumlah pestisida pertanian dalam kondisi baik</i>	liter	400	475	118,75
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp.	548.000.000	535.898.100	97,79
	<i>Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian</i>	%	99,05	87,40	87,84
4.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp.	548.000.000	535.898.100	97,79
	<i>Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian</i>	%	11,41	68,92	604,44
4.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp.	548.000.000	535.898.100	97,79
	<i>Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pembuatan agen hayati</i>	Kel	45	272	604,44
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp.	4.384.110.250	4.058.980.994	92,58
	<i>Persentase peningkatan kelas kelompok tani</i>	%	7	7,67	109,57
5.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp.	4.384.110.250	4.058.980.994	92,58
	<i>Jumlah peningkatan kelas kelompok tani</i>	kelompok	180	197	109,44
5.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp.	200.000.000	197.873.390	98,94
	<i>Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Bimtek</i>	orang	96	92	95,83
5.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp.	705.000.000	697.754.254	98,97
	<i>Jumlah Petani yang Mengikuti Pembinaan</i>	orang	600	460	76,67

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rp.	106.500.000	95.490.000	89,66
	<i>Persentase peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian</i>	%	75	75	100
5.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	3.372.610.250	3.067.863.350	90,96
	<i>Jumlah sekolah lapang yang dilaksanakan</i>	SL	20	20	100

PERMASALAHAN

1. Berkurangnya ekosistem sawah yang merupakan salah satu dampak dari alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketersediaan pangan serta berkurangnya kesempatan petani untuk menggarap lahannya secara berkelanjutan.
2. Penurunan produksi padi yang disebabkan oleh serangan OPT (organisme pengganggu tumbuhan) yang terjadi di beberapa kecamatan. Tanaman padi di wilayah tersebut diserang virus kerdil yang disebabkan karena vektor wereng hijau dan wereng coklat.
3. Tingginya resiko gagal panen komoditas hortikultura akibat pengaruh iklim dan serangan hama penyakit serta sulitnya menjaga mutu pasca panen mengingat komoditas hortikultura tidak dapat disimpan lama dan sangat rentan rusak sehingga mengakibatkan harganya sangat fluktuatif
4. Kegiatan swakelola Dana Alokasi Khusus terkendala oleh ketersediaan dana yang bertahap mengakibatkan penyelesaian pekerjaan fisik terhambat.
5. Lemahnya kemitraan antara petani dan industri rokok sehingga petani mengalami kesulitan dalam pemasaran tembakau
6. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.
7. Minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah, manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.



8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang BPP serta minimnya fasilitas untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas penyuluh lapangan.
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya, tingginya harga pakan dan terbatasnya ketersediaan benih unggul.

PENYELESAIAN MASALAH

1. Perlindungan terhadap lahan pertanian melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu program perlindungan terhadap 21.587 Ha lahan sawah untuk tetap berfungsi sebagai lahan pertanian tanaman pangan.
2. Pengendalian OPT melalui Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yaitu :
 - konsep agroekosistem, yaitu perpaduan interaksi komponen-komponen ekosistem pertanian ke dalam taktik pengendalian hama dengan menciptakan keseimbangan antara herbivora dan musuh alaminya.
 - konsep ambang pengendalian, yaitu pengendalian populasi hama/penyakit yang memerlukan tindakan secara kimiawi dengan mempertimbangkan jenis organisme sasaran, dengan pengaruh minimum terhadap manusia, hewan, serangga berguna dan kualitas lingkungan hidup.
 - konsep pelestarian lingkungan, yaitu pengendalian OPT melalui pendekatan ekologis, artinya dalam upaya pengendalian OPT harus sekecil mungkin gangguannya terhadap lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan pelatihan pembuatan agen hayati sehingga pengendalian OPT bisa dilakukan secara alami sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.
3. Peningkatan pengetahuan petani melalui bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil, dengan penerapan teknologi pasca panen yang baik dan pengolahan hasil yang tepat guna. Melalui upaya ini diharapkan petani dapat meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura yang dihasilkan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.

4. Kelompok tani pelaksana swakelola harus menyediakan modal secara mandiri untuk pelaksanaan kegiatan, berupa kas kelompok atau kerjasama dengan pihak desa
5. Mendekatkan petani tembakau dengan pasar melalui Kerjasama dengan perusahaan mitra khususnya untuk tembakau Kasturi.
6. Peningkatan penyuluhan kelembagaan petani.
7. Menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan ,peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi jaringan pemasaran, serta meningkatkan pembinaan penyuluh terhadap kelembagaan petani untuk terus mendorong petani anggota di dalamnya menerapkan GHP GAP, memperhatikan kualitas produk, dan memberikan jaminan mutu hasil pertanian.
8. Peningkatan sarana dan prasarana BPP serta mengakomodir peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas melalui berbagai kegiatan.

a. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita makanan	Rp.	550.000	488.619	88,83
2.	SASARAN OPD Stabilnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	61	61	100
	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	78	87,74	112,48
	Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan	Angka Produksi				
		Daging	Ton	9575	10293	107,49
		Telur	Ton	4573	5260	115,02
		Susu	Ton	234	269	114,95

Secara keseluruhan seluruh terget kinerja sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Masyarakat Kabupaten Madiun tercapai dengan baik.



Sasaran Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat pada Tahun 2022 dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dapat tercapai dengan nilai 60,98 atau 99,98% dari target yang ditetapkan.

Sasaran Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi juga dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,74 atau 112,48 %. Meskipun ada variabel pembentuk skor pola pangan harapan yaitu angka kecukupan energi (AKE) dan angka kecukupan protein (AKP) yang menjadi indikator di salah satu program yang belum mencapai angka yang dianjurkan karena kurangnya konsumsi di kelompok pangan umbi-umbian dan biji berminyak tapi dapat tertutup oleh konsumsi dari kelompok pangan lainnya terutama di kelompok padi-padian.

Begitu pula dengan sasaran meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan dengan indikator angka produksi daging, telur, dan susu. Semua target produksi tercapai diatas 100%. Dengan persentase capaian : Daging = 107,49%, Telur = 115,02%, dan Susu = 114,95%.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp.	400.000.000	378.192.418	94,55
	<i>Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb)</i>	%	70	51,78	73,97
1.1	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000	78.282.418	78,28
	<i>Jumlah kegiatan dalam mendukung Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak</i>	kegiatan	1	1	100
1.1.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp.	100.000.000	78.282.418	78,28
	<i>Jumlah tenaga inseminator yang mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan</i>	Kelompok	36	36	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupataen/Kota	Rp.	300.000.000	299.910.000	99,97
	<i>Jumlah kegiatan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak</i>	kegiatan	1	1	100
1.2.1	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Rp.	300.000.000	299.910.000	99,97
	<i>Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan bibit ternak</i>	Kelompok	5	5	100
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp.	485.944.579	478.363.030	98,44
	<i>Sarana dan prasarana peternakan yang dibangun atau direhabilitasi</i>	paket	1	1	100
2.1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp.	485.944.579	478.363.030	98,44
	<i>Sarana dan prasarana peternakan yang dibangun atau direhabilitasi</i>	paket	1	1	100
2.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rp.	485.944.579	478.363.030	98,44
	<i>Jumlah sarana prasarana peternakan yang dibangun dan dipelihara</i>	Paket.	1	1	100
3.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp.	310.561.000	300.424.703	96,74
	<i>Persentase Kasus Kesehatan Hewan Yang Tertangani</i>	%	100	100	100
3.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	310.561.000	300.424.703	96,74
	<i>Persentase Kasus Kesehatan Hewan Yang Tertangani</i>	%	100	100	100
3.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp.	210.561.000	208.396.621	98,97



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah hewan ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan</i>	Ekor	3.200	3.315	103,59
3.2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000	92.028.082	92,03
	<i>Jumlah tenaga kesehatan hewan</i>	petugas	22	22	100
3.2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp.	100.000.000	92.028.082	92,03
	<i>Jumlah obat untuk pelayanan kesehatan hewan yang tersedia</i>	bulan	12	12	100
4.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp.	95.000.000	85.673.525	90,18
	<i>Presentase Peningkatan Kualitas Peternak dan Pelaku Usaha Ternak</i>	%	100	100	100
4.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp.	95.000.000	85.673.525	90,18
	<i>Presentase Peningkatan Kualitas Peternak dan Pelaku Usaha Ternak</i>	%	100	100	100
4.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	Rp.	95.000.000	85.673.525	90,18
	<i>Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan</i>	Kecamatan	15	15	100



4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan PDRB sektor Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	17,00	17,57	103
	Menciptakan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Persentase distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	%	95	147	155
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya hasil produksi usaha perdagangan	Persentase peningkatan hasil produksi usaha perdagangan	%	11	11,41	104
	Meningkatnya hasil produksi usaha mikro	Persentase peningkatan hasil produksi usaha mikro	%	1,031	1,820	177
	Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persentase peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	%	7	7,89	113

(Keterangan : Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan 5,76%)

Realisasi dari pencapaian indikator tujuan dan sasaran melebihi target. Terdapat 2 (dua) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran. Pada indikator tujuan : kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB target yang ditetapkan adalah 17% sedang realisasinya 17,57%. Capaian indikator tujuan ini adalah 103%. Indikator sasaran pada tujuan ini adalah :

- Persentase peningkatan hasil produksi perdagangan dengan target 11% dan realisasinya adalah 11,41%, capaian dari indikator sasaran ini adalah 104%.
- Persentase peningkatan hasil produksi usaha mikro dengan target 1,031% dan realisasinya adalah 1,82%, capaian dari indikator sasaran ini adalah 177%.

Pada indikator tujuan : Persentase distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan target 95% sedang realisasinya 155%. Capaian indikator tujuan ini adalah 155%. Indikator sasaran pada tujuan ini adalah : Persentase peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya targetnya adalah 7% sedangkan realisasi 7,89% sehingga capaiannya adalah 113%



Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp.	113.000.000	98.892.900	87,52
	<i>Persentase peningkatan rekomendasi perizinan yang diterbitkan</i>	%	20	83	415
1.1	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp.	49.000.000	37.053.000	75,62
	<i>Jumlah rekomendasi TDG yang diterbitkan</i>	Dokumen	10	60	600
1.1.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp.	49.000.000	37.053.000	75,62
	<i>Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan</i>	Orang	50	60	120
1.2	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Rp.	39.000.000	38.073.500	97,62
	<i>Jumlah rekomendasi STPW yang diterbitkan</i>	Dokumen	5	13	260
1.2.1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Rp.	39.000.000	38.073.500	97,62
	<i>Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan</i>	Orang	50	60	120
1.3	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	25.000.000	23.766.400	95,07
	<i>Persentase Pengawasan distribusi B2</i>	%	20	20	100
1.3.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp.	25.000.000	23.766.400	95,07
	<i>Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap PA-B2 dan P-B2 yang dilaksanakan</i>	kali	5	5	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	2.371.763.396	2.306.658.537	97,26
	<i>Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan</i>	%	55	117	212,12
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	1.461.763.396	1.457.749.580	99,73
	<i>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan</i>	persen	55	57	102,77

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	872.663.396	868.865.330	99,56
	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan</i>	unit	6	6	100
		unit	20	20	100
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	589.100.000	588.884.250	99,96
	<i>Jumlah Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang difasilitasi</i>	orang	41	41	100
2.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp.	910.000.000	848.908.957	93,29
	<i>Persentase pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan</i>	%	50	50	100
2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	610.000.000	604.418.257	99,08
	<i>Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya yang dibina</i>	orang	32	32	100
2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	300.000.000	244.490.700	99,37
	<i>Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan</i>	orang	30	33	110
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	779.950.000	758.029.957	97,19
	<i>Persentase Ketersediaan Barang pokok dan barang Penting Lainnya</i>	%	80	147	183,75
3.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Rp.	34.950.000	34.277.825	98,08
	<i>Persentase terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya</i>	%	80	100	125
3.1.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	34.950.000	34.277.825	98,08
	<i>Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat yang di kendalikan</i>	jumlah pasar	16	16	100
3.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Rp.	716.500.000	699.162.246	97,58

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting</i>	%	80	100	125
3.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp.	10.000.000	9.165.964	91,66
	<i>Jumlah Komoditi yang di pantau di tingkat distributor</i>	komoditi	75	75	100
3.2.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp.	155.500.000	154.671.896	99,47
	<i>Jumlah Komoditi yang di pantau di tingkat pasar</i>	Komoditi	28	28	100
3.2.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota	Rp.	551.000.000	535.324.386	97,16
	<i>Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar</i>	kali	25	53	212
3.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp.	28.500.000	24.589.886	86,28
	<i>Persentase pengawasan pupuk dan pestisida</i>	%	100	100	100
3.3.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp.	28.500.000	24.589.886	86,28
	<i>Jumlah distributor dan agen yang dipantau</i>	distributor	30	30	100
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp.	95.000.000	91.028.965	95,82
	<i>Persentase peningkatan fasilitas Produk Ekspor Unggulan</i>	%	65	71	109,89
4.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	95.000.000	91.028.965	95,82
	<i>Jumlah pelaksanaan promosi bagi produk ekspor</i>	kali	2	3	150
4.1.1	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp.	95.000.000	91.028.965	95,82
	<i>jumlah Pelaksanaan Misi Dagang</i>	kali	2	2	150
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp.	272.450.000	271.865.302	99,79
	<i>Persentase Peningkatan perlindungan konsumen</i>	%	95	0,51	0,54
5.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa	Rp.	272.450.000	271.865.302	99,79

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				
	<i>Persentase peningkatan Pelaksanaan Metrologi legal</i>	%	95	0,51	0,54
5.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.	200.000.000	199.732.602	99,87
	<i>Jumlah UTTP yang tera/tera ulang</i>	UTTP	5.800	6.252	107,79
5.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp.	72.450.000	72.132.700	99,56
	<i>Jumlah wajib tera ulang yang mengikuti penyuluhan</i>	orang	150	150	100
6.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	320.000.000	307.137.696	95,98
	<i>Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri</i>	%	60	300	500
6.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp.	320.000.000	307.137.696	95,98
	<i>Persentase penjualan produk dalam negeri</i>	%	60	80	133,33
6.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	250.000.000	244.039.246	97,62
	<i>Jumlah pelaksanaan promosi</i>	unit	3	3	100
6.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	70.000.000	63.098.450	90,14
	<i>Jumlah fasilitasi pemasaran produk dalam negeri</i>	Kali	2	1	50

PERMASALAHAN :

1. Kendala kapasitas pemahaman masing-masing peserta terhadap penyampaian materi aktivitas kegiatan berdampak terhadap implementasinya.
2. Banyak data yang nantinya dibutuhkan OPD tetapi yang mengeluarkan data adalah BPS.
3. Banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Madiun.
4. Data UM yang sudah dan belum di fasilitasi belum terintegrasi.
5. Capaian program pemberdayaan mencapai 22,8% dikarenakan capaian target kegiatan, pendataan, NIB dan kelembagaan (bansos) melebihi target.



PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Memaksimalkan tenaga pendamping koperasi untuk memonitoring, evaluasi dan mendampingi koperasi peserta pelatihan dalam implementasi hasil pelatihan.
2. Kerjasama dengan BPS.
3. Permohonan wilayah tim pendamping lapangan.
4. Penyempurnaan aplikasi SIMIUM.



5. Urusan Pemerintah Bidang Industri

Dinas Tenaga Kerja

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	0	13,31	
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Usaha Industri Kecil dan Menengah	Persentase Peningkatan IKM	%	3,19	4,92	1,54

(Keterangan : Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri 13,31%)

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp.	572.637.555	330.102.370	57,64
	<i>Jumlah rencana pembangunan industri</i>	Dokumen	1	1	100
1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp.	572.637.555	330.102.370	57,64
	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	Dokumen	1	1	100
1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Rp.	187.936.110	133.632.620	71,11
	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	IKM	30	40	133
1.1.2	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaann Pembangunan Sumber daya Industri	Rp.	123.701.445	109.779.500	88,75
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	Dokumen	1	1	100
1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp.	261.000.000	86.690.250	33,21
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	Dokumen	1	1	100
2.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp.	21.500.000	15.668.100,00	72,87
	<i>Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha.</i>	%	12,04	6,00	0,49
2.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin	Rp.	21.500.000	15.668.100	72,87

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				
	<i>Jumlah Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI</i>	IKM	50	3	6
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Teintegrasi secara Elektronik.	Rp.	21.500.000	15.668.100	72,87
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</i>	Dokumen	1	1	100
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp.	30.000.000	20.073.450	66,91
	Presentase IKM yang memanfaatkan SIINas	%	12,04	46,00	3,82
3.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	30.000.000	20.073.450	66,91
	<i>Persentase updating Data Sistem Informasi Industri</i>	%	100	46	46
3.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	30.000.000	20.073.450	66,91
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Dokumen	1	1	100

PERMASALAHAN :

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa “Setiap Bupati / Walikota



menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota”. Untuk itu Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten / Kota, termasuk Kabupaten Madiun untuk membuat Rencana Pembangunan Industri Daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembangunan sektor industri melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Madiun

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda RPIK dan nantinya di Tahun 2023 akan tersusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2. Koordinasi dengan OPD terkait untuk data dukung penyiapan dokumen penyusunan Raperda RPIK.
3. Melakukan pendataan IKM untuk mengetahui kondisi IKM di Kabupaten Madiun.



6. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Nilai	4,32	5,84	132
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Nilai	70	72-72	103

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp.	56.274.000,00	45.995.600,00	81,84
	<i>Persentase Transmigran Umum yang berhasil</i>	%	100	100	100
1.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp.	56.274.000,00	45.995.600,00	81,84
	<i>Jumlah calon Transmigran yang diseleksi</i>	KK	7	7	100
1.1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Rp.	56.274.000,00	45.995.600,00	81,84
	<i>Jumlah Kepala Keluarga yang Dibina</i>	KK	2	2	100

PERMASALAHAN :

Pada Program pengembangan kawasan transmigrasi Tahun 2022 sudah mulai ada pemberangkatan kembali, selama ini Kuota pemberangkatan transmigrasi sudah ditentukan oleh pusat maupun Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun animo calon trans yang ada di Kabupaten Madiun saat ini masih relatif tinggi.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2022 harus lebih aktif kordinasi baik pusat maupun daerah provinsi Jawa Timur untuk penambahan kouta penempatan calon transmigrasi pada tahun-tahun



berikutnya. Adapun penjarangan animo calon Transmigrasi dapat dilakukan beberapa hal diantaranya kegiatan sosialisasi terhadap Masyarakat desa. Pelaksanaan Sosialisasi Ketransmigrasian Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada 2 lokasi, di Kecamatan Sawahan 30 orang dan di Kecamatan Kare sebanyak 30 orang.



3.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	TUJUAN OPD : Mewujudkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Toleransi	Nilai	78.03	80.88	100
	Mewujudkan Pemerintahan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72.50		
	Meningkatkan Inovasi Layanan Publik Berbasis Transformasi Digital	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84.5	83.4	98.2
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Dihasilkan	Kebijakan	100 (9 kebijakan)	100 (14 kebijakan)	100
2.	SASARAN OPD : Terwujudnya Nilai-Nilai Keagamaan dan Gotong Royong dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Pelayanan Keagamaan	Nilai	82.00	82.06	100
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase Rumusan Kebijakan Administrasi Umum yang di Tindak Lanjuti	Kebijakan	100 (131 Kebijakan)	100 (131 Kebijakan)	100
		Persentase Rumusan Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan dan Kesra yang di Tindaklanjuti	Kebijakan	100 (40 Kebijakan)	100 (47 Kebijakan)	100
		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di Tindaklanjuti	Kebijakan	100 (23 Kebijakan)	100 (30 Kebijakan)	100
	Meningkatnya Inovasi Layanan Publik Berbasis Transformasi Digital	Persentase PD yang Mendapatkan Nilai Baik dalam Melaksanakan Pelayanan	Nilai	84.5	83.4	98.2
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang di Tindaklanjuti	Kebijakan	100 (9 kebijakan)	100 (14 kebijakan)	100



Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Terwujudnya nilai-nilai keagamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indikator *Indeks Layanan Keagamaan* dengan target Nilai 82 mencapai Nilai 82,06 (100%) dengan tingkat capaian indikator sangat tinggi dengan skala nilai peringkat kinerja (skala nilai 91% - 100%).
2. Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Indikator *Persentase rumusan kebijakan bidang Administrasi Umum, bidang Perekonomian dan Pembangunan, bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti* dengan target 100% mencapai Nilai 100% dengan tingkat capaian indikator sangat tinggi dengan skala nilai peringkat kinerja (skala nilai 91% - 100%).
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Inovasi Layanan publik berbasis transformasi Digital Indikator *Persentase PD yang mendapatkan Nilai baik dalam melaksanakan pelayanan* dengan target 100% mencapai Nilai 100% dengan tingkat capaian indikator sangat tinggi dengan skala nilai peringkat kinerja (skala nilai 91% - 100%).
4. Sasaran Strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui rumusan kebijakan bidang perekonomian Indikator *Persentase Rumusan kebijakan strategis bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti* dengan target 100% mencapai Nilai 100% dengan tingkat capaian indikator sangat tinggi dengan skala nilai peringkat kinerja (skala nilai 91% - 100%)

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB /KOTA	Rp.	29.490.876.298	27.781.349.578	94,20
	<i>Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di Fasilitasi</i>	%	100	92	92
	<i>Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Daerah</i>	Nilai	88	80,2	91,3

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	317.153.256	285.612.916	90,06
	<i>Jumlah dokumentasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	dokumen	16	15	93,75
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	234.443.736	217.901.716	92,94
	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun</i>	dokumen	3	3	100
	<i>Jumlah dokumen DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang tersusun</i>	dokumen	4	4	100
	<i>Jumlah dokumen RKASKPD dan perubahan RKA SKPD yang tersusun</i>	dokumen	4	4	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	82.709.520	67.711.200	81,87
	<i>Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun</i>	Dokumen	2	2	100
	<i>Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yg tersusun</i>	Dokumen	2	2	100
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	14.388.455.307	13.855.062.692	96,29
	<i>Prosentase pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah</i>	%	100	96	96
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	14.385.411.695	13.854.240.192	96,31
	<i>Jumlah penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sekretariat daerah</i>	Orang /bulan	14	14	100
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	3.043.612	822.500	27,02
	<i>Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran sekretariat daerah</i>	laporan	4	2	50
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	0	0	0
	<i>Prosentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah</i>	%	100	0	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	0	0	0



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>jumlah penatausahaan barang milik daerah sekretariat daerah</i>	unit	20	0	0
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	0	0	0
	<i>Prosentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah</i>	%	100	0	0
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	0	0	0
	<i>Jumlah dokumen pendataan dan pengolah Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah</i>	dokumen	125	0	0
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	3.541.885.163	3.219.011.772	90,88
	<i>Prosentase Pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah</i>	%	100	100	100
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	38.313.048	38.301.016	99,97
	<i>Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Daerah</i>	paket	20	12	60
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	46.112.573	45.201.935	98,03
	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah</i>	paket	50	40	80
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	178.540.351	175.216.279	98,14
	<i>Jumlah peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah</i>	paket	23	19	82,61
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	448.808.590	425.549.623	94,82
	<i>Jumlah bahan logistik kantor Sekretariat Daerah</i>	paket	35	30	85,71
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	222.668.205	217.297.780	97,59
	<i>Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan Sekretariat Daerah</i>	paket	8	6	75
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	17.490.000	16.856.000	96,38
	<i>Jumlah langganan bahan bacaan Sekretariat Daerah</i>	dokumen	7	7	10
1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	Rp	135.532.255	125.211.331	92,38
	<i>Jumlah ketersediaan bahan/material Sekretariat Daerah</i>	paket	3	2	66,67
1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	30.890.000	15.311.099	49,57
	<i>Jumlah kunjungan tamu ke</i>	laporan	2	2	100



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>sekretariat daerah</i>				
1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	2.423.530.141	2.160.066.709	89,13
	<i>Jumlah dokumen laporan rapat koordinsai dan konsultasi Sekretariat Daerah</i>	laporan	100	85	85
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.216.702.184	1.090.204.320	89,60
	<i>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan</i>	%	100	87	87
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	750.000.000	726.000.000	96,80
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai klasifikasi</i>	Unit	2	2	100
1.6.2	Pengadaan Mebel	Rp	176.774.643	176.401.200	99,79
	<i>Jumlah mebel sekretariat daerah</i>	Paket	2	2	100
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	289.927.541	187.803.120	64,78
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Sekretariat Daerah</i>	Unit	2	2	100
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	0	0	0
	<i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sekretariat daerah</i>	Unit	2	0	0
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	4.358.993.273	4.213.927.661	96,67
	<i>Prosentase Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	%	100	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	13.000.000	12.536.000	96,43
	<i>Jumlah jasa surat menyurat Sekretariat Daerah</i>	laporan	5	2	40
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	1.292.907.724	1.232.701.879	95,34
	<i>Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Daerah</i>	bulan	12	12	100
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	521,765,007	519,470,037	99,56



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah</i>	Jenis	15	15	100
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2.531.320.542	2.449.219.745	96,76
	<i>Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	kelompok	20	17	85
1.8	Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	2.913.784.289	2.883.793.970	98,97
	<i>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan</i>	%	100	95	95
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	2.384.381.453	2.359.796.819	98,97
	<i>Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat Daerah</i>	unit	20	16	80
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Rp	43.972.800	43.073.550	97,95
	<i>Jumlah mebel Sekretariat Daerah yang terpelihara secara rutin/berkala</i>	unit	16	16	100
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	104.000.000	103.419.376	99,44
	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya sekretariat daerah yang terpelihara secara rutin/berkala</i>	unit	5	5	100
1.8.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	381.430.036	377.504.225	98,97
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sekretariat Daerah yang terpelihara secara rutin/berkala</i>	unit	2	2	100
1.9	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	802.367.826	664.345.537	82,80
	<i>Prosentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	164.717.826	91.828.712	55,75
	<i>Jumlah penyediaan gaji dan</i>	dokumen	28	14	50



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi</i>				
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	130.200.000	92.633.825	71,15
	<i>Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH yang terpenuhi</i>	paket	10	10	100
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	35.000.000	19.813.000	56,61
	<i>Jumlah medical check up KDH/WKDH yang terfasilitasi</i>	orang	2	2	100
1.9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	472.450.000	460.070.000	97,38
	<i>Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terfasilitasi</i>	orang/bulan	24	24	100
1.10	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp	1.951.535.000	1.569.390.710	80,42
	<i>Prosentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi</i>	%	85	85	100
1.10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp	907.474.000	769.247.453	84,77
	<i>Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang terfasilitasi</i>	jenis	10	10	100
1.10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp	729.371.000	638.618.681	87,56
	<i>penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang terfasilitasi</i>	paket	10	10	100
1.10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp	314.690.000	161.524.576	51,33
	<i>jumlah kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang terpenuhi</i>	bagian	9	9	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp	942.580.921	920.279.226	97,63
	<i>Prosentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang diterapkan sesuai kebutuhan</i>	%	100	100	100
	<i>prosentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu pelayanan</i>	%	100	100	100



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Kegiatan Penataan Organisasi	Rp	942.580.921	920.279.226	97,63
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Pelayanan Publik dan tatalaksana yang disahkan</i>	Dokumen	1	1	100
	<i>Jumlah rumusan kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang disahkan</i>	Dokumen	1	1	100
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Kelembagaan dan analisa jabatan yang disahkan</i>	Dokumen	53	53	100
1.1.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Rp	243.350.000	242.552.978	99,67
	<i>Jumlah PD yang tepat fungsi dan ukurannya</i>	PD	60	60	100
	<i>Jumlah PD yang dipetakan jabatannya dan di analisa jabatan</i>	PD	60	60	100
1.1.2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp	309.012.000	304.654.610	98,6
	<i>Jumlah Perangkat Daerah terfasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</i>	PD	40	1.2	100
1.2	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp	201.749.246	197.826.293	98
	<i>Jumlah PD yang menyusun dokumen renaksi reformasi birokrasi</i>	PD	54	54	100
1.2.1	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan Publik	Rp	86.706.075	80.744.500	93
	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan di evaluasi kualitas pelayanan publik dan tatalaksana</i>	PD	40	40	100
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan	Rp	101.763.600	94.501.065	92,80
	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dari Pemerintah daerah dan perangkat daerah yang sesuai perundang undangan</i>	PD	53	53	100
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	1.530.510.723	1.528.806.459	99,89
	<i>Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Daerah yang di fasilitasi</i>	%	100	172,13	172,13
1.1	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Rp	1.530.510.723	1.528.806.459	99,89
	<i>Jumlah kegiatan keprotokolan dan</i>	kegiatan	305	525	172,13



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>komunikasi Pimpinan yang terselenggara</i>				
	<i>Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pimpinan yang dirilis</i>	rillis	250	488	195,20
1.1.1	Fasilitasi Keprotokolan	Rp	1.021.339.668	1.020.209.934	99,89
	<i>Jumlah fasilitasi keprotokolan kegiatan Pimpinan</i>	kegiatan	305	525	172,13
1.1.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp	4.000.000	3.948.840	98,72
	<i>Jumlah fasilitasi komunikasi kegiatan Pimpinan</i>	unsur	4	4	100,00
1.1.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp	505.171.055	504.647.685	99,90
	<i>Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pimpinan</i>	kegiatan	305	638	255,20
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	14.706.773.636	13.695.344.374	93,12
	<i>Persentase rumusan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai kebutuhan</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi</i>	%	90	100	111,11
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	14.706.773.636	13.695.344.374	93,12
	<i>Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang disahkan</i>	Kebijakan	13	13	100
	<i>Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi</i>	Kegiatan	143	143	100
1.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp.	4.322.511.286	4.193.940.634	97,03
	<i>Jumlah Rumusan kebijakan bina mental spirityal yang dikeluarkan</i>	Kebijakan	6	6	100
	<i>Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi</i>	Kegiatan	143	143	100
1.1.2	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp.	10.220.757.540	9.351.560.570	91,50
	<i>Jumlah rumusan kebijakan Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan</i>	Kebijakan	4	4	100
1.1.3	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp.	163.504.810	149.843.170	91,64
	<i>Jumlah rumusan kebijakan Kesejahteraan Masyarakat yang dikeluarkan</i>	Kebijakan	3	3	100
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	1.208.915.696	1.131.263.296	93,58



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Jumlah rumusan kebijakan penyelenggaraan bidang hukum	Keputusan Bupati	7	16	228,57
1.1	Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi hukum	Rp.	1.208.915.696	1.131.263.296	93,58
	<i>Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah</i>	Rp.	434.677.582	406.052.707	93,41
	<i>Jumlah Produk hukum daerah (perdadan perbub) yang sesuai/harmonis dengan peraturan per uu yang baru dan lebih tinggi</i>	produk hukum daerah	75	162	216
1.1.1	<i>Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	Rp.	535.240.243	511.988.813	95,66
	<i>Jumlah kasus perdata, TUN, dan pidana yang terselesaikan baik litigasi dan non litigasi</i>	kasus	5	13	260
1.1.2	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Rp.	238.997.871	213.221.776	89,21
	<i>Jumlah produk hukum daerah yang dihimpun dan diupload ke webside JDIH</i>	produk hukum daerah	45	60	133,33
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	1.147.364.070	1.126.316.636	98,17
	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	persen	100	100	100
1.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp.	1.079.235.549	1.062.563.736	98,46
	<i>Jumlah rumusan kebijakan pemerintah daerah yang disahkan</i>	kebijakan	10	10	100
1.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp.	162.451.199	157.731.012	97,09
	<i>Jumlah rumusan kebijakan terkait penataan administrasi pemerintahan</i>	kebijakan	3	3	100
1.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp.	753.231.350	741.784.274	98,48
	<i>Jumlah rumusan kebijakan terkait pengelolaan administrasi kewilayahan</i>	kebijakan	4	4	100
1.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.	163.553.000	163.048.450	99,69
	<i>Jumlah rumusan kebijakan terkait pelaksanaan otonomi daerah</i>	kebijakan	3	3	100
1.2.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp.	68.128.521	63.752.900	93,58
	<i>Jumlah rumusan kebijakan kerjasama yang disahkan</i>	kebijakan	10	10	100
1.2.1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Rp.	55.579.720	51.336.000	92,36
	<i>Jumlah kerjasama yang dilakukan</i>	dokumen	10	10	100



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.2	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Rp.	12.548.801	12.416.900	98,95
	<i>Jumlah evaluasi pelaksanaan kerjasama</i>	kerjasama	10	10	100
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp.	867.586.729	773.866.142	89,20
	<i>Presentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan</i>	persen	100	100	100
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp.	321.887.024	304.714.382	94,67
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan perekonomian daerah yang disahkan</i>	Rumusan kebijakan	9	14	155,56
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp.	227.158.216	218.451.932	96,17
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang dikeluarkan</i>	Rumusan kebijakan	5	12	240
1.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp.	94.728.808	86.262.450	91
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang dikeluarkan</i>	Rumusan kebijakan	4	2	50
1.2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp.	545.699.705	439.551.760	80,55
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam yang disahkan</i>	Rumusan kebijakan	2	5	250
1.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp.	527.699.705	423.031.360	80,17
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Pertanian, Perikanan yang dikeluarkan</i>	Rumusan kebijakan	1	4	400
1.2.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp.	18.000.000	16.520.400	91,78
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Energi dan Air yang dikeluarkan</i>	Rumusan kebijakan	1	1	100
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp.	628.226.925	608.249.762	96,82
	<i>Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai kebutuhan</i>	%	100	96,82	96,82
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp.	628.226.925	608.249.762	96,82
	<i>Jumlah Pelaksanaan Administarsi</i>	Dolumen	10	10	100



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Pembangunan sesuai ketentuan</i>				
1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp.	317.200.000	316.669.850	99,83
	<i>Jumlah rumusan kebijakan fasilitasi penyusunan program pembangunan</i>	Dokumen	4	4	100
1.1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.	100.000.000	95.700.824	95,70
	<i>Jumlah rumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi program pembangunan</i>	Dokumen	3	3	100
1.1.3	Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	211.026.925	195.879.088	92,82
	<i>Jumlah rumusan dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	Dokumen	3	3	100
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp.	1.706.340.937	1.565.050.946	91,72
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat Nilai	Baik 74,56	Cukup 69,6	79,9
	Persentase Jumlah Rumusan Kebijakan Strategis Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	%	100	225	225
		Jumlah Kebijakan	4	9	225
1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	1.706.340.937	1.565.050.946	91,72
	<i>Persentase nilai belanja pengadaan pada APBD yang diumumkan dalam SiRUP</i>	% Nilai Bobot Nilai	100 100 10	100 100 10	100
	<i>Persentase realisasi jumlah paket yang dilaksanakan melalui E-Tendering/E-Seleksi terhadap jumlah paket ETendering/ E-Seleksi yang diumumkan pada aplikasi SiRUP</i>	% Nilai Bobot Nilai	100 100 5	90,4 90,4 5	100
	<i>Persentase penerapan E-Kontrak pada aplikasi SPSE</i>	% Nilai Bobot Nilai	100 100 5	85,8 85,8 4,6	96
	<i>Persentase Status Paket Selesai pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring (E-Purchasing)</i>	% Nilai Bobot Nilai	100 100 5	72,9 72,9 5	0
	<i>Tingkat kematangan UKPBJ Level Proaktif</i>	Dokumen / Variabel Bobot Nilai	8/9 35,56	8/9 35,56	100



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Pemenuhan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ)</i>	Orang % Bobot Nilai	9 30 9	2 6,7 4,4	6,7
	<i>Persentase proses pemilihan dengan metode Non E-Tendering/ Non E-Purchasing (E-PL, Swakelola, Penunjukan Langsung, Pencatatan Non Tender pada SPSE</i>	% Nilai Bobot Nilai	100 100 5	98,7 98,7 5	98,7
	TOTAL NILAI DARI TOTAL BOBOT NILAI 7 INDIKATOR KINERJA UTAMA ITKP		74,56 (Baik)	69,6 (Cukup)	79,9 (Baik)
1.1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	6.500.000	6.142.850	94,51
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Triwulanan belanja pengadaan pada OPD yang diumumkan dalam SiRUP</i>	Jumlah Dokumen	4	4	100
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Triwulanan Paket E-Tendering/E-Seleksi pada SPSE yang diumumkan pada aplikasi SiRUP</i>	Jumlah Dokumen	4	4	100
	<i>Jumlah Dokumen data hasil penilaian kinerja penyedia per-Triwulan</i>	Jumlah Dokumen	4	4	100
1.1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp	86.150.000	83.303.931	96,70
	<i>Jumlah Dokumen Data hasil penanganan permasalahan/ pengaduan pengguna sistem aplikasi pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti per-Triwulan</i>	Jumlah Dokumen	4	4	100
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi penerapan E-Kontrak pada aplikasi SPSE per-Triwulan</i>	Jumlah Dokumen	4	4	100
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Status Paket Selesai pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring (E-Purchasing) per-Triwulan</i>	Jumlah Dokumen	4	4	100
1.1.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	1.613.690.937	1.475.604.165	91,44
	<i>Jumlah Dokumen Bukti Dukung Tingkat Kematangan UKPBJ</i>	Variabel Dokumen	8/9	8/9	100
	<i>Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ</i>	Jumlah Dokumen	1	1	100
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi metode Non E-Tendering/ Non E-Purchasing (E-PL, Swakelola, Penunjukan Langsung, Pencatatan</i>	Jumlah Dokumen	4	4	100



No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>NonTender pada SPSE</i>				
	<i>Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa</i>	Jumlah Orang	240	240	100
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan Strategis Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindak lanjuti</i>	Jumlah Kebijakan	4	9	225

PERMASALAHAN :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai tenaga Teknologi Informasi (TI) untuk pengelolaan SPSE di Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Kebutuhan 1 (satu) Orang.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dan kaulifikasi SDM PBJ sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Tersedia JF-PPBJ 3 (tiga) Orang dan CPNS 4 (empat) Orang, Kebutuhan JF-PPBJ 19 (sembilan belas) Orang

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Madiun untuk Petugas pengelolaan TI, serta dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun untuk pemenuhan tenaga TI tersebut.
2. Mendorong Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menggunakan secara penuh LPSE Suport.
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dan kaulifikasi SDM PBJ sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.



2. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	TUJUAN OPD : Mewujudkan pemerintah yang akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat/DPRD (IKM / DPRD)	%		Belum dilakukan survei	
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya kualitas layanan kinerja terhadap DPRD	Persentase layanan sekretariat DPRD yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD	Rp	58.080.692.315	54.742.775.703	94,25

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebesar 94,25%. Target capaian pada tahun 2022 sebesar Rp.58.080.692.315 dan terealisasi sebesar Rp.54.742.775.703. berdasarkan nilai capaian tersebut menggambarkan bahwa persentase layanan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi DPRD terbilang Baik. Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat / DPRD (IKM/DPRD) Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun belum melakukan survei.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Rp.	10.036.241.516	9.016.419.993	89,83
		%	100	100	100
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	113.864.945	99.848.700	87,69
	<i>Persentase Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	%	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	5.074.118	588.500	11,59
	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	%	100	100	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp.	10.000.000	8.965.500	89,65

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				
	<i>Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD</i>	%	100	100	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	98.790.827	90.294.700	91,39
	<i>Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	%	100	100	100
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.662.244.716	3.400.154.539	92,84
	<i>Persentase kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	190.630.000	177.210.000	92,96
	<i>Tersedianya gaji dan tunjangan asn</i>	%	100	100	100
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi dan keuangan SKPD	Rp.	143.550.000	129.100.000	89,93
	<i>Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi dan keuangan SKPD</i>	%	100	100	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	433.525.720	342.323.660	78,96
	<i>Persentase meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	%	100	100	100
1.3.1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp.	31.468.000	8.752.920	27,81
	<i>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>	%	100	100	100
1.3.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp	10.542.720	9.028.200	85,63
	<i>Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan-undangan</i>	%	100	100	100
1.3.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp	391.515.000	324.542.540	82,89
	<i>Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	%	100	100	100
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.083.814.284	1.022.092.360	94,31
	<i>Persentase kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp	31.987.494	31.943.400	99,86

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kantor				
	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	%	100	100	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	30.378.775	30.375.500	99,98
	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	%	100	100	100
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	76.116.700	74.290.180	97,60
	<i>Tersedianya peralatan rumah tangga</i>	%	100	100	100
1.4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	252.305.969	236.948.230	92,91
	<i>Tersedianya bahan logistik kantor</i>	%	100	100	100
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	116.896.100	103.542.750	88,57
	<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	%	100	100	100
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	74.140.000	72.360.000	97,59
	<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	%	100	100	100
1.4.7	Fasilitasi kunjungan tamu	Rp	153.993.350	151.484.300	98,37
	<i>Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu</i>	%	100	100	100
1.4.8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	347.995.896	321.148.000	92,28
	<i>Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	%	100	100	100
1.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp	1.257.647.427	1.129.375.599	89,80
	<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</i>	%	100	100	100
1.5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	15.398.750	7.800.000	50,65
	<i>Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat</i>	%	100	100	100
1.5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	241.685.000	196.321.988	81,23
	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	%	100	100	100
1.5.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	1.000.563.677	925.253.611	92,47
	<i>Tersedianya jasa pelayanan umum kantor</i>	%	100	100	100
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp	559.223.029	538.250.200	96,25

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah				
	<i>Persentase meningkatnya ketersediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah</i>	%	100	100	100
1.6.1	Pengadaan mebel	Rp	273.566.225	258.862.900	94,62
	<i>Tersedianya mebel</i>	%	100	100	100
1.6.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	285.656.804	279.387.300	97,80
	<i>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>	%	100	100	100
1.7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp	2.925.921.395	2.484.374.935	84,90
	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp	652.503.130	532.276.868	81,57
	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	%	100	100	100
1.7.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp	908.729.702	797.386.276	87,75
	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	%	100	100	100
1.7.3	Pemeliharaan mebel	Rp	40.000.000	34.071.820	85,17
	<i>Terlaksananya pemeliharaan mebel</i>	%	100	100	100
1.7.4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	120.000.000	114.208.500	95,17
	<i>Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	%	100	100	100
1.7.5	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp	608.122.369	414.281.695	68,12
	<i>Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	%	100	100	100
1.7.6	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	596.566.194	592.149.776	99,25
	<i>Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung</i>	%	100	100	100



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>kantor atau bangunan lainnya</i>				
1.8	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Rp	25.656.861.595	25.489.340.250	99,35
	<i>Jumlah layanan keuangan DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
1.8.1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Rp	25.154.752.000	25.032.132.960	99,51
	<i>Terselenggaranya anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD</i>	%	100	100	100
1.8.2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Rp	438.359.595	423.607.290	96,63
	<i>Tersedianya paket pakaian dinas dan atribut DPRD</i>	%	100	100	100
1.8.3	Pelaksanaan medical check up DPRD	Rp	63.750.000	33.600.000	52,70
	<i>Terlaksananya orang yang mengikuti medical check up DPRD</i>	%	100	100	100
1.9	Layanan Administrasi DPRD	Rp	52.562.409	36.253.500	68,97
	<i>Persentase jumlah layanan administrasi DPRD yang dilaksanakan sesuai kebutuhan</i>	%	100	100	100
1.9.1	Fasilitasi fraksi DPRD	Rp	16.310.409	2.751.000	16,86
	<i>Terlaksananya fasilitasi fraksi DPRD</i>	%	100	100	100
1.9.2	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Rp	36.252.000	33.502.500	92,41
	<i>Hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD</i>	%	100	100	100
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp	48.044.450.799	45.726.355.710	95,18
		%	100	100	100
2.1	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Rp	6.523.914.388	5.292.957.360	81,13
	<i>Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu</i>	%	100	100	100
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Rp	27.973.000	16.079.000	57,48
	<i>Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah</i>	%	100	100	100
2.1.2	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Rp	1.259.073.300	1.201.515.000	95,43



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah</i>	%	100	100	100
2.1.3	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Rp	5.162.136.612	4.013.293.910	77,74
	<i>Terlaksananya penyelenggaraan kajian perundang-undangan</i>	%	100	100	100
2.1.4	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Rp	49.500.000	48.534.750	98,05
	<i>Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik</i>	%	100	100	100
2.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp	25.231.476	13.534.700	53,64
	<i>Tersusunnya tata tertib DPRD</i>	%	100	100	100
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp	2.538.142.950	2.321.126.900	91,45
	<i>Persentase Jumlah Kebijakan anggaran yang ditetapkan tepat waktu</i>	%	100	100	100
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp	296.209.150	294.253.500	99,33
	<i>Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS</i>	%	100	100	100
2.2.2	Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp	293.428.150	288.572.000	98,34
	<i>Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	%	100	100	100
2.2.3	Pembahasan APBD	Rp	900.004.100	731.358.400	81,26
	<i>Terlaksananya pembahasan APBD</i>	%	100	100	100
2.2.4	Pembahasan APBD perubahan	Rp	552.237.100	520.077.000	94,17
	<i>Terlaksananya pembahasan APBD perubahan</i>	%	100	100	100
2.2.5	Pembahasan laporan semester	Rp	2.801.000	0	0
	<i>Terlaksananya pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester</i>	%	100	0	0
2.2.6	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Rp	499.463.450	486.866.000	98,66
	<i>Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD</i>	%	100	98,66	98,66
2.3	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Rp.	505.564.163	451.500.800	89,31
	<i>Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
2.3.1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Rp.	15.172.129	2.910.000	19,18



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum</i>	%	100	100	100
2.3.2	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Rp.	11.385.000	9.085.000	79,80
	<i>Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur</i>	%	100	100	100
2.3.3	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Rp.	9.085.000	3.880.000	42,70
	<i>Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat</i>	%	100	100	100
2.3.4	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Rp.	14.052.500	9.662.500	68,76
	<i>Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian</i>	%	100	100	100
2.3.5	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Rp.	7.590.000	-	0
	<i>Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam</i>	%	100	0	0
2.3.6	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	Rp.	83.428.234	65.711.600	78,76
	<i>Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan</i>	%	100	100	100
2.3.7	Pembahasan laporan keuangan pertanggungjawaban kepala daerah	Rp.	362.551.300	360.251.700	99,36
	<i>Terlaksananya laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah</i>	%	100	100	100
2.4	Peningkatan kapasitas DPRD	Rp.	3.193.742.525	2.806.050.156	87,86
	<i>Persentase penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD yang dilaksanakan</i>	%	100	100	100
2.4.1	Orientasi DPRD	Rp.	-	-	-
	<i>Terselenggaranya orientasi DPRD</i>	%	0	0	0
2.4.2	Pendalaman tugas DPRD	Rp.	1.294.954.900	965.339.806	74,55
	<i>Terlaksananya pendalaman tugas DPRD</i>	%	100	100	100
2.4.3	Publikasi dan dokumentasi Dewan	Rp.	1.443.394.750	1.438.115.350	99,63
	<i>Terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan</i>	%	100	100	100
2.4.4	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Rp.	27.000.000	-	0

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli</i>	%	100	100	100
2.4.5	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Rp.	180.000.000	180.000.000	100
	<i>Tersedianya tenaga ahli fraksi</i>	%	100	100	100
2.4.6	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Rp.	14.680.470	-	-
	<i>Terselenggaranya hubungan masyarakat</i>	%	100	100	100
2.4.7	Penyusunan program kerja DPRD	Rp.	233.712.405	222.595.000	95,24
	<i>Tersusunnya rencana kerja DPRD</i>	%	100	100	100
2.5	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Rp.	256.412.204	138.795.420	54,13
	<i>Persentasase jumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun</i>	%	100	54,13	54,13
2.5.1	Kunjungan kerja dalam daerah	Rp.	32.350.000	4.080.000	12,61
	<i>Terselenggaranya kunjungan kerja DPRD</i>	%	100	100	100
2.5.2	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Rp.	9.726.200	4.320.000	44,42
	<i>Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun</i>	%	100	100	100
2.5.3	Pelaksanaan reses	Rp.	214.336.004	130.395.420	60,84
	<i>Terlaksananya reses</i>	%	100	100	100
2.6	Pelaksanaan dna pengawasan kode etik DPRD	Rp.	94.572.000	77.693.000	82,15
	<i>Persentase kode etik DPRD yang disahkan</i>	%	100	100	100
2.6.1	Penyusunan kode etik DPRD	Rp.	94.572.000	77.693.000	82,15
	<i>Tersusunnya kode etik tata beracara DPRD</i>	%	100	100	100
2.6.2	Pengawasan kode etik DPRD	Rp.	94.572.000	77.693.000	82,15
	<i>Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD</i>	%			
2.7	Fasilitasi tugas DPRD	Rp.	9.222.678.565	9.112.638.324	98,81
	<i>Persentase jumlah tugas DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan</i>	%	100	98,81	98,81
2.7.1	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Rp.	8.087.464.765	8.037.708.540	99,35
	<i>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD</i>	%	100	100	100
2.7.2	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Rp.	274.463.319	263.600.500	96,04
	<i>Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD</i>	%	100	100	100
2.7.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Rp.	35.203.105	21.300.000	60,51

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah</i>	%	100	100	100
2.7.4	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Rp.	825.547.376	792.549.284	96
	<i>Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan DPRD</i>	%	100	100	100
	<i>Total</i>		58.080.692.315	54.742.775.703	94,25

PERMASALAHAN :

Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun mengampu 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, serta Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Secara garis besar pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat sedikit permasalahan, yaitu :

1. Regulasi berubah saat pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan rencana kegiatan kurang optimal.
3. Kegiatan yang dilaksanakan belum efektif/efisien karena penerapan SPIP belum optimal.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Dari beberapa permasalahan yang di alami Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun Tahun 2022, maka upaya penyelesaian permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Selalu melakukan evaluasi secara konsisten baik kegiatan dan anggarannya.
2. Menyusun rencana kegiatan dan penganggaran lebih dioptimalkan lagi.
3. Penerapan SPIP yang optimal.



3.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Yang Akuntabel	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	
		Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Menjadi Kebijakan Daerah	%	100	100	100
			Indeks Inovasi Daerah	Skor	1310		
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan PD yang Disusun Dengan Kualitas Baik Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun dengan kualitas baik sesuai ketentuan	%	100	100	100
	Persentase dokumen laporan yang disusun dengan kualitas baik sesuai ketentuan		%	100	100	100	
	Meningkatnya Fungsi Litbang Sebagai Dasar Merumuskan Kebijakan Daerah	Indeks Inovasi Daerah Kab. Madiun	%	100	100	100	
		Persentase Hasil Kelitbangan Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	6.719.163.396	6.058.432.599	90
	<i>Nilai SAKIP OPD</i>	Nilai	A	A	100
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan OPD</i>	%			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	285.645.145	192.461.330	67
	<i>Jumlah Dokumen Pemerintahan yang disusun sesuai peraturan</i>	Dokumen	8	8	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp.	285.645.145	192.461.330	67

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	<i>jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Dokumen	8	8	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.833.280.335	4.326.516.364	90
	<i>Presentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4.564.930.335	4.059.216.364	89
	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	Orang	39	39	100
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	268.350.000	267.300.000	100
	<i>Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	721.071.506	697.171.274	97
	<i>Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	9.544.113	9.459.000	99
	<i>penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	215.762.586	214.547.500	99
	<i>penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	1.386.390	1.297.500	94
	<i>penyediaan peralatan rumah tangga</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	132.374.982	123.033.580	93
	<i>penyediaan bahan logistik kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	16.814.435	15.485.500	92
	<i>penyediaan barang cetak dan penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	5.524.000	5.414.000	98
	<i>penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat	Rp.	339.665.000	327.934.194	97



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	<i>layanan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	451.143.265	425.809.152	94
	<i>Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi</i>	Persen	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	140.142.496	120.488.449	86
	<i>fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	311.000.769	305.320.703	98
	<i>jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	428.023.145	416.474.479	97
	<i>persentase barang milik daerah yang layak fungsi</i>	Persen	100	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	333.302.745	327.274.979	98
	<i>fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	47.990.000	47.544.500	99
	<i>jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	Bulan	12	12	100
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	46.730.400	41.655.000	89
	<i>jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</i>	Jumlah	5	5	100
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	2.437.638.577	2.012.474.287	83
	<i>Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan</i>	%	100	100	100
2.1	Penyusunan Perencanaan dan	Rp.	1.212.454.066	1.055.516.075	87



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pendanaan				
	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan</i>	Dokumen	6	2	
2.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp.	739.539.840	656.145.500	89
	<i>Jumlah dokumen rancangan Awal RPJMD/RKPD(Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)</i>	Dokumen	2	2	100
2.1.2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp	35.218.905	34.048.000	97
	<i>Jumlah pelaksanaan musrenbang kabupaten</i>	Kegiatan	1	1	100
2.1.3	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp	6.323.550	6.220.000	98
	<i>Jumlah bahan musrenbang kecamatan</i>	Bahan	15	15	100
2.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	431.371.771	359.102.575	83
	<i>Jumlah Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	Laporan	6	2	
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	256.036.603	190.894.312	75
	<i>Jumlah Data Informasi Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan</i>	Data	3	3	100
2.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp.	181.190.375	118.630.932	65
	<i>Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah yang Dikelola</i>	Jenis	2	2	100
2.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	74.846.228	72.263.380	97
	<i>Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang dihasilkan</i>	Buku	1	1	100

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	969.147.908	766.063.900	79
	<i>Jumlah Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan</i>	Laporan	3	3	100
2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp.	340.793.658	221.616.400	65
	<i>Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Kali	12	12	100
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.	628.354.250	544.447.500	87
	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Laporan	3	3	100
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	3.900.437.563	3.337.800.106	86
	<i>Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%</i>	%	90	90	100
	<i>Persentase PD Bidang Ekonomidan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%</i>	%	90	90	100
	<i>Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%</i>	%	90	90	100
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.	236.787.831	201.201.100	85
	<i>Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan</i>	Urusan	15	15	100
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	12.298.520	13.267.500	108



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</i>	Urusan	7	7	100
3.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.	9.990.381	9.368.000	94
	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	Urusan	7	7	100
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.	25.192.700	25.050.000	99
	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang pemerintahan</i>	Urusan	7	7	100
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.	2.046.000	613.000	30
	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</i>	Urusan	8	8	100
3.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	5.588.000	5.588.000	100
	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Urusan	8	8	100
3.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.	10.096.100	9.989.000	99
	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Urusan	8	8	100
3.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rp.	43.783.999	20.618.600	47

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang pembangunan Manusia</i>	Urusan	8	8	100
3.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.	127.792.131	116.707.000	91
	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	Urusan	8	8	100
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	404.681.743	335.810.650	83
	<i>Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenominan dan SDA yang sesuai ketentuan</i>	Urusan	14	14	100
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	47.007.120	11.766.900	25
	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>	Urusan	14	14	100
3.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp.	6.198.000	4.868.000	79
	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	Urusan	14	14	100
3.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp.	17.986.080	15.365.750	85
	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang Perekonomian</i>	Urusan	14	14	100
3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan	Rp.	120.262.400	107.792.000	90

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				
	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>	Urusan	14	14	100
3.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Rp.	104.949.168	96.256.000	92
	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</i>	Urusan	14	14	100
3.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp.	5.168.450	3.931.000	76
	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	Urusan	14	14	100
3.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp.	6.796.000	6.321.000	93
	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang SDA</i>	Urusan	14	14	100
3.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp.	96.314.525	89.510.000	93
	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</i>	Urusan	14	14	100
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.	3.258.967.989	2.800.788.356	86
	<i>Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai ketentuan</i>	Urusan	10	10	100
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Rp.	280.925.889	227.422.890	81



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Urusan	5	5	100
3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.	5.164.629	3.558.000	69
	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Urusan	5	5	100
3.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.	4.594.415	2.875.000	63
	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang Perekonomian</i>	Urusan	5	5	100
3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.	185.465.070	100.068.400	54
	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</i>	Urusan	5	5	100
3.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	1.833.635.000	1.588.877.113	87
	<i>Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Urusan	5	5	100
3.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.	55.000.000	45.735.700	83
	<i>Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Urusan	5	5	100
3.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Rp.	51.171.361	27.092.500	53



No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang SDA</i>	Urusan	5	5	100
3.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.	843.011.625	805.158.753	96
	<i>Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</i>	Urusan	5	5	100



2. Unsur Keuangan

a. Badan Pendapatan Daerah

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyar)	Milyar	235.445.000.000	377.425.486.961,72	147,05
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya	Persen	6,49	13,29	204,78

Upaya meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan menerapkan strategi meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Serta menerapkan beberapa kebijakan, yaitu :

1. mengoptimalkan sinergitas OPD dan pihak eksternal yang terkait pendapatan.
2. meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pendapatan.
3. meningkatkan keakuratan data potensi pendapatan daerah.
4. meningkatkan keakuratan data pendapatan.
5. meningkatkan kapasitas SDM pendapatan daerah.
6. meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi penagihan.
7. mengembangkan kanal-kanal pembayaran pajak daerah

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA.	Rp.	10.295.171.332	9.216.117.837	90
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Angka/ Abjad	85(A)	(80,6)A	94,82
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</i>	Persen	80	80	100
1.1	Administrasi Keuangan	Rp.	8.319.673.811	7.487.696.047	89,99



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Perangkat Daerah				
	<i>Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	8.319.673.811	7.487.696.047	90,00
	<i>Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	Orang	45	46	102,22
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	54.994.500	-	0
1.2.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	54.994.500	-	0
	<i>Tersedianya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai</i>	Paket	1	-	0
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	532.726.207	496.410.992	93,18
	<i>Jumlah pelayanan administrasi umum</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	3.000.000	1.945.480	64,85
	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	80.943.864	75.273.540	92,99
	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	162.215.557	149.641.898	92,25
	<i>Tersedianya bahan logistik kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	40.602.196	37.067.512	91,29
	<i>Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan</i>	Jenis	3	3	100
1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	6.500.000	6.024.000	92,68
	<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	Eksemplar	48	48	100
1.3.6	Penyediaan bahan/material	Rp.	10.580.590	1.806.000	17,07
	<i>Tersedianya bahan/material</i>	Bulan	12	12	100
1.3.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.	228.884.000	224.652.562	98,15
	<i>Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	323.473.636	262.516.352	81,16
	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>				
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Rp.	22.000.000	20.516.352	93,26
	<i>Terselenggaranya sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	Paket	1	1	100
1.4.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	301.473.636	242.000.000	80,27
	<i>Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	Unit	1	1	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	775.927.720	750.615.899	96,74
	<i>Jumlah layanan jasa penunjang</i>				
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	500.000	-	0
	<i>Tersedianya jasa surat menyurat</i>	Persen	100	100	160
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	184.578.112	174.222.633	94,39
	<i>Tersedianya jasa komunikasi, SDA, dan listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	590.849.608	576.393.266	97,55
	<i>Tersedianya jasa pelayanan umum kantor</i>	Orang	16	17	106,25
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	288.375.458	218.878.547	75,90
	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	215.753.896	161.808.397	75,00
	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	Unit	40	45	112,50
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan	Rp	55.885.000	43.790.000	78,36

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Mesin Lainnya				
	<i>Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya</i>	Persen	100	100	100
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	16.736.589	13.280.150	79,35
	<i>Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	Unit	1	1	100
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp.	2.292.084.202	2.048.193.547	89,36
	<i>Persentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun berkenaan</i>				
2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp.	259.768.374	229.324.547	88,28
	<i>Jumlah dokumen pendataan obyek PAD</i>	Bendel	1	1	100,00
	<i>Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak</i>	SPPT	410.500	417.323	101,66
2.2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp.	240.928.408	229.505.605	95,26
	<i>Jumlah peningkatan target pajak daerah</i>	Milyar	8	13	162,50
2.3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.	371.808.651	352.635.772	94,84
	<i>Jumlah desa yang dilakukan pemutakhiran</i>	Desa	2	1	50
2.4	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp.	296.443.372	289.228.020	97,57
	<i>Jumlah dokumen verifikasi piutang</i>	Bendel	1	1	100
	<i>Jumlah pengajuan keberatan/pengajuan yang di verifikasi</i>	Berkas	1.275	1.956	153,41
2.5	Penagihan Pajak Daerah	Rp.	391.401.461	322.147.300	82,31
	<i>Jumlah desa yang melunasi PBB P2</i>	Desa	85	74	87,06
	<i>Jumlah pelunasan SPPT PBB P2</i>	SPPT	342.770	344.000	100,36
	<i>Jumlah SPPT PBB P2 yang di distribusikan</i>	SPPT	410.500	418.510	101,95

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
2.6	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp.	333.500.123	327.165.703	98,10
	<i>Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilakukan</i>	Desa	2	2	100
	<i>Jumlah sarana pemungutan yang tercetak</i>	Karcis	24	24	100
2.7	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	324.453.813	253.275.080	78,06
	<i>Jumlah regulasi yang disusun</i>	Regulasi	1	1	100
2.8	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	73.780.000	44.911.520	60,87
	<i>Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</i>	Kegiatan	3	3	100
JUMLAH			12.587.255.534	11.264.311.384	89.49

PERMASALAHAN :

1. Aplikasi PBB P2 yang terkadang tidak terkoneksi dengan baik dengan Bank Persepsi,
2. Masih terbatasnya petugas penilai pajak sehingga terjadi kemungkinan loss pajak karena penetapan harga pasar sering salah,
3. Luasnya cakupan obyek pajak yang harus dilaksanakan penilaian se wilayah kab madiun yang terdiri dari 15 kecamatan,
4. Luasnya cakupan wilayah dan jumlah desa yang perlu dilakukan verifikasi dan pencocokan harga tanah, bangunan serta kebenaran berkasnya,
5. Masih tingginya angka piutang PBB P2,
6. Masih adanya ketidakcocokan data piutang antara catatan sistem bapenda dengan catatan pemungut desa,
7. Status Obyek dan wajib pajak yang tidak jelas,
8. Subyek pajak yang tidak dapat diidentifikasi,
9. Daluarsa penagihan,



10. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang daluarsa masa berlakunya karcis.
11. Belum adanya regulasi pemusnahan karcis terhadap karcis yang tarifnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
12. Adanya perubahan regulasi penerbitan karcis.
13. Terbitnya Undang-Undang No1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
14. Memerlukan penataan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
15. Penyesuaian struktur dan tarif pajak
16. Penyesuaian obyek retribusi daerah
17. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak resto dan PBB P2 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Pemeliharaan data secara berkala bekerjasama dengan pihak ketiga, menaikkan kapasitas internet internet untuk memperlancar akses sistem PBB P2,
2. Dilaksanakan diklat penilai pajak, pemeriksa pajak serta juru sita pajak sebagai dasar para petugas verifikasi lapangan dalam melaksanakan tugasnya karena telah mempunyai ilmu dan ketrampilan dalam menilai pajak daerah,
3. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang penilaian dan pemutakhiran data wajib pajak.
4. Mengoptimalkan SDM yang ada di Bapenda sebagai tenaga penilai pajak daerah,
5. Dibentuknya satuan tugas monitoring dan satuan tugas verifikasi,
6. Adanya kesempatan wajib pajak untuk mengajukan pengurangan jika masih merasa keberatan dengan dengan hasil LHP petugas,
7. Pengajuan pengurangan berdasarkan SK Bupati,
8. Dilaksanakan kegiatan door to door penagihan piutang pajak PBB P2 mulai tahun 2021 kebawah ke desa.



9. Dilaksanakan reviu dan pencocokan data realisasi PBB P2 dengan petugas pemungut desa.
10. Dibentuk dan ditugaskannya satgas penagihan yang terdiri dari beberapa tim yang menjangkau seluruh desa se Kab Madiun.
11. Koordinasi dengan bagian aset BPKAD terkait tata cara penghapusan karcis yang daluarsa
12. Dilaksanakan rekonsiliasi data secara rutin setiap hari dengan Bank Jatim sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian pajak daerah
13. Bekerjasama dengan pihak akademisi dalam hal ini PPOTODA Univ Brawijaya Malang dalam kegiatan penyusunan naskah akademik dan raperda pajak daerah dan retribusi daerah.
14. Memasang banner himbauan pajak restoran di resto se wil kab madiun
15. Memasang banner PBB P2 di desa-desa se wil kab madiun
16. Mengandeng APH dalam hal ini Kejaksaan dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak restoran.



b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Kebijakan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Ketentuan dan Akuntabel	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R.APBD	100	100	100
		Persentase OPD yang tertib penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang ditentukan	85	85	100
		Persentase OPD yang tertib dalam kelengkapan dokumen pencairan anggaran	100	100	100
		Prosentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP	100	100	100
		Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	100	100	100

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tujuan "Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah" dengan Sasaran "Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Ketentuan dan Akuntabel" yang mana secara keseluruhan telah tercapai / terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan diraihnya kembali Opini atas Audit BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	30.021.330.272	29.028.111.919	96.69
	<i>nilai saki perangkat daerah</i>	Nilai	86		
	<i>kepuasan asn terhadap pelayanan sekretariat PD</i>	Nilai	90	90	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	711.432.212	388.688.795	54,63
	<i>Prosentase Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu</i>	%	100	100	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp.	178.475.130	125.233.945	70,17
	<i>Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</i>	Dokumen	12	12	100
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	532.957.082	263.454.850	49,43
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dokumen	12	12	100
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	26.673.513.112	26.209.639.313	98,26
	<i>Prosentase ketersediaan gaji, tunjangan ASN dan kebutuhan operasional ASN yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	26.114.148.112	25.710.580.881	98,45
	<i>Jumlah Laporan</i>	Bulan	12	12	100
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	559.365.000	499.058.432	89,22
	<i>terlaksananya rakor dan konsultasi</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	55.000.000	20.000.000	36,36
	<i>Prosentase aparatur penetausahaan Keuangan yang mengikuti pembinaan pengelolaan Keuangan Daerah</i>	%	100	100	100
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	55.000.000	20.000.000	36,36
	<i>Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan</i>	Orang	15	15	100
1.4	Kegiatan Administrasi Umum	Rp.	1.031.331.958	930.801.225	90,25



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Perangkat Daerah				
	<i>Prosentase ketersediaan sarana penunjang kinerja terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	5.998.993	2.930.000	48,84
	<i>jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	484.155.060	464.551.500	95,95
	<i>Jumlah Peralatan Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	450.122.539	385.990.150	85,75
	<i>Jumlah ATK yang diadakan, Jumlah snack, rapat tamu yang terpenuhi</i>	Bulan	12	12	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	91.055.366	77.329.575	94,93
	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan/ Fotocopy yang diadakan</i>	Bulan	12	12	100
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	680.564.255	652.460.567	95,87
	<i>Prosentasi kebutuhan operasional kantor yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	2.000.000	607.000	30,35
	<i>Jumlah dokumen surat menyurat</i>	Bulan	12	12	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	152.082.710	134.079.518	88,16
	<i>jumlah dokumen pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	526.481.545	517.774.049	98,35
	<i>jumlah tenaga kebersihan, Resepsionis dan Keamanan Kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	869.488.735	826.522.019	95,06
	<i>Prosentase ketersediaan sarana penunjang kinerja dalam kondisi baik</i>	%	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	512.701.585	485.333.119	94,66
	<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin dan Pajak kendaraan kendaraan dinas/jabatan</i>	Bulan	12	12	100
	<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin dan Pajak kendaraan kendaraan dinas/jabatan</i>	Unit	37	37	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	149.000.500	147.388.900	98,92
	<i>terlaksananya pemeliharaan rutin alat kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	207.786.650	193.800.000	93,27
	<i>Terpeliharanya gedung kantor</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	448.746.550.534	439.838.753.534	98,01
	<i>Persentase OPD yang tertib penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP</i>	%	100	100	100
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp.	1.290.449.293	1.217.683.080	94,36
	<i>Prosentase penyusunan APBD dan P APBD tepat waktu</i>	%	100	100	100
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp.	47.173.050	44.695.900	94,75
	<i>Jumlah Rancangan Perda tentang APBD</i>	Buku	240	240	100
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp.	35.940.025	35.940.025	94,81



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Jumlah Rancangan Perubahan Perda tentang APBD</i>	Buku	240	240	100
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp.	17.223.600	16.442.400	95,46
	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD APBD Kabupaten Madiun</i>	Dokumen	54	54	100
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp.	10.453.200	10.453.200	100
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD APBD Kabupaten Madiun</i>	Dokumen	54	54	100
2.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp.	7.538.650	7.500.000	99,49
	<i>Jumlah Dokumen DPA SKPD APBD Kabupaten Madiun</i>	Dokumen	54	54	100
2.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp.	13.852.800	13.635.000	98,43
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD APBD Kabupaten Madiun</i>	Dokumen	54	54	100
2.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp.	740.402.114	729.064.585	98,47
	<i>jumlah buku Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD</i>	Buku	240	240	100
2.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp.	197.163.424	160.967.467	81,64
	<i>jumlah buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD</i>	Buku	240	240	100
2.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp.	153.640.750	136.614.000	88,92
	<i>Jumlah Regulasi dan kebijakan Bidang Anggaran</i>	Dokumen	6	6	100
2.1.10	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	67.061.680	64.235.000	95,78



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan daerah</i>	Bulan	12	12	100
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.	1.038.219.075	891.010.232	85,82
	<i>Prosentase pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang tepat waktu</i>	%	100	100	100
2.2.1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp.	89.588.387	87.922.100	98,14
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	Dokumen	12	12	100
2.2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp.	354.620.900	275.170.000	77,60
	<i>Jumlah koordinasi dan asistensi</i>	Kali	1	1	100
2.2.3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp.	279.366.623	246.905.188	88,38
	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>	Dokumen	12	12	100
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp.	159.500.338	143.765.476	90,13
	<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil</i>	Laporan	4	4	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>				
2.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp.	155.142.827	137.247.468	88,47
	<i>Jumlah laporan realisasi</i>	Laporan	12	12	100
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.	303.349.334	289.477.675	95,43
	<i>Prosentase laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang terlaksana</i>	%	100	100	100
2.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp.	14.711.488	14.279.040	97,06
	<i>jumlah laporan realisasi APBD dan prognosis</i>	Laporan	2	2	100
2.3.2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp.	240.434.675	237.484.635	98,77
	<i>jumlah laporan prognosis dan realisasi APBD sesuai SAP</i>	Buku	240	240	100
2.3.3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp.	48.203.171	37.714.000	78,24
	<i>Jumlah regulasi</i>	Regulasi	1	1	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	446.114.532.832	437.440.582.547	98,06
	<i>Prosentase capaian hasil belanja penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah tepat waktu</i>	%	100	100	100
2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp.	420.582.943.832	420.122.367.200	99,89
	<i>Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Khusus</i>	Bulan	12	12	100
	<i>Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Khusus</i>	Dokumen	1	1	100
2.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp.	14.000.000.000	6.272.672.347	44,80
	<i>Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Terduga</i>	Bulan	12	12	100
	<i>Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Tidak Terduga</i>	Dokumen	1	1	100
2.4.3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp.	11.531.589.000	11.045.543.000	95,79
	<i>Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi</i>	Dokumen	1	1	100
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp	7.904.007.683	4.110.473.421	52,00
	<i>Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah</i>	%	100	100	100
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	7.904.007.683	4.110.473.421	52,00
	<i>Prosentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal</i>	%	100	100	100
3.1.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.	599.597.300	556.265.567	92,77
	<i>jumlah laporan penggunaan dan pemanfaatan BMD</i>	Dokumen	51	51	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
3.1.2	Iventarisasi Barang Milik Daerah	Rp.	291.315.973	251.789.500	86,43
	<i>jumlah dokumen inventarisasi dan penghapusan aset</i>	Dokumen	121	121	100
3.1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp.	6.950.339.785	3.247.214.958	46,72
	<i>Pensertifikatan Tanah Milik Pemkab Madiun</i>	Bidang	250	1.407	562,8
3.1.4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp.	62.754.625	55.203.396	87,97
	<i>jumlah dokumen rekonsiliasi neraca aktiva tetap</i>	Dokumen	1	1	100

PERMASALAHAN :

1. Masih adanya Aset berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang belum bersertifikat.
2. Masih adanya Aset Pemerintah Kabupaten Madiun (Khususnya Aset dikota) yang berupa Aset Tanah dan Bangunan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Melakukan Inventarisasi Aset Tanah yang belum bersertifikat.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (BPN, PUBMCK, Dindik) dan selanjutnya melakukan proses pensertifikatan.
3. Berkat Kerjasama semua pihak yang terlibat, Di tahun 2022 dari target awal persertifikatan sebanyak 250 Bidang pada akhir tahun 2022 dapat terlaksana sebanyak 1.407 bidang.
4. Untuk memaksimalkan pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Madiun melalui BPKAD melakukan Kerjasama dengan Pihak 3 dengan sistem sewa sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).



3. Unsur Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Mengembangkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesional ASN	Nilai	80,5	64,79	80,5
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	Nilai Dimensi Kualifikasi	Nilai	21,01	12,8	60,92
		Nilai Dimensi Kinerja	Nilai	20,5	23,43	114,29
		Nilai Dimensi Disiplin	Nilai	4,5	4,99	110,88
		Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	34,49	23,57	68,33

Sesuai RPJMD Tahun 2018-2023, BKD melaksanakan urusan pendukung dibidang kepegawaian dengan indikator sasaran Indeks Profesional ASN Pada tahun anggaran 2022, guna melaksanakan urusan dimaksud BKD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.8.468.585.109 yang terdiri dari: Anggaran Gaji Rp.3.416.093.489 Realisasi Rp.3.032.634.078 dengan capaian realisasi anggaran 88,77% dan Non Gaji sebesar Rp.5.052.491.620 dengan Realisasi Rp.4.093.913.490 tercapai realisasi anggaran 81,03%. Anggaran Non Gaji dialokasikan untuk melaksanakan program kegiatan.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Rp.	5.108.009.916	4.827.853.796	94,51
1.1	Gaji Pegawai	Rp.	3.416.093.489	3.032.634.078	89
	<i>Terpenuhinya gaji Pegawai</i>	Bulan	14	14	100
1.2	Administrasi umum	Rp.	1.029.053.987	1.158.459.569	96
	<i>Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat BKD</i>	%	92	96	104
	<i>Nilai SAKIP A</i>	Nilai	80	81,43	102
1.2.1	Administrasi umum perangkat daerah	Rp.	546.191.547	521.699.420	96
	<i>Terpenuhinya layanan Administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Penyedia jasa Penunjang Urusan PD	Rp.	412.094.713	402.910.429	98
	<i>Jumlah Tenaga Penunjang</i>	Bulan	2	2	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.3.1	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	412.094.713	402.910.429	98
	<i>Jumlah Aset Yang terpelihara</i>	bulan	12	12	100
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Rp.	119.447.460	106.712.020	89,33
	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	bulan	12	12	100
1.5	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.	131.320.267	127.137.700	97
	<i>Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah (RKA-RKA-P, DPA, DPA-P, Renstra, Renja, Renja Perubahan)</i>	Dokumen	12	12	100
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp.	3.822.245.633	2.548.959.151	66,68
	<i>Persentase penetapan kebutuhan ASN</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase Mutasi jabatan sesuai kualifikasi</i>	%	95	100	105
	<i>Persentase kedisiplinan ASN</i>	%	97	100	103
	<i>Persentase Penilaian Kinerja ASN</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi</i>	%	95	100	105
2.1	Mutasi dan Promosi ASN	Rp.	789.564.529	357.915.550	45
	<i>Prosentase Mutasi Jabatan sesuai anjab ABK</i>	%	96	100	105,3
2.1.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp.	4.426.761	4.414.800	99,7
	<i>Jumlah ASN yang mutasi</i>	ASN	2	24	1.200
2.1.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp.	66.487.754	65.960.800	99,2
	<i>Prosentase Kenaikan pangkat tepat waktu</i>	%	100	1.00	100
2.1.3	Pengelolaan Promosi ASN	Rp.	718.650.014	287.539.950	40
	<i>Jumlah ASN yang dipromosikan sesuai klasifikasi jabatan</i>	ASN	450	500	111,1
2.2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp.	1.067.248.864	232.041.623	21,7
2.2.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		86.860.000	86.570.900	99,7
	<i>Jumlah Update data yang akurat</i>	orang	7.000	7.000	100
2.2.2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp.	855.888.864	386.440.055	45,2
	<i>Jumlah Pengadaan ASN</i>	Pegawai	497	497	100
	<i>Jumlah Formasi Pegawai yang sesuai kebutuhan</i>	Pegawai	907	934	103
	<i>Jumlah Penyusunan Bezeting Pegawai</i>	OPD	61	61	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.2.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp.	74.500.284	73.143.239	98,2
	<i>Jumlah PNS yang menerima SK pensiun</i>	orang	500	493	99
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp.	1.883.842.200	1.877.734.278	99,7
	<i>Prosentase ASN yang Mengikuti pengembangan Kompetensi</i>	%	100	100	100
2.3.1	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp.	1.285.992.450	1.280.650.450	99,6
	<i>Jumlah Diklat Latsar CPNS</i>	Orang	83	83	100
	<i>Jumlah Diklat Kades</i>	Orang	143	143	100
	<i>Jumlah Diklat Pemeriksa dan Juru Sita</i>	Orang	22	22	100
	<i>Jumlah Pengiriman Diklat sertifikasi camat</i>	Orang	5	5	100
	<i>Jumlah Pengiriman Diklat Mediator</i>	Orang	3	3	100
	<i>Jumlah Pengiriman Diklat PPBJ dan uji sertifikasi</i>	Orang	28	28	100
	<i>Jumlah Pengiriman Diklat PKN</i>	Orang	6	6	100
2.3.2	Pengelolaan Assessment Center	Rp.	201.800.000	196.404.940	97,3
	<i>Jumlah ASN yang mengikuti Assessment Center</i>	orang	100	100	100
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Rp.	81.590.040	81.267.700	99,6
	<i>Prosentase Penilaian Kinerja ASN</i>	%	100	100	100
2.4.1	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp.	30.196.640	30.046.050	99,5
	<i>Jumlah ASN Yang melanggar Disiplin</i>	orang	0	6	0,09
2.4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Rp.	51.393.400	51.221.650	99,7
	<i>Jumlah Penghitungan IP ASN</i>	ASN	7.000	7.000	100

PERMASALAHAN :

Untuk realisasi ada beberapa kegiatan antara lain Mutasi dan Promosi ASN kurang penyerapan anggaran dikarenakan untuk kegiatan tersebut mutasi dan rotasi pejabat dilakukan pada tahun 2023 sehingga mempengaruhi penyerapan kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk indeks profesional ASN mengalami penurunan dari target 81 terealisasi 64,79 dikarenakan untuk penghitungan yang dulu menggunakan manual sekarang dilakukan penghitungan melalui aplikasi



SAPK sehingga ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yang diinginkan terutama di nilai kompetensi dan kualifikasi ASN. Namun dari nilai 64,79 merupakan urutan ke lima se Jawa Timur.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

Untuk meningkatkan Nilai Indeks Profesional setiap OPD diberi surat agar segera memenuhi upload dokumen Diklat Workshop, Bintek, Sosialisasi dengan bukti Dokumen Melalui MY SAPK dan untuk mengoptimalkan Diklat/kompetensi sesuai program kegiatan tahunan.

Upaya ke dua bahwa untuk meningkatkan indikator PIP yang kurang memenuhi target bahwa OPD diberikan surat edaran jika melakukan bintek sosialisasi diwajibkan untuk memberikan sertifikat secara elektronik dan untuk meningkatkan kualifikasi ASN BKD telah diterbitkan Perbub Tugas Belajar, Penyesuaian Ijazah dan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai pendidikan ASN yang dibutuhkan.



4. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Yang Akuntabel	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
	Meningkatkan Kualitas Hasil Kelitbangan Dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Menjadi Kebijakan Daerah	%	100	100	100
		Indek Inovasi Daerah	Skor	1310		
100	100	100	%	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun dengan kualitas baik sesuai ketentuan	%	100	100	100
		Persentase dokumen laporan yang disusun dengan kualitas baik sesuai ketentuan	%	100	100	100
	Meningkatnya Fungsi Litbang Sebagai Dasar Merumuskan Kebijakan Daerah	Indeks Inovasi Daerah Kab. Madiun	%	100	100	100
		Persentase Hasil Kelitbangan Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	1.354.556.995	1.291.823.526	95
	<i>Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan</i>	%	100	100	100
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp.	759.960.916	715.280.076	94
	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian</i>	Rekomendasi	2	5	250



	<i>Peraturan yang dimanfaatkan</i>				
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp	533.846.805	509.075.150	95
	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pemerintahan Umum yang dihasilkan</i>	Rekomendasi	1	4	400
4.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp	101.114.111	93.559.926	93
	<i>Jumlah data kelitbangan yang dipublikasikan</i>	Data	2	2	100
4.1.3	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rp	125.000.000	112.645.000	90
	<i>Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan</i>	Naskah Akademik	-	1	100
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp	109.556.701	109.083.850	100
	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan</i>	Dokumen	-	1	100
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Rp	109.556.701	109.083.850	100
	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Aspek-aspek Sosial yang Ditindaklanjuti</i>	Kajian	1	1	100
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp	299.053.369	296.859.300	99
	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	Rekomendasi	1	3	300
4.3.1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp	217.614.000	215.765.000	99
	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dihasilkan</i>	Rekomendasi	1	2	200
4.3.2	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Rp	81.439.369	81.094.300	100
	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pekerjaan umum yang dihasilkan</i>	Rekomendasi	1	1	100
4.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	185.986.009	170.600.300	92
	<i>Persentase Inovasi yang Ditindaklanjuti</i>	%	100	100	100



4.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp	185.986.009	170.600.300	92
	<i>Jumlah inovasi yang terjaring dalam inovasi daerah Kabupaten Madiun</i>	Inovasi	25	47	188
	<i>Jumlah Hasil-Hasil Kelitbangan yang Dipublikasikan melalui jurnal</i>	Kajian	10	10	100



3.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat

No	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	TUJUAN OPD : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP memuaskan (A)	%	60	28,9	49
		Persentase OPD yang dinilai Maturitas SPIP	%	28	28	100
		Jenis Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP
2	SASARAN OPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	100
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal(BPK) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP menuju level 4	OPD	12	11	92

Tujuan Inspektorat adalah Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, dimana ada 3 Indikator Kinerja yaitu :

- Persentase OPD yang memiliki Nilai SAKIP memuaskan dimana target untuk tahun 2022 sebesar 60 %, sementara itu realisasi target dari 45 OPD yang dievaluasi, hanya 13 OPD atau 28,9 % yang mendapatkan nilai memuaskan (A).
- Persentase OPD yang dinilai maturitas SPIP pada tahun 2022 dengan target 28 % capaian realisasinya sebesar 92 % atau telah dilakukan penilaian maturitas terhadap 11 OPD.
- Jenis Opini BPK dengan target WTP pada tahun 2022 telah tercapai 100%, dengan didapatkannya opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Sasaran Inspektorat Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu :

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai A dapat terealisasi dengan nilai 80,04 (A).



2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dengan target 100% pada Tahun 2022 dapat terealisasi 100 %.
3. Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP dengan target 12 OPD pada Tahun 2022 telah dapat terealisasi sebanyak 11 OPD yang dilakukan evaluasi SPIP.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	5.803.505.901	5.569.310.185	95,96
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	83	80,04	96
	<i>Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Sekretariat PD</i>	%	77	80	104
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	10.000.000	5.226.000	52,26
	<i>Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan</i>	%	100	100	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	10.000.000	5.226.000	52,26
	<i>Jumlah Dokumen Capaian Kinerja</i>	Dokumen	8	8	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.311.215.334	4.160.495.857	97
	<i>Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan</i>	%	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4.311.215.334	4.160.495.857	97
	<i>Jumlah Pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangan</i>	orang	45	45	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	174.535.000	151.916.493	87,04
	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	174.535.000	151.916.493	87,04
	<i>Jumlah ASN yang mengikuti Diklat</i>	orang	30	30	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	647.470.553	640.399.395	98,91
	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang terpenuhi</i>	%	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp.	9.081.100	8.477.130	93,35



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia</i>	buah	25	25	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	12.448.567	12.234.000	98,28
	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia</i>	buah	5	5	100
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	5.256.025	5.244.900	99,79
	<i>Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia</i>	buah	3	3	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		127.201.904	126.540.500	99,48
	<i>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tercukupi</i>	bulan	12	12	100
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	25.708.057	22.386.475	87,08
	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia</i>	Jenis	3	3	100
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	5.200.000	4.104.000	78,92
	<i>Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tercukupi</i>	bulan	12	12	100
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	72.308.900	71.459.500	98,83
	<i>Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	bulan	12	12	100
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	390.266.000	389.952.890	99,92
	<i>Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan</i>	Kali	80	80	100
	<i>Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan</i>	kali	510	510	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	23.514.684	23.509.800	99,98
	<i>Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi</i>	%	100	100	100
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	23.514.684	23.509.800	99,98
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia</i>	buah	2	2	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	374.388.210	354.624.000	94,72
	<i>Persentase jasa penunjang yang tercukupi</i>	%	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	3.829.500	250.000	6,53
	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi</i>	bulan	12	12	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	120.890.000	109.169.083	90,30



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Terpenuhi</i>	bulan	12	12	100
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	249.668.710	245.204.917	98,21
	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia</i>	Jenis	3	3	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	262.382.120	233.138.640	88,85
	<i>Persentase sarana prasarana yang layak fungsi</i>	%	100	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	175.882.120	159.704.640	90,80
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara</i>	unit	6	6	100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	86.500.000	73.434.000	84,89
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara</i>	unit	60	60	100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp.	814.344.271	736.296.678	90
	<i>Persentase OPD yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP memuaskan</i>	%	80	30	30
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti</i>	%	100	100	100
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp.	752.092.621	714.953.902	95,06
	<i>Persentase PKPT yang dilaksanakan</i>	%	95	70%	74
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp.	139.667.615	136.804.807	97,95
	<i>Jumlah OPD yang dinilai SAKIP</i>	OPD	45	45	100
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp.	387.896.000	362.108.000	93,35
	<i>Jumlah Dokumen LHP yang terbit</i>	dokumen	50	50	100
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Rp.	18.946.660	18.766.340	99,05
	<i>Jumlah Dokumen Rivi yang Terbit</i>	Dokumen	2	2	100
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Rp.	31.931.900	31.540.005	98,77
	<i>Jumlah Dokumen Rivi yang Terbit</i>	Dokumen	1	1	100
2.1.5	Pengawasan Desa	Rp.	45.556.000	44.280.000	97,20
	<i>Jumlah LHP Desa yang terbit</i>	Dokumen	15	15	100
2.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp.	73.472.246	67.601.000	92,01
	<i>Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP</i>	OPD	12	11	92
2.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	Rp.	54.622.200	53.853.750	98,59



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti</i>	%	96	100	104
	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal (APIP) yang ditindaklanjuti</i>	%	95	100	105
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp.	113.015.600	89.295.600	79,01
	<i>Persentase PKPT yang dilaksanakan</i>	%	100	100	100
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp.	20.200.000	12.134.630	60,07
	<i>Persentase kerugian negara/daerah yang telah selesai</i>	%	90	90	100
2.2.2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp.	200.000.000	200.000.000	100
	<i>Jumlah Kasus Pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti</i>	Kasus	15	15	100
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp.	619.351.049	551.667.661	89
	<i>Level Kapabilitas APIP</i>	Level	3	2	2
	<i>Persentase Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi kepada OPD yang sesuai peraturan berlaku</i>	%	100	100	100
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp.	182.929.832	159.388.300	87,13
	<i>Level Kapabilitas APIP</i>	Level	3	2,810	2,810
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan	Rp.	182.929.832	159.388.300	87,13
	<i>Jumlah Kebijakan Teknis yang terbit</i>	dokumen	1	1	100
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Rp.	436.421.217	406.695.361	93,19
	<i>Persentase OPD yang dilakukan Pendampingan dan asistensi</i>	%	100	100	100
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	19.999.958	17.973.400	89,87
	<i>Jumlah Dokumen Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbit</i>	Dokumen	3	3	100
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp.	20.000.000	16.075.000	80,38
	<i>Jumlah OPD yang dilakukan Asistensi RB</i>	OPD	12	12	100
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp.	295.099.815	277.830.960	94,15
	<i>Jumlah dokumen tentang pencegahan</i>	Dokumen	3	3	100



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>korupsi yang diterbitkan (UPP, UPG, RADPK)</i>				
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp.	101.321.444	94.816.001	93,58
	<i>Jumlah OPD yang sudah Membangun Zona Integritas</i>	OPD	7	7	100

PERMASALAHAN :

1. Rasio Anggaran Pengawasan dengan APBD yang masih belum sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan;
2. Keterbatasan SDM Fungsional Auditor dan P2UPD pada umumnya dan secara khusus dibidang keahlian tertentu yang masih kurang dari kebutuhan ideal Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Madiun;
3. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya ;
4. Dalam pencapaian hasil evaluasi SAKIP terhadap 45 OPD, 13 OPD mendapatkan hasil memuaskan (A), atau naik dari tahun 2021 sebanyak 11 OPD;
5. Tingkat pengendalian SPI pada perangkat daerah dan desa masih rendah;
6. Pencapaian Level Kapabilitas APIP yang belum memenuhi target.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Memaksimalkan penggunaan Anggaran dan memprioritaskan Kegiatan – Kegiatan Pengawasan serta Pembiayaan Rutin;



2. Mengoptimalkan Tugas dan Peran SDM Inspektorat dalam rangka meningkatkan kinerja serta mengikutsertakan dalam Pendidikan dan pelatihan Auditor dan P2UPD;
3. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang ada serta pemeliharaan alat dan Kendaraan Dinas;
4. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap OPD;
5. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan terkait penerapan SPI dan manajemen risiko pada OPD dengan membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
6. Membangun koordinasi dan konsultasi yang intens dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait pemenuhan dokumen untuk pencapaian kapabilitas APIP pada level 3.



3.1.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Dolopo

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79	85,06	108
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	Nilai	79	85,06	108
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	81	70,99	87,64

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kinerja Kantor Kecamatan Dolopo yang terdapat 2 Sasaran dan 3 Indikator. Dengan Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik, dan Indikator Tujuan yaitu : Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kecamatan dengan Target 79 dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat mencapai 85,06.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan dengan Target 81, Adapun hasil Nilai SAKIP Tahun 2022 : 70,99.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp.	3.841.575.615	3.582.468.601	93
	<i>Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah</i>	bulan	12 bulan	12 bulan	100
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.499.802.421	3.248.032.021	92
	<i>Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan</i>	bulan	12 bulan	12 bulan	100
1.1.1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Rp.	3.499.802.421	3.248.032.021	92
	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</i>	Bulan	12	12	100
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	135.865.089	135.148.760	99
	<i>Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	2.000.000	2.000.000	100
	<i>Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	2.000.000	2.000.000	100
	<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	Bulan	12	12	100
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	33.885.089	33.686.700	99
	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	Bulan	12	12	
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.000.000	9000.000	100
	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	1.980.000	1.755.000	88
	<i>Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Bulan	12	12	100
1.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	87.000.000	86.707.060	99
	<i>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	5.180.750	5.180.750	100
	<i>Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>	Unit	3	3	100
1.3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.180.750	5.180.750	100
	<i>Tersedianya kebutuhan Peralatan dan mesin Kantor</i>	Unit	3	3	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	84.771.440	84.022.333	99
	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	18.506.440	17.892.854	96
	<i>Tersedianya jasa komunikasi dan sumberdaya air</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	66.265.000	66.129.479	95
	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	115.955.915	110.084.737	94
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	76.212.165	70.381.487	92
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.180.750	5.180.750	100
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	Bulan	12	12	100
1.5.3	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan	Rp.	34.563.000	34.522.500	99
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	32.059.600	30.774.000	95
	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	Kegiatan	4	4	100
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Di Kecamatan	Rp.	32.059.600	30.774.000	95
	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>	Kegiatan	4	4	100
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	32.059.600	30.774.000	95
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>	Kegiatan	4	4	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	37.999.280	37.790.900	99
	<i>Prosentase layanan pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	37.999.280	37.790.900	99
	<i>Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	RP.	7.374.000	7.270.000	98
	<i>Jumlah rapat koordinasi yang terselenggara</i>	Kegiatan	4	4	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1.2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah swasta di wilayah kecamatan	Rp.	5.072.000	5.072.000	100
	<i>Jumlah fasilitasi lomba desa yang terlaksana</i>	Kegiatan	3	3	100
3.1.3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp.	25.553.280	25.448.900	99
	<i>Jumlah kegiatan bidang olahraga, kepemudaan, kesehatan, keagamaan, bansos dan lintas sector yang terfasilitasi</i>	Kegiatan	5	5	100
3.2	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Rp.	29.889.280	29.889.280	100
	<i>Prosentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang terselenggara</i>	Kegiatan	1	1	100
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	Rp.	11.000.000	11.000.000	100
	<i>Jumlah kader PKK yang aktif dan terampil</i>	Kader Pkk	12	12	100
3.2.2	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Rp.	8.889.280	8.889.280	100
	<i>Jumlah Lembaga kemasyarakatan tingkat desa yang aktif</i>	Lembaga kemasyarakatan	12	12	100
3.2.3	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	10.000.000	100
	<i>Jumlah BUMDes yang aktif</i>	BUMDes	10	10	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	24.677.900	23.326.000	94
	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Kegiatan	1	1	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	24.677.900	23.326.500	94
	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Kegiatan	1	1	100
4.1.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di wilayah Kecamatan	Rp.	24.677.900	23.326.500	94
	<i>Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	12	12	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	41.361.450	41.080.450	99



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Kegiatan	1	1	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	41.361.450	41.080.450	99
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana</i>	Kegiatan	1	1	100
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp.	21.769.450	21.769.450	100
	<i>Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang terselenggara dengan baik</i>	Kegiatan	2	2	100

PERMASALAHAN :

1. Kurangnya SDM di Kecamatan
2. Kurangnya Koordinasi dengan Pihak OPD yang terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan
3. Apabila ada kerusakan alat yang menyebabkan pelayanan kependudukan tidak bisa berjalan dengan optimal
4. Jaringan internet yang bermasalah menyebabkan terganggunya pelayanan

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Penambahan ASN di Kecamatan dengan kualifikasi yang dibutuhkan
2. Perlunya SOP dalam pelaksanaan kegiatan dari Tingkat Kabupaten
3. Melaporkan kerusakan alat ke Dinas Terkait (Dinas Dukcapil)
4. Melaporkan masalah jaringan ke Dinas terkait (Dinas Kominfo)



2. Kecamatan Madiun

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Take Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	82,22	101,51
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	82,22	101,51
		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	81	64,25	77,41

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp.	3.547.312.651	3.114.252.824	87,79
	<i>Nilai Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</i>				
	<i>Nilai SAKIP Kecamatan</i>				
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	3.632.705	3.632.300	99,99
	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	3.632.705	3.632.300	99,99
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Tahun			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.159.070.136	2.739.008.516	86,70
	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	bulan	12	12	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.159.070.136	2.739.008.516	86,70
	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	0	0	0

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Bulan	0	0	0
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	0	0	0
	<i>Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang hadir</i>	Orang	0	0	0
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	136.675.236	129.051.899	94,42
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	2.446.000	2.435.000	95,55
	<i>Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	4.750.000	4.730.000	99,58
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	4.702.500	4.687.000	99,67
	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	32.806.654	32.667.489	99,58
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	10.990.082	10.184.610	92,67
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp.	1.980.000	1.885.000	95,20
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	79.000.000	72.463.800	91,20
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp.	32.447.094	32.412.000	99,89

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah				
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</i>				
1.4.1	Pengadaan Mebel	Rp.	0	0	0
	<i>Jumlah paket Mebel yang disediakan</i>		0	0	0
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	32.447.094	32.412.000	99,89
	<i>Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>				
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	130.197.164	125.142.469	96.12
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp.	43.938.500	38.883.879	88,50
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	86.258.664	86.258.590	100
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	85.296.316	85.011.640	99,67
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	84.434.200	84.161.640	99,68
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Bulan	12	12	100
1.6.2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	862.116	850.000	98,59
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>				

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	5.543.000	4.865.000	99,53
	<i>Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan</i>				
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakann oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp.	5.543.000	4.865.000	99,53
	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakann oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>				
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	0	0	0
	<i>Jumlah Laporan Efektifitas Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	36.050.400	24.981.700	70,54
	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>				
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	14.020.100	10.675.600	76,14
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana</i>				
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perenvanaan Pembangunan di Desa	Rp.	5.350.000	4.109.100	76,81
	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	1.302.000	1.292.500	99,27
	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	7.368.100	5.274.000	71,58
	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.	22.030.300	14.306.100	64,94
	<i>Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>				
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	13.136.900	11.527.100	87,75
	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan</i>				
3.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	4.611.200	2.779.000	60,27
	<i>Jumlah Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan</i>				
3.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp.	4.282.200	0	0
	<i>Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana</i>				
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	39.612.000	36.366.500	91,81
	<i>Persentase Layanan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	39.612.000	36.366.500	91,81



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	39.612	36.366.500	91,81
	<i>Jumlah terselenggaranya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	51.792.100	51.754.000	99,93
	<i>Persentase Layanan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>				
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	51.792.100	51.754.000	99,93
	<i>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara</i>				
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp.	6.167.600	6.143.500	99,61
	<i>Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa</i>				
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rp.	45.624.500	45.610.500	99,97
	<i>Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional</i>				
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	70.003.356	61.191.600	87,41

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	70.003.356	61.191.600	87,41
	<i>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp.	2.560.000	2.559.000	99,96
	<i>Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	655.000	0	0
	<i>Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.	38.323.356	34.008.600	88,74
	<i>Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	Rp.	6.420.000	2.779.000	43,29
	<i>Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>				
6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp.	12.770.000	12.570.000	98,43
	<i>Terselenggaranya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>				
6.1.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp	9.275.000	9.275.000	100
	<i>Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang terlaksana</i>				

PERMASALAHAN :

1. Minimnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal.



2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Madiun (penyimpanan arsip).
3. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan.
4. Masih lemah dalam pemahaman pembuatan tata naskah dinas baik hal redaksi maupun pengetikannya.
5. Pengiriman RKP dan usulan musrenbang tingkat kecamatan tidak tepat waktu.
6. Petugas Prodeskel jarang mengupdate data sehingga data jadi tidak valid.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Mininnya anggaran maka didahulukan kegiatan yang lebih urgen dan sangat pokok.
2. Penyimpanan arsip masih disimpan di ruang kerja masing-masing Kasi dan Kasubag.
3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi.
4. Mengadakan Bimtek untuk seluruh desa khususnya kaur umum desa.

3. Kecamatan Wungu

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,95	81,09	96,59
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan Kinerja pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	79	86,36	109,3
		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	84	75,03	89,3

Untuk Tujuan dan indeks kepuasan masyarakat kecamatan sudah hampir memenuhi capaian atau sudah ada yang mencapai target. Indeks kepuasan masyarakat kecamatan diukur dengan pengadaan kotak saran elektronik dengan cara *scan barcode* agar masyarakat bisa menyalurkan kepuasan dan aspirasi terhadap pelayanan kecamatan.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	174.235.511	165.416.831	94,94
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</i>	Nilai	79	86,36	109,3
	<i>Nilai Sakip Kecamatan</i>	Nilai	84	75,03	89,3
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	174.235.511	165.416.831	94,94
	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Bulan	100	100	100
1.1.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp.	3.486.670	3.485.500	99,97
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Rp.	19.563.521	19.102.000	97,64
	<i>Penyediaan pelaratan rumah tangga</i>	Rp.	16.948.059	16.913.428	99,8
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	Rp.	10.307.791	5.567.530	54,01
	<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	Rp.	123.929.470	120.347.873	97,11
1.1.2.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	9.315.000	9.315.000	100
	<i>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>	Rp.	9.315.000	9.315.000	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1.3	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp.	102.060.664	95.379.019	93,45
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik</i>	Rp.	22.074.146	18.544.499	84,01
	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	Rp.	79.986.518	76.834.520	96,01
1.1.4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp.	80.323.259	75.697.724	94,24
	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan</i>	Rp.	80.323.259	75.697.724	94,24
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	6.207.024	5.355.400	86,28
	<i>Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
2.1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp.	6.207.024	5.355.400	86,28
	<i>Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas</i>				
2.1.1	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp.	6.207.024	5.355.400	86,28
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	86.906.088	80.815.450	92,99
	<i>persentase layanan pemberdayaan masyarakat desan dan kelurahan</i>	%	100	100	100
3.1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp.	86.906.088	80.815.450	92,99
	<i>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	%	100	100	100
3.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Rp.	51.743.048	46.937.450	90,71
3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp.	35.163.040	33.878.000	96,35
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
	<i>Persentase layanan ketentraman dan ketertiban umum</i>				
4.1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				
	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana</i>				

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.2	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah				
	<i>Jumlah fasilitasi penegakan perda dan pengawasan dan perijinan</i>				
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	49.397.800	42.377.000	85,79
	<i>Persentase layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>	%	100	100	100
5.1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp.	49.397.800	42.377.000	85,79
	<i>Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana</i>	%	100	100	100
5.1.1.	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Rp.	10.630.400	9.834.000	92,51
5.1.2	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Rp.	5.622.400	5.084.000	90,42
5.1.3	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Rp.	33.145.000	27.459.000	82,85
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	41.378.729	35.767.000	86,44
	<i>Persentase layanan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	%	100	100	100
6.1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	41.378.729	35.767.000	86,44
	<i>Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana</i>	%	100	100	100
6.1.1	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Rp.	41.378.729	35.767.000	86,44

PERMASALAHAN

Pada Nilai Sakip Kecamatan realisasi belum bisa mencapai target dikarenakan terdapat satu indikator yang belum terlaksana yaitu perumusan sistem teknologi informasi Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.



PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut harus dilakukan perencanaan dan penganggaran agar dapat merealisasikan perumusan sistem teknologi informasi (aplikasi) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam rangka kegiatan pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

4. Kecamatan Kebonsari

No.	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tujuan OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81	100
2.	Sasaran OPD : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	79	75	95
		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	84	62,28	74

Tujuan OPD Kecamatan Kebonsari adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas telah tercapai 100% dari target tujuan OPD dengan sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dengan indikator sasaran 1 (satu) Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan capaian sebesar 75 dari target nilai sebesar 79 (tercapai 95%) dan sasaran 2 (dua) dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan dengan nilai target 84 dan capaian nilai 62,28, (tercapai 74%).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	6.990.500	6.990.500	100
	<i>Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp.	6.990.500	6.990.500	100
	<i>Jumlah Layanan Masyarakat yang berkualitas</i>	kegiatan	6	6	100
	<i>Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey</i>	Layanan	4 Jenis Layanan dan	4	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Masyarakat</i>		Nilai IKM (82)		
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	53.358.300	49.726.700	95,645
	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	%	100	100	100
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	41.714.700	38.083.100	91,29
	<i>Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	%	100	100	100
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp.	41.714.700	38.083.100	91,29
	<i>Jumlah Rapat koordinasi Yang Terselenggara</i>	Kegiatan	3	3	100
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Terselenggara</i>	%	100	100	100
2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	11.643.600	11.643.600	100
	<i>Jumlah Kader PKK yang Aktif Dan Terampil</i>	Desa	14	14	100
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	25.434.800	24.326.400	95,64
	<i>Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
3.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	25.434.800	24.326.400	95,64
	<i>Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
3.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	25.434.800	24.326.400	95,64
	<i>Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi</i>	Desa	14	14	100
4.	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	25.434.800	24.326.400	95,64
	<i>Persentase Layanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
4.1.1	Harmonisasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	3.880.000	3.880.000	100
	<i>Jumlah Koordinasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Dilaksanakan</i>	Kegiatan	5	5	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Rp.	105.722.354	96.806.180	91,57



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
	<i>Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum</i>	%	100	100	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	105.722.354	96.806.180	91,57
	<i>Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana</i>	%	100	100	100
5.1.1	Fasilitasi, Kordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp.	10.532.740	10.462.980	99,34
	<i>Jumlah Fasilitasi, Kordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Terlaksana</i>	Kegiatan	4	4	100
5.1.2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp.	33.043.800	33.043.800	100
	<i>Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang Terlaksana</i>	Kegiatan	2	2	100
5.1.3	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rp.	62.145.814	53.299.400	85,77
	<i>Jumlah Fasilitasi Kampung Pesilat yang Terlaksana</i>	Kegiatan	4	4	100
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.			
	<i>Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Sekretariat perangkat Daerah (Skor)</i>	%	100	100	100
	<i>Nilai Sakip OPD</i>	Hasil Evaluasi Inspektorat	84	62,08	74
6.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rupiah	6.448.050	6.448.050	100
	<i>Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Disusun Sesuai Peraturan</i>	Dokumen	14	14	100
6.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	6.448.050	6.448.050	100
	<i>Presentase Layanan Umum Yang Tersedia</i>	Dokumen	14	14	100
6.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	165.351.915	164.475.840	99,47
	<i>Presentase Layanan Umum yang tersedia</i>	%	100	100	100
6.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Lapangan Bangunan Kantor	Rp	4.054.961	3.989.326	98,36
	<i>Presentase Layanan Umum yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	26.039.323	25.847.473	99,26
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Bulan	12	12	100
6.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	6.807.531	6.807.531	100
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Bulan	12	12	100
6.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	4.079.000	3.959.000	97,06
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
6.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rp	1.808.400	1.800.000	99,54
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	Bulan	12	12	100
6.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	122.562.700	122.072.510	99,60
	<i>Layanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	Bulan	12	12	100
6.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	108.034.709	98.473.519	91,1
	<i>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tercukupi</i>	%	100	100	100
6.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	34.902.489	34.467.798	91,15
	<i>Fasilitasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Bulan	12	12	100
6.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	73.132.720	64.005.721	87,52
	<i>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
6.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	126.715.989	122.698.980	96,83
	<i>Presentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>	%	100	100	100
6.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	88.449.450	84.454.450	95,48
	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
6.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	8.266.530	8.266.530	100
	<i>Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	10	10	100
6.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	30.000.000	29.978.000	99,93



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Unit	1	1	100

PERMASALAHAN

1. Rapat koordinasi tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak bisa dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Kegiatan rapat koordinasi tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.
2. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor bisa terlaksana setelah pergeseran (PAK).



5. Kecamatan Wonoasri

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tujuan OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	84	87,89	104,63
2.	Sasaran OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	NILAI	79	87,89	111,25
		Nilai Sakip Kecamatan	NILAI	84	71,63	85,27

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian indikator tujuan sebesar 87,89 atau 104,63%, hal ini berarti target indikator tujuan telah tercapai. Untuk target indikator sasaran yang tersebar dalam 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target semua. Untuk sasaran indikator yang pertama telah tercapai sebesar 111,25%, sedangkan untuk sasaran indikator kedua dengan realisasi 85,27 yang berarti belum memenuhi target (belum tercapai).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	4.681.000	4.660.500	99,56
	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp.	4.681.000	4.660.500	99,56
	<i>Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas</i>	Jenis	4	4	100
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp.	4.681.000	4.660.500	99,56
	<i>Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana</i>	Kegiatan	4	4	100
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	61.769.040	60.935.000	98,65
	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	%	100	100	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	29.607.091	28.919.500	85,62
	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	1	1	100
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	8.797.600	8.350.000	94,91
	<i>Jumlah kegiatan perencanaan desa yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	3	3	100
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	2.236.300	2.223.000	99,41
	<i>Jumlah fasilitasi lomba desa dan penyusunan profil desa yang terlaksana</i>	Kegiatan	2	2	100
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	18.573.191	18.346.500	98,78
	<i>Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana</i>	Kegiatan	4	4	100
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.	32.161.949	32.015.500	99,54
	<i>Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	4	4	100
2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	13.235.349	13.156.500	99,40
	<i>Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	4	4	100
2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	5.939.600	5.903.000	99,38
	<i>Jumlah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	1	1	100
2.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp.	11.046.000	11.028.000	99,84
	<i>Jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	2	2	100
2.2.4	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp.	1.941.000	1.928.000	99,33
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	71.778.430	68.218.250	95,04
	<i>Persentase Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	41.619.040	40.788.750	98
	<i>Jumlah koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Yang Diselenggarakan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Rp.	41.619.040	40.788.750	98



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan				
	<i>Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang terlaksana</i>	Kegiatan	4	4	100
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.	30.159.390	27.429.500	90,95
	<i>Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan perda yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp.	30.159.390	27.429.500	90,91
	<i>Jumlah sosialisasi yang terlaksana</i>	Kali	1	1	100
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	17.955.640	17.901.000	99,70
	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	%	100	100	100
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	17.955.640	17.901.000	99,70
	<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	2	2	100
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp.	5.759.000	5.743.000	99,72
	<i>Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	3	3	100
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rp.	12.196.640	12.158.000	99,68
	<i>Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	2	2	100
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	55.841.600	55.780.000	99,89
	<i>Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	55.841.600	55.780.000	99,89
	<i>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	4	4	100
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	23.321.600	23.309.000	99,95



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan yang terlaksana</i>	Kegiatan	4	4	100
5.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp.	8.851.000	8.849.000	99,98
	<i>Jumlah fasilitasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	2	2	100
5.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan permusyawaratan Desa	Rp.	3.455.200	3.418.000	98,92
	<i>Jumlah fasilitasi tugas dan fungsi BPD yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	1	1	100
5.1.4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.	20.213.800	20.204.000	99,95
	<i>Jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa</i>	Desa	7	6	85,71

PERMASALAHAN :

1. Belum sinerginya antara pemerintahan kecamatan dan desa
2. Terlambatnya informasi potensi dari OPD sehingga usulan musrenbang dari desa tidak ada di potensi OPD terkait.
3. Belum optimalnya pendampingan dan pengelolaan keuangan desa karena terbatasnya tenaga pendamping.
4. Belum tercapainya target PBB yang disebabkan kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak PBB terhadap waktu jatuh tempo yang ditetapkan dan belum optimalnya petugas PBB tingkat desa dalam melaksanakan pemungutan PBB.
5. Belum maksimalnya untuk implementasikan aturan-aturan atau regulasi yang baru.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Sering diadakan pertemuan-pertemuan untuk menyamakan persepsi, sehingga betul-betul sinergi antara pemerintahan kecamatan dan desa.
2. Usulan desa harus mengacu pada potensi yang ada di OPD dan potensi mohon secepatnya diinformasikan.
3. Perlu tenaga pendamping pengelolaan keuangan desa yang professional dan diadakan bimtek siskeudes/pengelolaan keuangan desa.



4. Mengadakan pembinaan bagi petugas pemungut PBB tingkat desa dan sosialisasi mengenai jatuh tempo PBB.
5. Mengadakan sosialisasi tentang aturan-aturan atau regulasi baru.



6. Kecamatan Saradan

No	Kebijakan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Layanan	80	79,31	79,31
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	97	97
		Persentase Layanan Bidang Administrasi Kecamatan	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	80	62,68	62,68

Pencapaian target dan tujuan dan sasaran Kecamatan Saradan telah memenuhi target dan telah dilakukan evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 oleh Tim Sakip Kabupaten Madiun / Inspektorat dengan hasil ; cukup , akuntabel, kinerja baik, memiliki system manajemen yang baik.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp.	2.915.245.109	2.637.421.486	93
	<i>Terselenggaranya Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Bulan	12	12	100
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	2.915.245.109	2.637.421.486	93
	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Orang / bulan	12	12	100
1.1.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Rp.	2.915.245.109	2.637.421.486	90,47
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang / bulan	12	12	100
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				88,20
	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	Bulan	12	12	100
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	14.974.000,00	13.544.375,00	90,45
	<i>Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.1.2	Penyediaan Peralatan Dan	Rp	93.484.929	91.134.548	97,48



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perlengkapan Kantor				
	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	15.048.550,00	15.025.000,00	99,98
	<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	Bulan	12	12	100
1.1.4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	1.914.000,00	1.900.000,00	95,83
	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Bulan	12	12	100
1.1.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	23.608.913,00	23.594.250,00	99,94
	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	16.136.359,00	16.134.000,00	99,99
	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
1.1.7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	6.759.750	6.750.000	99,85
	<i>Tersedianya Fasilitas Untuk Kunjungan Tamu</i>	Bulan	12	12	100
1.1.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Rp	75.585.300	75.464.819	96,21
	<i>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp	20.327.500	17.006.640	83,66
	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi Dan Sumberdaya Air</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan	Rp	1.895.000	1.856.500	97,95
	<i>Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	66.850.000	66.750.000	99,85
	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	94.999.900	91.930.579	96,76
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
2.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp	7.556.750	7.548.000	99,88
	<i>Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya</i>	Bulan	12	12	100
2.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Rp	20.000.000	19.980.684	99,90



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kantor Dan Bangunan Lainnya				
	<i>Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya</i>	Bulan	12	12	100
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Rp	35.322.000	35.308.975	99,96
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>	Kegiatan	4	4	100
3	Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kecamatan	Rp			98,41
	<i>Terselenggaranya Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kecamatan</i>	Bulan	12	12	100
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Rp	14.408.100	14.407.700	99,91
	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pembangunan</i>	Kegiatan	5	5	100
4.1.1	Sinergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Rp	37.517.000	37.516.185	99,99
	<i>Terlaksananya Bimtek Satlinmas, Patroli dan Pengawasan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa</i>	Kegiatan	3	3	100
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp	53.402.800	53.318.325	99,84
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kegiatan	1	1	100
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp	14.690.000	12.483.557	84,98
	<i>Terlaksananya Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	Kegiatan	11	11	100

PERMASALAHAN :

1. Adanya Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Tupoksi dan Aktivitas di tengah jalan.
2. Belum tercapainya target PBB yang disebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak PBB terhadap waktu jatuh tempo PBB.



3. Belum maksimalnya informasi aturan – aturan atau regulasi baru.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Tupoksi dan Aktivitas.
2. Pembinaan bagi Petugas tingkat Desa.
3. Mengadakan Sosialisasi tentang aturan – aturan regulasi yang baru.



7. Kecamatan Jiwan

No	Kebijakan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83,34	83,34
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	87,52	87,52

Tujuan Kecamatan Jiwan yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang efektif dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 target 85 realisasi 83,34 sehingga capaiannya 98%.

Sedangkan Sasaran Kecamatan Jiwan yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada tahun 2022 target sebesar 80 adapun realisasi sebesar 87,52 sehingga capaiannya adalah 102,96%.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	5.030.000	4.995.000	99,30
	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan</i>	%	100	100	100
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp.	3.720.000	3.700.000	99,46
	<i>Layanan rapat koordinasi dan konsultasi</i>	kegiatan	2	2	100
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	3.720.000	3.700.000	99
	<i>Jumlah jenis pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Masyarakat</i>	nilai	80	87,52	102,96
1.1.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp.	1.310.000	1.295.000	99
	<i>Jumlah Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum yang</i>	kegiatan	1	1	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.1	<i>terkoordinasi dengan baik</i>				
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp.	1.310.000	1.295.000	99
	<i>Jumlah Kegiatan Yang Terpublikasi</i>	kegiatan	150	155	103
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	40.773.900	40.572.200	99,51
	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	%	100	100	100
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	23.633.100	23.502.200	99,45
	<i>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	persentase	100	100	100
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	4.127.100	4.107.100	100
	<i>Jumlah Rapat koordinasi yang terselenggara</i>	kegiatan	3	3	100
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	2.116.000	2.110.000	99,72
	<i>Jumlah fasilitasi lomba desa yang terlaksana</i>	kegiatan	5	5	100
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	17.390.000	17.285.100	99,40
	<i>Jumlah kegiatan pendataan Yatim Piatu, Lansia, ODGJ, Keluarga prasejahtera dan bimtek yang terlaksana</i>	kegiatan	2	2	100
	<i>Jumlah kegiatan pendataan Yatim Piatu, Lansia, ODGJ, Keluarga prasejahtera dan bimtek yang terlaksana</i>	kegiatan	2	2	100
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	17.140.800	17.070.000	99,59
	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara</i>	%	5	5	100
2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	11.828.000	11.827.000	99,99
	<i>Jumlah kader PKK yang aktif dan terampil</i>	jumlah desa	14	14	100
2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	1.310.000	1.295.000	98,85

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa yang aktif</i>	jumlah desa	14	14	100
2.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp	4.002.800	3.948.000	98,63
	<i>Jumlah BUMDes yang aktif</i>	jumlah desa	14	14	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	10.806.600	10.790.000	99,85
	<i>Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	10.806.600	10.790.000	99,85
	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i>	persentase	100	100	100
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp	6.074.600	6.068.000	99,89
	<i>Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>	kegiatan	6	6	100
3.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp	4.732.000	4.722.000	99,79
	<i>Jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan</i>	kegiatan	5	5	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	47.232.001	47.097.000	99,71
	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	%	100	100	100
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp	47.232.001	47.097.000	99,71
	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	%	100	100	100
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp	31.459.901	31.350.000	99,65
	<i>Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang terselenggara dengan baik</i>	kegiatan	2	2	100
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp	9.040.100	9.027.000	99,86

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah fasilitasi Kampung Pesilat yang terselenggara</i>	kegiatan	4	4	100
4.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp	6.732.000	6.720.000	99,82
	<i>Jumlah rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang terselenggara</i>	kegiatan	4	4	100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	61.930.800	61.250.000	98,90
	<i>Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	61.930.800	61.250.000	98,90
	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana</i>	persentase	100	100	100
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp	21.560.000	21.545.000	99,93
	<i>Jumlah desa yang tertib administrasi</i>	jumlah desa	14	14	100
5.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp	1.310.000	1.295.000	98,85
	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	jumlah desa	14	14	100
5.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp	14.825.000	14.370.000	96,93
	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>	jumlah desa	12	12	100
5.1.4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp	21.445.800	21.265.000	99
	<i>Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan</i>	dokumen	14	8	57,14
5.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp	2.790.000	2.775.000	99
	<i>Jumlah hasil evaluasi R-APBDes yang diselesaikan</i>	dokumen	14	14	100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.563.530.559	2.316.432.354	90,36
	<i>Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</i>	%	88	90	102
	<i>Nilai SAKIP PD</i>	Nilai	83	72,10	86,87

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	48.301.100	48.161.400	99,71
	<i>Jumlah Dokumen Pemerintahan yang disusun sesuai peraturan</i>	dokumen	14	18	129
6.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	48.301.100	48.161.400	99,71
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun</i>	dokumen	14	18	129
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.132.490.114	1.887.425.996	88,51
	<i>Persentase Administrasi keuangan yang dilaksanakan</i>	persentase	100	88,51	88,51
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.132.490.114	1.887.425.996	88,51
	<i>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan</i>	bulan	12	12	100
6.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	140.954.395	140.664.454	99,79
	<i>Persentase Layanan Umum yang tersedia</i>	persentase	100	99,79	99,79
6.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	2.550.750	2.550.500	99,99
	<i>penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan</i>	bulan	12	12	100
6.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	8.437.710	8.410.500	99,68
	<i>penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	bulan	12	12	100
6.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	7.277.105	7.258.250	99,74
	<i>penyediaan peralatan rumah tangga</i>	bulan	12	12	100
6.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	4.312.500	4.312.500	100
	<i>penyediaan bahan logistik kantor</i>	bulan	12	12	100
6.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	8.695.830	8.679.835	99,82
	<i>penyediaan barang cetak dan penggandaan</i>	bulan	12	12	100
6.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	1.980.000	1.800.000	90,91
	<i>penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	bulan	12	12	100
6.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	107.700.500	107.652.869	99,96
	<i>layanan rapat koordinasi dan konsultasi</i>	bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	31.319.550	31.313.100	99,98
	<i>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</i>	persentase	100	99,98	99,98
6.4.1	Pengadaan Mebel	Rp	5.307.300	5.305.800	99,97
	<i>Jumlah pengadaan mebel</i>	Unit	1	1	100
6.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	26.012.250	26.007.300	99,98
	<i>Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>	Unit	2	2	100
6.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	107.980.500	106.440.422	98,57
	<i>Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi</i>	persentase	100	98,57	98,57
6.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	23.788.600	22.345.048	93,93
	<i>Fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	bulan	12	12	100
6.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	84.192.000	84.095.374	99,89
	<i>Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	bulan	12	12	100
6.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	102.484.800	102.425.982	99,94
	<i>persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</i>	persentase	100	99,45	99,45
6.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	89.284.800	89.263.882	99,98
	<i>Jumlah jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	bulan	12	12	100
6.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	13.200.000	13.163.100	99,72
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	bulan	12	12	100

PERMASALAHAN :

- a. Aplikasi Siskeudes sering mengalami gangguan ketika penginputan anggaran



- b. Jumlah desa yang tertib administrasi masih belum optimal
- c. Sarana prasarana pendukung di Seksi Pelayanan masih sangat kurang terkendala minimnya anggaran kecamatan
- d. Terbatasnya SDM secara kualitas maupun kuantitas karena banyak yang memasuki purna tugas
- e. Jaringan pada aplikasi SIMDUK sering bermasalah sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang optimal.
- f. Penginputan data epdeskel baik di Tingkat Depdagri maupun Kabupaten Madiun masih kurang optimal karena desa beranggapan data yang diinput tersebut sangat berpengaruh terhadap bantuan-bantuan yang akan masuk di desa
- g. Banyak kegiatan-kegiatan di Tingkat Kabupaten Madiun yang mengakibatkan penyerapan anggaran kecamatan, sedangkan anggaran tersebut tidak tersedia di kecamatan
- h. Sering terjadi kerawanan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat pada saat peringatan hari besar di perguruan pencak silat

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

- a. Mengusulkan kepada dinas Kominfo untuk menaikkan bandwidth sehingga penginputan bisa maksimal
- b. Perlu tenaga pendamping pengelolaan administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa yang profesional serta pendampingan secara kontinyu
- c. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang ada
- d. Mengusulkan kepada BKD tambahan pegawai utamanya staf pelaksana.
- e. Selalu berkoordinasi dengan dinas terkait dan pihak ketiga
- f. Selalu berkoordinasi dengan desa dan memberikan arahan sesuai petunjuk dari Dinas PMD Kabupaten Madiun
- g. Mengkoordinasikan dengan masing – masing OPD penyelenggara kegiatan
- h. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Kepolisian RI dan TNI.

8. Kecamatan Geger

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	82	88,19	107,51
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	NILAI	82	88,19	107,51
		Nilai SAKIP Kecamatan	NILAI	81	73,47	90,70

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kinerja Kantor Kecamatan Geger yang terdapat 1 Sasaran dan 2 Indikator. Dengan Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas, dengan Indikator Tujuan yaitu :Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target 82 dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 88,19. Untuk Kantor Kecamatan terdapat 1 Sasaran Yaitu : Sasaran 1: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan, Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan Target 82, dengan realisasi nilai IKM berdasarkan SuKMa-e Jatim 88,19, dan Indikator Sasaran 2 : Nilai SAKIP Kecamatan dengan Target 81, dengan nilai SAKIP Tahun 2022 berdasarkan LHE Implementasi SAKIP adalah 73,47.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp.	2.705.781.760	2.424.070.149	89,59
	<i>Terselenggaranya Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Bulan	12	12	100
1.1	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp.	2.249.905.399	1.985.851.847	88,26
	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Bulan	14	14	100
1.1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Rp.	2.249.905.399	1.985.851.847	88,26



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bulan	14	14	100
1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	13.215.200	11.005.000	83,27
	<i>Terseleenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	13.215.200	11.005.000	83,27
	<i>Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Kegiatan	1	1	100
1.3	Administrasi umum perangkat daerah	Rp.	159.443.651	152.242.765	95,48
	<i>Terpeenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp.	10.044.900	9.946.135	99,02
	<i>Tersedianya kebutuhan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp.	5.006.540	4.996.665	99,80
	<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	52.412.211	50.373.365	96,11
	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	9.000.000	6.919.600	76,88
	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	1.980.000	1.800.000	90,91
	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.	81.000.000	78.207.000	96,55
	<i>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp.	44.376.255	44.275.000	99,77
	<i>Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>	Unit	7	7	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.4.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	44.376.255	44.275.000	99,77
	<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop, AC, Meja Kerja Pejabat, Kursi Kerja Pejabat)</i>	Unit	7	7	100
1.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	100.162.025	95.955.791	95,80
	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	17.802.600	16.337.680	91,77
	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.	82.359.425	79.618.111	96,67
	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	138.679.230	134.739.749	97,16
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan</i>	Bulan	12	12	100
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.	85.549.496	82.192.459	96,08
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
1.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	10.195.700	9.692.700	95,07
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	Bulan	12	12	
1.6.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	Rp.	42.934.034	42.854.590	99,81
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	6.712.440	6.700.000	99,81
	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	Kegiatan	1	1	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp.	6.712.440	6.700.000	99,81
	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>	Kegiatan	1	1	100
2.1.1	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp.	6.712.440	6.700.000	99,81
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	71.873.260	60.859.770	84,68
	<i>Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp.	16.420.400	16.026.970	97,60
	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kegiatan	2	2	100
3.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Rp.	4.810.400	4.810.000	100
	<i>Terlaksananya musrenbang Tingkat Kecamatan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp.	11.610.000	11.216.970	96,61
	<i>Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kabupaten, Bupati Cup dan FKUB</i>	Kegiatan	3	3	100
3.2	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Rp.	55.452.860	44.832.800	80,85
	<i>Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.2.1	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Rp.	14.894.560	14.653.000	98,38
	<i>Terlaksananya kegiatan pemantapan bank sampah, pleno kecamatan dan sosialisasi stunting</i>	Kegiatan	3	3	100
3.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	27.703.400	27.544.800	99,43
	<i>Terlaksananya pemantapan administrasi PKK desa dan kecamatan</i>	Kegiatan	1	1	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.2.3	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Rp.	12.854.900	2.635.000	20,50
	<i>Terlaksananya bimtek kapasitas pengurus BUMDes</i>	Kegiatan	1	1	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	45.671.2600	43.301.000	94,81
	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Kegiatan	1	1	100
4.1.1	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp.	45.671.600	43.301.000	94,81
	<i>Terlaksananya Sinergitas Tiga Pilar Kecamatan, Simulasi Kesiapsiagaan Kewaspadaan Dini Tanggap Bencana</i>	Kegiatan	2	2	100
5.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Rp.	37.348.800	36.979.100	99,01
	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Kegiatan	1	1	100
5.1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp.	37.348.800	36.979.100	99,01
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana</i>	Kegiatan	2	2	100
5.1.1	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Rp.	32.130.200	31.782.100	98,92
	<i>Terlaksananya peringatan hari besar nasional</i>	Kegiatan	1	1	100
5.1.2	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional	Rp.	5.218.600	5.197.000	99,59
	<i>Terlaksananya rapat koordinasi dengan perguruan pencak silat se kecamatan gejer</i>	Kegiatan	1	1	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	58.146.300	56.093.500	96,47
	<i>Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan</i>	Kegiatan	3	3	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pemerintahan Desa					
6.1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	58.146.300	56.093.500	96,47
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana</i>	Kegiatan	3	3	100
6.1.1	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Rp.	925.000	925.000	100
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Kepala Desa</i>	Kegiatan	1	1	100
6.1.2	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Rp.	5.310.100	5.199.000	97,91
	<i>Terlaksananya bimtek kapasitas BPD</i>	Kegiatan	1	1	100
6.1.3	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Rp.	51.911.200	49.969.500	96,26
	<i>Terlaksananya pengisian perangkat desa</i>	Kegiatan	1	1	100

URAIAN PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Permasalahan:

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, untuk anggaran pemeliharaan kurang memadai mengingat bangunan gedung kantor dan lahan kantor Kecamatan Geger sangat luas (Eks. Kantor Pembantu Bupati di Uteran/Eks. Kantor BKP).

Penyelesaian Permasalahan :

Untuk pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, memaksimalkan dengan Anggaran yang sudah ada di Pagu Anggaran. Mohon untuk penambahan anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Permasalahan:



- Belum adanya keseragaman antar Desa terkait dengan Pelayanan Administrasi di Tingkat Desa.

Penyelesaian Permasalahan:

- Diadakan Sosialisasi kepada Aparat Desa terkait dengan Administrasi Pelayanan di Desa.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Permasalahan:

- Kurangnya SDM pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
- Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (kegiatan BST) tidak maksimal.

Penyelesaian Permasalahan:

- Penambahan SDM pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
- Kegiatan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (kegiatan BST) sudah dicukupi oleh desa di wilayah Kecamatan Geger.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan:

- Kurangnya koordinasi dengan pihak OPD dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan.

Penyelesaian Permasalahan:

- Perlunya SOP (Standard Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan kegiatan dari tingkat Kabupaten.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Permasalahan:

- Kurangnya koordinasi dengan pihak OPD dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan.

Penyelesaian Permasalahan:

- Perlunya SOP (Standard Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan kegiatan dari tingkat Kabupaten.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Permasalahan:

- Kurangnya SDM pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Penyelesaian Permasalahan:

- Penambahan SDM pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan



9. Kecamatan Pilangkenceng

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	100
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	88	96,19	109,3
		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	89	75,54	84,9

Pada Tahun 2022, Kecamatan Pilangkenceng telah berhasil mempertahankan pencapaian target tujuan, yaitu B. Untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan juga masih tetap dipertahankan pada nilai A (96,19). Sedangkan untuk indikator sasaran Nilai SAKIP, pada Tahun 2022 Kecamatan Pilangkenceng mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun 2022. Namun nilai SAKIP Kecamatan Pilangkenceng masih berada pada nilai BB (75,54).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	44.852.060	44.810.000	99,9
	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan</i>	Kegiatan	6	6	100
1.1	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Rp.	44.852.060	44.810.000	99,9
	<i>Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas</i>	Kegiatan	6	6	100
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	44.852.060	44.810.000	99,9
	<i>Jumlah jenis pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Masyarakat</i>	Kegiatan	6	6	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	76.915.916	74.335.000	96,6
	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	%	100	100	100
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	66.380.416	63.905.000	96,3
	<i>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	%	100	100	100
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	33.026.240	32.755.000	99,2
	<i>Jumlah Rapat koordinasi yang terselenggara</i>	Kegiatan	2	2	100
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	13.638.000	12.775.000	93,7
	<i>Jumlah fasilitasi lomba desa yang terlaksana</i>	Kegiatan	1	1	100
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	19.716.176	18.375.000	93,2
	<i>Jumlah kegiatan pendataan Yatim Piatu, Lansia, ODGJ, Keluarga prasejahtera dan bimtek yang terlaksana</i>	Kegiatan	1	1	100
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.	10.535.500	10.430.000	99
	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara</i>	%	100	100	100
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	10.535.500	10.430.000	99
	<i>Jumlah kader PKK yang aktif dan terampil</i>	Kegiatan	1	1	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	25.820.800	25.780.000	99,8
	<i>Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	25.380.800	25.780.000	99,8
	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i>	%	100	100	100
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	25.380.800	25.780.000	99,8
	<i>Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	3	3	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	36.680.725	36.115.000	98,5
	<i>Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	%	100	100	100
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	36.680.725	36.115.000	98,5
	<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana</i>	%	100	100	100
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp.	23.916.825	23.475.000	98,2
	<i>Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang terselenggara dengan baik</i>	Kegiatan	2	2	100
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp.	12.763.900	12.640.000	99
	<i>Jumlah fasilitasi Kampung Pesilat yang terselenggara</i>	Kegiatan	2	2	100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	37.797.375	37.290.000	98,6
	<i>Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	37.797.375	37.290.000	98,6
	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana</i>	%	100	100	100
5.1.1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	11.703.930	11.590.000	99
	<i>Jumlah desa yang tertib administrasi</i>	Desa	18	18	100
5.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp.	864.600	840.000	97,2
	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>	Kegiatan	1	1	100
5.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	6.800.000	0	0
	<i>Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD</i>	Kegiatan	1	0	0
5.1.4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.	16.228.957	15.980.000	98,5
	<i>Jumlah desa yang mendapat rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa</i>	Desa	7	7	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	2.200.843.527	2.006.588.761	91,2
	<i>Nilai Sakip</i>	Nilai	80	75,54	
6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	35.396.225	35.253.000	99,6
	<i>Jumlah Laporan perencanaan dan evaluasi</i>	Dokumen	13	13	100
6.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp.	35.396.225	35.253.000	99,6
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah</i>	Dokumen	13	13	100
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.799.815.938	1.617.810.866	89,9
	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>	Tahun	1	1	100
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.799.815.938	1.617.810.866	89,9
	<i>Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan</i>	Tahun	1	1	100
6.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	144.383.819	142.560.100	98,7
	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>	Tahun	1	1	100
6.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	5.389.560	5.360.000	99,5
	<i>Komponen instalasi listrik yang tersedia</i>	Tahun	1	1	100
6.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	9.471.741	9.462.750	99,9
	<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia</i>	Unit	1	1	100
6.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	7.769.878	7.717.000	99,3
	<i>Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
6.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	48.796.382	48.044.000	98,5
	<i>Bahan Logistik Kantor yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
6.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	10.842.385	10.775.000	99,4
	<i>Barang cetak, penggandaan dan souvenir yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
6.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	2.178.000	2.177.500	99,9
	<i>Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
6.3.7	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp.	41.050.000	40.337.000	98,3
	<i>Mamin rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
6.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	113.179.320	105.430.378	93,2



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
6.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	24.448.320	17.970.528	73,5
	<i>Listrik, air dan telpon yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
6.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	87.675.000	86.700.000	98,9
	<i>Tenaga kerja non ASN siap pakai</i>	Bulan	12	12	100
6.4.3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp.	1.056.000	759.850	72
	<i>Iuran Asuransi yang terbayarkan</i>	Bulan	1	1	33
6.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	108.068.225	105.534.417	97,7
	<i>Persentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi</i>	%	100	100	100
6.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	87.655.233	85.184.417	97,2
	<i>Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai</i>	Bulan	12	12	100
6.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.490.703	5.450.000	99,3
	<i>Sarana pendukung kantor siap pakai</i>	Bulan	12	12	100
6.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	14.922.289	14.900.000	99,9
	<i>Gedung dan Bangunan Siap Pakai</i>	Bulan	12	12	100

Secara keseluruhan baik Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi target realisasi. Namun demikian, kami masih dapat melakukan efisiensi realisasi anggaran.

PERMASALAHAN :

Secara umum pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Pilangkenceng Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami kendala yang berarti. Namun bila dilihat dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, di Kantor Kecamatan Pilangkenceng terdapat permasalahan kekurangan SDM yaitu kekosongan Jabatan Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan Sosial serta kurangnya Staf Pengelola.



PENYELESAIAN PERMASALAHAN:

Sebagai upaya penyelesaian sebagaimana tersebut di atas, untuk melaksanakan setiap kegiatan sesuai rencana program dan kegiatan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan Sosial serta mengangkat Tenaga PKWT.

10. Kecamatan Dagangan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	88,61	100
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	79	75	95
		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	84	62,99	74,98

Tujuan OPD Kecamatan Dagangan adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas telah tercapai 100% dari target tujuan OPD dengan sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dengan indikator sasaran 1 (satu) Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan capaian sebesar 75 dari target nilai sebesar 79 (tercapai 95%) dan sasaran 2 (dua) dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan dengan nilai target 84 dan capaian nilai 62,99, (tercapai 74,98%).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	9.934.596	9.893.272	99,58
	<i>Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Rp.	9.934.596	9.893.272	99,58
	<i>Jumlah Layanan Masyarakat yang berkualitas</i>	Kegiatan	6	6	100
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	9.934.596	9.893.272	99,58
	<i>Jumlah Jenis Pelayanan yang</i>	Layanan	4 Jenis Layanan	4	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>dilaksanakan dan Hasil Survey Masyarakat</i>		dan Nilai IKM (82)		
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	53.356.812	52.944.545	99.22
	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	%	100	100	100
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	25.212.000	24.885.472	98.7
	<i>Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa yang terselenggara</i>	%	100	100	100
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp	7.998.000	7.916.160	98.98
	<i>Jumlah Rapat koordinasi yang terselenggara</i>	Kegiatan	3	3	100
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	5.614.000	5.408.000	96.33
	<i>Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</i>	Desa	17	17	100
2.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	11.600.000	11.561.312	99.67
	<i>Jumlah Rapat koordinasi yang terselenggara</i>	Kegiatan	3	3	100
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.	28.144.812	28.059.073	99.70
	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Terselenggara</i>	%	100	100	100
2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	19.401.632	19.391.409	99,95
	<i>Jumlah Kader PKK yang Aktif Dan Terampil</i>	Desa	17	17	100
2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	1.302.000	1.249.920	96
	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif</i>	Desa	17	17	100
2.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp.	41.714.700	38.083.100	91,29
	<i>Jumlah BUMDes yang aktif</i>	Desa	17	6	35,29
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Rp.	127.353.496	119.997.835	94,22



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	DESA				
	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100
3.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	127.353.496	119.997.835	94,22
	<i>Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
3.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp.	11.744.000	11.736.560	99,94
	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>	Desa	13	13	100
3.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.	1.488.000	1.458.240	98
	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	Desa	17	17	100
3.1.3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	59.190.000	55.586.080	93,91
	<i>Jumlah desa yang tertib administrasi</i>	Desa	17	17	100
3.1.4	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp.	10.760.700	10.667.328	99,13
	<i>Jumlah Perdes dan Perkades yang tersusun</i>	Dokumen	17	17	100
3.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	7.994.880	7.917.504	99,03
	<i>Jumlah Fasilitasi Peningkatan SDM aparatur desa</i>	Kegiatan	2	2	100
3.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	6.239.040	6.167.616	98,86
	<i>Jumlah Fasilitasi Peningkatan SDM BPD</i>	Kegiatan	2	2	100
3.1.7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp.	17.848.096	14.547.259	81,51
	<i>Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	Dokumen	14	14	100
3.1.8	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp	11.132.700	11.083.968	99,56
	<i>Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Peningkatan SDM BPD</i>	Dokumen	17	17	100
3.1.9	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan	Rp	956.080	833.280	87,16



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				
	<i>Jumlah Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga</i>	Kegiatan	1	1	100
4.	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	104.500.016	99.033.172	95,64
	<i>Persentase Layanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	104.500.016	99.033.172	94,77
	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	85.810.716	80.377.080	93,67
	<i>Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>	Kegiatan	5	5	100
4.1.2	Harmonisasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp	18.689.300	18.656.092	99,82
	<i>Jumlah Koordinasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Dilaksanakan</i>	Kegiatan	2	2	100
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp	1.126.000	1.111.608	98,72
	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	%	100	100	100
4.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp	1.126.000	1.111.608	98,72
	<i>Jumlah koordinasi yang terselenggara</i>	Kegiatan	1	1	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Rp.	26.262.145	25.827.104	98.34
	<i>Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum</i>	%	100	100	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Rp.	26.262.145	25.827.104	98.34
	<i>Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum sesuai</i>	%	100	100	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana</i>				
5.1.1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Instra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rp.	19.936.145	19.926.984	99,95
	<i>Jumlah fasilitasi Kampung Pesilat yang terselenggara</i>	Kegiatan	3	3	100
5.1.2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp.	5.024.000	4.983.512	99,19
	<i>Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang Terlaksana</i>	Kegiatan	3	3	100
5.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.	1.302.000	916.608	70,40
	<i>jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Yang Terselenggara</i>	Kegiatan	1	1	100
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	312.693.436	306.530.810	98
	<i>Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Sekretariat perangkat Daerah (Skor)</i>	%	100	100	100
	<i>Nilai Sakip OPD</i>	Hasil Evaluasi Inspektorat	84	62,99	74,98
6.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	24.186.120	23.117.520	95,58
	<i>Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Disusun Sesuai Peraturan</i>	Dokumen	14	14	100
6.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	24.186.120	23.117.520	95,58
	<i>Presentase Layanan Umum Yang Tersedia</i>	Dokumen	14	14	100
6.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	121.262.713	121.195.730	99,94
	<i>Presentase Layanan Umum yang tersedia</i>	%	100	100	100
6.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Lapangan Bangunan Kantor	Rp.	4.166.020	4.158.700	99,82
	<i>Presentase Layanan Umum yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
6.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	1.956.903	1.956.903	100
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Bulan	12	12	100
6.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	31.265.000	31.245.680	99,94

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>penyediaan bahan logistik kantor</i>	Bulan	12	12	100
6.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	6.384.800	6.384.450	99,99
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
6.2.5	Penyediaan Bahan Material	Rp.	2.002.000	2.000.000	99,99
	<i>Penyediaan Bahan Material</i>	Bulan	12	12	100
6.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	75.487.990	75.450.000	99,95
	<i>Layanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	Bulan	12	12	100
6.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	79.779.328	74.970.442	93,97
	<i>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tercukupi</i>	%	100	100	100
6.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	16.273.552	15.823.407	97,23
	<i>Fasilitasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Bulan	12	12	100
6.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	63.505.776	59.147.035	93,14
	<i>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
6.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	87.465.275	87.247.118	99,75
	<i>Presentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>	%	100	100	100
6.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	67.999.800	67.806.818	99,72
	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
6.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	4.465.475	4.440.300	99,94
	<i>Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	10	10	100
6.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	15.000.000	15.000.000	100
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Unit	1	1	100



PERMASALAHAN

1. Rapat koordinasi tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan sasaran kinerja Bumdes desa tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor internal desa, baik merupakan kurangnya pengelolaan internal bumdes, maupun kurangnya pengelolaan bumdes dengan baik.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Kegiatan rapat koordinasi tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.
2. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor bisa terlaksana setelah pergeseran (PAK).



11. Kecamatan Gemarang

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	90,75	106,76
2.	SASARAN OPD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	85	90,75	106,76
		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	81	63,25	78,09

Pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Kinerja Kantor Kecamatan Gemarang yang terdapat 1 Sasaran dan 2 Indikator Sasaran. Dengan Tujuan: Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas, dengan Indikator Tujuan yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target 85 dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 90,76.

Untuk Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan, Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan Target 85 dan Realisasi Indikator Sasaran 1 mencapai 90,75, Indikator Sasaran 2 yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan Target 81 dan Realisasi sebesar 63,25.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	1.969.641.378	1.706.867.629	87
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	3.794.488	3.788.000	99,83
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	3.794.488	3.788.000	99,83



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Dokumen	14	14	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.469.521.984	1.351.672.853	91,98
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/ bulan	-	-	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1.469.521.984	1.351.672.853	91,98
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/ bulan	-	-	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	320.617.065	180.402.000	56,27
	<i>Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	37.313.705	37.240.500	99,80
	<i>Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	16.391.785	16.390.000	99,99
	<i>Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	48.904.575	48.899.500	99,99
	<i>Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	7.040.000	7.040.000	100,00
	<i>Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	1.815.000	1.800.000	99,17
	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	69.032.000	69.032.000	100
	<i>Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.	140.120.000	-	0,00
	<i>Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	97.609.111	93.158.217	95,44



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	21.135.571	16.776.059	79,37
	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	76.473.540	76.382.158	99,88
	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	78.098.730	77.846.559	99,68
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	66.866.595	66.624.105	99,64
	<i>Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.115.000	5.105.454	99,81
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Bulan	12	12	100
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	6.117.135	6.117.000	100
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	10.173.984	10.102.200	99,29
	<i>Tersedianya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	Kegiatan	1	1	100
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Rp.	10.173.984	10.102.200	99,29
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>	Kegiatan	1	1	100
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di	Rp.	10.173.984	10.102.200	99,29



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Wilayah Kecamatan				
	<i>Terlaksananya Hasil Survey Masyarakat</i>	Kegiatan	1	1	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	30.592.590	30.402.355	99,38
	<i>Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	Kegiatan			
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	9.229.900	9.112.500	98,73
	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kegiatan	2	2	100
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	4.379.900	4.307.500	98,35
	<i>Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Kegiatan	1	1	100
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Rp	4.850.000	4.805.000	99,07
	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan</i>	Kegiatan	1	1	100
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	21.362.690	21.289.855	99,66
	<i>Terlaksananya Simulasi Peran Kader PKK dalam Pencegahan Stunting</i>	Kegiatan			
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	21.362.690	21.289.855	99,66
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	3.004.970	2.989.000	99,47
	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kegiatan	2	2	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	3.004.970	2.989.000	99,47
	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kegiatan	2	2	100
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp	1.331.210	1.318.000	99,01
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Rp.	1.673.760	1.671.000	99,84



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Terlaksananya Patroli dan Yustisi kewilayahan</i>	Kegiatan	2	2	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	8.787.310	8.786.050	99,99
	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Kegiatan	2	2	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	8.787.310	8.786.050	99,99
	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Kegiatan	2	2	100
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp.	8.787.310	8.786.050	99,99
	<i>Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (Upacara)</i>	Kegiatan	2	2	100
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	8.548.790	8.544.330	99,95
	<i>Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kegiatan	2	2	100
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	8.548.790	8.544.330	99,95
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</i>	Kegiatan	2	2	100
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	8.548.790	8.544.330	99,95
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kegiatan	2	2	100

PERMASALAHAN :

1. Minimnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Mejayan (penyimpanan arsip).
3. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan.



4. Masih lemah dalam pemahaman pembuatan tata naskah dinas baik hal redaksi maupun pengetikannya.
5. Pengiriman RKP dan usulan musrenbang tingkat kecamatan tidak tepat waktu.
6. Petugas Prodeskel jarang mengupdate data sehingga data jadi tidak valid.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Minimnya anggaran maka didahulukan kegiatan yang lebih urgen dan sangat pokok.
2. Penyimpanan arsip masih disimpan di ruang kerja masing-masing Kasi dan Kasubag.
3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi.
4. Mengadakan Bimtek untuk seluruh desa khususnya kaur umum desa.

12. Kecamatan Sawahan

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	82	95
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	83	82	95
		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	80	62,78	74

Tujuan OPD Kecamatan Sawahan adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas telah tercapai 100% dari target tujuan OPD dengan sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dengan indikator sasaran 1 (satu) Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan capaian sebesar 82 dari target nilai sebesar 85 (tercapai 96%) dan sasaran 2 (dua) dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan dengan nilai target 80 dan capaian nilai 62,78, (tercapai 74%).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	6.495.900	6.495.900	100
	<i>Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
1.1	peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sawahan	Rp.	6.495.900	6.495.900	100
	<i>Jumlah Layanan Masyarakat yang berkualitas</i>	kegiatan	6	6	100
	<i>Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Masyarakat</i>	Layanan	Layanan dan Nilai IKM (82)	82	100
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	16.000.000	15.893.200	99,33



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	100	100
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp.	16.000.000	15.893.200	99,33
	<i>Jumlah Rapat koordinasi Yang Terselenggara</i>	Kegiatan	3	3	100
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	1	100
	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Terselenggara</i>	%	100	100	100
2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan	1	1	100
	<i>Jumlah Kader PKK yang Aktif Dan Terampil</i>	Desa	13	13	100
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	40.102.000	40.102.000	100
	Indikator Kinerja Program : Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100
3.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	25.882.000	25.882.000	100
	<i>Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
3.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	14.220.000	14.220.000	100
	<i>Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi</i>	Desa	13	13	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	9.600.000	9.530.000	98,81
	Indikator Kinerja Program : Persentase Layanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	100	100
	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100
4.1.1	Harmonisasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	9.600.000	9.530.000	98,81
	<i>Jumlah Koordinasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Dilaksanakan</i>	Kegiatan	5	5	100
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	343.064.971	342.961.571	99,78
	Indikator Kinerja Program : Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan umum	%	100	100	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>sesuai ketentuan</i>				
.5.1	Program Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp	2.100.000	2.035.000	96,90
	<i>Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Sekretariat perangkat Daerah (Skor)</i>	%	100	100	100
	<i>Nilai Sakip OPD</i>	Hasil Evaluasi Inspektorat	80	62,58	78
5.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	2.100.000	2.035.000	96,90
	<i>Presentase Layanan Umum Yang Tersedia</i>	Dokumen	14	14	100
5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	102.332.471	102.294.071	99,96
	<i>Presentase Layanan Umum yang tersedia</i>	%	100	100	100
5.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Lapangan Bangunan Kantor	Rp	6.000.000	5.999.000	99,99
	<i>Presentase Layanan Umum yang tersedia</i>	Bulan	12	12	100
5.2.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	36.109.471	36.109.471	100
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Bulan	12	12	100
5.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	6.000.000	5.982.600	99,71
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Bulan	12	12	100
5.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	6.291.000	6.291.000	100
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
5.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rp	2.000.000	1.980.000	99,98
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	Bulan	12	12	100
5.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	45.932.000	45.932.000	100
	<i>Layanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	Bulan	12	12	100
5.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	29.144.150	29.144.150	100
	<i>Presentase Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah Yang Tercukupi</i>	%	100	100	100
5.3.1	pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Kecamatan Sawahan)	Rp	29.144.150	29.144.150	100
	<i>Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Fasilitas Pengadaan Peralatan dan mesin</i>	%	100	100	100
5.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	113.126.600	113.126.600	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tercukupi</i>	%	100	100	100
5.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	27.726.600	27.726.600	100
	<i>Fasilitasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Bulan	12	12	100
5.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	85.690.750	85.690.750	100
	<i>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
5.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	96.361.750	96.361.750	100
	<i>Presentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>	%	100	100	100
5.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	68.690.750	68.690.750	100
	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
5.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	10.800.000	10.800.000	100
	<i>Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	10	10	100
5.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	16.871.000	16.871.000	100
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Unit	1	1	100

PERMASALAHAN

1. Rapat koordinasi tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak bisa dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Kegiatan rapat koordinasi tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.
2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor bisa terlaksana setelah pergeseran (PAK).



13. Kecamatan Mejayan

No.	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	97,96	120,94
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	81	97,96	120,94
		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	83	63,22	76,17

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.528.581.577	4.112.338.130	90,81
	<i>Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</i>	Nilai	81	97,96	120,94
	<i>Nilai Sakip Kecamatan</i>	Nilai	83	63,22	76,17
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	-	-	-
	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		-	-	-
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	6.411.000	6.410.641	99,99
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD</i>	Rp.	6.411.000	6.410.641	99,99
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.918.412.811	3.519.323.325	89,82
	<i>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	-	-	-
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	3.918.412.811	3.519.323.325	89,82
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-	-	-	-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Rp.	0	0	0



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah				
	<i>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	0	0	0
	<i>Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang hadir</i>				
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	137.347.766	137.117.094	99,83
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</i>				
6.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	61.505.766	61.505.766	100
	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia</i>				
6.03	Belanja perawatan rumah tangga	Rp.	3.497.900	3.497.900	100
	<i>Jumlah paket Belanja perawatan Rumah tangga yang tersedia</i>				
6.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	21.428.000	21.427.412	100
	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang tersedia</i>				
6.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Rp.	2.356.100	2.356.092	100
	<i>Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan</i>				
6.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang tersdian	Rp.	3.180.000	3.180.000	100
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan perundang-undangan yang tersedia</i>				
6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Rp.	45.380.000	45.150.000	99,49
	<i>Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasiSKPD yang disediakan</i>				
2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	53.906.500	51.349.905	95,26
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</i>				
09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.	48.340.500	45.783.805	94,71
	<i>Jumlah paket Mebel yang disediakan</i>				
09.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.566.000	5.566.000	100
	<i>Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>				



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	88.372.300	76.173.703	86,20
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</i>				
8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rupiah	31.766.300	19.740.575	62,14
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan</i>				
8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	56.606.000	56.433.128	99,69
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>				
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	53.906.500	51.349.805	95,26
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>				
9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	48.340.500	45.783.805	94,71
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				
9.06	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	5.566.000	5.566.000	100
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	59.907.200	59.906.991	100
	<i>Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan</i>				
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakann oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp	59.907.200	59.906.991	100
	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakann oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>				
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	59.907.200	59.906.991	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Laporan Efektifitas Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	92.447.200	91.396.460	98,86
	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>				
2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	60.114.700	59.064.030	98,25
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana</i>				
2.03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp	32.332.500	32.332.430	100
	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				
01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	60.114.700	59.064.090	98,25
	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.	32.332.500	32.332.430	100
	<i>Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>				
03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	17.921.000	17.921.000	100
	<i>Jumlah Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan</i>				
3.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp.	14.411.500	14.411.430	100
	<i>Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana</i>				
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	35.428.800	35.428.760	100
	<i>Persentase Layanan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				
2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Rp	15.169.900	15.169.880	100
	<i>Jumlah terselenggaranya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik</i>				

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan</i>				
2.02	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp	20.258.900	20.258.880	100
	<i>Jumlah Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlaksana</i>				
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	103.582.700	103.533.981	99,95
	<i>Persentase Layanan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>				
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp	103.582.700	103.533.981	99,95
	<i>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terselenggara</i>				
5.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp	103.582.700	103.533.981	99,95
	<i>Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa</i>				
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	32.765.300	31.714.686	96,79
	<i>Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	32.765.300	31.714.686	96,79
	<i>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp	29.106.260	28.055.646	96,39
	<i>Terselenggaranya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>				
6.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp	2.237.136	2.237.136	100
	<i>Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				

PERMASALAHAN

1. Minimnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal.



2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Mejayan (penyimpanan arsip).
3. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan.
4. Masih lemah dalam pemahaman pembuatan tata naskah dinas baik hal redaksi maupun pengetikannya.
5. Pengiriman RKP dan usulan musrenbang tingkat kecamatan tidak tepat waktu.
6. Petugas Prodeskel jarang mengupdate data sehingga data jadi tidak valid.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Mininnya anggaran maka didahulukan kegiatan yang lebih urgen dan sangat pokok.
2. Penyimpanan arsip masih disimpan di ruang kerja masing-masing Kasi dan Kasubag.
3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi.
4. Mengadakan Bimtek untuk seluruh desa khususnya kaur umum desa.



14. Kecamatan Kare

No	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	82,13	97,7
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Nilai	79	80	101,26
		Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	84	70,15	89,46

Pada Tahun 2022, Kecamatan Kare belum berhasil memperoleh pencapaian target tujuan, yaitu nilai 84. Dan hanya mendapatkan Nilai 82,13. Untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sudah memperoleh target yaitu Nilai 80 dari target Nilai 79. Sedangkan untuk indikator sasaran Nilai SAKIP, pada Tahun 2022 Kecamatan Kare mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun 2021. Namun nilai SAKIP Kecamatan Kare masih berada pada nilai BB (70,15).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	1.930.824.747	1.737.543.271	89,98
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Bulan	12	12	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.936.483	6.877.200	99,15
	<i>Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku</i>	Dokumen	14	14	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	6.936.483	6.877.200	99,15
	<i>Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku</i>	Dokumen	14	14	100
1.1.1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Rp	6.936.483	6.877.200	99,15



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku</i>	Dokumen	14	14	100
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	146.312.742	140.969.448	96,35
	<i>Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	Bulan	12	12	
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	3.876.000	3.871.300	99,88
	<i>Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik</i>	Bulan	12	12	100
1.2.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp.	42.796.442	41.605.020	97,22
	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	47.803.100	47.769.000	99,93
	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	5.406.600	5.405.000	99,97
	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	2.310.000	2.100.000	90,91
	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Bulan	12	12	100
1.2.6	Penyediaan Bahan/Material	Rp.	1.886.600	991.755	52,57
	<i>Tersedianya Bahan/Material</i>	Bulan	12	12	
1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Rp.	42.234.000	39.227.373	92,88
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Bulan	12	12	100
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	98.818.905	88.432.180	89,49
	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp.	14.384.000	9.050.020	62,92
	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumberdaya Air</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	84.434.905	79.382.160	94,02
	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	115.539.803	107.851.791	93,35
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>				
1.4.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	94.047.603	86.541.491	92,02
	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
1.4.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp.	4.364.900	4.289.900	98,28
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	Bulan	12	12	100
1.4.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan	Rp.	13.377.300	13.270.400	99,20
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya</i>	Bulan	12	12	100
1.4.4	Pemeliharaan Mebel	Rp.	3.750.000	3.750.000	100
	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Mebel</i>	Unit	1	1	100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	5.300.500	5.300.500	100
	<i>Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	Bulan	12	12	100
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Rp.	5.300.500	5.300.500	100
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Pelayanan</i>		1	1	100
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Rp.	5.300.500	5.300.500	100
	<i>Terlaksananya Rapat koordinasi Seksi Pelayanan</i>	Bulan	12	12	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	46.129.000	45.279.700	98,16
	<i>Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	Kegiatan	2	2	100
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	46.129.000	45.279.700	98,16
	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan</i>	Kegiatan	2	2	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Desa</i>				
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Rp.	46.129.000	45.279.700	98,16
	<i>Terlaksananya Musrenbang, Rapat Koordinasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan</i>	Kegiata	1	1	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	30.594.950	30.127.000	98,47
	<i>Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Kegiatan	1	1	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	30.594.950	30.127.000	98,47
	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Kegiatan	1	1	100
4.1.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Rp.	23.875.000	23.875.000	100
	<i>Terlaksananya Bimtek Satlinmas, Patroli dan Yustisi dalam Rangka Penguatan Penanganan Covid-19</i>	Kegiatan	1	1	1
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Rp.	6.719.950	6.252.000	93,04
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Kesos</i>	Kegiatan	1	1	1
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	37.378.200	34.416.300	92,08
	<i>Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Kegiatan	1	1	1
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	37.378.200	34.416.300	92,08
	<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</i>	Kegiatan	1	1	1
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	37.378.200	34.416.300	92,08
	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi Seksi Tata Pemerintahan Desa</i>	Kegiatan	1	1	1



PERMASALAHAN

Secara umum pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Kare Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami kendala . Namun bila dilihat dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, di Kantor Kecamatan Kare terdapat permasalahan kekurangan SDM yaitu kekosongan Jabatan Kasi Tata Pemerintahan serta kurangnya Staf Pengelola.

PENYELESAIAN MASALAH

Sebagai upaya penyelesaian sebagaimana tersebut di atas, untuk melaksanakan setiap kegiatan sesuai rencana program dan kegiatan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Tata Pemerintahan.

15. Kecamatan Balerejo

No.	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	81	100
2.	SASARAN OPD : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	79	75	95
		Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	84	62,28	74

Tujuan OPD Kecamatan Balerejo adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas telah tercapai 100% dari target tujuan OPD dengan sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dengan indikator sasaran 1 (satu) Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan capaian sebesar 75 dari target nilai sebesar 79 (tercapai 95%) dan sasaran 2 (dua) dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan dengan nilai target 84 dan capaian nilai 62,28, (tercapai 74%).

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	12.341.000	12.140.500	98,38
	<i>Indikator Kinerja Program : Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai ketentuan</i>	%	100	100	100
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Rp.	12.341.000	12.140.500	98,38
	<i>Jumlah Layanan Masyarakat yang berkualitas</i>	Kegiatan	6	6	100
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	12.341.000	12.140.500	98,38
	<i>Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Masyarakat</i>	Layanan	4 Jenis Layanan dan Nilai IKM (82)	4	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	31.533.896	31.302.100	99,20
	<i>Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	%	100	100	100
2.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp.	21.776.071	21.760.100	99,93
	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terselenggara</i>	%	100	100	100
2.1.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp.	5.000.000	5.000.000	100
	<i>Jumlah BUMDes yang aktif</i>	Desa	18	6	33,33
2.1.2	Penyelenggaraan Lemabaga Kemasyarakatan	Rp.	16.776.071	16.760.100	99,90
	<i>Jumlah kader PKK yang aktif dan terampil</i>	Desa	18	18	100
2.2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	9.778.825	9.542.000	97,59
	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Terselenggara</i>	%	100	100	100
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	4.212.351	4.090.000	97,59
	<i>Jumlah Rapat koordinasi yang terselenggara</i>	Kegiatan	3	3	100
2.2.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp.	2.683.474	2.572.000	95,85
	<i>Jumlah fasilitasi lomba desa yang terlaksana</i>	Desa	18	18	100
2.2.3	Peningkatan Partisipasi Masyarkaak dalam Forum Musyawarah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	2.882.000	2.880.000	99,93
	<i>Jumlah Rapat koordinasi yang terselenggara</i>	Kegiatan	3	3	100
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	21.233.300	21.048.000	99.13
	<i>Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
3.1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	21.233.300	21.048.000	99.13
	<i>Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	%	100	100	100
3.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp.	11.650.000	11.650.000	100
	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa</i>	Desa	12	12	100
3.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.	3.750.000	3.750.000	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	Desa	18	18	100
3.1.3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	2.200.000	2.088.000	94,91
	<i>Jumlah desa yang tertib administrasi</i>	Desa	18	18	100
3.1.4	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp.	3.633.300	3.560.000	97,98
	<i>Jumlah Perdes dan Perkades yang tersusun</i>	Dokumen	28	28	100
4.	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	10.456.000	10.040.000	96.02
	<i>Persentase Layanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	10.456.000	10.098.000	96.58
	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	%	100	100	100
4.1.1	Harmonisasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	1.441.000	1.382.500	95.94
	<i>Jumlah Koordinasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Dilaksanakan</i>	Kegiatan	5	5	100
4.1.2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	9.015.000	8.657.500	96.03
	<i>Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan</i>	kegiatan	6	6	100
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.	2.882.000	2.664.000	92.44
	<i>Persentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	%	100	100	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	2.882.000	2.664.000	92,44
	<i>Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terlaksana</i>	%	100	100	100
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp.	1.441.000	1.224.000	84,94
	<i>Jumlah Kegiatan Kesejahteraan Sosial</i>	kegiatan	4	4	100
5.1.2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp.	1.441.000	1.440.000	100
	<i>Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang Terlaksana</i>	Kegiatan	2	2	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	479.022.594	472.410.410	98.62
	1. Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Sekretariat perangkat Daerah (Skor) 2. Nilai Sakip OPD	%	100	100	100
6.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	7.660.261	7.647.650	99.84
	<i>Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Disusun Sesuai Peraturan</i>	Dokumen	14	14	100
6.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	7.660.261	7.647.650	99.84
	<i>Presentase Layanan Umum Yang Tersedia</i>	Dokumen	14	14	100
6.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	219.341.226	219.058.059	99.87
	<i>Presentase Layanan Umum yang tersedia</i>	%	100	100	100
6.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Lapangan Bangunan Kantor	Rp.	7.233.446	7.233.400	100
	<i>Presentase Layanan Umum yang tersedia</i>	Bulan	100	100	100
6.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	58.625.580	58.569.500	100
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Bulan	12	12	100
6.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	12.158.966	12.154.000	100
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Bulan	12	12	100
6.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	81.429.296	81.416.359	100
	<i>penyediaan bahan logistik kantor</i>	Bulan	12	12	100
6.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.147.324	9.147.200	100
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Bulan	12	12	100
6.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rp.	4.840.000	4.840.000	100
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	Bulan	12	12	100
6.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	45.906.614	45.697.600	99.54
	<i>Layanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	Bulan	12	12	100
6.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	122.258.664	119.122.101	97.43
	<i>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tercukupi</i>	%	100	100	100
6.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	38.250.000	35.176.733	91.97
	<i>Fasilitasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air</i>	Bulan	12	12	100



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>dan Listrik</i>				
6.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	84.008.664	83.945.368	99.92
	<i>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Bulan	12	12	100
6.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	30.585.684	30.565.200	99.93
	<i>Presentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>	%	100	100	100
6.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	24.835.684	24.815.200	99.92
	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Bulan	12	12	100
6.4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.750.000	5.750.000	100
	<i>Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	10	10	100
6.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	30.000.009	30.000.000	100
	<i>Presentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>	%	100	100	100
6.5.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	30.000.009	30.000.000	100
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Unit	1	1	100

PERMASALAHAN

1. Rapat koordinasi tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan sasaran kinerja Bumdes desa tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor internal desa, baik merupakan kurangnya pengelolaan internal bumdes, maupun kurangnya pengelolaan bumdes dengan baik.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Kegiatan rapat koordinasi tetap dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.
2. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor bisa terlaksana setelah pergeseran (PAK).



3.1.8 Urusan Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Kebijakan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	TUJUAN OPD: Terwujudnya Kondusifitas di Wilayah Kabupaten Madiun	Indeks Toleransi	Nilai	78,03	80,88	103,65
		Indeks Solidaritas	Nilai	87,01	88,99	103,89
2.	SASARAN OPD: Meningkatnya Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	Persentase Pemahaman Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100

(Sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian Misi 1 dan 5. Dengan indikator kinerja utama : Indeks Toleransi dan Indeks Solidaritas guna pencapaian Tujuan Perangkat Daerah yaitu Terwujudnya Kondusifitas di Wilayah Kabupaten Madiun.

1. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sejauhmana tingkat kerukunan atau harmonisasi masyarakat Kabupaten Madiun dan lingkungan dalam perikehidupan. Indeks Toleransi Kabupaten Madiun tahun 2022 diukur melalui metode survey dan analisa terhadap masyarakat Kabupaten Madiun secara langsung. Indikator dalam pengukuran Nilai Indeks Toleransi Kabupaten Madiun Tahun 2022 meliputi 5 Dimensi dengan 14 variabel didalamnya, yaitu :

a) Menghargai dan Menghormati, dengan variabel:

- Kesiediaan untuk menghargai;
- Menghargai dan menghormati;
- Berhati-hati terhadap hak orang lain.

b) Penerimaan (Menerima), dengan variabel:

- Memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang berbeda;
- Menciptakan kenyamanan;
- Tidak menggunakan kekuatan & paksaan terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang;
- Penghargaan pada keragaman budaya; dan



- Mengenali sikap tidak toleran.
- c) Jujur, dengan variabel Jujur terhadap perbedaan
- d) Teladan, dengan variabel :
 - Bersikap sebagai contoh;
 - Sabar membiarkan orang lain menjalankan agamanya;
 - Memberi kesempatan berinteraksi kepada orang lain yang berbeda.
- e) Kesetaraan, dengan variabel :
 - Tingkatan yang Sama;
 - Kerjasama

Dari hasil analisis data survey, nilai Indeks Toleransi Kabupaten Madiun pada tahun 2022 adalah 80,88 atau dengan capaian 103,65% dari target 78,03 dengan status/predikat “HARMONIS”. Terdapat 8 (delapan) variabel yang mendapatkan nilai rendah atau di bawah skor 80. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi yang disarankan untuk dilaksanakan kedepannya, antara lain :

- Pemerintah Kabupaten Madiun dan tokoh-tokoh masyarakat serta umat Islam pada umumnya untuk memberikan kesan baik mengenai agama Islam kepada masyarakat luas untuk meminimalisir kesalahpahaman yang dapat memicu Islamofobia;
- Pemerintah Kabupaten Madiun agar melakukan sosialisasi moderasi beragama secara berkesinambungan kepada masyarakat luas dengan melibatkan guru agama, penyuluh agama, dan praktisi keagamaan lainnya, baik melalui workshop, kajian keagamaan, media sosial, dan media cetak;
- Menjelang pemilu dan pilukada, Pemerintah Kabupaten Madiun harus lebih memperkuat peran media dan masyarakat sipil dalam memberitakan informasi yang berimbang dan narasi alternatif untuk menangkal narasi ujaran kebencian, tidak boleh berkaitan dengan politisasi “politik identitas” yang berpotensi menimbulkan “Polarisasi Pemikiran Masyarakat”.



2. Indeks Solidaritas

tingkat solidaritas masyarakat Kabupaten Madiun dapat menjadi bahan untuk menyusun kebijakan. Indeks Solidaritas Kabupaten Madiun adalah salah satu bentuk pengukuran bagaimana tingkat solidaritas pada masyarakat Kabupaten Madiun, sehingga mampu meminimalisasi terjadinya konflik pada masyarakat.

Variabel dalam Pengukuran Nilai Indeks Solidaritas Kabupaten Madiun Tahun 2022 meliputi : (1) Saling tolong menolong; (2) Rasa memiliki; (3) Peduli pada orang lain; (4) Bermanfaat bagi orang lain; (5) Memiliki Motivasi bersosial; dan (6) Percaya pada orang lain.

Di tahun 2022 realisasi nilai Indeks Solidaritas sebesar 88,99 atau dengan capaian 103,89% dari target 87,01. Unsur solidaritas yang dianggap paling tinggi oleh responden adalah *Memiliki Motivasi Bersosial* dengan nilai 93,00 dan nilai solidaritas sosial yang paling rendah adalah *Percaya terhadap Orang Lain* dengan nilai 83,38.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp	3.432.399.838	2.976.941.539	86,73
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Nilai	83	86,75	104,52
	<i>Kepuasan ASN Terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Nilai	88	90,53	102,88
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	111.043.895	103.878.940	93,55
	<i>Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	%	100	100	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	111.043.895	103.878.940	93,55
	<i>Jumlah Dokumen PD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>	Dokumen	4	4	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.412.507.490	2.082.125.237	86,31



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN Bakesbangpoldagri Kab. Madiun</i>	Orang	27	22	81,48
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	2.412.507.490	2.082.125.237	86,31
	<i>Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan</i>	Orang	27	22	81,48
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	364.088.343	301.318.317	82,76
	<i>Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	%	100	100	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	10.586.350	6.685.500	63,15
	<i>Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik yg Disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	108.877.295	107.504.763	98,74
	<i>Jumlah Peralatan Dan perlengkapan Kantor yg Disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	85.759.865	65.938.233	76,89
	<i>Jumlah Logistik kantor yang Disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	21.868.833	21.319.810	97,49
	<i>Jumlah Barang Cetak Dan penggandaan yang Disediakan</i>	Bulan	12	12	100
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	136.996.000	99.870.011	72,90
	<i>Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	327.009.910	294.788.602	90,15
	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	105.990.100	86.874.291	81,96
	<i>Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Dibayarkan</i>	Bulan	12	12	100
1.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	221.019.810	207.914.311	94,07
	<i>Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	217.750.200	194.830.443	89,47
	<i>Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	Bulan	12	12	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	6.160.000	6.007.400	97,52

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	133.970.200	116.631.093	87,06
	<i>Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Yang Dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.6.3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	17.620.000	13.102.700	74,36
	<i>Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Yang Dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	60.000.000	59.089.250	98,48
	<i>Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Yang Dilaksanakan</i>	Bulan	12	12	100
2.	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	139.313.350	132.719.420	95,27
	<i>Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	%	100	100	100
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	139.313.350	132.719.420	95,27
	<i>Jumlah Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Kali	3	4	133,33
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp	139.313.350	132.719.420	95,27
	<i>Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Orang	300	320	106,67
3.	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	3.032.518.531	3.021.686.900	99,64
	<i>Indeks Demokrasi Indonesia</i>	Nilai	80	80*)	100
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Rp	3.032.518.531	3.021.686.900	99,64

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik				
	<i>Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	Kali	3	3	100
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp	3.032.518.531	3.021.686.900	99,64
	<i>Jumlah anggota Partai Politik yang mengikuti sosialisasi</i>	Rp	211.210.531	200.378.900	94,87
		Anggota Parpol	16	16	100
	<i>Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik</i>	Rp	2.821.308.000	2.821.308.000	100
		Parpol	9	9	100
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp	2.777.537.000	2.671.365.192	96,18
	<i>Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina</i>	%	100	100	100
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp	2.777.537.000	2.671.365.192	96,18
	<i>Jumlah Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	Kegiatan	3	5	166,67
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp	2.777.537.000	2.671.365.192	96,18
	<i>Jumlah anggota Ormas yang dibina</i>	Rp	110.537.000	99.365.192	89,89
		Anggota Ormas	68	72	105,88
	<i>Jumlah Ormas yang mendapatkan hibah</i>	Rp	2.667.000.000	2.572.000.000	96,44
		Ormas	68	72	105,88
5.	PROGRAM PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KETAHANAN	Rp	124.125.550	122.137.770	98,40



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
	<i>Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	%	100	100	100
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp	124.125.550	122.137.770	98,40
	<i>Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>	Kali	3	4	133,33
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp	124.125.550	122.137.770	98,40
	<i>Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Orang	300	300	100
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp	2.258.391.413	1.682.135.042	74,48
	<i>Indeks Keamanan Manusia</i>	Nilai	85	85*)	100
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp	2.258.391.413	1.682.135.042	74,48
	<i>Jumlah Pencegahan konflik sosial dengan baik</i>	Rp	1.269.557.977	1.213.642.960	85,30
		Kegiatan	40	40	100
	<i>Jumlah Penanganan konflik Sosial sesuai dengan ketentuan</i>	Rp	835.658.271	468.492.082	56,06
		Kegiatan	40	40	100
6.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp	1.269.557.977	1.081.422.960	85,18
	<i>Jumlah pencegahan konflik sosial dengan baik</i>	Kegiatan	40	40	100
6.1.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Rp	835.658.271	468.492.082	56,06



No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
	<i>Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan</i>	Kegiatan	40	40	100
6.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	153.175.165	132.220.000	86,32
	<i>Jumlah Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten</i>	Kegiatan	4	6	150

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun mendapatkan nilai 86,75 (Kategori A atau memuaskan).

Capaian Nilai SAKIP perangkat Daerah Bakesbangpoldagri pada Tahun 2022 sebesar 104,52% dari target yang ditetapkan yaitu 83 nilai. Beberapa catatan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun diantaranya:

- a) Menyesuaikan *flowchart* SOP pengumpulan data kinerja tahun 2022 dengan SOTK tahun 2022;
- b) Melakukan penyempurnaan terhadap substansi laporan kinerja tahun 2021 sesuai dengan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014;
- c) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja PD ke depan.



2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Realisasi indikator kinerja Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2022 sejumlah 320 orang atau mencapai 106,67% dari target yang ditetapkan sejumlah 300 orang.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/405/KPTS/402.013/2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Tahun Anggaran 2022, ada sebanyak 9 Partai Politik dengan besaran bantuan keuangan sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 213/5095/209.2/2022 tanggal 31 Mei 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Kegiatan pembinaan terhadap partai politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan secara kontinyu, dengan harapan dapat selalu terjalin komunikasi, koordinasi yang baik dan tertib administrasi bagi Partai Politik.



4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/474/KPTS/402.013/2022 Tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2022, jumlah ormas penerima hibah tahun 2022 sebanyak 80 ormas, namun yang mencairkan sebanyak 72 ormas.
- Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan ditahun 2022 sebanyak 72 anggota ormas, atau mencapai 105,88% dari target sebanyak 68 anggota ormas.
- Salah satu kendala bagi Ormas yang tidak bisa mencairkan Bantuan Hibah yaitu dikarenakan adanya masalah dalam kepengurusan ormas, dan belum melakukan pergantian kepengurusan ormas.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Realisasi indikator jumlah peserta yang mengikuti pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2022 sejumlah 300 orang atau capaian sebesar 100% dari target sejumlah 300 orang. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebanyak 4 kali atau capaian sebesar 133,33% dari target yang ditetapkan 3 kali.



6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Realisasi indikator kinerja jumlah pencegahan konflik sosial dengan baik pada tahun 2022 sebanyak 40 kegiatan atau mencapai 100% dari target sebanyak 40 Kegiatan.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Realisasi jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan pada tahun 2022 sejumlah 40 kegiatan atau dengan capaian 100% dari target 40 kegiatan.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa sarasehan dan pembinaan IPSI, Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini, Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Kewaspadaan Daerah serta kegiatan penanganan konflik-konflik sosial yang terjadi di tahun 2022.

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Selama tahun 2022, dilaksanakan kegiatan sebanyak 6 kegiatan atau dengan capaian 150% dari target 4 kegiatan.

PERMASALAHAN :

1. Potensi – potensi konflik antara Perguruan Silat, Remaja, Ormas, Agama dan aliran Kepercayaan serta suku/ras masih rawan muncul terutama pada saat pelaksanaan Pilkadaes Serentak.
2. Belum optimalnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial yang timbul di wilayah Kabupaten Madiun.



PENYELESAIAN PERMASALAHAN :

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Sarasehan, Pembinaan, Silaturahmi kepada Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Ormas, LSM, Partai politik serta Generasi Muda secara intensif dalam upaya menangkal potensi-potensi masalah/konflik sosial yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Madiun.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Vertikal, serta membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam upaya deteksi dini dan cegah dini untuk meredam potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan yang dapat mengancam stabilitas daerah.



3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai respon dalam menyelesaikan masalah yang bersifat strategis pada Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Penyediaan penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun melalui mekanisme KPBU	Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan	Mempercepat penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun secara massif.
2.	Percepatan pelayanan perizinan kepada masyarakat	Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	Efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat yang mengurus perizinan
3.	Pengelolaan Sampah di Desa/Kelurahan	Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Desa/Kelurahan	Petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5A, Pasal 6A, Pasal 7A Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
4.	Pencapaian target pengurangan	Peraturan Bupati Madiun Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	sampah jenis plastik dan styrofoam	dan Styrofoam	diakibatkan oleh penggunaan plastik dan styrofoam
5.	Penanganan stunting	Peraturan Bupati Madiun Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Data Stunting Terintegrasi Kabupaten Madiun	Penurunan angka Stunting di Kabupaten Madiun
6.	Penanganan stunting	Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/263/KPTS/402.013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun	Penurunan angka Stunting di Kabupaten Madiun
7.	Penanganan stunting	Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/341/KPTS/402.013/2022 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 di Kabupaten Madiun	Penurunan angka Stunting di Kabupaten Madiun
8.	Penanganan stunting	Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/486/KPTS/402.013/2022 tentang Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Melalui Operasi Pasar untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022	Penurunan angka Stunting di Kabupaten Madiun



3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2021

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, dari hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menerbitkan Rekomendasi melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Akhir Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2022 sebagai perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rekomendasi dimaksud merupakan uraian catatan-catatan strategis yang ditindaklanjuti oleh Bupati Madiun dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang sebagai berikut :



INDIKATOR SASARAN		CAPAIAN KINERJA	REKOMENDASI DPRD
1)	Indeks Toleransi	Tercapai 100,05%	-
2)	Indeks Solidaritas	Tercapai 100,52%	-
3)	Nilai SAKIP	a. RPJMD dalam proses perubahan dan RENSTRA OPD harus sudah menyesuaikan RPJMD Direncanakan dengan baik agar target sasaran bisadiketahui b. Penyusunan Dokumen SAKIP waktunya pendek bersamaan dengan perubahan RPJMD	Pendampingan oleh team smart Id dan sosialisasi terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap OPD
4)	Tingkat Maturitas SPIP	Karena evaluasi atas pengendalian intern dilakukan dengan dokumentasi yang belum memadai	Sarana dan prasarana yang diperlukan supaya dipenuhi
5)	Indeks Profesionalitas Aparatur	Tercapai 60,58 Masalahnya kegiatan belajar dengan biaya mandiri sehingga ASN kurang berminat	Direncanakan dan diinferifikasi sehingga kepastian mengikuti belajar dengan biaya sendiri sesuai dengan target badan kepegawaian yang ditetapkan
6)	Nilai IKM	Tidak tercapai secara maksimal karena masa pandemi covid sehingga mengurangi untuk bertemu langsung atau bertatap muka	Dilanjutkan pada saat situasi dan kondisi yang normal
7)	Persentase Desa Mandiri	Tercapai 112,79%	-
8)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Tercapai 100,2%	-



9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Turun 1,01%	-
10)	Pengeluaran Perkapita Makanan (Target 500.000)	Tercapai 448.641 (Target tidak tercapai), dikarenakan pemberian bantuan <i>social/safety net</i> kepada masyarakat kelompok terendah tidak tepat waktu	Perlu peningkatan distribusi dan akses pangan yang mudah kepada masyarakat
11)	Indeks Kesehatan (Target 0,79)	Tercapai 0,79 (Target tercapai)	-
12)	Indeks pembangunan Gender (IPG) (Target 91,6)	Tercapai 91,7 (Target tercapai)	-
13)	Indeks Pendidikan	Tercapai 99,05% dikarenakan kondisi pandemi covid 19 dimana sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring atau secara jarak jauh, yang berakibat pada kegiatan belajar mengajar yang kurang efektif	Karena masa pandemi covid kita semuanya harus bisa menyadari karena mempertimbangkan faktor keamanan dan kesehatan anak didik dan tenaga kependidikan

No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN			
1.	Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan					
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	Indek Pendidikan	Karena Kondisi Pandemi Covid-19 dimana sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring atau jarak jauh	Kalau kondisi sudah normal sitem kegiatan belajar mengajar harus	Pembelajaran tatap muka telah mulai dilaksanakan dengan kapasitas 50% pada bulan Februari 2022 dan	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
			sehingga kegiatan belajar mengajar kurang efektif	melalui tatap muka	pada bulan April 20232 Sesuai dengan SE Mendikburistek No. 3 Tahun 2022 Pertemuan Tatap Muka Terbatas Telah dilaksanakan untuk semua jenjang dengan Kapasitas 100%	
2.	Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan					
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu dan angka Kematian Bayi	Adanya 35 kasus kematian ibu dan 66 kasus kematian bayi (Umur 0 – 12 bulan)	Upaya untuk menekan kematian ibu dan bayi selama pandemi covid-19 yang harus dilakukan dan diupayakan terus menerus adalah: <ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki sistem pelayanan persalinan kepada masyarakat, utamanya dalam rujukan pasien sehingga mendapatkan penanganan yang cepat apabila terjadi permasalahan kesehatan pada ibu 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan koordinasi dengan RS selaku Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lanjut dalam pelaksanaan rujukan ibu hamil dan melahirkan memaksimalkan fungsi puskesmas PONED sebagai rujukan ibu hamil dan melahirkan dengan cara meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> adanya perbaikan sistem rujukan terutama untuk ibu hamil dan melahirkan Pemenuhan sarana puskesmas PONED dan pelatihan petugas telah dilakukan pada 7 Puskesmas PONED di tahun 2022



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
				<p>hamil dan melahirkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan fasilitas rujukan selama masa pandemi covid-19 		
3.	Urusan PUPR Dinas PUPR					
	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	Perawatan dan Peningkatan jalan	Banyak jalan antar kabupaten belum ditingkatkan	Ada skala prioritas untuk peningkatan jalan antar kabupaten	Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan peningkatan jalan ruas : 1. Plosorejo-Batas Ponorogo. 2. Krokeh-Batas Magetan. 3. Bulu-Batas Bojonegoro.	
			Banyak jalan menuju tempat pariwisata belum maksimal	Jalan – jalan menuju tempat wisata agar segera diperbaiki dan ditingkatkan	Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan peningkatan jalan ruas : 1. Katregan-Kepel. 2. Mililir-Suluk. 3. Slambur-Segulung. 4. Krokeh-Batas Magetan.	
			Banyak kerusakan jalan yang bersifat insidental karena factor cuaca dan struktur tanah	Penambahan anggaran untuk perawatan jalan agar penanganannya lebih maksimal.	Hasil koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD, dalam P-APBD 2022 telah dilakukan penambahan anggaran untuk perawatan jalan meliputi : 1. Rekonstruksi Jalan dari Rp. 5.319.216.629,- menjadi Rp. 9.891.373.125, 2. Rehabilitasi Jalan dari Rp.	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN			
					26.575.936.755,- menjadi Rp. 31.964.436.755, 3. Pemeliharaan Berkala Jalan dari Rp. 6.267.952.432,- menjadi Rp. 7.767.952.432, 4. Pemeliharaan Rutin Jalan dari Rp. 8.619.413.983,- menjadi Rp. 16.796.680.463,-	
				Dibentuk Satgas perawatan jalan dengan melibatkan UPT yang ada	Sudah dibentuk Satgas Pemeliharaan Jalan pada masing-masing UPT Pengelolaan Jalan sesuai SK Kepala Dinas PUPR Nomor 188.45/12/KPTS/402.104/2021 dan diubah dengan SK Kepala Dinas PUPR Nomor 188.45/25A/KPTS/402.104/2021	
		Perawatan dan perbaikan jembatan	Banyak jembatan-jembatan yang mengalami kerusakan	Ada skala prioritas untuk rehab dan perbaikan jembatan	Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan rehab dan pemeliharaan jembatan, meliputi : 1. Jembatan di Ruas Jalan Tiron-Banjarsari. 2. Jembatan di Ruas Jalan Balerejo-Tulungrejo.	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN		
				Ada perawatan jembatan secara berkala	Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan perawatan jembatan Kajang, Kecamatan Sawahan.
	Pembangunan badan badan sungai dan saluran irigasi	Perbaikan penahan badan badan sungai	Banyak penahan – penahan sungai /tanggul mengalami kerusakan sehingga menyebabkan banjir	Perbaikan tanggul tanggul / penahan sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	Menurut Permen PUPR Nomer 04/PRT/M/2015 Semua sungai menjadi kewenangan pusat atau masuk WS Bengawan Solo, tidak ada sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di kabupaten Madiun
				Selalu koordinasi dengan pihak terkait, terkait penanganan sungai sungai diluar kewenangan pemerintah daerah agar segera diadakan penanganan	Menurut Permen PUPR Nomer 04/PRT/M/2015 Semua sungai menjadi kewenangan pusat atau masuk WS Bengawan Solo, tidak ada sungai yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di kabupaten Madiun
		Normalisasi sungai – sungai	Banyak sedimen – sedimen sungai yang belum dilakukan pengerukan sehingga menyebabkan banjir	Segera dilaksanakan pengerukan untuk normalisasi sungai	Sudah dilakukan pengerukan/ normalisasi pada saluran yang membutuhkan penanganan sepanjang + 3000 m
				Dibentuk satgas penanganan sungai-sungai	Perlunya dibentuk komunitas peduli sungai
		Perbaikan saluran	Banyak saluran - saluran	Segera diadakan	Sebagian sudah di petakan melalui aplikasi E-Paksi dan



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
		irigasi	irigasi teknis mengalami kerusakan	pemetaan terkait kerusakan kerusakan tersebut agar segera di perbaiki dengan didukung anggaran yang memadai.	sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan rehabilitasi melalui sumber dana APBD dan APBN (IPDMIP dan DAK).	
			Kurangnya petugas pengatur / penjaga pintu air	Penambahan / pengadaan petugas-petugas pintu air	Sudah dilakukan pengusulan tenaga kontrak untuk petugas-petugas pintu air ke BKD dan terealisasi ada 10 PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di 2 UPT Wilayah SDA	
	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur gedung / kantor-kantor di dinas / BUMD di Kabupaten Madiun	Masih banyak pembangunan gedung yang kualitasnya kurang maksimal	System perencanaan harus benar-benar dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan konstruksi yang ada	Dinas PUPR melalui Bidang Cipta Karya akan lebih selektif untuk memilih konsultan perencana, hal ini sudah dilakukan Dinas PUPR melalui Bidang Jasa Konstruksi melaksanakan penilaian kinerja Jasa Konsultansi setiap tahun.	
				Peningkatan pengawasan terhadap pekerjaan dilapangan secara maksimal	Dalam hal Pengawasan di lapangan Dinas PUPR tetap selektif dalam memilih Jasa Konsultan Pengawas, dimana dalam pengawasan dilapangan Bidang Cipta Karya juga membentuk Tim Teknis yg terdiri dari PPK,	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN			
					PPTK dan Anggota Tim Teknis.	
				Bersifat tegas terhadap kontraktor – kontraktor yang tidak mengindahkan saran – saran konsultan pengawas	Teguran terhadap Kontraktor yang tidak mengindahkan saran dari konsultan pengawas, akan ditindak lanjuti Dinas PUPR melalui PPK dengan mengadakan rapat kordinasi. Melalui Bidang Jasa Konstruksi Penilai Kinerja Kontraktor dilakukan setiap tahun.	
				Selalu koordinasi dengan dinas teknis jika terjadi permasalahan dilapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan komunikasi menjadi tolak ukur utama dalam pelaksanaan di lapangan, dalam hal penyelesaian permasalahan tim yg terlibat dalam pelaksanaan dilapangan harus menjadi satu tim yaitu Kontarktor, Konsultan Pengawas dan Dinas PUPR. • Rapat Koordinasi pada saat pelaksanaan dilaksnakan 2 (dua) kali dalam satu bulan untuk membahas progres perkembangan pelaksanaan maupun permasalahan- 	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI			
					permasalahan yang mungkin muncul.		
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pengadaan tanah	Pengadaan tanah untuk Polres Madiun	Pengadaan tanah belum dilaksanakan karena harga dari Apresial tidak disetujui oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengadaan tanah hendaknya dianggarkan pada tahun berikutnya 	Tahun ini dilakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah sesuai dengan amanah dari PP. 19 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum. Sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan, dan penentuan harga sudah mempertimbangkan lokasi. Pengadaan Tanah tidak terealisasi karena tidak dianggarkan.	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah telah diselesaikan langkah selanjutnya sosialisasi dan penganggaran untuk pengadaan tanah.	
<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pendekatan kepada masyarakat terkait harga tanah dari Apresial 							
<ul style="list-style-type: none"> Penentuan lokasi harga dari Apresial dibuatkan bidang dengan membedakan tanah sesuai lokasi 							
5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Pelayanan terhadap	Respon Time	Karena luas wilayah				
					Ditambah Pos Pemadam	1. Pada tahun 2022 ada	1. Penanganan



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
	kebakaran dan non kebakaran	Rate terhadap penanganan Kebakaran non kebakaran	kabupaten Madiun yang hanya mempunyai 2 wilayah Manajemen Kebakaran sehingga jangkauan dan waktu tanggap kurang dari target	kebakaran disesuaikan dengan luas wilayah kabupaten Madiun	<p>penambahan 1 (satu) unit mobil water supply Damkar untuk meningkatkan pelayanan Pemadaman Kebakaran.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan kualifikasi Pemadam I di Balai Diklat Damkar DKI Jakarta.</p> <p>3. Pada tahun 2023 melalui Dana DBHCHT dianggarkan untuk membangun Pos Damkar yang berlokasi di Dolopo (Pasar Hewan). Dan pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran.</p>	<p>pemadaman kebakaran semakin cepat.</p> <p>2. Respon time 15 menit bisa dicapai. Karena semakin cepat respon time mengindikasikan semakin baik kinerja pemadam kebakaran dalam melayani masyarakat.</p>
	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase laporan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditindak lanjuti	Karena laporan masyarakat bukan kewenangan dari Satpol PP	Kordinasi,fasitasi dan kerja sama dengan Trantib dan OPD yang menjadi kewenangan	Telah melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain baik melalui kegiatan pencegahan maupun penindakan.	Mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat dan meningkatkan angka indeks stabilitas.
	Kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Persentase laporan peristiwa kebakaran	Cakupan wilayah Manajemen Kebakaran	Mengusulkan penambahan personil Satpol PP dan	1. Pada tahun 2022 ada penambahan personil pemadam kebakarn	1. Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran semakin cepat karena



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
	dan non kebakaran	dan non kebakaran yang di tindak lanjuti dalam kurun waktu 15 menit	Kabupaten Madiun baru 2	Pemadam Kebakaran dan meningkatkan SDM	sebanyak 2 (dua) orang ASN. 2. Mengirimkan personil Damkar sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang untuk mengikuti diklat pemadam kebakaran.	masing masing personil sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
6.	Urusan Sosial Dinas Sosial					
	Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Penanganan Bencana (sosial dan alam)	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terjadinya peningkatan jumlah KeluargaPenerima Manfaat (KPM)	Diupayakan dilakukan verifikasi data 3-6 bulan sekali dari Dinsos yang dikoordinasikan dengan Desa / Kelurahan.	Dilakukan Verval terhadap penerima manfaat PBID	Perbaikan Data penerima manfaat PBID. Hasil verval data, jumlah penerima PBID tahun 2022 sejumlah 48.000 PM.
			Di masa PPKM hal ini disebabkan : • Data dari Dinkes untuk perorangan sedangkan Dinsos paket sembako untuk 1 KK • Adanya data dobel nama dari Dinkes		Untuk tahun 2022, tidak ada pemberian bantuan bagi korban Covid-19	Telah membuat Telaahan Staf kepada Bapak Bupati melalui Bapak Sekretaris Daerah, adapun disposisinya "Tidak boleh digeser, menunggu status pencabutan Pandemi".
	Rehabilitasi Sosial,	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan	Belum punya tempat penampungan ODGJ, PMKS	Perlu dibangunnya tempat Shelter	Sudah dibangun Ruang Isolasi untuk penanganan PPKS	Bisa digunakan untuk menampung PPKS terlantar sebelum



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
		Kesejahteraan Sosial (PPKS)				direhabilitasi ke UPT
7.	Urusan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja					
	Pengurangan pengangguran	Persiapan tenaga kerja terampil dan pengurangan pengangguran	Kurang tersedianya tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan	Menyiapkan tenaga kerja yang profesional dengan didukung oleh anggaran yang memadai	Saran diperhatikan dengan tindak lanjut mengadakan Pelatihan terhadap pencaker pada tahun 2022 sebagai berikut : Tata rias, prosesing, menjahit, Design Grafis, Menjahit (Upper), Outsole, Outsole / Asembling, membatik dan pande besi.	
			Kurangnya anggaran untuk pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja	Adanya penambahan anggaran yang memadai terkait kegiatan-kegiatan pelatihan	Telah diberikan penambahan penganggaran pelatihan Kerja dari dana PAD dan DBHCHT untuk mengatasi pengangguran dan inflasi.	
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKB, PPPA					
	Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan layanan bagi anakyang perlu	Masih tingginya angka perkawinan anak di	Sosialisasi dan advokasi dalam upaya pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MOU dengan Pengadilan Agama dalam upaya 	Dengan adanya kebijakan Dispensasi Perkawinan



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
		pendampingan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Madiun sebanyak 175 dan angka stunting 16,9% di tahun 2020	perkawinan anak dan stunting	<p>pengecahan perkawinan anak mulai tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi melalui Instagram, KIE melalui Leaflet, Konseling bagi Catin dimohonkan dispensasi dan orang tua 	<p>maka dapat menekan jumlah perkawinan anak. Berdasar data tahun 2022 terdapat pemohon dispensasi perkawinan sebanyak 120 pasangan dan yang mendapat dispensasi karena hamil sebanyak 46 pasangan dan karena melahirkan sebanyak 4 pasangan.</p>
			Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan	Dengan mewujudkan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Kecamatan Layak Anak melalui Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, Sekolah Ramah Anak, Desa Kelurahan Layak Anak. • Bimtek Pesantren Ramah Anak bagi Pengurus Pengasuh Pontren • Memaksimalkan peran forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Kecamatan Layak Anak • Terbentuknya Pesantren Ramah Anak • Terbentuknya Sekolah Ramah Anak
				Membentuk dan mengaktifkan Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop dan Sosialisasi PATBM bagi Desa/Kel dan 	Dengan adanya PATBM kesadaran masyarakat



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
				Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 40 Desa / Kelurahan	<p>Penanda tangenan Komitmen Pembentukan PATBM Desa/ Kelurahan se Kabupaten Madiun</p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk MOU (dengan RSUD Dolopo dan RSUD Caruban) terkait visum et repertum dan PKS (dengan Lembaga Masyarakat) tentang program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta pemenuhan hak anak 	untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun 2021 sebanyak 15 menjadi 27 kasus di tahun 2022.
9.	Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					
	Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita makanan	Dari target 500.000 terealisasi 448.641	Peningkatan ketersediaan distribusi dan akses pangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga daya beli masyarakat melalui Pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif) Melaksanakan Program Pekarangan Lestari untuk 	Kurangnya pengeluaran Perkapita makanan



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
					<p>Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar, terutama komoditas peyumbang inflasi seperti cabai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan kegiatan pelatihan olahan pangan lokal agar dapat menambah nilai jual suatu komoditas pangan sehingga pendapatan juga bertambah 	
10.	Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup					
	Persampahan	Pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah belum bisa mencakup seluruh wilayah kabupaten madiun	Penambahan SDM dan Infrastruktur persampahan agar cakupan pelayanan lebih maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tenaga pengemudi pick up sampah 10 orang • Tenaga kontrak untuk TPST3R di Banaran Balerejo 1 orang • Penambahan sarana prsarana persampahan berupa kendaraan pengangkut sampah dan 	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI			
					container (Truk 4 unit, container pick up 47 buah, pick up amrol 4 unit, truk amrol 2 unit.		
				Segera dimanfaatkan TPA diMadiun Selatan	Terkendali ijin lingkungan sekitar TPA Selatan		
				Banyak masyarakat yang membuangsampah tidak pada tempatnya	Segera dilaksanakan Perda no 4 Tahun 2021 terkait penanganan sampah	Sudah dilaksanakan sosialisasi dengan bank sampah-bank sampah Kabupaten Madiun.	
				Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau yang ada di beberapa tempat di Kabupaten Madiun belum selesai pembangunannya sehingga belum memiliki ciri khas	Segera dilanjutkan penyelesaian beberapa RTH yang belum selesai	Pembangunan RTH akan dilanjutkan secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
				Masing – masing Ruang terbuka hijau seharusnya memiliki ciri khas yang jelas sehingga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar	Akan dioptimalkan pembangunan RTH pada masing-masing wilayah dengan disesuaikan kekhasan dan kebutuhan wilayah/daerah masing-masing		
11.	Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan						



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
	Peningkatan Pelayanan, Kelaikan Kendaraan Dan Sarana Prasarana Mutimoda Angkutan	Peningkatan sarana dan Prasarana	Pembangunan palang pintu Rel Kereta Api	Segera di bangun 5 titik lokasiperlintasan sebidang untuk keselamatan pengguna jalan	Masih menunggu BKK dari Provinsi.	Untuk meminimalisir Kecelakaan yang terjadi diperlintasan kereta api.
			Gedung masuk ke pengujian kurang maksimal	Perlu segera dibangun tempat uji kendaraan yang representative sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sebagai bentuk pelayanan ke masyarakat sekaligus meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
12.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro					
	Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan target 30, realisasi 14	Sasaran sub pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan adalah pedagang kaki lima (PKL) dengan diberikan bantuan	Sudah dipenuhi pada tahun 2022 dengan jumlah 33 unit	Mencukupi kekurangan penyediaan booth container pada tahun 2021



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
				berupa booth container sebanyak 14 unit. Hal ini disesuaikan dengan anggaran yang ada hanya mencukupi untuk 14 unit.		
				Untuk mencukupi target 30 perlu adanya penambahan anggaran		
13.	Urusan Penanaman Modal					
	PDAM					
	Peningkatan PAD	Peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih pada masyarakat	Sumbangan air ke masyarakat masih belum maksimal	Peningkatan dan penambahan jaringan & kualitas air untuk terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggungjawab dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat sekaligus penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perlu segera dilakukan penatalaksanaan unit usaha baru sebagai upaya untuk mendapatkan sumber Pendapatan Asli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan dan penambahan jaringan dan kualitas air sudah direncanakan Tahun 2023. Pengembangan cakupan pelayanan meliputi desa Krokeh, Kanung Kecamatan Sawahan dan Desa Wayut Kecamatan Jiwan. ▪ Pelaksanaan Program MBR 2023 sebanyak 2.000 unit untuk meningkatkan PAD PERUMDAM. ▪ Meningkatkan Penjualan Air 	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
				Daerah (PAD)	Minum Yoiki	
	PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Madiun					
	Peningkatan PAD	Meningkatkan pelayanan dan kepada nasabah	Pelayanan yang kurang maksimal	Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) harus bisa menciptakan terobosan dan mengembangkan pelayanan berbasis berbasis IT (Fintech) Mengoptimal potensi yang sudah ada (SDM dan saranadan prasarana)	Kegiatan BPR Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang antara lain: Target Jangka Pendek 1. Penurunan Non Performing Loan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas asset produktif BPR. • Mapping Area Penagihan dan meningkatkan Frekwensi Penagihan dengan efektif dan efisien. • Meningkatkan kualitas penggunaan IDEB SILK dalam melakukan analisa kredit. • Menseleksi debitur dengan ketat yang layak mendapatkan program restrukturisasi sehingga 	Peningkatan PAD



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN		
				<p>BPR bisa survive dan diharapkan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut tidak mempengaruhi likuiditas BPR.</p> <p>2.Peningkatan Fungsi Intermediasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan penghimpunan Dana Murah.• Melakukan terobosan dalam upaya peningkatan kemampuan pendanaan.• Meningkatkan produktivitas penyaluran kredit secara prudent.• Meningkatkan kualitas dan diversifikasi Produk <p>3. Peningkatan Efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi dan efisiensi biaya, dengan melakukan beberapa inisiatif untuk melakukan penghematan biaya.• Meningkatkan penghimpunan dana murah	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN			
					sehingga COF menurun. <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat retail untuk memperbaiki rasio dana murah. • Meningkatkan fee based income BPR 4. Meningkatkan PAD secara berkesinambungan Target Jangka Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat standar layanan melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. • Memperkuat penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan. • Optimalisasi dan memperkuat Struktur Organisasi Tata Kelola BPR. • Optimalisasi dan memperkuat pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. • Optimalisasi penerapan kebijakan dan prosedur 	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN			
					manajemen risiko. • Optimalisasi dan memperkuat penerapan ketentuan intern manajemen resiko Target Jangka Panjang • Memperkuat brand Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan standar layanannya sehingga dalam jangka panjangnya akan menjadi partner keuangan pilihan utama masyarakat Kabupaten Madiun. • Menjadi Bank dengan layanan one stop financial solution kepada nasabah.	
	PD. Umbul Square Kabupaten Madiun					
	Peningkatan PAD		Pemanfaatan sumber daya yang sudah ada perlu terus di tingkatkan	■ Perlu dilakukan penyesuaian regulasi yang ada yang ada untuk menjawab	1.Membuka stand photo booth & foto bersama satwa 2.Mengadakan show satwa untuk menarik minat pengunjung 3.Road Show Edu Zoo ke	Peningkatan PAD



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN			
				perkembangan kondisi saat ini yang mana Umbul Square sebagai Lembaga Konservasi & BUMD yang harus menyetorkan PAD	lembaga pendidikan & non pendidikan 4. Upaya penambahan koleksi satwa lewat BKSDA 5. Membuka stand <i>Fiding Time</i> untuk menambah pendapatan	
	RSUD Caruban					
	Peningkatan SDM dan Pengembangan Rumah sakit Caruban	Peningkatan sarana prasarana rumah sakit	Peningkatan pelayanan pada masyarakat	Perlu dibuat terobosan untuk mengurangi daftar tunggu antrian pasien	Telah di buat antrian pendaftaran online melalui JKN mobile dan penyediaan anjungan pendaftaran mandiri sebanyak 2 unit sehingga masyarakat tidak perlu lagi antri di loket pendaftaran dan pendaftaran online dapat di lakukan H-3 s/d H-1 sebelum pelayanan.	Percepatan waktu tunggu proses pelayanan
			Klaim covid - 19 belum optimal	Tata kelola administrasi terkait covid -19 harus di tingkatkan	Telah dilakukan perbaikan pengelolaan administrasi proses klaim COVID-19 dan klaim COVID-19 s/d tahun 2022 telah ditransfer semua ke Rekening BLUD	Peningkatan target capaian pendapatan
			Penyediaan SDM pelayanan			



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
			khususmasih belum tercukupi	Dengan pemberlakuan kelas standart oleh BPJS kesehatan mulai bulan Januari tahun 2023, maka diperlukan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit menyesuaikan ketentuan dalam penetapan kelas standar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakit.		
				Masih terbatasnya ruang inap Paviliun untuk pemenuhan harapan masyarakat akan pelayanan eksklusif.		
	RSUD Dolopo					
	Meningkatkan standart pelayananMinimal Rumah sakit	Meningkatkan kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan	Perlu peningkatan pelayanan	Agar kepuasan pelanggan pada Instalansi rawat jalan terpenuhi	Pendaftaran online rawat jalan, perluasan ruang tunggu.	Antrian pasien dapat terurai dengan adanya pendaftaran online, ruang



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
		kesehatan				tunggu pasien rawat jalan lebih nyaman.
				Agar kepuasan pelanggan pada instalasi rawat inap terpenuhi	Pembangunan Gedung Rawat Inap	Ruang rawat inap pasien layak dan sesuai standar.
14.	Urusan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
		Indek Pendidikan	Karena Masa Pandemi Covid 19 dan Dinas Perpustakaan hanya fungsi support dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Diperlukan kordinasi antar OPD	Untuk mendukung tetap berjalannya kegiatan belajar mengajar meski dilakukan di rumah pada saat Pandemi Covid Bidang Layanan Perpustakaan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengadakan droping rolling buku ke sekolah – sekolah (jemput bola) supaya siswa siswi khususnya SD tidak ketinggalan pengetahuan yang seharusnya mereka mengerti dan pahami kami droping di sekolah yang pada saat itu termasuk zona hijau.	
	Meningkatnya tata kelola kearsipan	Nilai audit kearsipan Ekternal	Karena adanya perubahan komponen penilaian ekternal bagi Kab/Kota dari Dinas	Memaksimalkan SDM untuk segera menyesuaikan mema-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilaksanakan Upaya memaksimalkan SDM yang ada untuk memahami 	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
			Perpustakaan Propinsi Jawa Timur	Perubahan komponen penilaian pada Audit Kearsipan Eksternal	<p>perubahan. Komponen penilaian, sehingga pada tahun 2022 sudah mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 nilai audit kearsipan eksternal sebesar 71,64 sedangkan nilai tahun 2022 sebesar 75,85 (sangat baik / BB).</p> <ul style="list-style-type: none"> Perubahan komponen dimaksud adalah bahwa nilai hasil pengawasan merupakan gabungan /akumulasi dari nilai pengawasan eksternal dari provinsi dengan bobot 60% dengan nilai pengawasan internal dengan bobot 40%. 	
15.	Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga					
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Permasalahan yang dihadapi adalah belum tercapainya jumlah kunjungan wisata sesuai harapan (karena masa Pandemi)	<p>Disparpora tetap melaksanakan upaya untuk menarik pengunjung wisata dengan meningkatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana pariwisata 	<p>Disparpora telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dengan upaya pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata,</p>	<p>Meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang berpengaruh pada pendapatan retribusi pariwisata</p>



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN			
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan SDM Pariwisata • Melakukan promosi melalui media cetak, elektronik dan media sosial lainnya 	melakukan pembinaan SDM Pariwisata melalui pelatihan Pemandu Gunung, dan pelatihan pembuatan korek dongkrek, serta melakukan promosi wisata melalui media cetak, media elektronika dan media social.	
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentasi pemuda yang berprestasi	Target persentase pemuda berprestasi 5% realisasi 2,5% atau hanya 50%	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya membentuk Lembaga Pemuda Mandiri • Melakukan pembinaan terhadap organisasi Olahraga untuk meningkatkan prestasi dibidang olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Diawali dengan melaksanakan forum pemuda dengan mendatangkan anggota organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Madiun • Menyelenggarakan kejuaraan di cabang olahraga Volley, bulu tangkis dan pencak silat. Serta mengikuti kejuaraan cabang olahraga tingkat propinsi, seperti kickboxing, senam, yudo, mengikuti beberapa kejuaraan porprov jatim, mengikuti kejuaraan Popda Jatim serta 	Meningkatkan atlit dan pemuda yang berprestasi



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
					mengikuti kejuaraan di Peparpeda (Pekan Paralimpik Pelajar Daerah) Jatim	
16.	Urusan Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan					
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yangmendapatkan sarana pertanian	Kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian 3,62% dari target 8,14%.	Minimnya inovasi dan belum maksimalkan tehnologi pertanian dalam menjangkau petani	Tahun 2021 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian hanya dilaksanakan dari sumber dana DBHCHT, kedepan akan dialokasikan juga dari sumber dana DAU agar bantuan alat maupun inovasi ke petani lebih banyak lagi.	Target persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian akan tercapai
				Memberikan bantuan tehnologipertanian baik berupa alat maupun inovasi		
17.	Badan Kepegawaian Daerah					
	Mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara	Indeks profesionalisme ASN	Perubahan sistem penilaian dari BKN yang dulu dilakukan mandiri secara Manual	OPD terkait harus menyesuaikan regulasi dari BKN	Badan Kepegawaian Daerah memberikan surat kepada opd untuk memerintahkan setiap	untuk menampah kapasitas dan kualitas masing masing ASN kabupaten



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
					ASN untuk mengupload data melalui Umpeg masing masing.	yang profesional dan nilai indeks Profesional ASN meningkat
	Meningkatnya kwalifikasi	Nilai dimensi Kwalifikasi	Sedikitnya ASN yang melanjutkan Studikarena perihal anggaran	Direncanakan dengan baik agartarget sasaran bisa diketahui	BKD telah memberikan sosialisasi tentang persamaan gelar bagi ASN yang linier untuk klas jabatan sehingga nilai pendidikan yang dimiliki ASN Kab Madiun menjadi naik	Meningkatkan nilai Indikator Kualifikasi yaitu pendidikan ASN sehingga target nilai dimensi kualifikasi ASN kab. Madiun terpenuhi
	Meningkatnya kompetensi	Nilai Dimensi Kompetensi	Karena keterbatasan anggaran dan masih kurang respon ASN melaporkan Kompetensi yang diikutinya	Memotifasi dan menghimbau ASN untuk melaporkan kwalifikasi dan kompetensi yang di ikuti	BKD telah memberikan surat ke semua OPD agar bagi OPD yang Mengadakan Bintek Sosialisasi untuk di buat kan Piagam elektronik dan bisa di cetak masing masing peserta untuk di apload ke mySAPK	Meningkatkan nilai dimensi Kompetensi ASN yaitu tentang Kediklatan ,Bintk yang di miliki setiap ASN dalam setahun terpenuhi 25 JP
18.	Inspektorat					
	Pengukuran maturitas lingkungan pengendalian	Tingkat maturitas SPIP	Karena evaluasi atas pengendalian intern dilakukan dengan dokumentasi yang belum memadai	Sarana dan prasarana yang diperlukan supaya dipenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Alat pendukung. 2. Mengintensifkan Sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern kepada Perangkat Daerah guna pencapaian tingkat maturitas SPIP yang lebih baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Laptop dan Sarana prasaran pendukung lainnya. 2. Membangun Kerjasama yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
						Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
19.	Bagian Hukum					
	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang akuntabel	Nilai Sakip	RPJMD dalam proses perubahan dan RENSTRA OPD harus sudah menyesuaikan RPJMD Direncanakan dengan baik agar target sasaran bisa diketahui	Pendampingan oleh team smartId dan sosialisasi terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap OPD	Telah dilakukan Evaluasi oleh Tim Smart Id kepada OPD di Tahun 2022 dan renstran OPD telah menyesuaikan RPJMD perubahan	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Penyusunan Dokumen SAKIP waktunya pendek bersamaan dengan perubahan RPJMD		Akan disusun time line penyusunan dokumen SAKIP yang lebih komprehensif	
20.	Bagian Administrasi Pemerintahan					
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel	Nilai Sakip	RPJMD dalam proses perubahan dan RENSTRA OPD harus sudah menyesuaikan RPJMD Direncanakan dengan baik agar target sasaran bisa diketahui	Pendampingan oleh team smartId dan sosialisasi terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap OPD	Telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi	
			Penyusunan Dokumen		Akan disusun time line	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
			SAKIP waktunya pendek bersamaan dengan perubahan RPJMD		penyusunan dokumen SAKIP yang lebih komprehensif	
		Prosentase rumusan kebijakan Bidang Pemerintahan yang di tindak lanjuti	Direncanakan dengan baik agar targetsasaran bisa diketahui Anggaran kena refokusing sehingga	Dilanjutkan tahun berikutnya	Ditindaklanjuti dengan perencanaan yang lebih terukur dan target dan realisasi ditahun berikutnya telah sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan data yang disampaikan	
21.	Bagian Organisasi					
	Mewujudkan pemerintah yang akuntabel	Nilai Sakip	RPJMD dalam proses perubahan dan RENSTRA OPD harus sudah menyesuaikan RPJMD Direncanakan dengan baik agar target sasaran bisa diketahui	Pendampingan oleh team smart dan sosialisasi terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap OPD	Telah dilakukan pendampingan kepada beberapa OPD saja dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran, tetapi melalui pendampingan intens tersebut Nilai Sakip Kabupaten Madiun di tahun 2022 menjadi naik 2,97 Point dari 73,06 menjadi 76,03	
			Penyusunan Dokumen SAKIP waktunya pendek bersamaan dengan perubahan RPJMD		Penyusunan Dokumen Pendukung SAKIP yaitu Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 80 % dilaporkan tepat waktu ke Kemenpan dan Tim Sakip kab Madiun	
22.	Bagian Kesejahteraan					



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
	Rakyat					
	Program kesejahteraan rakyat	Peningkatan	Pemberian jasa / honor kepada ustadz- ustadzah guru TPA –TPQ yang masih minim	Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan lembaga keagamaan perlu ditingkatkan / dinaikan untuk jasa / honor para tenaga-tenaga pengajar (ustadz-ustadzah guru TPA –TPQ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan bahwa bidang keagamaan seharusnya juga telah diakomodir pengembangannya melalui ADD/DD di Pemerintahan Desa. 2. Pada Tahun 2022 untuk jasa / honor para tenaga-tenaga pengajar (ustadz-ustadzah guru TPA–TPQ) dinaikkan sebesar 14 % menjadi sebesar Rp. 400.000,00/Orang dari sebelumnya sebesar Rp. 350.000,00/Orang 	Diharapkan dapat secara tidak langsung mendorong semangat para ustadz/ustadzah guru TPA/TPQ dalam meningkatkan indeks pengembangan Manusia di Kabupaten Madiun
23.	Badan Pendapatan Daerah					
	Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Penyelenggaraan Penetapan PBB P2	Masih banyak data PBB-P2 yang ganda dan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.	Updating data wajib pajak khususnya wajib pajak PBB- P2 untuk terus dilakukan sampai target di 15 kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan pendataan massal door to door di awal. 2. Pembuatan peta digital 3 kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan data wajib pajak yang akurat sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak sebenarnya.



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
				selesai.	3. Sosialisasi EPM elektronik Pembayaran Mandiri yaitu pelayanan online PBB tanpa datang ke kantor. 4. Pendataan langsung ke desa. 5. Pendataan dan penilaian obyek khusus	2. Pemutakhiran data bermanfaat untuk perbaikan pelayanan wajib pajak seperti mempermudah proses verifikasi BPHTB. 3. Pemutakhiran data dapat meminimalisir kesalahan maupun permasalahan yang timbul di saat penagihan pajak.
			Masih banyak objek Pajak yang perlu segera di validasi ulang.	Diklat Tim Pemeriksa & JuruSita untuk segera dilaksanakan	1. Diklat Pemeriksa dan JuruSita Pajak telah dilaksanakan bekerjasama dengan STAN. 2. Diklat diikuti oleh personil dari Bapenda, 2 personil BPKAD dan 2 personil Satpol PP sebagai perangkat daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah	1. Diklat sebagai persyaratan administratif untuk pemeriksa dan jurusita 2. meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak / retribusi daerah 3. meningkatnya kualitas dan profesionalisme karyawan dalam menjalankan tugasnya,



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
						sehingga dapat mempercepat penyelesaian pemeriksaan pajak /retribusi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak / retribusi daerah
				Perlu segera diadakan kajian Naskah Akademik sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)		
24.	Sekretariat DPRD					
	Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Perlu peremajaan barang-barang inventaris kantor yang fungsinya sudah tidak maksimal	Perlu pergantian secara bertahap	Rekomendasi kami perhatikan dan telah kami tindak lanjuti dengan menganggarkan dan melaksanakan sebagai berikut : 1. Rehabilitasi ruang ketua DPRD, 2. Pembangunan tempat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi DPRD



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
					parkir kendaraan, 3. Pembuatan taman, 4. Rehabilitasi bangunan kantor, 5. Pengadaan meubel, 6. Pengadaan pakaian dinas, 7. Pengadaan alat alat kantor	
25.	BPKAD					
	Penatausahaan Aset dan Akuntansi	Pengelolaan Administrasi Pelaporan Aset	Masih adanya asset yang belum tersertifikatkan.	Sertifikasi semua asset daerah untuk terus dilakukan sebagai upaya menyelamatkan semua asset daerah	1. Inventarisir Aset yang Belum bersertifikat. 2. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (PUBMCK, DINDIK, BPN) 3. Melakukan Percepatan Pensertifikatan	Tahun 2022 Target awal Pensertifikatan : 250 Bidang, diakhir tahun 2022 berhasil menyelesaikan / terbit sertifikat sebanyak 1.407 Bidang
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Kajian	Penelitian dan kajian yang dilaksanakan belum sepenuhnya dijadikan acuan oleh semua OPD	Penelitian dan kajian harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati agar hasil dari kajian dapat dijadikan acuan bagi semua OPD dalam melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Upaya yang dilakukan dengan mengirimkan surat kepada perangkat daerah untuk menggali kebutuhan penelitian/kajian setiap bulan januari awal tahun anggaran sebagai database Kelitbang pada aplikasi. Pelaksanaan kajian 	Pelaksanaan kajian oleh bidang litbang bappeda didasarkan pada kebutuhan PD sehingga hasil kajian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan perangkat daerah pengusul kajian.



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021			TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN			REKOMENDASI
				semua program dan kegiatannya	<p>berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil kajian menjadi bahan kebijakan Bupati untuk ditindaklanjuti OPD terkait dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan OPD. 	
	Perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan kegiatan	Kurangnya koordinasi antar OPD khususnya terkait penyiapan dokumen	Meningkatkan fungsi koordinasi antar OPD tentang sebuah program kegiatan yang saling terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah telah dilaksanakan berupa pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dimulai dari rancangan awal renja sampai dengan penetapan renja sebagai dasar penyusunan rancangan KUA PPAS • Pendampingan capaian kinerja perangkat daerah dengan mengedepankan pendekatan CROSSCUTTING kepada perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah yang dilaksanakan melalui penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang harus menjadi acuan bagi perangkat daerah.
				Berikan sanksi bagi OPD yang menghambat fungsi koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi perangkat daerah ditindak lanjuti sesuai dengan langkah mempertimbangkan pengurangan anggaran pada perangkat daerah 	



No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021				TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	CATATAN/ TEMUAN	REKOMENDASI		
					tanpa mengurangi capaian indikator utama. <ul style="list-style-type: none"> Fungsi pengawasan oleh Inspektorat lebih dioptimalkan. 	
27.	15 Kecamatan		IKM kecamatan	Karena masa pandemi covid		
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Sakip	RPJMD dalam proses perubahan dan RENSTRA OPD harus sudah menyesuaikan RPJMD Direncanakan dengan baik agar target sasaran bisadi ketahui	Pendampingan oleh team smart dan sosialisasi terkait pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap OPD	Setelah dilakukan pendampingan penyusunan renstra perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip kaidah Sakip.	Peningkatan pelayanan publik di Kecamatan
	Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan Kecamatan	Kurangnya SDM Kecamatan	Penambahan ASN	Disesuaikan dengan kebutuhan pegawai	
			Kurang Kordinasi dengan OPD	Perlunya SOP	SOP Pelayanan Publik telah disusun	
			Masalah gangguan Jaringan Internet	Segera melaporkan gangguan kepada OPD terkait	1. Koordinasi dengan Dinas Kominfo terkait gangguan jaringan internet 2. Menganggarkan jaringan internet sendiri	

--- II ---



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat (5) mengamanatkan bahwa Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh Kepala Daerah penerima



Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan dana APBN diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanahkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan Tugas Pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Madiun menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Urusan pemerintahan yang di tugas pembantuan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel IV.1
Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan
Di Pemerintah Kabupaten Madiun

No.	Yang memberi Tugas Pembantuan	Urusan yang di tugas Pembantuan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
1.	Pemerintah Pusat	Urusan Pertanian, meliputi :	
		A. Rawat ratoon kegiatan percepatan pencapaian swasembada gula konsumsi	Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian
		B. Kegiatan Bantuan Benih Jagung Wilayah Khusus (<i>Realisasi Automatic Adjustment</i>)	Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
		C. Pengelolaan Produksi Tanaman Kedelai	Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
		D. Sarana Produksi Budidaya Porang	Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
		E. Pengelolaan Produksi Budidaya Kacang Hijau	Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian



No.	Yang memberi Tugas Pembantuan	Urusan yang di tugas Pembantuan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
		F. Peningkatan Produksi Tanaman Obat	Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Urusan Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Urusan Pertanian, meliputi A. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian (program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
		B. Pembangunan embung kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
		C. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
		D. Penyusunan e-rdck untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
		E. Verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
		F. Kegiatan pengembangan irigasi perpipaan	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
		G. Pengembangan tanaman kelapa genjah	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya



Uraian selengkapnya pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Madiun tersaji pada data dibawah ini.

4.1.1 Tugas Pembantuan Yang Di Terima dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Madiun menerima Tugas Pembantuan dari Kementrian Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagai berikut :

A. RAWAT RATOON KEGIATAN PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA KONSUMSI

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dasar Pelaksanaan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2022 adalah : DIPA TA 2022 Nomor SP (DIPA) Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tansimpah Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA - 018.05.1.238830/2022 tanggal 12 Februari 2022.

Tujuan Kegiatan

Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2022, melalui kegiatan Identifikasi dan pemantauan CPCL, Pengawasan dan pendampingan ke lokasi, Koordinasi dan Konsultasi Ke Provinsi serta Monitoring dan Evaluasi ke lokasi dalam Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi (DIPA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2022.

Dana dan Sumber Anggaran

Pelaksanaan Program Rawat Ratoon Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2022 dibiayai dari dana APBN tahun 2022 pada DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan.

Mekanisme Kegiatan

Dalam Pelaksanaan Rawat Ratoon salah satu hal terpenting adalah :

- ↳ Identifikasi dan Pemantauan CPCL agar memperoleh usulan CPCL Rawat Ratoon, yang dilaksananan pada bulan Mei 2022 dengan metode yaitu kunjungan ke lapangan dan Diskusi.

- ↪ Tim Teknis Kabupaten melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Pemantauan CPCL yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2022 di Kecamatan Dolopo, Kebonsari, Geger, Dagangan, Wungu dan Balerejo, dengan Luas areal adalah 150 ha.
- ↪ Kegiatan Rawat Ratoon dilaksanakan pada lahan keprasan yang secara ekonomis masih menguntungkan untuk dipelihara dan dapat meningkatkan produksi bagi tanaman seluas maksimal 4 Ha per petani dengan bantuan berupa pupuk majemuk, pupuk organik, dan obat-obatan.
- ↪ Berikut ini Rekap Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Rawat Ratoon Reguler Kegiatan Percepatan Pencapaian Swasembada Konsumsi Tahun 2022 seluas 150 Ha terdapat di 14 kelompok Tani di Kabupaten Madiun.

No	Nama poktan	Ketua Poktan	NIK	Alamat		
				Desa	Kecamatan	Luas (ha)
1	Tani Makmur	Samiran	3519022504760001	Bader	Dolopo	25
2	Rosan Mulya	Badrul Makali	3519040812710003	Banjarsari Wetan	Dagangan	20
3	Tani Sejahtera	Saiful Mu'arif	3519013108650001	Pucanganom	Kebonsari	8
4	Sekar Wangi	Hengki Jaka	3519010802770001	Palur	Kebonsari	1
5	Rosan Asri	Dyah K	3519015411700001	Kebonsari	Kebonsari	5
6	Tani Makmur	Joko Utomo	3519011105720005	Singgahan	Kebonsari	2
7	Rosan Jaya	Mujiono	3519011111570000	Sukorejo	Kebonsari	5
8	Rosan Madu	Arwani	3519011506740006	Krandegan	Kebonsari	4
9	Sido Manis	Herwanto	3519014101770008	Sidorejo	Kebonsari	4
10	Tebu Barokah	Joko S	3577031404790001	Pilangrejo	Wungu	16
11	Tebu Subur	Andi Wiyono	3519031111720006	Uteran	Geger	10
12	Sae Makmur	Hendri	3519033101870001	Jatisari	Geger	25
13	Barokah	Mardi	3519030512520001	Purwojoro	Geger	10
14	Tani Sejati	Kadar Priyo	3519103006550026	Warurejo	Balerejo	15
J U M L A H						150

- ↪ Paket bantuan pemerintah untuk Kegiatan Rawat Ratoon TA 2022 adalah pupuk NPK, pembenah tanah, obat-obatan. Bantuan yang bersifat stimulan berupa bantuan pupuk majemuk sebesar 400 kg/ha, pembenah tanah sebesar 13 liter/ha dan obat-obatan sebesar 4 liter/ha kekurangannya dipenuhi dari swadaya petani.

Spesifikasi Pupuk NPK yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ↪ Pupuk NPK yang diadakan adalah pupuk NPK non-subsidi minimum mengandung N 15%, P 15%, dan K 15% (NPK 15- 15- 15).
- ↪ Syarat mutu pupuk NPK Padat yang memenuhi standar SNI 2803:2010 tentang Pupuk NPK Padat.

Mutu pupuk NPK dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi, sebagai berikut :

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan	Batas Toleransi Minimal yang Diperyaratkan
1	Nitrogen Total*	%, b/b	Sesuai formula yang ada di label	8%
2	Fosfor total sebagai P ₂ O ₅ *	%, b/b		8%
3	Kalium sebagai K ₂ O*	%, b/b		8%
4	Jumlah kadar N, P ₂ O ₅ , K ₂ O	%, b/b		8%
5	Kadar Air	%, b/b	Maks. 3	-
6	Cemaran Logam			
	- Raksa (Hg)	mg/kg	Maks. 10	-
	- Kadmium (Cd)	mg/kg	Maks. 100	-
	- Timbal (Pb)	mg/kg	Maks. 500	-
7	Arsen (As)	mg/kg	Maks. 100	-

Keterangan : * adalah jenis uji 1 s/d adbk (atas dasar berat kering)

Pada kemasan dicantumkan tulisan **“Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Tahun 2022, Dilarang untuk diperjualbelikan”** dan nama produsen.



Spesifikasi Pembenh Tanah

- ↪ Pembenh tanah yang digunakan sekurang-kurangnya mengandung bahan organik 10%.
- ↪ Jumlah bantuan pupuk organik cair yang diberikan sebesar 13 liter/ha.
- ↪ Syarat teknis minimum kandungan pupuk hayati diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/ M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah dan terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah).
- ↪ Pada kemasan diharapkan mencantumkan tulisan “**Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian Tahun 2022, Dilarang untuk diperjualbelikan**”, nama produsen.

Spesifikasi Herbisida

- ↪ Herbisida yang diberikan adalah herbisida sistemik pra tumbuh untuk gulma tebu. Jumlah bantuan herbisida yang diberikan sebesar 4 liter/ha.
- ↪ Herbisida yang diadakan terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida).
- ↪ Pada kemasan dicantumkan tulisan “**Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Tahun 2022, Dilarang untuk diperjualbelikan**” dan nama produsen.

B. KEGIATAN BANTUAN BENIH JAGUNG WILAYAH KHUSUS (REALISASI AUTOMATIC ADJUSTMENT)

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung Wilayah Khusus *Realisasi Automatic Adjustment* Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri



Pertanian Nomor 34 tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 248/HK.310/C/10/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022.

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan produksi dan produktivitas jagung dalam rangka mendukung peningkatan produksi jagung nasional.

Dana dan Sumber Anggaran

Sumber Anggaran Kegiatan Bantuan Benih Jagung Wilayah Khusus *Realisasi Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Madiun berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2022.

Mekanisme Pelaksanaan

- ↳ Kegiatan Budidaya Jagung Wilayah Khusus *Realisasi Automatic Adjustment* dilaksanakan dalam bentuk bantuan sarana produksi budidaya jagung kepada kelompok tani.
- ↳ Kabupaten Madiun mendapat alokasi seluas 1000 Ha yang diserahkan kepada kelompok tani yang tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Madiun yaitu Kecamatan Dolopo, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Madiun dengan jumlah penerima 94 kelompok tani penerima bantuan, Realisasi bantuan dapat terserap seluruhnya meskipun sudah memasuki periode akhir musim tanam tahun 2022.
- ↳ Komponen bantuan yang diberikan berupa 4 jenis bantuan yaitu Benih Jagung Hibrida varietas NK 22 sebanyak 15 Kg/ha, Pupuk NPK sebanyak 100 Kg/ha, Pupuk Hayati 2 liter/ha, dan pupuk silika 1.5 Kg/ha.

Dengan usulan Luas bantuan sebesar 1000 ha, Kabupaten madiun mendapatkan total 15.000 Kg Benih Jagung Hibrida Varietas NK



22, Pupuk NPK sebanyak 100.000 Kg, Pupuk Hayati sebanyak 2000 liter dan pupuk silika sebanyak 1500 Kg, Jumlah nilai bantuan :

No	KECAMATAN	LUAS (ha)	JENIS BANTUAN				REALISASI
			JUMLAH BENIH (Kg)	PUPUK NPK (Kg)	PUPUK HAYATI (PAKET)	PUPUK SILIKA (PAKET)	
1	Dolopo	32	480	3.200	64	48	100%
2	Wungu	152	2.280	15.200	304	228	100%
3	Kare	398	5.970	39.800	796	597	100%
4	Gemarang	14	210	1.400	28	21	100%
5	Saradan	164	2.460	16.400	328	246	100%
6	Pilangkenceng	50	750	5.000	100	75	100%
7	Mejayan	100	1.500	10.000	200	150	100%
8	Wonoasri	60	900	6.000	120	90	100%
9	Madiun	30	450	3.000	60	45	100%
J U M L A H		1.000	15.000	100.000	2.000	1.500	100%

C. PENGELOLAAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Surat dari Direktur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 254/HK.310/C/11/2021 Tentang Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2022

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai.

Dana dan Sumber Anggaran

Sumber Anggaran Kegiatan Pengembangan Kedelai, dari DIPA Pusat TA 2022. Kelompok Tani menerima bantuan dalam bentuk barang, yang terdiri dari total Benih kedelai 5.000 Kg, Pupuk NPK (Non Subsidi) 4.500 Kg, Pestisida 200 Lt, Pupuk hayati Cair 300 Lt untuk 100 Ha.

Mekanisme Kegiatan

- ↳ Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 100 Ha dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 100 Ha di 4 kelompok tani, dan berada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Jiwan.
- ↳ Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai seluas 100 Ha sudah realialisasi 100%, dan sudah panen pada bulan september 2022 dengan hasil provitas rata- rata 1,9 ton/ ha.

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Realisasi (%)
1.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun I	26	100
2.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun II	25	100
3.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun III	25	100
4.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun IV	24	100
JUMLAH				100	

D. SARANA PRODUKSI BUDIDAYA PORANG

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Surat dari Direktur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 254/HK.310/C/11/2021 Tentang Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang Dan Umbi Tahun Anggaran 2022.

Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Porang.

Dana dan Sumber Anggaran

- ↳ Sumber Anggaran Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang, dari DIPA Pusat TA 2022.
- ↳ Total Anggaran untuk 5 Ha sejumlah Rp. 281.250.000 dengan rincian per ha Rp. 56.250.000, yang diberikan secara langsung dalam bentuk uang masuk ke rekening kelompok Tani



Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- ↳ Pelaksanaan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.
- ↳ Tempat pelaksanaan Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang di Kabupaten Madiun antara lain :
 - Kecamatan Saradan seluas 2 Ha
 - Kecamatan Kare seluas 2 Ha
 - Kecamatan Gemarang seluas 1 Ha

Realisasi Kegiatan

Kegiatan Sarana Produksi Budidaya Porang seluas 5 Ha sudah realisasi 100 %.

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1.	Saradan	Klangon	Bangun Karso	2	112.500.000	100
2.	Kare	Kepel	Sarwo Asih	2	112.500.000	100
3.	Gemarang	Durenan	Podang Wilis	1	56.250.000	100
JUMLAH				5	281.250.000	

E. PENGELOLAAN PRODUKSI BUDIDAYA KACANG HIJAU

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pengelolaan Produksi Budidaya Kacang Hijau tahun 2022 adalah Dipa Pemerintah Pusat Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hasil produktivitas tanaman kacang hijau.

Mekanisme Pelaksanaan

- ↳ Alokasi bantuan pada Pengelolaan Produksi Budidaya Kacang Hijau di Kabupaten Madiun terdapat bantuan pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Madiun Nomor : 521.1/268/402.109/2021 tentang Penetapan Calon



No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua	NIK	No HP	Jumlah Anggota	Luas lahan (Ha)	Benih (Kg)	Varietas Benih	Jadwal Tanam	Provitas Existing (ku/ha)	Target Provitas (ku/ha)
TOTAL								50	1250				
1	Pilangkenceng	Wonoayu	Ngudi Rejeki	Aris Basuki	3519130412760002	08121602556	82	25	625	Vima 3	Juli 22	12	13
2		Wonoayu	Sumber Rejeki	Chamim	3519132007650002	085330745484	76	15	375	Vima 3	Juli 22	12	13
3		Kenongorejo	Tirto Langgeng	Suminto	3519131012760001	081387706098	121	10	250	Vima 3	Juli 22	12	13

Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Tahun 2022.

↳ Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang Hijau.

Dengan jumlah areal CPCL seluas 50 Hektar, dan jumlah bantuan benih sebanyak 1.250 kg.

Sasaran dan Realisasi Kegiatan Kacang Hijau Per Kelompok Tani

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua	NIK	No HP	Jumlah Anggota	Luas lahan (Ha)	Benih (Kg)	Varietas Benih	Jadwal Tanam	Realisasi (%)
TOTAL								50	1250			
1	Pilangkenceng	Wonoayu	Ngudi Rejeki	Aris Basuki	3519130412760002	08121602556	82	25	625	Vima 3	Juli 22	100
2		Wonoayu	Sumber Rejeki	Chamim	3519132007650002	085330745484	76	15	375	Vima 3	Juli 22	100
3		Kenongorejo	Tirto Langgeng	Suminto	3519131012760001	081387706098	121	10	250	Vima 3	Juli 22	100

Peningkatan produksi / provitas kegiatan Kacang Hijau

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua	NIK	No HP	Luas lahan (Ha)	Provitas (Ton/ha)	Produksi (Ton)	Harga (Rp)
TOTAL							50		65	
1	Pilangkenceng	Wonoayu	Ngudi Rejeki	Aris Basuki	3519130412760002	08121602556	25	1.3	32.5	17.000
2		Wonoayu	Sumber Rejeki	Chamim	3519132007650002	085330745484	15	1.3	19.5	17.500
3		Kenongorejo	Tirto Langgeng	Suminto	3519131012760001	081387706098	10	1.3	13	17.000

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 100% sesuai target tanam dalam SK, untuk Kecamatan Pilangkenceng mendapatkan bantuan Kacang Hijau sebesar 50 ha, yaitu

1) Kelompok tani Ngudi Rejeki Desa Wonoayu Ketua Aris Basuki,



bantuan benih kacang hijau sebanyak 625 kg dengan luas areal banpem 25 ha, varietas vima 3, kelompok ini terdiri dari 82 orang anggota, dengan luas lahan secara keseluruhan 49,71ha

2) Kelompok tani Sumber Rejeki Desa Wonoayu Ketua Chamim, bantuan benih kacang hijau sebanyak 375 kg dengan luas areal banpem 15 ha, varietas vima 3, kelompok ini terdiri dari 76 orang anggota, dengan luas lahan secara keseluruhan 53,67ha.

3) Kelompok tani Tirto Langgeng Desa Kenongorejo Ketua Suminto, bantuan benih kacang hijau sebanyak 250 kg dengan luas areal banpem 10 ha, varietas vima 3, kelompok ini terdiri dari 121 orang anggota, dengan lahan secara keseluruhan 66,75ha.

↳ Lahan yang digunakan untuk kacang hijau yaitu lahan sawah dengan pola tanam padi – padi – palawija

↳ Penanaman Banpem kacang hijau 50 ha dilaksanakan bulan juli 2022 dan panen pada bulan september-oktober 2022.

↳ Hasil produksi kacang hijau biasanya dipakai untuk konsumsi sekitar atau dijual dengan harga Rp.17.000. Penanaman secara swadaya diperoleh benih yang berasal dari benih yang bersertifikat dengan harga Rp.25.000.

↳ Produktivitas kacang hijau hasil banpem sebesar 13 kw/ha jauh lebih meningkat dari penanaman sebelumnya sekitar 12 kw/ha. Keuntungan dalam sekali musim tanam kacang hijau biasanya mencapai keuntungan Rp.9.100.000 dengan rincian (Total Panen Rp. 22.100.000 – Total Pengeluaran Rp. 13.000.000)

F. PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN OBAT

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dasar pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura , dan Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2022, berdasar Petunjuk Teknis dari Direktorat Buah dan Florikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.



Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya Kampung Hortikultura yang tersebar secara merata di seluruh Indonesia pada Tahun 2022 sebagai program untuk meningkatkan produktifitas komoditas subsektor hortikultura. Tujuan dari Kegiatan kampung Hortikultura ini untuk meningkatkan produksi dan pemenuhan pangan, dibidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat.

Dana dan Sumber Anggaran

Dana yang diperlukan untuk kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dan Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, terdapat pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2022.

Mekanisme Pelaksanaan

- ↳ Alokasi sarana produksi dan bibit buah maupun Bibit Obat/ Jahe, yang diberikan langsung kekelompok tani penerima sesuai SK dari Direktorat Jenderal Hortikultura, sesuai dengan Pagu Anggaran dan luasan kampung di masing-masing lokasi CPCL.
- ↳ Penunjukkan Tim Teknis kegiatan yang mempunyai tugas melakukan Pemeriksaan Barang, Pengawasan dan Pengarsipan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) , melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kegiatan.
- ↳ Jadwal distribusi masing-masing sarana produksi akan dikoordinasikan langsung oleh pihak penyedia / tim ekspedisi pengiriman dengan tim teknis kegiatan yang sudah ditetapkan melalui Surat Usulan Tim Teknis yang ditandatangani Kepala Dinas Setempat.

4.1.2 Tugas Pembantuan Yang Di Terima Dari Pemerintah Provinsi

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Yang



dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun sebagai berikut :

BANSOS UMKM

Dasar Pelaksanaan

1. DIPA Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur Nomor : 044.01.3.050069/2022 tanggal 17 November 2021
2. Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi, UMK No. 5 Tahun 2022 tentang pendataan lengkap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur No: 903/18921/115.5/ 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban bansos kepada pelaku usaha mikro untuk penanganan inflasi dampak kenaikan harga BBM Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
4. Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur No: 518/621/115.5/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Data Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT).

Mekanisme Pelaksanaan

1. Pendataan lengkap dilakukan bertahap dimana tahun 2022 mencakup seluruh kategori lapangan usaha kecuali kategori A, O, T dan lebih fokus terhadap usaha yang menetap. Target Kabupaten Madiun 41.000 data dan realisasi 29.658, hal ini disebabkan karena update data pada aplikasi belum optimal sehingga intervensi data calon penerima ada yang mengalami perubahan.
2. Bansos UMKM merupakan perlindungan sosial kepada pelaku UM di Jatim, salah satunya di Kabupaten Madiun dengan persyaratan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran dana bansos sebesar Rp. 600.000,-. Digunakan untuk mendukung kegiatan usaha bagi para pelaku UM. Target 488 realisasi 409, hal ini disebabkan karena update data pada aplikasi belum optimal sehingga intervensi data calon penerima ada yang mengalami perubahan.



3. Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang diperuntukkan bagi pelaku UM di wilayah Kabupaten Madiun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Madiun juga menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagai berikut :

A. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN (PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS)

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.

Tujuan Kegiatan

- ↳ Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT)
- ↳ Meningkatkan areal tanam melalui penambahan indeks pertanaman dan produktivitas.
- ↳ Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi yang telah direhabilitasi

Sasaran Kegiatan

Sasaran rehab JITUT adalah:

- ↳ Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dengan luas 500 Ha (13 kecamatan).
- ↳ Meningkatnya luas areal tanam melalui penambahan IP lebih dari 30% dan peningkatan produktivitas lebih dari 0.5 ton/ha.
- ↳ Terbangunnya rasa memiliki petani terhadap jaringan irigasi.

Mekanisme Pelaksanaan

- ↳ Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Program Ketersediaan, Akses



dan Konsumsi Pangan Berkualitas TA. 2022 di Kabupaten Madiun telah mencapai penyelesaian, baik fisik maupun keuangan. Adapun data selengkapnya sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Alamat		Titik Koordinat		Target (m)	Realisasi (m)	Partisipasi (m)
		Desa	Kecamatan	LU (Y)	LS (X)			
1.	Kelompok Tani Wonoasri	Nglandung	Geger	-7,704822	111,513351	146	149,3	3,3
2.	Kelompok Tani Krido Tani	Sangen	Geger	-7,685.831	111,533.379	135	136,7	1,7
3.	Kelompok Tani Karya Makmur	Kebonsari	Kebonsari	-7,741.436	111,478.592	134	136,3	2,3
4.	Kelompok Tani Sriket	Tambakmas	Kebonsari	-7,762.191	111,460.180	173	186,8	13,8
5.	Kelompok Tani Ngudi Utomo	Banjarsari Kulon	Dagangan	-7,688.026	111,591.240	134	139,6	5,6
6.	Kelompok Tani Tani Jaya	Prambon	Dagangan	-7,696.283	111,573.338	171	183,4	12,4
7.	Kelompok Tani Rukun Tani	Bancong	Wonoasri	-7,563.117	111,632.305	150	154,9	4,9
8.	Kelompok Tani Sido Muncul	Ngampel	Mejayan	-7,531.473	111,652.017	173	178,1	5,1
9.	Kelompok Tani Tulodho Bogo	Mojopurno	Wungu	-7,660.740	111,574.532	142	146	4
10.	Kelompok Tani Margo Makmur	Bibrik	Jiwan	-7,569.996	111,496.461	162	170,3	8,3
11.	Kelompok Tani Rukun Tani	Bedoho	Jiwan	-7,577.609	111,486.942	123	124,8	1,8
12.	Kelompok Tani Tani Makmur	Tapelan	Balerejo	-7,529.030	111,623.658	152	159,8	7,8
13.	Kelompok Tani Sumber Untung	Sumber Bening	Balerejo	-7,553.802	111,610.549	162	173,6	11,6
14.	Kelompok Tani Tani Makmur	Kradinan	Dolopo	-7,796456	111,537382	171	179	8
15.	Kelompok Tani Sido Makmur	Pajaran	Saradan	-7,522126	111,7861997	150	160	10
16.	Kelompok Tani Sido Luhur I	Sumber Bendo	Saradan	-7,47003489	111,76566909	152	155,6	3,6
17.	Kelompok Tani Jatirejo	Tawangrejo	Gemarang	-7,633.115,0	111,692404	135	140,25	5,25
18.	Kelompok Tani Tani Bahagia	Nglames	Madiun	-7,5930060	111,5401560	142	169,30	27,30
19.	Kelompok Tani Sampurno	Banjarsari	Madiun	-7,595.899	111,555934	119	124,5	5,5
20.	Kelompok Tani Slaji Makmur	Randualas	Kare	-7,7069266	111,6875347	68	68,70	0,70
JUMLAH						2.894	3.036,95	142,95

Dari data tersebut di atas dapat terlihat bahwa target fisik kegiatan telah tercapai. Partisipasi masyarakat di lokasi kegiatan cukup besar berupa tenaga dan material sehingga kegiatan dapat terlaksana



melebihi target yang telah direncanakan. Besarnya partisipasi masyarakat dapat terukur dari peningkatan hasil pekerjaan pasangan dari kegiatan Rehab JITUT sebesar 142,95 m.

B. PEMBANGUNAN EMBUNG KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.

Tujuan Kegiatan

1. Menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi, dan minum ternak).
2. Meningkatkan Indeks Pertanaman dan atau produktifitas.

Mekanisme Pelaksanaan

↳ Pengembangan Embung Pertanian merupakan kegiatan pembangunan baru untuk menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).

a. Standar Teknis

1. Tersedianya sumber air baik berupa aliran permukaan dan atau mata air yang dapat ditampung atau dapat di alirkan ke lahan pertanian.
2. Untuk bangunan yang berfungsi menampung air (embung dan long storage), volume tampungan minimal 500m³.

3. Untuk bangunan yang berfungsi menahan dan menampung aliran air (dam parit) diupayakan debit minimal 5 lt/detik dan lebar penampang kurang lebih 5m.
 4. Diupayakan dapat memberikan suplesi air seluas 20 Ha untuk Sub Sektor Tanaman Pangan, 5 Ha Sub Sektor Hortikultura, 5 Ha untuk sub sektor Peternakan. 5 Ha untuk sub sektor Perkebunan.
- b. Kriteria Lokasi dan Petani
1. Kriteria Lokasi
 - a. Relative dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplementer/tambahan air irigasi atau daerah endemik kekeringan dan banjir.
 - b. Diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit
 - c. Diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang porous, maka embung harus dilapisi material geomembrane.
 - d. Lokasi tempat Pengembangan Embung Pertanian status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
 - e. Untuk Sub Sektor Peternakan, dimanfaatkan terutama untuk Hijauan Pakan Ternak (HPT) serta sanitasi dan minum ternak.
 2. Kriteria Penerima Bantuan
 - a. Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif.
 - b. Diutamakan kelompok tani/ Gapoktan atau P3A yang mempunyai semangat partisipatif.
 - c. Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).
 3. Tahapan Kegiatan
 - a. Persiapan



Pembentukan tim teknis, seleksi dan verifikasi CPCL, dan penetapan CPCL kegiatan yang ditetapkan oleh kepala dinas Kabupaten/Kota lingkup pertanian.

- b. Survei, Investigasi dan Desain (SID)
- c. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong. Tahapan pelaksanaan konstruksi adalah Pembersihan lokasi, Pembelian Bahan Material, Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja sesuai dengan RUKK yang disusun oleh kelompok tani

C. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALAT MESIN PERTANIAN

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Pl.130/5/2008 Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian.

Tujuan Kegiatan

1. Upaya pengembangan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.
2. Mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian khususnya pra-panen.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang berujung pada peningkatan produktivitas serta penurunan biaya produksi.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di wilayah kerja UPJA, Poktan maupun Gapoktan.
5. Mengoptimalkan kinerja UPJA sebagai lembaga usaha alat dan mesin pertanian dari kegiatan jasa sewa, perbengkelan dan penjualan



suku cadang alsintan.

6. Mendorong percepatan penumbuhan petani milenial.

Sumber Dana

Anggaran Kegiatan untuk Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian ini senilai Rp. 15.000.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Keuangan

Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 15.000.000,- terserap Rp.14.754.500,., Kegiatan ini dilaksanakan melalui monitoring pemanfaatan alsintan, pembinaan dan pelatihan kelembagaan UPJA, penginputan BAST, dan Pemeriksaan alsintan.

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan.

Mekanisme pelaksanaan

- a. Penetapan kriteria penerima bantuan perbengkelan Alat dan mesin Pertanian.
 1. UPJA atau Gapoktan memiliki potensi dalam perbengkelan alsintan.
 2. Lokasi di daerah sentra produksi tanaman pangan.
 3. Memfasilitasi UPJA maupun Gapoktan yang mengusulkan bantuan perbengkelan alat dan mesin pertanian.
- b. Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Alat Mesin Pertanian terdapat dukungan dana pendampingan bersumber dari dana Tugas



Pembantuan Provinsi Jawa timur

c. Pendampingan verifikasi Pengawasan Pemanfaatan Alsintan .

Melakukan Pendampingan verifikasi pengawasan pemanfaatan Alsintan supaya penyaluran alsintan yang berada di 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun sesuai dengan kreteria penerima tidak terjadi tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan, petani dan berada pada lokasi yang tepat dan benar benar dimanfaatkan dengan baik.

d. Memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

e. Melaksanakan Pembinaan kelembagaan UPJA

Melakukan Pembinaan kepada Lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.

f. Melaksanakan Koordinasi Penyaluran BAST untuk memastikan bahwa penyaluran alsintan sudah beserta berita acara serah terima nya sudah lengkap diterima oleh kelompok penerima manfaat sesuai dengan CPCL.

g. Melaksanakan Monitoring pemanfaatan Alsintan ke 15 kecamatan
Monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan dan penyaluran bantuan alsintan dilaksanakan agar proses penyediaan dan penyaluran bantuan alsintan dapat berdayaguna dan berhasilguna.

h. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tahap perencanaan pengadaan, tahap pengadaan dan tahap penyaluran oleh petugas.

D.PENYUSUNAN E-RDKK UNTUK PENDATAAN PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan riil sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan dan pertambakan dalam suatu format RDKK.
2. Untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam menyusun RDKK kegiatan usahatani pada setiap musim tanam secara mandiri berkesinambungan
3. Menyiapkan perangkat RDKK guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga

Sumber Dana

Anggaran Kegiatan untuk Penyusunan E-RDKK ini senilai Rp.181.955.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Keuangan

Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 181.955.000,- realisasi Rp.181.459.000,-.

Mekanisme Pelaksanaan

↳ Kegiatan ini dilaksanakan melalui Perjalanan dalam rangka



monitoring penginputan e alokasi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usahatani secara berencana dengan azas musyawarah sehingga pengisian e alokasi akan menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

- ↳ Latihan tentang penyusunan e Alokasi ini perlu dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada pertemuan teknis Penyuluh pertanian atau pertemuan lainnya, agar dalam praktek di Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di lapangan dalam membimbing/membina Kelompok tani dapat berjalan lancar.

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan

Penyusunan e Alokasi Dan Rekapitulasi

Penyusunan e Alokasi dilakukan oleh kelompok tani dan setiap petani harus tercatat/terdaftar dalam Kelompok Tani.

Tahapan penyusunan e Alokasi / RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan pengurus Kelompok Tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya.
2. Pertemuan pengurus Kelompok Tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota Kelompok Tani tentang rencana kebutuhan Kelompok Tani.
3. Musyawarah anggota-anggota Kelompok Tani dipimpin oleh Ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota Kelompok Tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis



komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan berdasarkan rekapitulasi.

4. Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil.
5. Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan diketahui oleh penyuluh pendamping.

E. VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS (APBN-TP)

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2022 Tanggal 17 November 2021.
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020.

Tujuan Kegiatan



Tujuan dari Kegiatan ini adalah memverifikasi dan memvalidasi penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga proses penyalurannya transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Sumber Dana

Anggaran Kegiatan untuk Penyusunan E-RDCK ini senilai Rp.216.060.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Keuangan

Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 138.800.000,- realisasi Rp.138.320.000,-.

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan.

Pelaksanaan

1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- ↳ Alokasi Pupuk Bersubsidi Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan.
- ↳ Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- ↳ Pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab

masing-masing. Kewenangan pengaturan menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.

- ↳ Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK
- ↳ Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 41 Tahun 2021.
- ↳ Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya.

2. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang.
- b. Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- c. Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka



jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.

3. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan :

- 1) Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada data Dashboard Bank maka dilakukan klarifikasi kepada kios pengecer dan petani.
- 2) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer.
- 2) Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani

F. KEGIATAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPIPAAN

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-018.08.4.059187/2021 tanggal 17 November 2021.

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan;
2. Menekan angka kematian tanaman baru;
3. Meningkatkan jumlah tanaman perkebunan
4. Meningkatkan daya saing komoditi perkebunan;
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan.

Dana dan Sumber Anggaran

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Perkebunan Jawa Provinsi Timur Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mendapat anggaran senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Sumber anggaran Kegiatan ini dari APBN Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian



Mekanisme Pelaksanaan

- ↳ Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan mendapat anggaran senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dialokasikan antara lain untuk, belanja barang pengelolaan air irigasi untuk pertanian dan belanja barang untuk administrasi teknis Kabupaten.
- ↳ Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan dengan volume kegiatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	KETUA	PANJANG PIPA (meter)	JUMLAH BAK PENAMPUNG (unit)
1.	Dagangan	Segulung	Bade Maju	Nyoto	1.875	2
2.	Gemarang	Batok	Tani Maju	Samsuri	1.875	2

G. PENGEMBANGAN TANAMAN KELAPA GENJAH

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

DIPA Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Nomor : SP DIPA-018.05.2.567338/2022 Revisi ke 05 Tanggal 28 April 2022.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,
2. Memberdayakan potensi sumberdaya alam dan Sumberdaya manusia yang ada di masyarakat pedesaan,
3. Mewujudkan sentra potensial alam yang mendukung di wilayah dataran tinggi.

Dana dan Sumber Anggaran

Dana dan sumber anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2022 dengan Kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Madiun di Kabupaten Madiun bersumber dari anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, bantuan berupa sarana produksi yaitu Bibit kelapa genjah 22.000 batang dan Pembenh Tanah 2000 kg.

Mekanisme Pelaksanaan

1. Pengajuan Usulan Kegiatan dari Kelompok Tani sampai Input ke E-Proposal
2. Proses Identifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lahan) sesuai pengajuan proposal Gapoktan/Kelompok Tani
3. Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Kelapa Genjah di Kabupaten Madiun dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 dengan dihadiri dari Komisi IV DPR RI, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Perwakilan Dinas Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Madiun, Bidang Perkebunan, serta Kelompok Tani penerima manfaat kegiatan yang ditunjuk.
4. Pengembangan kelapa genjah seluas 200 ha dengan paket kegiatan berupa Bibit 22.000 batang dan Pembenh Tanah 2000 lt. Kelapa (*Cocos mucifera L.*) adalah komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tumbuhan ini di manfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga di anggap sebagai tumbuhan serta guna.

Kriteria Standar Benih Kelapa Dalam Polibag :

No	Kriteria	Standar
1	Umur Benih	4-12 Bulan
2	Tinggi Benih - Kelapa Dalam - Kelapa Genjah	Minimal 50 cm Minimal 40 cm
3	Jumlah Daun	Lebih dari 4 helai
4	Warna Daun	Hijau
5	Kesehatan	Bebas Hama Penyakit
6	Ukuran Polybag	Minimal 40 cm x 50 cm
7	Warna Polibag	Hitam



4.2 Hambatan/ Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

4.2.1 Permasalahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/ kegiatan (DIPA) yang sudah jadi / final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga sering mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan dalam penentuan lokasi dan atau penerima. Perubahan DIPA sebagai revisi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

4.2.2 Upaya Penyelesaian Permasalahan

1. Meningkatkan koordinasi dan update data pokok masing masing instansi sesuai dengan urusan yang dilaksanakan,
2. Penggunaan sistem informasi pada proses perencanaan.
3. Usulan proposal kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan daerah



BAB V **P E N U T U P**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2022 memiliki makna yang penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah sebagai bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu satu tahun, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Bupati Madiun Tahun Anggaran 2022 ini, merupakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban periode RPJMD 2018-2023 tahun ke-empat. Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam, berdaya saing dan berpihak pada rakyat, terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan realisasi program/kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai selama ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi dari semua pihak (*stakeholder*) serta diharapkan dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan tugas dan kompetensi masing-masing.

Kerjasama yang baik dengan seluruh komponen masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik mendapat apresiasi antara lain:

1. Penghargaan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur untuk Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Penyaluran 100 persen Dana Desa Tercepat Nasional Tahap I Tahun 2022.

Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Wakil Bupati Madiun pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Pencairan Dana



- Desa Provinsi Jatim Tahun 2022 di Dyandra Convention Center Surabaya pada 24 Pebruari 2022;
2. Piagam penghargaan dari Menteri ATR / Kepala BPN atas dukungan Pemerintah Kabupaten Madiun terhadap pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi peserta PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Madiun Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kabid Survey dan Pemetaan kepada Bupati Madiun di Pendopo Ronggo Djoemeno pada 29 Maret 2022;
 3. Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 dengan nilai “BB” dan Reformasi Birokrasi (RB) dengan nilai “B” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan diterima Bupati Madiun dalam acara SAKIP-RB Award 2021 di Jakarta yang diikuti oleh Bupati Madiun secara virtual dari Ruang Kantor Bupati Madiun pada 5 April 2022;
 4. Terbaik III (ketiga) tingkat nasional untuk Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Penyaluran Dana Desa Tingkat Nasional Tahun 2021. Penghargaan diserahkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun kepada Bupati Madiun di Pendopo Muda Graha pada 12 April 2022;
 5. Penganugerahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 (sembilan) kali secara berturut-turut dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Madiun di Aula Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo pada 20 Mei 2022;
 6. Pemerintah Kabupaten Madiun menerima Sertifikat Frambusia dari Kementerian Kesehatan.
Sertifikat diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) kepada Wakil



Bupati Madiun, pada puncak acara Peringatan Hari Malaria Sedunia di Mandalika International Street Circuit Nusa Tenggara Barat pada 31 Mei 2022.

Kabupaten Madiun menjadi salah satu dari 47 Kota / Kabupaten di Indonesia yang lolos penilaian sertifikasi bebas frambusia. Frambusia adalah penyakit infeksi bakteri yang jangka panjang (kronis) menyerang kulit, tulang dan sendi sehingga dapat menimbulkan kecacatan;

7. Juara ke-1 (satu) OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dengan Presentase Capaian Tertinggi (234,08%) pada Kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor (PSA) dalam Rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022. Penghargaan diserahkan pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022 di Pahlawan Bisnis Center Kota Madiun pada 29 Juni 2022 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun;
8. Penghargaan atas Percepatan Pemberian Perizinan Perumahan dari DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Timur. Penghargaan diserahkan oleh Ketua DPD Himperra Jatim kepada Bupati Madiun, disaksikan oleh Gubernur Jawa Timur. Acara berlangsung di Hotel Bumi Surabaya pada 26 Juli 2022;
9. BKN Award 2022 kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Wilayah Barat Tipe Besar meraih peringkat ke-4 (empat). Penghargaan diserahkan oleh Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf kepada Wakil Bupati Madiun di Golden Tulip Holland Resort Batu pada 10 Agustus 2022;
10. Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar kepada Wakil Bupati Madiun dalam acara Launching Pendirian Lembaga Keuangan Mikro BumDesMa dan Penandatanganan MOU dengan Kementerian Kesehatan RI, Bakamla RI



- serta Perjanjian Kerja Sama dengan Pangkoarmada II, bertempat di KRI Makassar-590 Koarmada II Surabaya, pada 27 Oktober 2022;
11. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 (sembilan) kali berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun TA. 2021 dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Madiun di Bumi Hotel Surabaya pada 14 Nopember 2022;
 12. Penghargaan Kabupaten / Kota Kategori Open Defecation Free Tahun 2022 untuk Kabupaten Madiun. Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono kepada Wakil Bupati Madiun, pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 Tahun 2022 bertempat di Hotel El Royale Banyuwangi pada 15 Nopember 2022;
 13. Penghargaan untuk Kabupaten / Kota dengan Pencapaian Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tercapai target lebih dari 95% pada perpanjangan 1 se-Jawa Timur. Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono kepada Wakil Bupati Madiun, pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 Tahun 2022 bertempat di Hotel El Royale Banyuwangi pada 15 Nopember 2022;
 14. Penghargaan Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2022 untuk Kabupaten Madiun. Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono kepada Wakil Bupati Madiun, pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 Tahun 2022 bertempat di Hotel El Royale Banyuwangi pada 15 Nopember 2022;
 15. Award Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) dalam Kategori Kabupaten / Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) dari Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Madiun di Hotel Discovery Taman Mini Jaya Ancol Jakarta pada 23 Nopember 2022;
 16. Desa Klumutan Kecamatan Saradan memperoleh penghargaan dalam kategori Natural Leader Terbaik, Kepala Desa Terbaik dan Sanitarian Terbaik dari Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan diterima oleh



- Wakil Bupati Madiun di Hotel Discovery Taman Mini Jaya Ancol Jakarta pada 23 Nopember 2022;
17. Penghargaan Inovator “Merubah Sampah Menjadi Emas” (Merambah Emas) hasil inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PAN RB RI Abdullah Azwar Anas didampingi Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Madiun pada Festival Inovasi Desa dan Penyerahan Penghargaan Top Inovasi Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur Tahun 2022 di Alun-Alun Reksogati Caruban pada 7 Desember 2022;
 18. Desa Pule Kecamatan Sawahan terpilih sebagai Desa dengan Komitmen Terbaik Dalam Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Madiun pada Peringatan Hari Ibu ke-94 dan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-23 bertajuk “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”, bertempat di Gedung Negara Graha Surabaya pada 22 Desember 2022;
 19. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2022 Peringkat Madya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Nomor Sertifikat 932/MEN/TK.05/7/2022 yang diterimakan di Jakarta tanggal 23 Juli 2022;
 20. Pemenang Lomba Desa Dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Kategori Desa sebagai Pemenang II untuk Desa Cermo Kecamatan Kare. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur di acara Temu Karya Pemenang Lomba Provinsi Jawa Timur 2022 pada 18 Agustus 2022;
 21. Terbaik II Pelaksana 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 kategori “Kabupaten” diraih oleh Desa Cermo Kecamatan Kare;
 22. Pemenang terbaik kompetisi Yel-Yel PRB 2022 BPBD KABUPATEN/KOTA Tingkat Nasional diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;



23. Juara Lomba Destana Kategori Pratama Desa Segulung Kecamatan Dagangan diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
24. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas keberhasilan mencapai target *non-polio AFP (NPAFP) Rate* ≥ 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun dan *Discarded* (bukan campak-bukan rubela) *Rate* \geq per 100.000 penduduk pada tahun 2022.
25. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas capaian 81% Puskesmasnya telah melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular (PTM) tertanggal 18 Juli 2022.
26. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Kelulusan Paripurna dari Kementerian Kesehatan RI Tertanggal 18 November 2022;

Demikian uraian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madiun yang disajikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Bupati Madiun Tahun Anggaran 2022 ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan menerima amal bakti kita semua. Amin.

--- II ---